



**PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2024
TENTANG**

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

2025-2045

SUMSEL MAPAN 2045

MAJU, TERDEPAN DAN BERKELANJUTAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025-2045

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah provinsi maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN RPJPD

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045, disusun berdasarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah.

- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
- a. calon Kepala Daerah dalam perumusan visi, misi, dan Program;
 - b. Pemerintah Provinsi dalam menyusun RPJMD; dan
 - c. penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota.

BAB III
SISTEMATIKA RPJPD
Pasal 3

- (1) Dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
- BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
- BAB VI : PENUTUP

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RPJPD

Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

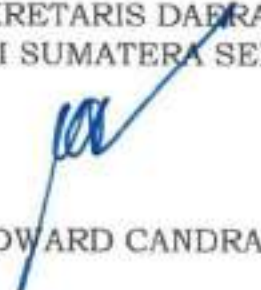
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~13 Desember~~ 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal ~~13 Desember~~ 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (7-326/2024)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan	I-7
1.5 Sistematika	I-7
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1 Geografi	II-1
2.1.2 Demografi.....	II-54
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-55
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	II-55
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	II-63
2.3 Aspek Daya Saing	II-70
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	II-70
2.3.2 Daya Saing SDM	II-75
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-78
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	II-93
2.4 Aspek Pelayanan Umum	II-98
2.4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-98
2.4.2 Tata Kelola Pemerintahan	II-100
2.4.3 Inovasi Daerah	II-101
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	II-102
2.5.1 Capaian Pembangunan 2005-2025	II-102
2.5.2 Evaluasi Kinerja RTRW dan Rencana Sektorial	II-106
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	II-117
2.6.1 Proyeksi Demografi.....	II-118
2.6.2 Bonus Demografi	II-129
2.6.3 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar.....	II-133
2.7 Arah Pengembangan Wilayah.....	II-152
2.7.1 Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan	

Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045	II-152
2.7.2. Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.....	II-154
2.7.3 Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	II-156
2.7.4. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044	II-164
2.7.5 Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Hijau	II-209
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
3.1 Permasalahan Pembangunan.....	III-1
3.1.1 Kerentanan dan Risiko Kondisi Geografi	III-1
3.1.2 Pengelolaan Sumber Daya Air Belum Berkelanjutan.....	III-2
3.1.3 Tingginya Alih Fungsi Lahan dan Gambut	III-3
3.1.4 Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal	III-4
3.1.5 Kerentanan Ketahanan Pangan.....	III-4
3.1.6 Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah masih Tinggi.....	III-6
3.1.7 Kualitas Sumber Daya Manusia dan Keluarga masih Rendah serta Ketimpangan Gender masih tinggi	III-9
3.1.8 Transformasi Ekonomi belum Optimal	III-12
3.1.9 Ancaman Stabilitas Daerah masih tinggi	III-13
3.1.10 Inovasi Daerah Masih Belum Optimal	III-13
3.1.11 Reformasi Birokrasi yang Belum Optimal.....	III-14
3.2 Isu Strategis Daerah.....	III-14
3.2.1 Isu Strategis Global	III-14
3.2.2 Isu Strategis Nasional	III-17
3.2.3 Isu Strategis Regional.....	III-18
BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH.....	IV-1
4.1 Visi	IV-1
4.2 Misi	IV-5
BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....	V-1
5.1 Arah Kebijakan Pembangunan	V-1
5.2 Sasaran Pokok Pembangunan	V-32
BAB VI. PENUTUP.....	VI-1
6.1 Kaidah Pelaksanaan.....	VI-1
6.1.1 Kerangka Pengendalian.....	VI-1
6.1.2 Mekanisme Perubahan	VI-3
6.2 Pembiayaan	VI-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Daratan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.....	II-1
Tabel 2. 2 Ketinggian Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.....	II-3
Tabel 2. 3 Kelerengan Provinsi Sumatera Selatan.....	II-5
Tabel 2. 4 Jenis Tanah Provinsi Sumatera Selatan.....	II-6
Tabel 2. 5 Kondisi Klimatologi Provinsi Sumatera Selatan.....	II-8
Tabel 2. 6 Formasi Batuan Provinsi Sumatera Selatan	II-9
Tabel 2. 7 Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Selatan	II-14
Tabel 2. 8 Fungsi Ekologis Gambut di Provinsi Sumatera Selatan	II-16
Tabel 2. 9 Luasan Perubahan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006, 2013, dan 2020	II-19
Tabel 2. 10 Bencana Alam di Provinsi Sumatera Selatan.....	II-23
Tabel 2. 11 Daya Dukung dan Daya Tampung Air Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	II-24
Tabel 2. 12 Status Air Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	II-26
Tabel 2. 13 Daya Dukung Daya Tampung Air Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2045	II-28
Tabel 2. 14 Perbandingan DDDT Air Tahun 2020 dengan proyeksi tahun 2045 ..	II-29
Tabel 2. 15 Daerah Irigasi di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat.....	II-29
Tabel 2. 16 Daerah Irigasi Rawa di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat.....	II-30
Tabel 2. 17 Kondisi Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi.....	II-31
Tabel 2. 18 Kondisi Jaringan Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi	II-32
Tabel 2. 19 Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan .	II-33
Tabel 2. 20 Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	II-33
Tabel 2. 21 Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.....	II-35
Tabel 2. 22 Daya Dukung Daya Tampung Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2045	II-39
Tabel 2. 23 Produktivitas Tanaman Pangan dan Palawija di Provinsi Sumatera Selatan (kuintal/ha), 2019-2023.....	II-43

Tabel 2. 24 Produksi Tanaman Pangan dan Palawija di Provinsi Sumatera Selatan (ton), 2019-2023	II-43
Tabel 2. 25 Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi 2023	II-44
Tabel 2. 26 Produksi Tanaman Perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan (ton), 2019-2023	II-45
Tabel 2. 27 Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021	II-46
Tabel 2. 28 Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Selatan (ton), 2018-2022	II-47
Tabel 2. 29 Klasifikasi Industri Besar Sedang dan Industri Menengah Kecil tahun 2021	II-48
Tabel 2. 30 Daya Tarik Unggulan Provinsi Sumatera Selatan	II-49
Tabel 2. 31 Potensi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Selatan	II-50
Tabel 2. 32 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral (%)	II-56
Tabel 2. 33 Nilai Tukar Petani Menurut Sektor di Sumatera Selatan	II-58
Tabel 2. 34 Indikator Kemiskinan Sumatera Selatan 2010-2023	II-59
Tabel 2. 35 Komponen IPM Sumatera Selatan 2005-2023	II-63
Tabel 2. 36 Perkembangan PDRB Harga Berlaku & Harga Konstan 2010	II-71
Tabel 2. 37 Lapangan Usaha Utama Sumatera Selatan	II-71
Tabel 2. 38 Struktur Ekonomi Sumatera Selatan	II-72
Tabel 2. 39 PDRB ADHK 2010 Sumatera Selatan Tahun 2010-2023	II-73
Tabel 2. 40 Rekapitulasi Income dan Labour Multiplier di Sumsel	II-74
Tabel 2. 41 Struktur Ketenagakerjaan (% Total Tenaga Kerja)	II-77
Tabel 2. 42 Kondisi Jalan Nasional di Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2023	II-80
Tabel 2. 43 Kondisi Jalan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2023	II-81
Tabel 2. 44 Kondisi Jalan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023	II-82
Tabel 2. 45 Komposisi Panjang Jalan Menurut Statusnya di Sumatera Selatan Tahun 2023	II-83
Tabel 2. 46 Rute dan Panjang Rel PT. KA Divre III di Wilayah Sumbagsel	II-84
Tabel 2. 47 Jumlah Penumpang Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan	II-85
Tabel 2. 48 Jumlah Kepala Keluarga Kekurangan Rumah (Backlog) di Provinsi Sumatera Selatan, 2023	II-88
Tabel 2. 49 Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2016 – 2023	II-90
Tabel 2. 50 Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Tahun 2023	II-92
Tabel 2. 51 Nilai Indeks SPBE Sumatera Selatan	II-99
Tabel 2. 52 Indeks Pelayanan Publik Sumatera Selatan	II-100

Tabel 2. 53 Matriks Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah yang Mendukung Rencana Tata Ruang (pada Tingkat Sinkronisasi Rendah).....	II-107
Tabel 2. 54 Kajian Terhadap Kawasan Strategis Provinsi	II-113
Tabel 2. 55 Proyeksi Indikator Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dan 2045	II-121
Tabel 2. 56 Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045	II-124
Tabel 2. 57 Proyeksi Struktur Umur Penduduk Sumatera Selatan	II-125
Tabel 2. 58 Proyeksi Penduduk Usia Kerja Sumatera Selatan Menurut Jenis Kelamin, 2025–2045	II-126
Tabel 2. 59 Proyeksi Penduduk Sumatera Selatan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2025–2045 (Ribu).....	II-129
Tabel 2. 60 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Sumatera Selatan, 2020-2045	II-131
Tabel 2. 61 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal	II-133
Tabel 2. 62 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih	II-134
Tabel 2. 63 Proyeksi Kebutuhan Listrik	II-135
Tabel 2. 64 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan	II-136
Tabel 2. 65 Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan.....	II-137
Tabel 2. 66 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2045	II-139
Tabel 2. 67 Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan dan Pembelajaran.....	II-141
Tabel 2. 68 Proyeksi Kebutuhan Kebutuhan Sarana Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2045	II-142
Tabel 2. 69 Proyeksi Kebutuhan Panjang Jalan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-143
Tabel 2. 70 Proyeksi Kebutuhan Pemadam Kebakaran.....	II-144
Tabel 2. 71 Proyeksi Kebutuhan Jamban.....	II-144
Tabel 2. 72 Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Air Limbah	II-145
Tabel 2. 73 Standar Jenis Sarana Perdagangan dan Niaga	II-147
Tabel 2. 74 Proyeksi Kebutuhan Toko/Warung di Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2045.....	II-147
Tabel 2. 75 Standar Kebutuhan Sarana Kebudayaan dan Rekreasi.....	II-148
Tabel 2. 76 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kebudayaan dan Rekreasi di Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2045	II-149
Tabel 2. 77 Standar Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga.....	II-150

Tabel 2. 78 Proyeksi Kebutuhan Taman/Tempat Main, Lapangan Olahraga, Jalur Hijau, dan Pemakanandi Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2045	II-151
Tabel 3. 1 Penyelarasan RTRW terhadap RPJPD: Langkah 1, Penyelarasan Tujuan Penataan Ruang terhadap Visi dan Misi RPJPD.....	III-25
Tabel 3. 2 Penyelarasan RTRW terhadap RPJPD: Langkah 2, Penyelarasan Kebijakan dan Strategi Tata Ruang terhadap Arah Kebijakan RPJPD	III-27
Tabel 3. 3 Penyelarasan RTRW terhadap RPJPD: Langkah 3, Penyelarasan Indikator Utama RTRW (Struktur Ruang) terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045.....	III-38
Tabel 3. 4 Penyelarasan RTRW terhadap RPJPD: Langkah 3. Penyelarasan Indikator Utama RTRW (Pola Ruang) terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045.....	III-45
Tabel 4. 1 Keselarasan Visi dan Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045.....	IV-1
Tabel 4. 2 Indikator 5 Sasaran Visi	IV-4
Tabel 5. 1 Arah Kebijakan dan Tahapan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045	V-2
Tabel 5. 2 Arah Kebijakan Transformasi.....	V-39
Tabel 5.3 Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan	V-59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kedudukan RPJPD Provinsi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	I-6
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan.....	II-2
Gambar 2. 2 Peta Topografi Provinsi Sumatera Selatan.....	II-4
Gambar 2. 3 Peta Kelerengan Provinsi Sumatera Selatan.....	II-5
Gambar 2. 4 Peta Jenis Tanah Provinsi Sumatera Selatan.....	II-7
Gambar 2. 5 Peta Klimatologi Provinsi Sumatera Selatan	II-8
Gambar 2. 6 Peta Geologi Provinsi Sumatera Selatan	II-11
Gambar 2. 7 Peta Pembagian Wilayah Sungai Provinsi Sumatera Selatan	II-12
Gambar 2. 8 Peta Pembagian DAS Provinsi Sumatera Selatan	II-13
Gambar 2. 9 Peta Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Selatan	II-15
Gambar 2. 10 Peta Fungsi Ekosistem Gambut Provinsi Sumatera Selatan.....	II-17
Gambar 2. 11 Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006, 2013, 2020.....	II-18
Gambar 2. 12 Emisi berbasis lahan historis Sumatera Selatan tahun 2000-2020	II-20
Gambar 2. 13 Lima jenis alih fungsi historis dengan nilai emisi terbesar di Sumatera Selatan	II-20
Gambar 2. 14 Peta Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan	II-22
Gambar 2. 15 Peta Bahaya Bencana Cuaca Ekstrem Provinsi Sumatera Selatan	II-23
Gambar 2. 16 Persentase Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	II-25
Gambar 2. 17 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022	II-26
Gambar 2. 18 Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Tahun 2045	II-27
Gambar 2. 19 Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023	II-34
Gambar 2. 20 Sebaran Capaian RT Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Sumatera Selatan 2023	II-36
Gambar 2. 21 Kapasitas Tampung Air di Provinsi Sumatera Selatan (m ³ /kapita), 2018-2022.....	II-37
Gambar 2. 22 Jumlah Air Disalurkan di Provinsi Sumatera Selatan (m ³), 2018-2022	II-38
Gambar 2. 23 Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Tahun 2045..	II-39
Gambar 2. 24 Peta Indeks Ketahanan Pangan Pulau Sumatera	II-40

Gambar 2. 25 Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan per Kabupaten/Kota	II-41
Gambar 2. 26 Peringkat Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2020	II-41
Gambar 2. 27 Prevalensi Ketidacukupan Pangan (%), 2018-2023.....	II-42
Gambar 2. 28 Pemenuhan Kebutuhan Listrik per Kapita di Provinsi Sumatera Selatan (KWh), 2018-2022.....	II-51
Gambar 2. 29 Produksi Listrik di Provinsi Sumatera Selatan (KWh), 2018-2023 ..	II-52
Gambar 2. 30 Pemanfaatan dan Pengembangan Aneka Energi Baru Terbarukan	II-52
Gambar 2. 31 Peta Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan.....	II-53
Gambar 2. 32 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin	II-54
Gambar 2. 33 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan	II-55
Gambar 2. 34 Gini Rasio Provinsi Sumatera Selatan.....	II-58
Gambar 2. 35 Perkembangan Kemiskinan Sumatera Selatan	II-59
Gambar 2. 36 Stunting di Provinsi Sumatera Selatan	II-60
Gambar 2. 37 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Selatan.....	II-61
Gambar 2. 38 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Agustus 2021-Agustus 2023 (%)	II-62
Gambar 2. 39 Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Selatan	II-62
Gambar 2. 40 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2023.....	II-64
Gambar 2. 41 Perkembangan Dimensi Kesehatan Reproduksi, 2018-2023	II-65
Gambar 2. 42 Perkembangan Indikator Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan dengan Pendidikan Minimal SMA, Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2023.....	II-66
Gambar 2. 43 Perkembangan Indikator Keterwakilan di Legislatif, 2018-2023....	II-66
Gambar 2. 44 Perkembangan Dimensi Pasar Tenaga Kerja, 2018-2023.....	II-67
Gambar 2. 45 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota, 2022-2023...	II-67
Gambar 2. 46 Umur Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018-2023	II-68
Gambar 2. 47 Harapan Lama Sekolah (HLS) Berdasarkan Jenis Kelamin, 2018-2023	II-68
Gambar 2. 48 Pengeluaran Per Kapita Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2018-2023	II-69

Gambar 2. 49 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Berdasarkan Jenis Kelamin. 2018-2023	II-69
Gambar 2. 50 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Sumatera Selatan...	II-70
Gambar 2. 51 Analisis Growth PDRB Sumatera Selatan 2017-2022	II-72
Gambar 2. 52 Income dan Labour Multiplier Sumsel 2017-2022	II-74
Gambar 2. 53 PDRB Per kapita Harga Berlaku dan Harga Konstan Sumatera Selatan.....	II-75
Gambar 2. 54 Distribusi Penduduk bekerja berdasarkan Pendidikan	II-76
Gambar 2. 55 Perkembangan Angkatan Kerjadan TPAK Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Selatan	II-77
Gambar 2. 56 Pelabuhan Penyebrangan Tanjung Api-api.....	II-86
Gambar 2. 57 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Selatan, 2023.	II-88
Gambar 2. 58 Jumlah Kepala Keluarga MBR yang Tidak Memiliki Rumah di Provinsi Sumatera Selatan, 2023	II-89
Gambar 2. 59 Persentase Akses Sanitasi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2023.....	II-90
Gambar 2. 60 Peta Sebaran Capaian RT Akses Sanitasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	II-91
Gambar 2. 61 Skor Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2023	II-94
Gambar 2. 62 Skor Indeks Daya Saing Daerah menurut Pilar di Provinsi Sumatera Selatan, 2023	II-94
Gambar 2. 63 Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Selatan, 2019-2023.....	II-95
Gambar 2. 64 Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime rate) (Per 100.000 Penduduk) di Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2022	II-97
Gambar 2. 65 Jumlah Kasus dan Penyelesaian Tindak Pidana di Provinsi Sumatera Selatan (%), 2019-2023	II-97
Gambar 2. 66 Skor Indeks Inovasi Daerah di Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2023	II-101
Gambar 2. 67 PAD Sumatera Selatan 2013-2022	II-105
Gambar 2. 68 Proyeksi Jumlah Penduduk Sumatera Selatan 2020-2045.....	II-119
Gambar 2. 69 Peta Sebaran Penduduk tahun 2020-2045	II-120
Gambar 2. 70 Proyeksi Kepadatan Penduduk Sumatera Selatan 2020-2045.....	II-120
Gambar 2. 71 Proyeksi Piramida Penduduk Sumatera Selatan 2020-2050	II-123
Gambar 2. 72 Proyeksi Penduduk Usia Kerja di Sumatera Selatan Tahun 2025- 2045	II-125
Gambar 2. 73 Proyeksi Penduduk Usia Sekolah Di Sumatera Selatan	II-127
Gambar 2. 74 Proyeksi Bonus Demografi	II-132
Gambar 2. 75 Lingkup Wilayah Patungraya Agung	II-159
Gambar 2. 76 Konsep Pengembangan Wilayah Patungraya Agung	II-161

Gambar 2. 77 KSP Kawasan Sekayu dan Sekitarnya	II-168
Gambar 2. 78 KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya	II-171
Gambar 2. 79 KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya	II-174
Gambar 2. 80 KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya.....	II-179
Gambar 2. 81 KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya	II-182
Gambar 4. 1 Nilai-Nilai dan Visi, Misi dan Sumatera Selatan	IV-11
Gambar 5. 1 Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045	V-1
Gambar 5. 2 Tahapan Misi Mewujudkan Transformasi Sosial Untuk Sumber Daya Manusia Berkarakter dan Berdaya Saing	V-10
Gambar 5. 3 Tahapan Misi Mewujudkan Transformasi Ekonomi menuju Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional	V-13
Gambar 5. 4 Tahapan Misi Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang Berkualitas	V-18
Gambar 5. 5 Tahapan Misi Memantapkan Ketahanan Daerah yang Tangguh, Berkualitas, dan Berkelanjutan	V-21
Gambar 5. 6 Tahapan Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.....	V-24
Gambar 5. 7 Tahapan Misi Mewujudkan Pemerataan Antar Daerah dan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan.....	V-26
Gambar 5. 8 Tahapan Misi Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	V-28
Gambar 5. 9 Tahapan Misi Memperkuat Kemandirian dan Inovasi Pembiayaan Pembangunan	V-31

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat dinamis telah mendorong era keterbukaan dalam segala aspek perencanaan. Sejalan dengan dinamika tersebut pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan memiliki kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pembangunan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, telah disusun pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan sejalan dengan ketentuan SPPN, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sehingga seluruh perencanaan pembangunan yang diselenggarakan baik sifatnya tahunan, jangka menengah dan jangka panjang merupakan dokumen yang terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan serta berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan melibatkan partisipasi publik (pemangku kepentingan) baik internal maupun eksternal. Proses penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2045 dilakukan dengan melibatkan utamanya partisipasi masyarakat dan *stakeholder* melalui *Focus Group Discussion* (FGD), Konsultasi Publik, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta proses penyusunan RPJPD melibatkan pendanaan pembangunan non pemerintah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang dijabarkan dari visi, misi, isu strategis, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan dari tahun 2025-2045. RPJPD mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Visi dan Misi RPJPD

Provinsi Sumatera Selatan sepenuhnya mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, daya tampung, dan daya dukung serta pencapaian pembangunan daerah periode sebelumnya.

Dokumen RPJPD dipedomani perencanaan pembangunan lainnya mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Provinsi Sumatera Selatan serta Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan seluruhnya harus mengacu kepada dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2045 adalah:

- (1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (10) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- (11) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- (17) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- (20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- (21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

- (22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- (23) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 06);
- (24) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- (25) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tanggal 10 Januari 2023;
- (26) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 tanggal 10 Januari 2024;
- (27) Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.2.1/3674/SJ, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 tanggal 6 Agustus 2024.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 sangat terkait dengan dokumen perencanaan lainnya. Penyusunan RPJPD mempedomani RPJPN, RTRW, dan KLHS serta memperhatikan hasil evaluasi RPJPD periode 2005-2025.

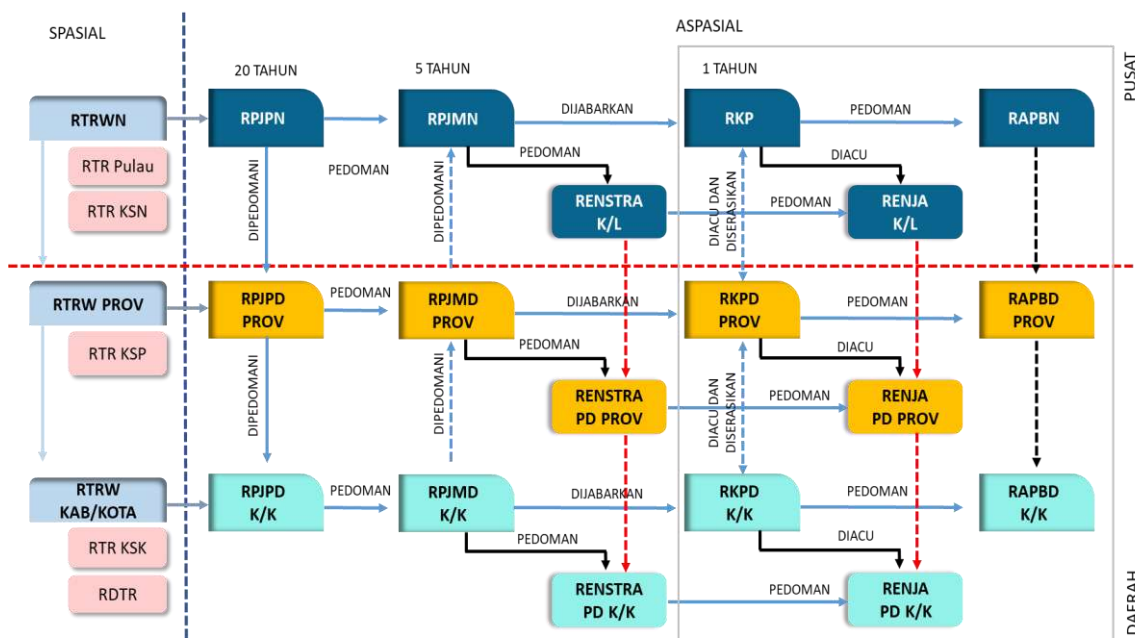
1.3.1 Hubungan RPJPN dengan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan mempedomani RPJPN, yaitu menyelaraskan visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok serta indikator utama pembangunan. RPJPD Provinsi Sumatera Selatan juga telah disusun dengan memperhatikan ruang lingkup penyelarasan pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.2.1/3674/SJ, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

1.3.2 Hubungan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam menyusun RPJPD Provinsi Sumatera Selatan telah mempedomani Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok sesuai dengan ruang lingkup penyelarasan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Disamping itu, RPJPD mengacu dan mengisi RTRW Nasional, utamanya substansi hal yang bersifat spasial yaitu rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah.



Gambar 1. 1 Kedudukan RPJPD Provinsi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.3.3 Hubungan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RPJPD Provinsi Sumatera Selatan mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang yang memuat rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan

perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Pengintegrasian isu lingkungan dan sumber daya alam menjadi bagian penting dalam penyusunan RPJPD Sumatera Selatan tahun 2025-2045.

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJPD Provinsi Sumatera Selatan ini disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, tujuan penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

- (1). Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.
- (2). Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah dan pusat
- (3). Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.
- (4). Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan.

1.5 Sistematika

Bab I : Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menguraikan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum. Aspek geografi membahas letak strategis, luas wilayah, fisik wilayah, potensi sumber daya alam, kebencanaan dan perubahan iklim. Aspek demografi menekankan pada karakteristik demografi daerah. Aspek kesejahteraan mencakup kesejahteraan ekonomi, dan kesejahteraan sosial budaya, sementara aspek daya saing menjabarkan daya saing ekonomi daerah, daya saing SDM, daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah, dan daya saing iklim investasi. Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintahan dan reformasi birokrasi. Gambaran umum juga memuat evaluasi hasil RPJPD tahun 2005-2025, tren dan Proyeksi Demografi dan sarana prasarana, serta pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPD 2025-2045.

- Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis
Menjelaskan permasalahan pembangunan dan isu strategis di masa yang akan datang. Permasalahan dan isu strategis merupakan hasil komparasi data eksisting, dan isu antarwilayah regional dan nasional serta perkembangan global.
- Bab IV : Visi dan Misi Daerah
Memuat visi daerah 2025-2045 hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan oleh daerah. Misi daerah menjelaskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah.
- Bab V : Arah dan Kebijakan dan Sasaran Pokok
Menjelaskan arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok dalam mencapai visi yang dibagi dalam 4 (empat) periode yaitu periode 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2045 yang dirinci ke dalam matrik keterkaitan antara visi, misi, sasaran pokok dan target.
- Bab VI : Penutup
Menjelaskan kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan melalui konsistensi perencanaan, dan pendanaan, sistem insentif, monitoring evaluasi dan manajemen risiko.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

2.1.1.1. Luas dan Letak Geografis

Provinsi Sumatera Selatan memiliki letak strategis, terletak antara 1°25'13"-4°55'17" Lintang Selatan dan 102°3'52"-106°19'45" Bujur Timur dengan batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan posisi geografis adalah:

- Sebelah Utara : Provinsi Jambi
- Sebelah Selatan : Provinsi Lampung
- Sebelah Barat : Provinsi Bengkulu
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Secara administrasi, Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 kabupaten/kota yang dibagi menjadi 13 wilayah kabupaten dan 4 wilayah kota dengan Ibukota Provinsi berada di Kota Palembang. Provinsi Sumatera Selatan memiliki luas sebesar 94.770,15 km² yang meliputi wilayah daratan seluas 86.769,34 km² dan wilayah perairan pesisir dengan luas lebih kurang 8.000,81 km². Provinsi Sumatera Selatan memiliki 241 kecamatan, 403 kelurahan, dan 2.855 desa. Luas wilayah terbesar yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu seluas 17.068,99 km², sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kota Palembang seluas 352,51 km².

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Daratan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1	Ogan Komering Ulu	3.774,497	13	14	143	101,63
2	Ogan Komering Ilir	17.068,99	18	13	314	45,68
3	Muara Enim	6.763,912	22	10	245	94,65
4	Lahat	4.333,065	24	18	360	102,00
5	Musi Rawas	6.122,588	14	13	186	68,85
6	Musi Banyuasin	14.550,788	15	13	229	48,61
7	Banyuasin	12.262,756	21	25	288	69,32
8	Ogan Komering Ulu Selatan	4.369,252	19	7	305	96,36

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
9	Ogan Komering Ulu Timur	3.412,716	20	7	252	200,59
10	Ogan Ilir	2.302,858	16	14	227	190,84
11	Empat Lawang	2.234,097	10	9	147	150,71
12	Penukal Abab Lematang Ilir	1.842,563	5	6	65	113,85
13	Musi Rawas Utara	5.937,803	7	7	82	33,63
14	Palembang	352,506	18	107	0	5.028,26
15	Prabumulih	447,311	6	33	12	467,17
16	Pagar Alam	625,913	5	35	0	241,06
17	Lubuklinggau	367,726	8	72	0	657,80
Sumatera Selatan		86.769,34	241	403	2.855	7.711,100

Sumber: Peta Batas Administrasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-1-6117 Tahun 2022 dan Garis Pantai Tahun 2021, BIG



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Peta Batas Administrasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-1-6117 Tahun 2022 dan Garis Pantai Tahun 2021, BIG

2.1.1.2. Kondisi Fisik Wilayah

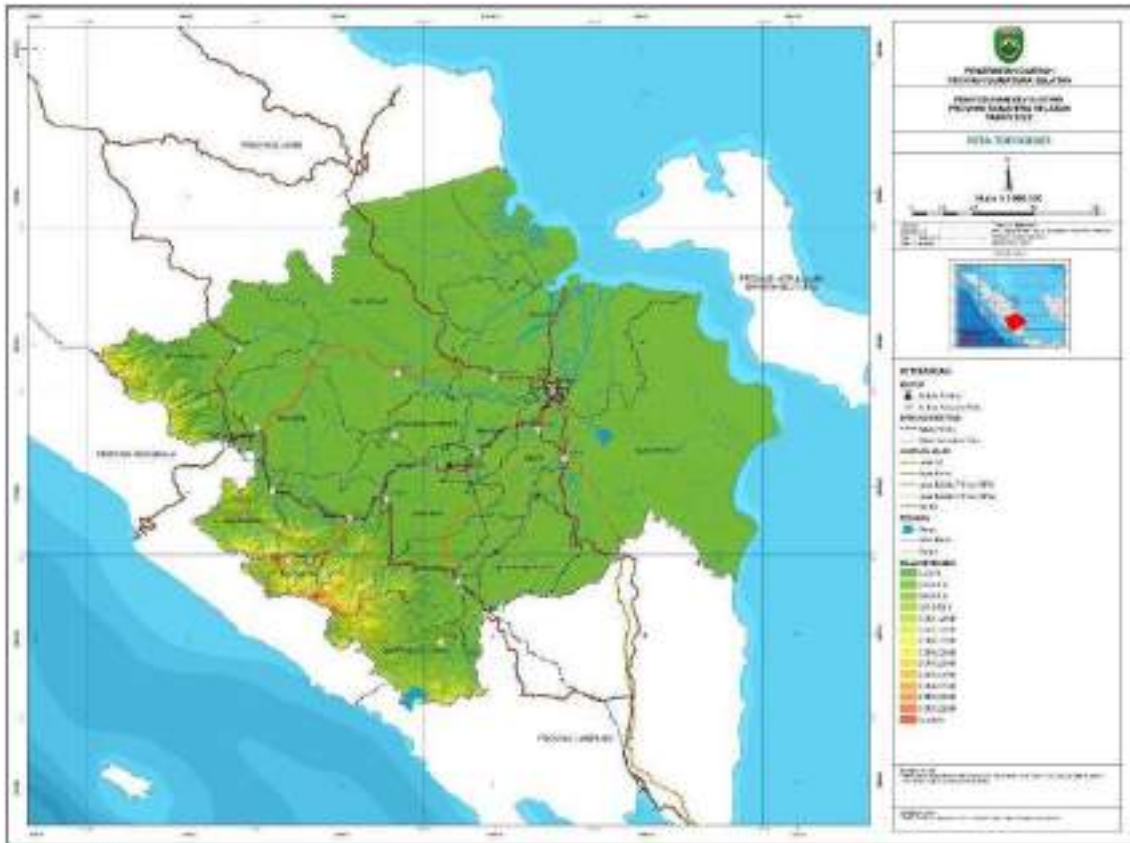
2.1.1.2.1 Topografi dan Kemiringan Lereng

Provinsi Sumatera Selatan memiliki topografi yang bervariasi mulai dari daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan dengan ketinggian wilayah antara 80-3.162 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sebanyak 85% wilayah Provinsi Sumatera Selatan berada pada ketinggian rata-rata antara 250-500 mdpl pada bagian tengah sampai ke wilayah pesisir di bagian utara. Salah satu kota dengan topografi tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Pagar Alam dengan titik tertinggi berada di puncak Gunung Dempo (3.173 mdpl), diikuti oleh Gunung Bungkok dengan ketinggian 2.125 mdpl, kemudian Gunung Seminung dengan ketinggian 1.964 mdpl, dan Gunung Patah dengan ketinggian 1.107 mdpl. Wilayah Timur merupakan daerah pantai yang terdiri dari rawa dan perairan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasi di wilayah timur berupa tumbuhan Palmase dan kayu rawa (Bakau).

Tabel 2. 2 Ketinggian Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Luas Ketinggian (ha)				
		Sangat Rendah 0-600 mdpl	Rendah 600-1.200 mdpl	Sedang 1200-1.800 mdpl	Cukup Tinggi 1.800-2.400 mdpl	Tinggi 2.400-3.300 mdpl
1	Ogan Komering Ulu	346.489,82	25.422,91	4.928,22	608,74	-
2	Ogan Komering Ilir	1.706.898,63	-	-	-	-
3	Muara Enim	580.795,50	35.524,63	37.245,43	20.273,62	2.551,99
4	Lahat	291.438,92	104.124,50	33.486,69	3.046,27	1.210,08
5	Musi Rawas	570.783,52	26.879,07	14.082,15	514,03	-
6	Musi Banyuasin	1.455.078,76	-	-	-	-
7	Banyuasin	1.226.275,57	-	-	-	-
8	Ogan Komering Ulu Selatan	242.100,98	154.554,61	36.180,42	4.007,24	81,95
9	Ogan Komering Ulu Timur	341.271,62	-	-	-	-
10	Ogan Ilir	230.285,79	-	-	-	-
11	Empat Lawang	139.942,69	62.433,66	18.797,90	2.076,21	159,22
12	Penukal Abab Lematang Ilir	184.256,33	-	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	487.164,66	66.845,60	33.526,70	6.243,34	-
14	Kota Palembang	35.250,59	-	-	-	-
15	Kota Prabumulih	44.731,12	-	-	-	-
16	Kota Pagar Alam	2.133,43	32.137,05	18.294,04	7.616,65	2.410,14
17	Kota Lubuklinggau	36.753,03	19,53	-	-	-
Sumatera Selatan		7.921.650,97	507.941,57	196.541,55	44.386,10	6.413,37

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044



Gambar 2. 2 Peta Topografi Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

Kelas kelerengan Provinsi Sumatera Selatan dibagi ke dalam lima kelas kelerengan berupa kelas datar dengan kemiringan 0-2%, landai dengan kemiringan 2-15%, agak curam dengan kemiringan 15-25%, curam dengan kemiringan 25-40%, dan sangat curam dengan tingkat kemiringan lebih dari 40%. Berdasarkan data olah spasial, Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh kelas kelerengan datar (0-2%) sebesar 78,65% atau seluas 6.825.713,57 ha. Sementara kelas lereng sangat curam dengan kelas lereng >40% hanya sebesar 144,09 ha yang tersebar di wilayah selatan.



Gambar 2. 3 Peta Kelerengan Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

Tabel 2. 3 Kelerengan Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Luas Kelerengan (ha)				
		Datar (0-2%)	Landai (2-15%)	Agak Curam (15-25%)	Curam (25-40%)	Sangat Curam >40%
1	Ogan Komering Ulu	213.472,03	163.237,14	668,30	65,26	6,95
2	Ogan Komering Ilir	1.696.036,40	10.862,23	-	-	-
3	Muara Enim	474.946,94	200.410,07	988,16	43,54	2,45
4	Lahat	173.121,10	257.689,94	2.401,72	92,53	1,16
5	Musi Rawas	468.069,12	141.229,81	2.545,34	380,40	34,10
6	Musi Banyuasin	1.301.832,76	153.245,79	0,20	-	-
7	Banyuasin	1.206.317,14	19.958,07	0,36	-	-
8	Ogan Komering Ulu Selatan	93.500,65	340.940,58	2.349,22	127,18	7,57
9	Ogan Komering Ulu Timur	319.074,75	22.189,82	7,05	-	-
10	Ogan Ilir	226.752,83	3.532,96	-	-	-
11	Empat Lawang	58.885,06	163.065,17	1.337,14	102,13	20,17

No	Kabupaten/Kota	Luas Kelerengan (ha)				
		Datar (0-2%)	Landai (2-15%)	Agak Curam (15-25%)	Curam (25-40%)	Sangat Curam >40%
12	Penukal Abab Lematang Ilir	168.541,75	15.714,58	-	-	-
13	Musi Rawas Utara	312.210,67	276.781,70	4.233,41	484,48	70,04
14	Kota Palembang	34.740,51	510,09	-	-	-
15	Kota Prabumulih	42.140,40	2.590,71	-	-	-
16	Kota Pagar Alam	14.790,54	47.187,79	568,32	43,02	1,64
17	Kota Lubuklinggau	21.280,92	15.480,77	8,67	2,20	-
Sumatera Selatan		6.825.713,57	1.834.627,24	15.107,90	1.340,75	144,09

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

2.1.1.2.2 Jenis Tanah

Keadaan jenis tanah di Sumatera Selatan terdiri dari beberapa jenis yaitu:

- Alluvial, jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur, total luas 4.954.800,82 ha atau sekitar 57% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan, terdapat di sepanjang Sungai Musi, Sungai Lematang, Sungai Ogan, Sungai Komering, dan Punggung Bukit Barisan. Tanah Aluvial umumnya subur karena memiliki kandungan air yang cukup, tanah ini banyak dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan kelapa, palawija, jagung, kedelai, ketela pohon, dan umbi-umbian.
- Histosol (tanah gambut), terdapat di sepanjang Pantai dan dataran rendah. Luas tanah gambut pada Provinsi Sumatera Selatan mencapai 1.794.484,26 ha atau sekitar 20% dari luas Provinsi Sumatera Selatan.
- Litosol, tersebar di pinggiran pegunungan terjal Danau Ranau dengan Patahan di sepanjang Bukit Barisan.
- Hidromorf, tersebar di dataran rendah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim.

Tabel 2. 4 Jenis Tanah Provinsi Sumatera Selatan

Jenis Tanah	Luas (Ha)	Luas (%)
Aluvial Distrik	1.369.910,70	15,79
Aluvial Eutrik	1.878.429,02	21,65
Aluvial Plintit	139.870,43	1,61
Aluvial Tionik	1.566.590,68	18,05
Andosol Humic	237.747,38	2,74
Arenosol Kambik	238.227,35	2,75
Badan Air	10.982,20	0,13
Gleisol Humik	405.042,52	4,67

Jenis Tanah	Luas (Ha)	Luas (%)
Grumusol Kromik	136.809,25	1,58
Histosol Distrik	1.794.484,26	20,68
Kambisol Eutrik	64.406,32	0,74
Kambisol Humik	829.216,90	9,56
Latosol Kromik	5.216,55	0,06
Grand Total	8.676.933,55	100,00

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044



Gambar 2. 4 Peta Jenis Tanah Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

2.1.1.2.3 Klimatologi

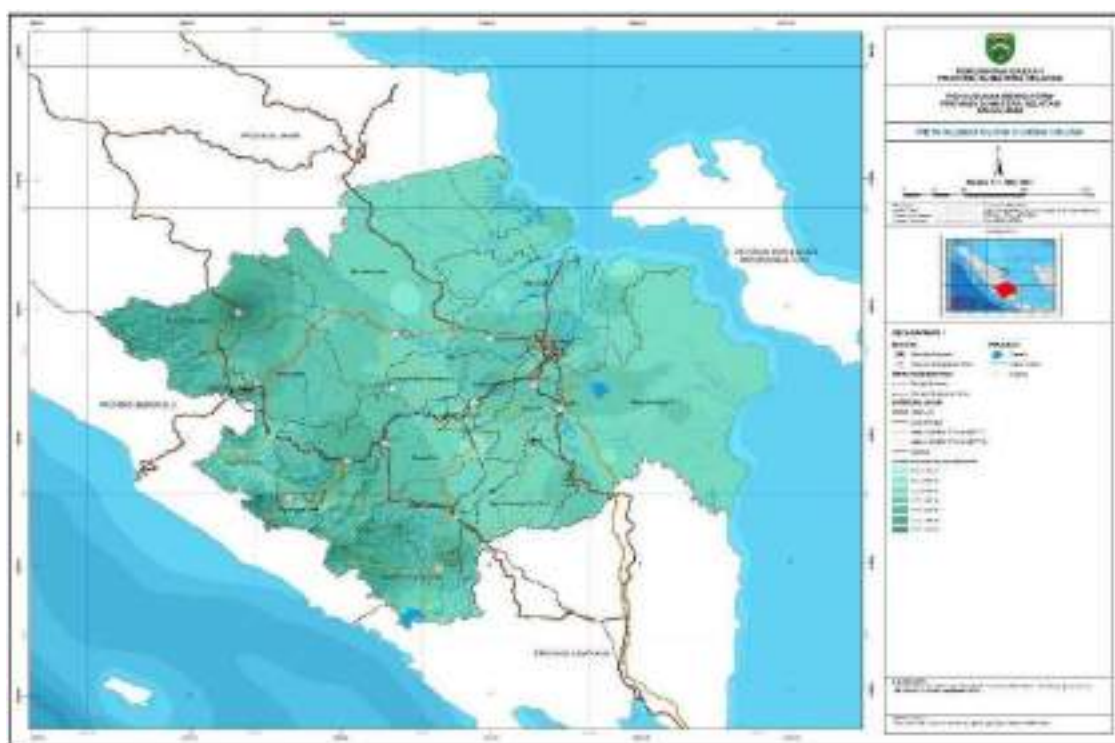
Provinsi Sumatera Selatan mempunyai iklim tropis dan basah dengan curah hujan per tahun, pada tahun 2021 mencapai 2.598,20 mm. Curah hujan tersebut masih masuk ke dalam kategori normal karena rata-rata curah hujan tahunan wilayah di Indonesia berkisar diangka 2.000 mm. Untuk hari hujan paling tinggi berada di bulan November dan Desember dengan hari jumlah hujan mencapai 23 hari.

Suhu udara di Provinsi Sumatera Selatan masih terhitung normal, dengan suhu rata-rata tahunan 29,10 C°, karena masih berkisar 21,3 C° hingga 29,7 C°. Kelembaban udara pada Provinsi Sumatera Selatan terhitung cukup tinggi karena untuk kelembaban udara rata-rata dalam satu tahun mencapai 78,50%.

Tabel 2. 5 Kondisi Klimatologi Provinsi Sumatera Selatan

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Suhu Udara rata-rata (C°)	Kelembaban Udara rata-rata (%)	Tekanan Udara (mb)	Kecepatan Angin (Knot)
Januari	235,70	17	27,70	82,10	1.008,30	3,90
Februari	181,40	19	28,20	80,90	1.008,90	4,10
Maret	251,90	19	28,80	78,50	1.008,30	2,80
April	127,60	13	29,20	77,30	1.008,90	2,30
Mei	144,80	15	29,80	77,70	1.007,70	2,40
Juni	60,00	8	29,80	74,70	1.009,00	2,80
Juli	124,70	6	29,50	73,40	1.008,70	3,30
Agustus	116,10	13	28,80	77,40	1.009,30	3,10
September	229,00	12	29,20	78,90	1.008,70	3,00
Oktober	118,10	12	30,10	78,30	1.008,40	2,80
November	421,40	23	28,90	80,50	1.007,40	2,00
Desember	587,50	23	28,80	83,30	1.009,10	3,00
Tahunan	2.598,20	235	29,10	78,50	1.008,60	2,90

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044



Gambar 2. 5 Peta Klimatologi Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

2.1.1.2.4 Geologi

Geologi Cekungan Sumatera Selatan adalah suatu hasil kegiatan tektonik yang berkaitan erat dengan penunjaman Lempeng Indi-Australia, yang bergerak ke arah utara hingga timur laut terhadap Lempeng Eurasia yang relatif diam. Zona penunjaman lempeng meliputi daerah sebelah barat Pulau Sumatera dan selatan Pulau Jawa. Beberapa lempeng kecil (*micro-plate*) yang berada di antara zona interaksi tersebut turut bergerak dan menghasilkan zona konvergensi dalam berbagai bentuk dan arah. Penunjaman lempeng Indi-Australia tersebut dapat mempengaruhi keadaan batuan, morfologi, tektonik dan struktur di Sumatera Selatan. Tumbukan tektonik lempeng di Pulau Sumatera menghasilkan jalur busur depan, magmatik, dan busur belakang.

Batuan yang mendasari Cekungan Sumatera Selatan merupakan kompleks batuan berumur pra-tercier, yang terdiri dari batu gamping, andesit, granodiorit, pilit, kuarsit dan granit. Jenis batuan yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- (1). Formasi Lahat terdiri dari endapan tufa, aglomerat, breksi tufan, andesit, serpih, batu lanau, batu pasir dan batubara;
- (2). Formasi Talang Akar terdiri dari batu pasir berukuran butir kasar-sangat kasar, serpih, batu lanau dan batubara;
- (3). Formasi Baturaja terdiri dari batu gamping terumbu, serpih gampingan dan napal atau batu lempung gampingan;
- (4). Formasi Baturaja terdiri dari serpih gampingan dan serpih lempungan;
- (5). Formasi Air Benakat dengan penyusun utama batu pasir;
- (6). Formasi Muara Enim terdiri dari batu pasir, batu lanau, batu lempung dan batubara; dan
- (7). Formasi Kasai terdiri dari batu pasir tufaan dan tufa.

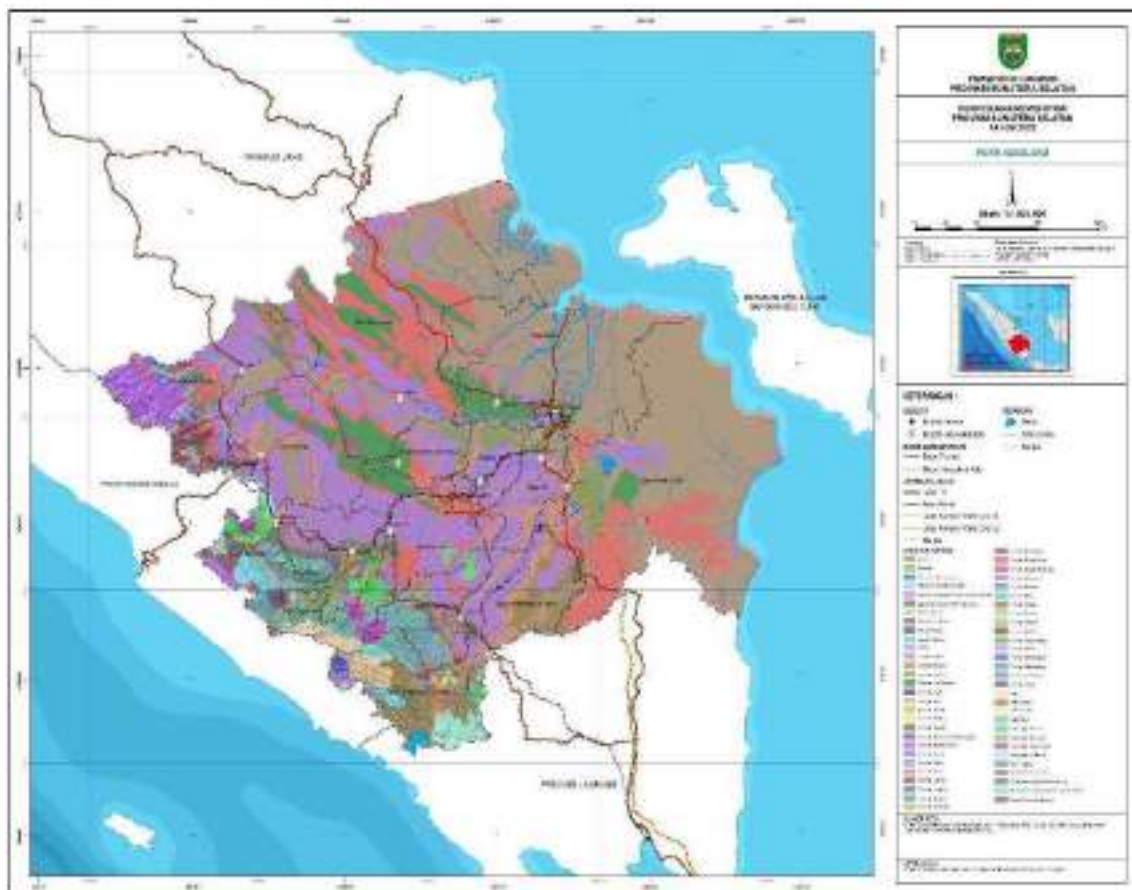
Tabel 2. 6 Formasi Batuan Provinsi Sumatera Selatan

Umur/ Masa	Formasi Batuan	Luas (Ha)
Jura	Batuan Terobosan	6.381,46
	Formasi Asai	2.781,52
	Granit	604,96
Kapur	Diorite Kuarsa	491,60
	Formasi Garba	7.262,59
	Formasi Lingsing	7.924,29
	Formasi Menanga	143,21
	Formasi Peneta	17.851,76
	Formasi Rawas	9.381,14
	Formasi Saling	11.230,51

Umur/ Masa	Formasi Batuan	Luas (Ha)
Trias	Formasi Sepingtiang	1.452,21
	Formasi Situlanglang	2.145,32
	Granit Kapur	20.538,07
	Granodiorit	4.687,15
	Satuan Batuan Ultrabasa	181,57
Kuarter	Aluvial	540.478,01
	Andesit	7.098,28
	Batuan Gunungapi Kuarter	55.048,38
	Batuan Gunungapi Peuet Sague, Meuntoi	458,92
	Batuan Gunungapi Rhyo-andesite	16.944,00
	Endapan Danau	2.676.134,78
	Endapan Rawa	136.279,08
	Formasi Kasai	1.749.522,41
	Formasi Meulaboh	42.180,15
	Formasi Pasumah	299,40
	Formasi Ranau	273.390,72
	Formasi Serei	1.313,79
	Granit	91.415,06
	Gunungapi Dempo	224.886,67
	Gunungapi Masurai	110.963,45
	Gunungapi Pesawaran	61.864,62
	Gunungapi Sekincau	101.569,86
	Pasir Kuarsa	11.532,32
	Porfiri Andesit dan dasit	67.298,74
	Pusat Gunungapi Geureundong	36.487,92
	Satuan Batuan GunungApi Andesit Basal	2.503,33
Neogen	Bancuh Tak Terpetakan	9.569,89
	Batuan Intrusi	6.624,84
	Dasite Piabung	80,32
	Diorit	1.626,46
	Formasi Air Benakat	626.207,16
	Formasi Bal	17.568,94
	Formasi Baong	11.931,87
	Formasi Gumai	145.878,39
	Formasi Gunungapi Haranggaol	1.843,49
	Formasi Hulusimpang	171.624,65
	Formasi Kikim	80.262,48
	Formasi Kueh	4.497,09

Umur/ Masa	Formasi Batuan	Luas (Ha)
	Formasi Lakitan	18.808,99
	Formasi Maonai	149,74
	Formasi Muara Enim	1.220.022,01
	Formasi Papan Betupang	16.671,13
	Formasi Peutu	3.319,06
	Formasi Seblat	1.754,12
	Formasi Simpangaur	1.282,30
	Formasi Talangakar	21.532,45
	Granit	119,89
	Granodiorit	5.334,78
Paleogen	Granit Seblat	2.243,09
Permo Karbon	Formasi Tarap	7.147,45
Pra Tersier	Batugamping	105,70
Grand Total		8.676.933,55

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044



Gambar 2. 6 Peta Geologi Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

2.1.1.2.5 Hidrologi dan Hidrogeologi

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah kaya sumber daya air, yang dibedakan menjadi sumber daya permukaan dan air tanah. Persediaan air di wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya sangat tergantung dari sungai-sungai utama. Terdapat 9 (Sembilan) sungai besar atau sungai utama di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Sungai Musi, Sungai Rawas, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi, Sungai Semangus, Sungai Lematang, Sungai Komering, Sungai Ogan dan Sungai Batanghari Leko, atau dikenal juga dengan sebutan Batanghari Sembilan. Sebagian besar sungai-sungai di Provinsi Sumatera Selatan bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi beserta anak sungainya seperti Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas.



Gambar 2. 7 Peta Pembagian Wilayah Sungai Provinsi Sumatera Selatan

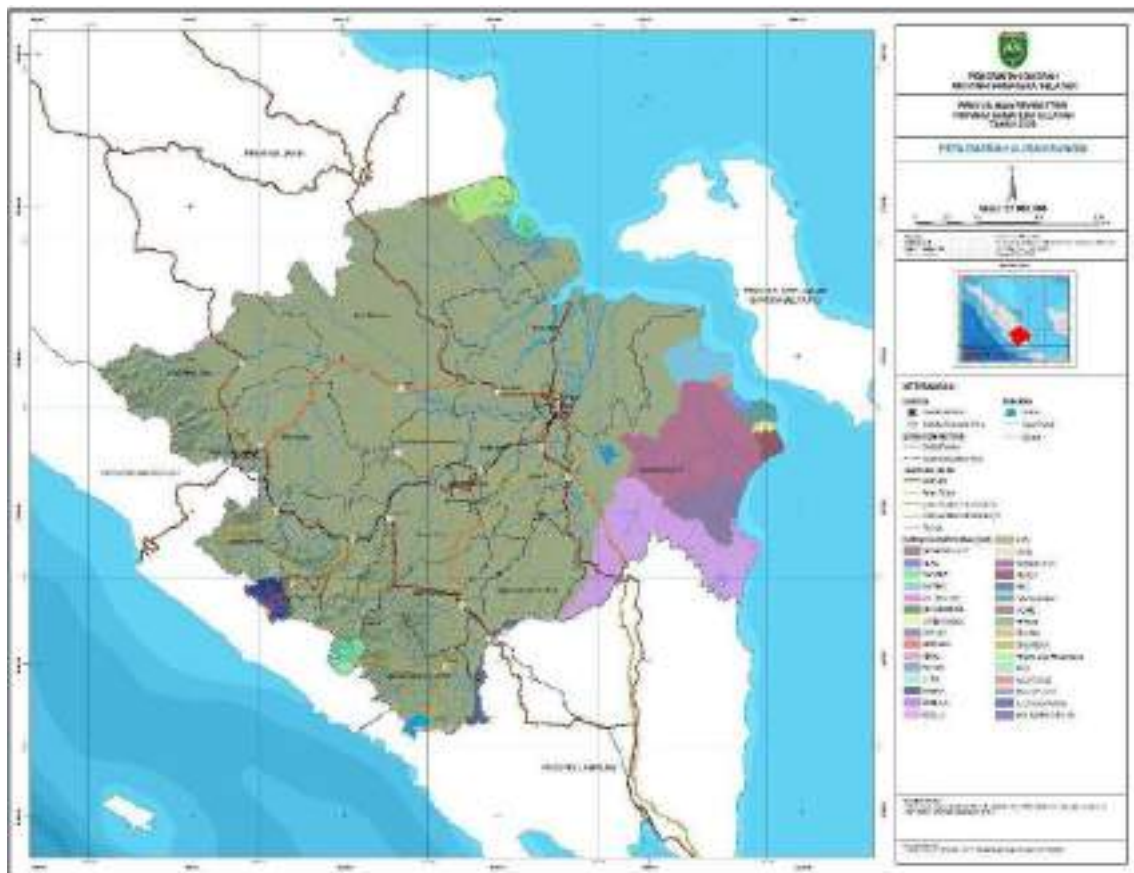
Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

Air permukaan merupakan sumber daya air paling strategis karena dapat dimanfaatkan langsung untuk berbagai keperluan makhluk hidup. Air permukaan dapat langsung digunakan sebagai sumber bahan baku keperluan manusia, hewan,

industri, dan kebutuhan lainnya. Keberadaan Air Permukaan di Provinsi Sumatera Selatan juga dipengaruhi keberadaan lebak, embung, dan rawa. Sebagian besar wilayah merupakan dataran aluvial sehingga ketinggian tanahnya relatif seragam. Kondisi yang datar demikian menyebabkan pengaturan air kurang lancar sehingga timbul daerah genangan pada wilayah yang ketinggiannya hampir sejajar sungai.

Selain sungai di Provinsi Sumatera Selatan juga terdapat sumber daya air berupa rawa dan danau. Daerah rawa terdapat di dataran rendah, berupa rawa lebak dan rawa pasang surut. Danau yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan antara lain Danau Air Hitam, Danau Ranau, Danau Matana, dan Danau Jembawan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 tahun 2015, di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 7 (tujuh) Wilayah Sungai meliputi WS Batanghari, WS Bengkulu-Alas-Talo, WS Mesuji-Tulang Bawang, WS Musi-Sugihan- Banyuasin, WS Nasai-Padang-Guci, WS Sebelat-Ketahun-Legi, dan WS Semangka yang didalamnya terbagi kedalam 31 Daerah Aliran Sungai (DAS).



Gambar 2. 8 Peta Pembagian DAS Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

2.1.1.2.6 Penutupan Lahan

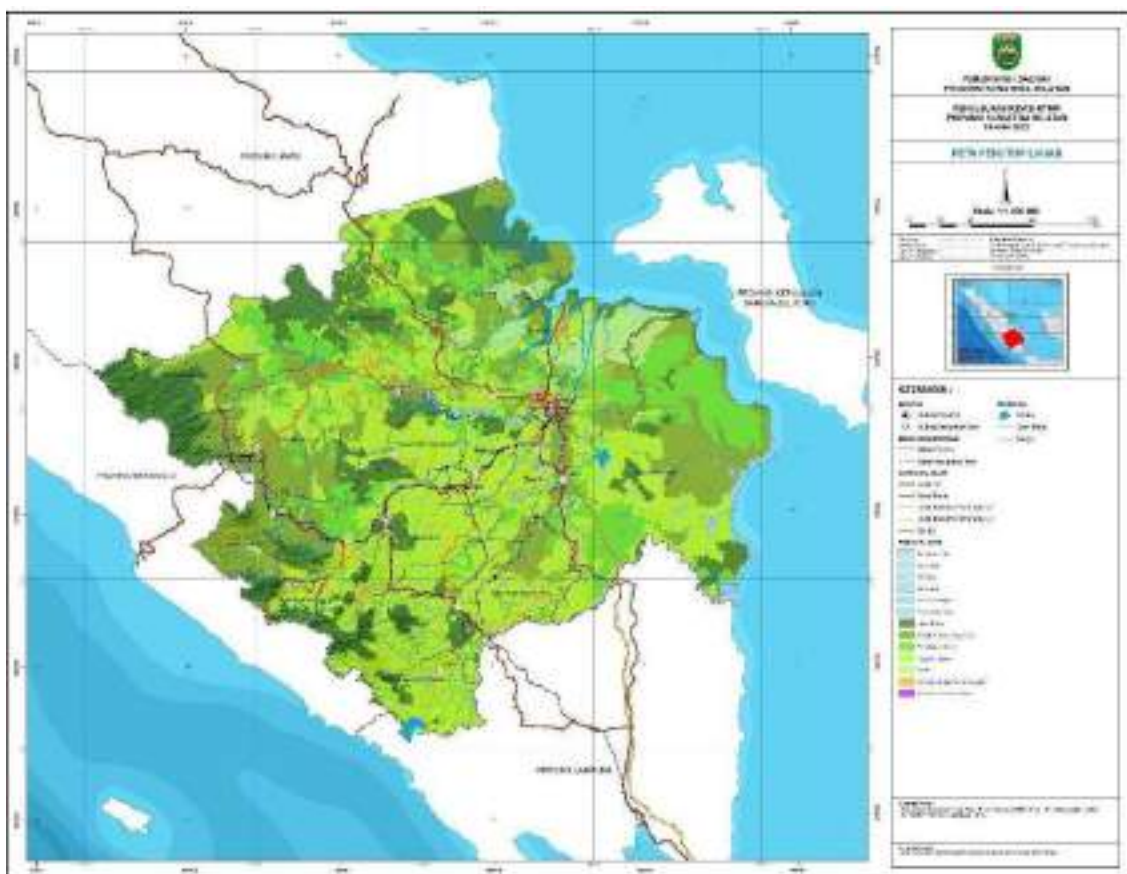
Berdasarkan data KLHK dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat dua jenis penutupan lahan yang meningkat terus menerus yaitu permukiman dan perkebunan. Penutupan lahan permukiman meningkat sebesar 16.057,97 ha pada rentang waktu lima tahun terakhir, dan penutup lahan perkebunan meningkat sebesar 265.606,72 ha. Sementara itu terdapat dua jenis penutupan lahan yang menurun terus menerus setiap tahunnya yaitu rawa dan hutan lahan kering sekunder. Apabila dilihat dari komposisi penutupan lahan di tahun terakhir, Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh penutupan lahan pertanian lahan kering dan perkebunan dengan komposisi sebesar 48,77%.

Tabel 2. 7 Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Selatan

Tutupan Lahan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Badan Air	87.769,90	87.885,26	101.230,07	90.103,45	87.209,31
Bandara/ Pelabuhan	466,70	466,70	470,43	545,35	545,35
Hutan Lahan Kering Primer	281.191,25	307.759,11	310.473,63	308.852,11	294.365,92
Hutan Lahan Kering Sekunder	317.601,00	277.655,12	274.875,24	271.935,74	261.026,20
Hutan Mangrove Primer	77.220,21	76.369,45	77.080,82	77.816,97	75.052,57
Hutan Mangrove Sekunder	92.468,98	91.189,49	92.060,07	85.531,52	79.054,09
Hutan Rawa Primer	10.321,19	10.321,19	10.416,63	10.514,72	10.140,64
Hutan Rawa Sekunder	58.142,34	53.912,90	56.764,37	63.144,24	64.951,45
Hutan Tanaman	336.617,57	314.740,86	496.623,71	332.583,19	717.575,52
Lahan Terbuka	564.746,88	492.406,26	334.050,47	661.799,00	49.960,61
Perkebunan	1.255.928,30	1.406.494,02	1.409.104,12	1.425.791,02	1.521.535,01
Permukiman	224.172,03	229.609,30	232.860,10	247.934,32	240.230,00
Pertambangan	31.956,05	33.214,38	34.117,68	46.732,21	33.104,99
Pertanian Lahan Kering	518.025,79	532.470,90	529.285,55	516.232,76	514.642,38
Pertanian Lahan Kering Campur	2.857.280,88	2.749.069,69	2.807.832,27	2.763.487,57	2.728.870,23
Rawa	105.270,71	102.676,01	101.092,99	100.311,14	96.629,70
Savana/ Padang Rumput	109.583,72	83.079,06	89.885,75	48.199,99	391,17
Sawah	466.804,60	483.081,95	487.713,90	480.321,21	473.843,31

Tutupan Lahan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Semak Belukar	334.436,86	414.378,46	281.864,20	139.543,89	426.379,13
Semak Belukar Rawa	924.592,06	914.144,42	921.048,78	980.679,21	983.469,74
Tambak	60.889,01	54.561,52	66.635,26	63.426,42	56.508,70
Grand Total	8.676.933,55	8.676.933,55	8.676.933,55	8.676.933,55	8.676.933,55

Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044



Gambar 2. 9 Peta Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Selatan
Sumber: Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

2.1.1.2.7 Fungsi Ekologis Gambut

Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Hidrologis Gambut Nasional, Provinsi Sumatera Selatan memiliki total luas ekosistem gambut sebesar 2.112.394,25 ha dengan pembagian fungsi ekologis gambut indikatif budidaya sebesar 909.435,92 ha, sementara luas fungsi ekologis gambut lindung sebesar 1.202.958,33 ha. Secara rinci luas dan

sebaran fungsi ekologi gambut di Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan secara rinci pada tabel dan gambar berikut.

Kebakaran lahan gambut pada tahun 2015 berkontribusi pada degradasi lahan gambut dan memberikan kerugian bagi penghidupan masyarakat. Kebakaran lahan gambut yang cukup besar terulang kembali pada tahun 2019. Gambut sebagai ekosistem yang unik dan memiliki berbagai fungsi pendukung bagi ekosistem Provinsi Sumatera Selatan, membutuhkan upaya integratif dan komprehensif untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Tabel 2. 8 Fungsi Ekologis Gambut di Provinsi Sumatera Selatan

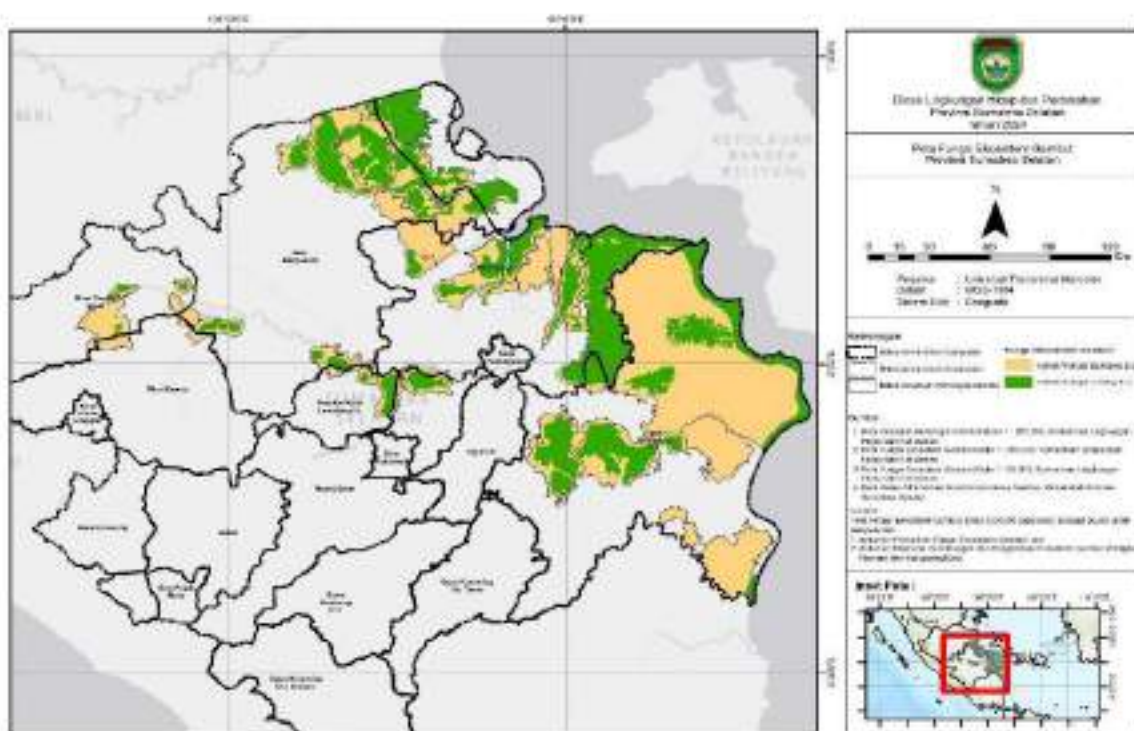
Fungsi Ekologis Gambut	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)
Indikatif Fungsi Budidaya E.G.	Banyuasin	195.433,24
	Muara Enim	18.245,83
	Musi Banyuasin	180.486,58
	Musi Rawas	12.731,12
	Musi Rawas Utara	35.976,48
	Ogan Komering Ilir	450.225,26
	Penukal Abab Lematang Ilir	16.337,40
Indikatif Fungsi Budidaya E.G. Total		909.435,92
Indikatif Fungsi Lindung E.G.	Banyuasin	390.585,62
	Muara Enim	13.821,82
	Musi Banyuasin	173.200,73
	Musi Rawas	4.140,94
	Musi Rawas Utara	19.153,39
	Ogan Komering Ilir	585.258,24
	Penukal Abab Lematang Ilir	16.797,61
Indikatif Fungsi Lindung E.G. Total		1.202.958,33
Grand Total		2.112.394,25

Sumber: Keputusan Menteri LHK Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017

Peta indikatif fungsi ekosistem gambut Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa 13 KHG yang sudah memiliki skala 1:50.000 dan 23 KHG masih menggunakan skala 1:250.000 ekosistem gambut Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh fungsi lindung dengan luas 1.296.476,55 ha atau 62% dari total luas ekosistem gambut yang ada. Sedangkan fungsi budidaya mencakup 795.841,39 ha atau 38% luasan ekosistem gambut. Dominasi fungsi lindung ekosistem gambut di

Provinsi Sumatera Selatan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam upaya perlindungan fungsi ekosistem gambut yang telah ditetapkan.

Berdasarkan luasannya, KHG Sungai Sugihan-Sungai Lumpur yang merupakan KHG dengan luas terbesar di Provinsi Sumatera Selatan memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Setidaknya 34,10% dari total fungsi lindung ekosistem gambut berada di KHG ini, kemudian diikuti oleh KHG Sungai Saleh - Sungai Sugihan (14,90%) dan KHG Sungai Sibumbang-Sungai Talangrimba (5,41%). Konfigurasi fungsi budidaya menunjukkan KHG Sungai Sugihan-Sungai Lumpur memberikan pengaruh yang juga signifikan dengan 79,8% fungsi budidaya berada di KHG ini, berikutnya diikuti oleh KHG Sungai Burung-Sungai Way Mesuji (93,66%) dan KHG Sungai Ulak kedondong-Sungai Lumpur (100%).



Gambar 2. 10 Peta Fungsi Ekosistem Gambut Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Pengolahan data geospasial peta fungsi ekosistem gambut memberikan informasi di 36 KHG yang ada di Sumatera Selatan terhadap luas masing-masing KHG menunjukkan, KHG Sungai Saleh-Sungai Sugihan yang memiliki komposisi fungsi lindung sebesar 87,71% atau 0,17 juta ha dari luas total, kemudian disusul oleh KHG Sungai Air Hitam Laut-Sungai Buntu Kecil dengan persentase fungsi lindung sebanyak 86,14%.

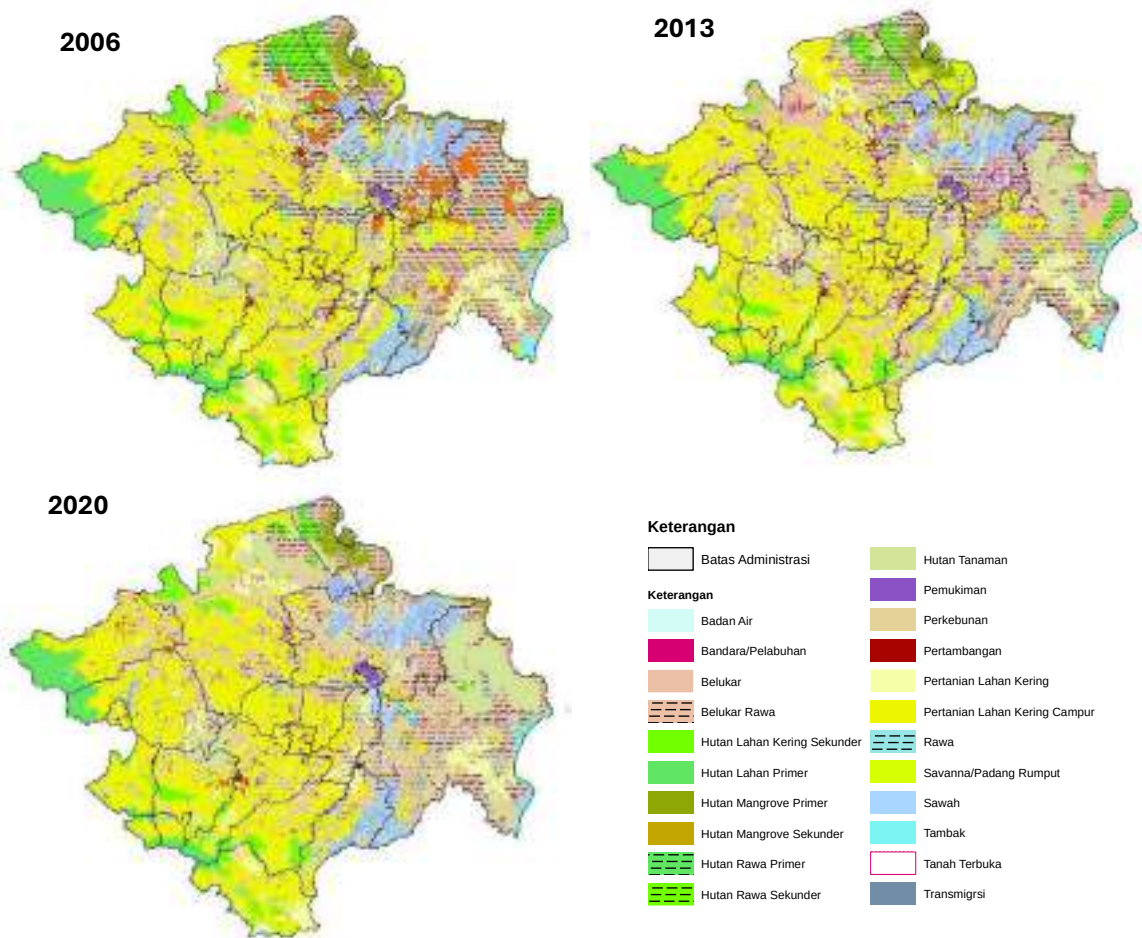
2.1.1.3. Kondisi Kerawanan Bencana Wilayah

2.1.1.3.1 Perubahan Iklim

Perubahan iklim ditandai dengan berbagai fenomena hidrometeorologis atau bencana yang terjadi di atmosfer, air dan lautan. Dengan meningkatnya pelepasan emisi di atmosfer, maka mengakibatkan perubahan pada proses alami yang terjadi di air dan lautan, termasuk meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi.

Sumbangan Emisi Berbasis Lahan

Salah satu sumbangan terbesar emisi di Sumatera Selatan berasal dari sektor berbasis lahan. Hal ini terjadi ketika terdapat alih fungsi lahan dari suatu tutupan lahan dengan cadangan karbon yang tinggi ke tutupan lahan dengan cadangan yang lebih rendah.



Gambar 2. 11 Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006, 2013, 2020

Sumber: KLHS Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Secara historis, analisis data dari KLHS untuk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2006, 2013 dan 2020 menunjukkan adanya perbedaan signifikan untuk beberapa tutupan lahan. Salah satu alih fungsi lahan yang perlu menjadi perhatian adalah pada penurunan tutupan lahan hutan. Beberapa kabupaten dengan tingkat penurunan tutupan lahan hutan tinggi adalah Ogan Komering Ilir, Musi Bayuasin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara.

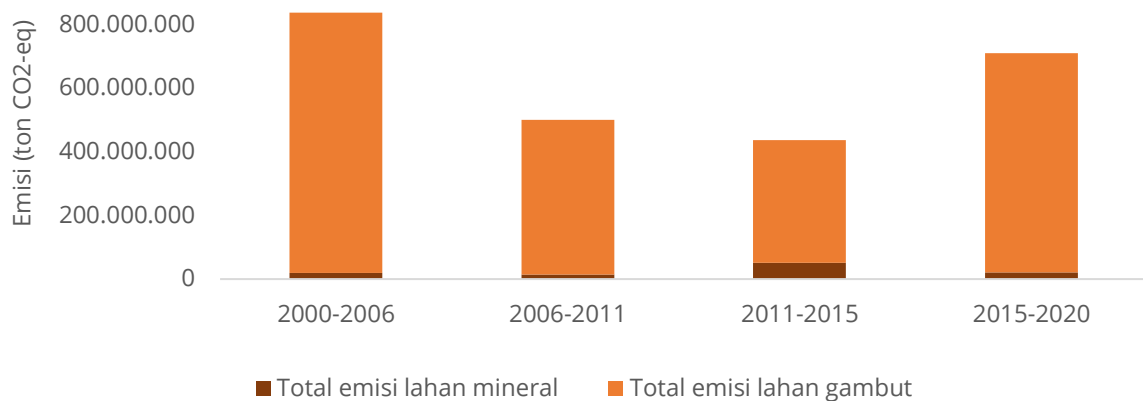
Tabel 2. 9 Luasan Perubahan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006, 2013, dan 2020

No	Tutupan lahan	Luas (ha)			Luas Perubahan Tutupan Lahan 2006-2020 (ha)
		Tahun 2006	Tahun 2013	Tahun 2020	
1	Perkebunan	677.683,00	778.343,35	1.393.055,72	715.372,72
2	Hutan Tanaman	259.745,00	424.527,66	726.660,00	466.915,00
3	Sawah	412.330,00	402.795,08	500.453,44	88.123,44
4	Pertanian Lahan Kering Campur	2.857.434,00	2.841.779,84	2.920.091,62	62.657,62
5	Hutan Mangrove Sekunder	57.550,00	67.563,99	81.757,25	24.207,25
6	Badan Air	80.084,00	94.313,52	89.651,84	9.567,84
7	Pemukiman	166.888,00	168.441,96	172.254,55	5.366,55
8	Pertambangan	28.362,00	28.194,75	33.653,19	5.291,19
9	Hutan Lahan Primer	293.434,00	296.455,88	298.510,98	5.076,98
10	Bandara/Pelabuhan	232,00	247,26	549,81	317,81
11	Tambak	59.266,00	59.703,47	57.275,98	-1.990,02
12	Hutan Rawa Primer	18.414,00	9.069,23	10.267,17	-8.146,83
13	Transmigrasi	55.482,00	55.164,00	42.943,94	-12.538,06
14	Pertanian Lahan Kering	558.544,00	549.699,27	521.286,41	-37.257,59
15	Hutan Mangrove Primer	116.570,00	101.170,37	76.094,01	-40.475,99
16	Rawa	144.226,00	153.354,39	97.841,19	-46.384,81
17	Hutan Lahan Kering Sekunder	386.961,00	273.826,25	264.552,66	-122.408,34
18	Belukar	434.659,00	619.556,55	279.070,45	-155.588,55
19	Hutan Rawa Sekunder	227.987,00	163.228,70	65.763,02	-162.223,98
20	Savanna/Padang Rumput	217.377,00	236.506,69	396,07	-216.980,93
21	Tanah Terbuka	315.843,00	297.117,63	50.648,69	-265.194,31
22	Belukar Rawa	1.325.861,00	1.047.512,18	996.118,45	-329.742,55

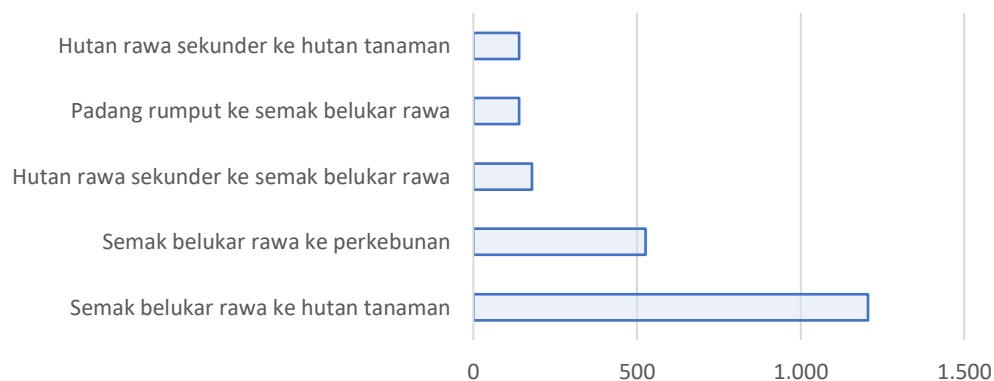
Sumber: KLHS RTRW Sumatera Selatan 2024-2044

Berdasarkan perubahan tutupan lahan di atas, sebagian besar emisi yang dihasilkan di Sumatera Selatan selama tahun 2000-2020 berasal dari emisi lahan

gambut. Hal ini diakibatkan oleh potensi emisi lahan gambut yang bukan hanya berasal dari adanya alih fungsi tutupan lahan, namun juga berasal dari emisi yang dihasilkan dari ekosistem gambut itu sendiri. Jenis perubahan tutupan lahan yang berkontribusi terhadap pelepasan emisi terbesar dapat dilihat pada Gambar 2.12. Alih fungsi dari semak belukar rawa ke hutan tanaman menyumbang pelepasan emisi terbesar pada kurun waktu 2000–2020.



Gambar 2. 12 Emisi berbasis lahan historis Sumatera Selatan tahun 2000-2020



Gambar 2. 13 Lima jenis alih fungsi historis dengan nilai emisi terbesar di Sumatera Selatan

2.1.1.3.2 Bencana Hidrometeorologi

Banyak kejadian bencana yang dialami Provinsi Sumatera Selatan selama 20 tahun terakhir, diantaranya kekeringan, suhu ekstrem, banjir, karhutla, dan kerawanan pangan, sebagai salah satu dampak dari perubahan iklim. Dilihat dari capaian Indeks Risiko Bencana, Sumatera Selatan cenderung mengalami penurunan pada tahun 2015-2022, namun masih masuk kategori tinggi sehingga perlu penanganan berupa perencanaan pembangunan yang berorientasi pada adaptasi

dan mitigasi perubahan iklim. Beberapa kabupaten dengan risiko paling tinggi adalah Kabupaten Empat Lawang, Muara Enim dan Musi Rawas. Adapun isu yang perlu diatasi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tenaga kerja yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama tenaga kerja di sektor perkebunan dan pertanian, serta pekerja keluarga, terutama perempuan.

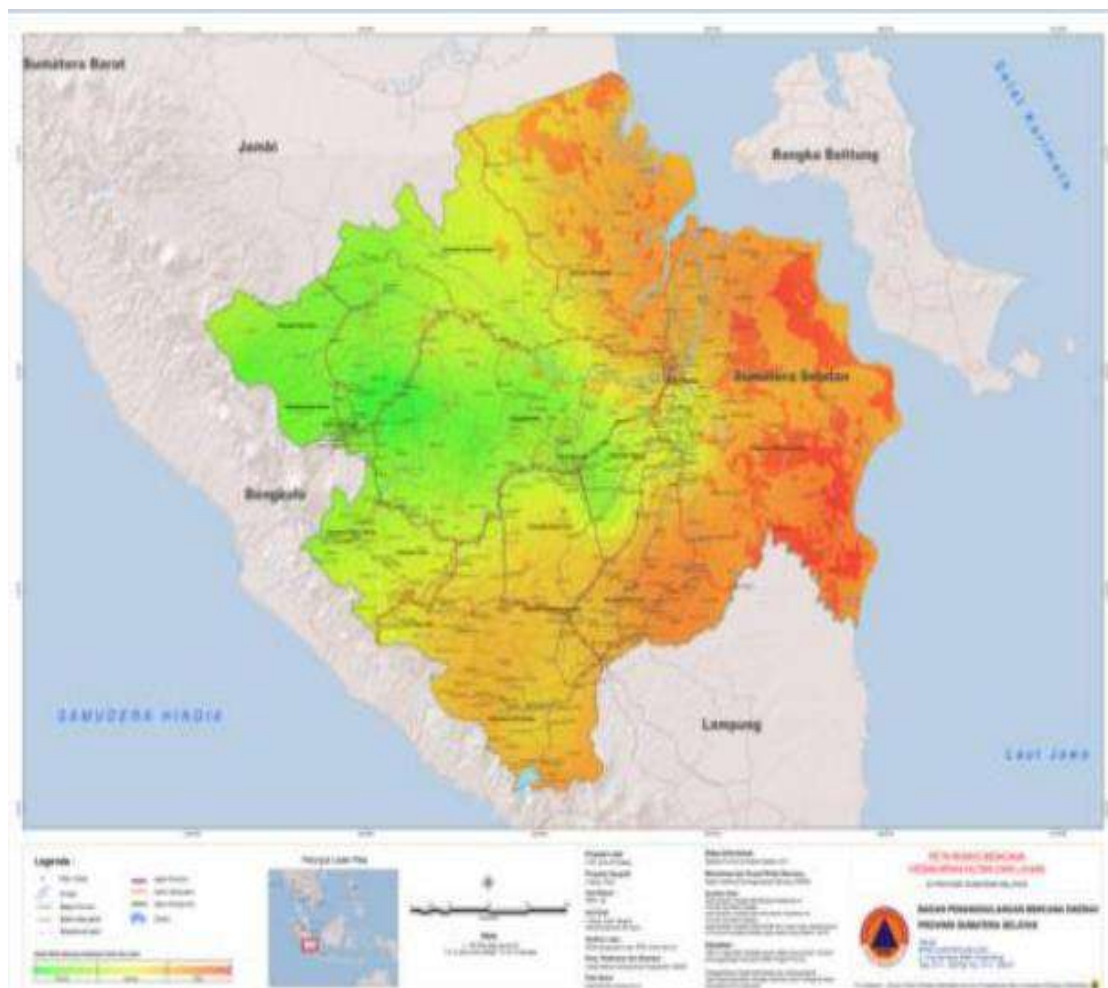
2.1.1.3.3 Bencana Banjir

Bencana banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Selama kurun waktu dari tahun 2014 hingga Tahun 2023 tercatat 364 kejadian banjir di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu penyebab banjir adalah semakin berkurangnya kawasan hutan lindung di daerah hulu dan merupakan penyebab yang paling dominan di wilayah ini. Berikut adalah kondisi banjir di DAS Musi:

- Di Sub DAS Musi banjir bandang sering terjadi. Pada tahun 1999 di Talang Padang beberapa rumah roboh diterjang banjir. Di Sub DAS Batanghari Leko banjir terjadi dipertemuan dengan Sungai Musi;
- Di Sub DAS Rawas banjir terjadi di Bingin Teluk dan Noman;
- Di Sub DAS Lematang banjir di Belimbing dan Pagar Alam;
- Di Sub DAS Ogan banjir terjadi di Muara Kuang;
- Di Sub DAS Komering banjir terjadi di Muaradua;
- Di pertemuan Sungai Musi-Sungai Kelingi, Sungai Musi-Sungai Lakitan dan Sungai Musi-Sungai Rawas terjadi pada saat debit air sedang tinggi di sungai-sungai;
- Wilayah kota di hilir seperti Palembang dan Sekayu.

2.1.1.3.4 Kebakaran Hutan dan Lahan

Sementara itu, potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah seluas 8.851.703,00 ha dan berada pada kelas Tinggi, yang meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 2.319.835,00 ha, kelas sedang 3.249.973,00 ha, dan kelas tinggi dengan luas 3.281.895,00 ha. Luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas rendah adalah 381.050,00 ha, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sedangkan pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas 673.019,00 ha. Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah wilayah yang memiliki potensi bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan yang tertinggi untuk kelas tinggi, yaitu 1.258.461,00 ha. Kejadian bencana alam cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir, pada tahun 2021 sebanyak 81, meningkat menjadi 201 di tahun 2023. Bencana alam terbanyak sepanjang tahun 2023 adalah kebakaran hutan, kondisi ini disebabkan oleh perubahan iklim El-Nino yang berdampak pada musim kering yang lebih lama sehingga mendorong terjadinya kebakaran hutan.



Gambar 2. 14 Peta Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: KLHS Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Dalam interval 20 tahun terakhir, kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan tertinggi berada pada tahun 2017 dengan total luasan 727.174 ha. Pada rentang waktu 2020-2023, kejadian kebakaran mengalami peningkatan secara signifikan. Meski demikian, kebakaran yang terjadi paling parah berada pada area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), terutama pada tahun 2015 dan 2019. Selain itu, selama 2006-2021 areal terbakar banyak terjadi secara berulang di lokasi yang sama, yakni daerah Timur Provinsi Sumatera Selatan seperti di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin dan Banyuasin. Akibat adanya kebakaran pada lahan gambut, maka terjadi peningkatan kerusakan ekosistem gambut, terutama pada areal konsesi, baik HTI dan HGU.

Tabel 2. 10 Bencana Alam di Provinsi Sumatera Selatan

Jenis Bencana	2021	2022	2023
Tanah Longsor	4	9	12
Banjir	39	38	37
Kebakaran hutan	24	32	126
Angin Puting Beliung	24	26	26
Total	91	105	201

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2023; BMKG Sumsel 2024

2.1.1.3.5 Cuaca Ekstrem

Total luas bahaya cuaca ekstrem di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan adalah 6.339.456,00 ha. Dari total luas bahaya tersebut, luas bahaya dengan kelas tinggi seluas 3.602.047,00 ha, kelas rendah seluas 21,00 ha, dan kelas sedang seluas 2.737.388,00 ha. Selain itu, total luas bahaya kekeringan di Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan adalah 8.853.691,00 ha dan berada pada kelas Sedang. Secara terinci, luas bahaya dengan kelas rendah 1.171.586,00 ha, kelas sedang seluas 7.676.694,00 ha, dan kelas tinggi seluas 5.411,00 ha.



Gambar 2. 15 Peta Bahaya Bencana Cuaca Ekstrem Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: KLHS Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Sebaran luas bahaya kekeringan masing-masing kabupaten/kota memperlihatkan bahwa kabupaten/kota yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas rendah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu 1.007.667,00 ha, sedangkan Kabupaten Musi Banyuasin adalah kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya kekeringan pada kelas sedang dengan luas 1.405.948,00 ha, dan Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan wilayah yang memiliki luas tertinggi potensi bahaya kekeringan dengan kelas tinggi di Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas 5.411,00 ha.

2.1.1.4. Potensi Ekonomi dan Lestari/ Sumber Daya Alam

2.1.1.4.1 Potensi Air

Daerah aliran sungai (DAS) Sumatera Selatan menurut ketetapan pemerintah terdiri dari DAS Musi yang luasnya 59,942 km² dan DAS Sugihan, serta sembilan sungai besar yang ada di Sumatera Selatan. Sungai-sungai tersebut merupakan potensi sumber daya air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan rumah tangga.

Daya Dukung Daya Tampung Air

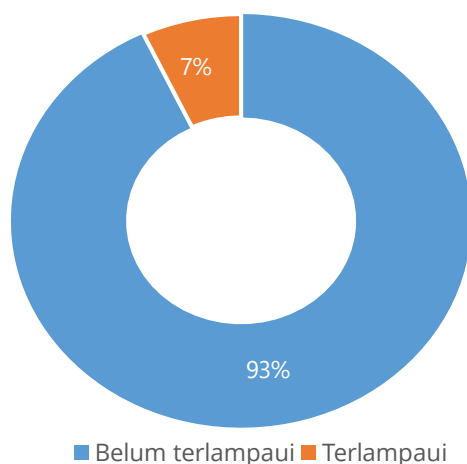
Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Selatan memiliki ketersediaan air sebanyak 89.861.218.593,14 m³ per tahun (data termuktahir 2022), dengan jumlah ketersediaan air paling banyak di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan Banyuasin. Dari sisi pemanfaatannya, kebutuhan air di Provinsi Sumatera Selatan yaitu 37.040.269.526,98 m³ per tahun, dengan Kabupaten Banyuasin sebagai daerah dengan jumlah pemanfaatan air terbanyak, diikuti Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air setiap tahunnya, maka Provinsi Sumatera Selatan masih memiliki cadangan air sebanyak 52.820.949.066,16 m³ per tahun, jauh melampaui kebutuhan air per tahun. Cadangan air paling banyak terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kota Palembang.

Tabel 2. 11 Daya Dukung dan Daya Tampung Air Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

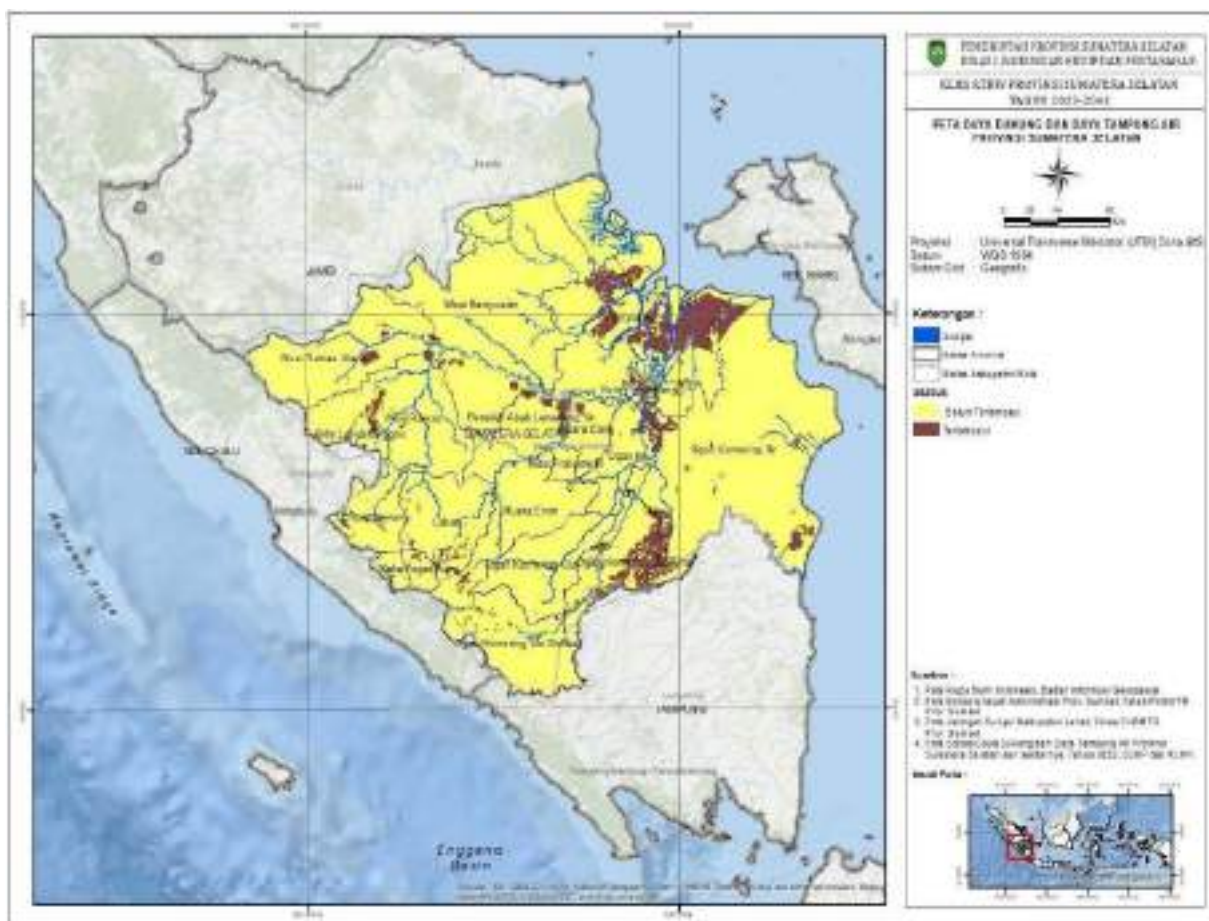
Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Populasi (jiwa)	Ketersediaan Air (m³/tahun)	Kebutuhan Air (m³/tahun)	Cadangan Air (m³/tahun)
Banyuasin	1.226.275,6	819.268	12.726.760.773,63	7.020.795.839,54	5.705.964.934,08
Empat Lawang	223.409,7	335.012	2.342.404.465,18	1.175.078.871,00	1.167.325.594,18
Kota Lubuklinggau	36.772,6	229.044	352.090.988,42	208.689.257,85	143.401.730,57
Kota Pagar Alam	62.591,3	146.861	668.352.162,58	308.279.914,29	360.072.248,29
Kota Palembang	35.250,6	1.668.168	327.638.558,68	196.575.727,43	131.062.831,25
Kota Prabumulih	44.731,1	197.716	501.597.019,76	225.966.728,77	275.630.290,99

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Populasi (jiwa)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Cadangan Air (m ³ /tahun)
Lahat	433.306,5	435.212	4.354.397.420,05	1.913.390.009,09	2.441.007.410,96
Muara Enim	676.391,2	593.362	7.302.742.929,26	2.406.134.029,81	4.896.608.899,44
Musi Banyuasin	1.455.078,8	620.539	13.720.490.689,16	5.625.823.778,82	8.094.666.910,34
Musi Rawas	612.258,8	405.078	6.609.302.541,90	2.450.529.137,27	4.158.773.404,63
Musi Rawas Utara	593.780,3	194.672	6.794.822.660,82	1.721.188.830,92	5.073.633.829,90
Ogan Ilir	230.285,8	420.796	2.552.407.572,62	1.309.091.247,44	1.243.316.325,18
Ogan Komering Ilir	1.706.899,0	736.258	17.075.698.729,51	5.800.018.563,60	11.275.680.165,91
Ogan Komering Ulu	377.449,7	369.273	3.927.762.990,09	1.457.386.592,03	2.470.376.398,06
Ogan Komering Ulu Selatan	436.925,2	416.254	4.581.573.091,32	1.697.528.338,89	2.884.044.752,42
Ogan Komering Ulu Timur	341.271,6	734.278	4.251.853.147,76	2.775.729.825,82	1.476.123.321,94
Penulak Abab Lematang Ilir	184.256,3	195.808	1.771.322.852,43	748.062.834,42	1.023.260.018,01
Provinsi Sumatera Selatan	8.676.933,6	8.517.599	89.861.218.593,14	37.040.269.526,98	52.820.949.066,16

Total keseluruhan status daya dukung dan daya tampung air yang telah “terlampau” di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu seluas 615.622,99 ha atau 7,10% dari total luas Provinsi Sumatera Selatan. Secara spasial, kabupaten/kota dengan status daya dukung dan daya tampung air yang telah “terlampau” relatif tinggi, yaitu Kota Palembang seluas 12.879,48 ha (35,29%), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur seluas 87.205,15 ha (25,48%), dan Kabupaten Banyuasin seluas 220.538,94 ha (17,67%). Sementara itu, status daya dukung dan daya tampung air yang telah terlampau di kabupaten/kota lainnya rata-rata masih di bawah 10%.



Gambar 2. 16 Persentase Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022



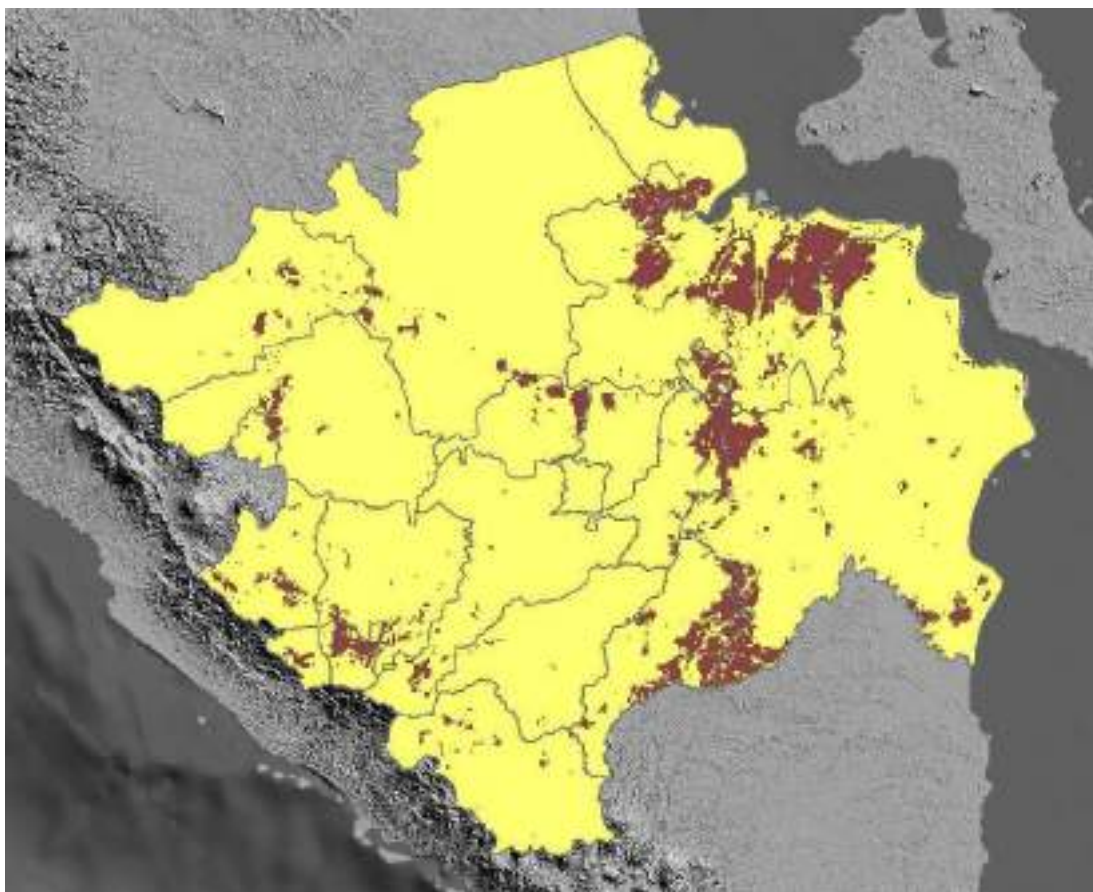
Gambar 2. 17 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Tabel 2. 12 Status Air Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Status DDDT Air (Ha)		Total Keseluruhan
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
1	Banyuasin	1,027,516.48	220,538.94	1,248,055.42
2	Empat Lawang	223,061.35	9,187.36	232,248.72
3	Kota Lubuklinggau	35,518.08	1,202.08	36,720.16
4	Kota Pagar Alam	57,832.24	5,581.11	63,413.35
5	Kota Palembang	23,612.38	12,879.48	36,491.86
6	Kota Prabumulih	47,825.80	0	47,825.80
7	Lahat	408,667.07	14,933.45	423,600.51
8	Muara Enim	664,215.54	15,111.92	679,327.46
9	Musi Banyuasin	1,377,840.28	51,002.74	1,428,843.02
10	Musi Rawas	594,723.11	18,117.13	612,840.24
11	Musi Rawas Utara	578,296.26	16,142.28	594,438.54
12	Ogan Ilir	211,223.45	15,970.55	227,194.01

No	Kabupaten/Kota	Status DDDT Air (Ha)		Total Keseluruhan
		Belum Terlampaui	Terlampaui	
13	Ogan Komering Ilir	1,578,480.21	122,936.33	1,701,416.54
14	Ogan Komering Ulu	374,878.70	1,888.99	376,767.69
15	Ogan Komering Ulu Selatan	431,539.31	6,697.33	438,236.64
16	Ogan Komering Ulu Timur	255,092.26	87,205.15	342,297.41
17	Penukal Abab Lematang Ilir	167,862.54	16,228.14	184,090.68
		8,058,185.06	615,622.99	8,673,808.05

Tabel 2.12 dan Gambar 2.18 menunjukkan status air berdasarkan kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan. Secara umum, status daya dukung dan daya tampung air di Provinsi Sumatera Selatan masih berada pada kategori aman yaitu 93% belum terlampaui. Namun demikian, daya dukung dan daya tampung air di tahun 2045 dengan status melampaui cenderung akan mengalami peningkatan. Secara total, daya tampung dan daya dukung “terlampaui” pada tahun 2045 seluas 756.628 ha (8,72%). Kabupaten dengan kenaikan tercepat dalam status terlampaui yaitu Kota Pagar Alam seluas 22.410 ha (35,34%), Kota Palembang seluas 17.173 ha (47,06%), dan Kabupaten Ogan Ilir seluas 40.785 ha (17,95%).



Gambar 2. 18 Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Tahun 2045

Tabel 2. 13 Daya Dukung Daya Tampung Air Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2045

Kabupaten/Kota	DDDT Air								
	Kebutuhan Air pada Lahan (M3/Tahun)	Kebutuhan Air Domestik	Kebutuhan Air Total (M3/Tahun)	Ketersediaan Air (M3/Tahun)	Selisih (M3/Tahun)	Belum Terlampaui		Terlampaui	
						Luas (Ha)	Luas (%)	Luas (Ha)	Luas (%)
Banyuasin	7.807.895.849	95.796.691	7.903.692.540	12.726.760.774	4.823.068.234	1.006.892	80,68%	241.164	19,32%
Empat Lawang	1.280.569.243	34.652.534	1.315.221.778	2.342.404.465	1.027.182.688	214.818	92,50%	17.430	7,50%
Kota Lubuklinggau	184.982.559	27.260.842	212.243.401	352.090.988	139.847.588	35.438	96,51%	1.282	3,49%
Kota Pagar Alam	421.073.129	14.052.701	435.125.829	668.352.163	233.226.333	41.003	64,66%	22.410	35,34%
Kota Palembang	110.485.928	170.783.597	281.269.525	327.638.559	46.369.034	19.319	52,94%	17.173	47,06%
Kota Prabumulih	212.324.691	22.053.341	234.378.032	501.597.020	267.218.988	47.826	100,00%		0,00%
Lahat	2.062.617.688	53.463.197	2.116.080.884	4.354.397.420	2.238.316.536	401.362	94,75%	22.239	5,25%
Muara Enim	3.049.435.898	65.946.787	3.115.382.685	7.302.742.929	4.187.360.244	661.983	97,45%	17.344	2,55%
Musi Banyuasin	6.333.847.150	68.297.990	6.402.145.141	13.720.490.689	7.318.345.548	1.381.790	96,71%	47.053	3,29%
Musi Rawas	2.706.152.244	37.718.611	2.743.870.855	6.609.302.542	3.865.431.687	596.526	97,34%	16.314	2,66%
Musi Rawas Utara	2.395.845.404	20.569.334	2.416.414.738	6.794.822.661	4.378.407.923	577.953	97,23%	16.486	2,77%
Ogan Ilir	1.830.110.478	48.826.454	1.878.936.933	2.552.407.573	673.470.640	186.409	82,05%	40.785	17,95%
Ogan Komering Ilir	8.283.211.550	86.581.440	8.369.792.990	17.075.698.730	8.705.905.739	1.520.014	89,34%	181.403	10,66%
Ogan Komering Ulu	1.645.290.617	39.120.451	1.684.411.068	3.927.762.990	2.243.351.922	374.793	99,48%	1.975	0,52%
Ogan Komering Ulu Selatan	1.862.079.952	27.950.314	1.890.030.266	4.581.573.091	2.691.542.825	429.479	98,00%	8.758	2,00%
Ogan Komering Ulu Timur	2.918.353.194	84.937.075	3.003.290.269	4.251.853.148	1.248.562.879	255.258	74,57%	87.039	25,43%
Penukal Abab Lematang Ilir	971.888.332	95.796.691	7.903.692.540	12.726.760.774	4.823.068.234	1.006.892	80,68%	241.164	19,32%
Grand Total	44.076.163.905	921.560.198	44.997.724.104	89.861.218.593	44.863.494.489	7.917.180	91,28%	756.628	8,72%

[illegible]

Tabel 2. 15 Daerah Irigasi di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015

Tabel 2. 16 Daerah Irigasi Rawa di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

No.	Nama Daerah Irigasi Rawa (DIR)	Luasan (Ha)
Kabupaten Banyuasin		
1	D.I.R. Air Saleh	17.011
2	D.I.R. Air Senda	4.711
3	D.I.R. Delta Air Sugihan Kiri	34.690
4	D.I.R. Delta Cinta Manis	5.554
5	D.I.R. Delta Upang	5.896
6	D.I.R. Gasing Puntian	4.830
7	D.I.R. Ka. Agung Hilir	9.777
8	D.I.R. Karang Agung I	6.300
9	D.I.R. Kr. Agung Tengah	4.001
10	D.I.R. Kumbang Padang	4.268
11	D.I.R. Padang Sugihan	10.200
12	D.I.R. Pulau Rimau	28.184
13	D.I.R. Telang I	18.676
14	D.I.R. Telang II	9.660
Kabupaten Musi Banyuasin		
15	D.I.R. Air Tenggulang	6.156
16	D.I.R. Kr. Agung Hilir	6.350
17	D.I.R. Kr. Agung II/Tengah	17.000
Kab. Ogan Ilir		
18	D.I.R. Lbk. Tanjung Seteko	3.876
19	D.I.R. Ogan Keramasan I + II	9.660
Kabupaten Ogan Komering Ilir		
20	D.I.R. M. Gajah Mati	5.950
21	D.I.R. Sugihan Kanan	20.885
22	D.I.R. Sungai Lumpur	3.500
Jumlah		237.133

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015

Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015, memiliki luasan total sebesar 41.541 ha untuk Daerah Irigasi dan 49.509 ha untuk Daerah Irigasi Rawa. Pada tahun 2023, Kondisi Jaringan Daerah Irigasi Permukaan kewenangan Provinsi Sumsel 2023 dengan kondisi baik 77,53%, rusak berat 4,45%.

**Tabel 2. 17 Kondisi Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi
di Sumatera Selatan Tahun 2023**

No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (Ha)	Kondisi (%) TA 2023			
		Daerah Irigasi	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Kabupaten Empat Lawang						
1	D.I. Air Keban	1.500	79,93	10,75	9,32	0,00
Kabupaten Lahat						
2	D.I. Air Gohong	1.200	70,29	19,05	10,66	0,00
3	D.I. Air Makim	1.000	100,00	0,00	0,00	0,00
4	D.I. Air Manna I	1.500	91,06	7,83	1,11	0,00
5	D.I. Air Merendang	1.341	95,22	4,78	0,00	0,00
6	D.I. Air Mulak	1.645	0,00	0,00	0,00	100,00
7	D.I. Air Pangi	1.001	75,88	16,08	8,04	0,00
8	D.I. Masam Bulau	1.500	98,29	1,71	0,00	0,00
9	D.I. Tebing Panjang	1.256	100,00	0,00	0,00	0,00
Kabupaten Muara Enim						
10	D.I. Ataran Sungai Air Deras (Cahaya Alam)	1.000	62,58	21,00	12,76	3,67
11	D.I. Danau Tampang	2.690	49,44	25,00	22,75	2,80
12	D.I. Endikat Bengkok /T.Bute	1.500	74,05	24,47	1,48	0,00
13	D.I. Lecah Paye	1.295	46,33	22,01	15,05	16,62
14	D.I. Tunggul Bute	2.400	51,00	25,00	15,16	8,84
Kabupaten Musi Rawas						
15	D.I. Air Deras I	1.461	91,15	7,37	1,48	0,00
16	D.I. Air Gegas	2.300	60,00	24,43	12,47	3,10
17	D.I. Air Satan	1.175	84,19	11,22	4,59	0,00
18	D.I. Megang Tikip	1.077	70,20	23,92	5,87	0,00
Kota Pagaram						
19	D.I. Air Merah	1.500	58,00	21,00	13,13	7,88
20	D.I. Pasemah	1.107	90,70	9,30	0,00	0,00
21	D.I. Selangis Besar/ Jemair	1.020	86,49	13,51	0,00	0,00
22	D.I. Selangis Kecil	1.352	58,00	25,35	11,26	5,38
Kabupaten OKU Selatan						
23	D.I. Air Pius	1.600	100,00	0,00	0,00	0,00
24	D.I. Air Sungkai	1.500	100,00	0,00	0,00	0,00
25	D.I. Air Sunur	1.701	100,00	0,00	0,00	0,00
Kabupaten OKU Timur						
26	D.I. Air Gilas	1.050	58,00	21,00	13,00	8,00
27	D.I. Lebak Datuk	2.102	99,45	0,55	0,00	0,00
28	D.I. Lebak Semendawai	1.768	63,04	19,27	10,89	6,80
	Jumlah	41.541	77,53	12,70	5,33	4,45

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Kondisi jaringan irigasi rawa kewenangan provinsi di Sumatera Selatan pada tahun 2023 dengan kondisi baik sebesar 15,69% dan rusak berat sebesar 84,31%.

Tabel 2. 18 Kondisi Jaringan Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Nama Daerah Irigasi Rawa (DIR)	Luas DIR (Ha) (Permen PUPR No. 14 Tahun 2015)	Kondisi (%) TA 2023			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Kabupaten Muara Enim						
1	D.I.R Air Putak	1.200	0,00	0,00	0,00	100,00
Kabupaten Musi Banyuasin						
2	D.I. R Bailangu	2.150	0,00	0,00	0,00	100,00
3	D.I. R Buntiale	2.000	0,00	0,00	0,00	100,00
4	D.I. R Danau Cala	1.769	5,65	0,00	0,00	94,35
5	D.I.R Lumpatan	1.300	0,00	0,00	0,00	100,00
6	D.I.R Pinang Banjar	1.000	47,82	0,00	0,00	52,18
7	D.I.R Rantau Panjang	1.922	0,00	0,00	0,00	100,00
Kabupaten Banyuasin						
8	D.I.R Rantau Bayur	1.500	0,00	0,00	0,00	100,00
Kabupaten Ogan Illir						
9	D.I.R Lbk Bakung	2.975	0,00	0,00	0,00	100,00
10	D.I.R Lbk Lorok	1.681	0,00	0,00	0,00	100,00
11	D.I.R Lbk Parit	1.575	0,00	0,00	0,00	100,00
12	D.I.R Lbk Purna Jaya	2.002	0,00	0,00	0,00	100,00
13	D.I.R Lbk Tj Pering	2.559	25,43	0,00	0,00	74,57
14	D.I.R Lbk Palas	2.450	46,16	0,00	0,00	53,84
15	D.I.R Lbk Tiang Bilik	1.750	0,00	0,00	0,00	100,00
Kabupaten Ogan Komering Illir						
16	D.I.R Bumi Agung	1.750	46,63	0,00	0,00	53,37
17	D.I.R Doros	1.400	17,86	0,00	0,00	82,14
18	D.I.R Jejawi	1.400	100,00	0,00	0,00	0,00
19	D.I.R Mesuji Illir/ S. Buaya	2.916	0,00	0,00	0,00	100,00
20	D.I.R Pancur	2.450	10,20	0,00	0,00	89,80
21	D.I.R Sangkaji	1.400	83,29	0,00	0,00	16,71
22	D.I.R Suka Pulih	1.750	24,99	0,00	0,00	75,01
23	D.I.R Ulak Jerman/Jermal	1.050	9,52	0,00	0,00	90,48

No	Nama Daerah Irigasi Rawa (DIR)	Luas DIR (Ha) (Permen PUPR No. 14 Tahun 2015)	Kondisi (%) TA 2023			
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Kab. OKU Timur						
24	D.I.R Lebak Datuk	1.960	0,00	0,00	0,00	100,00
25	D.I.R Lebak Pauh	2.100	0,00	0,00	0,00	100,00
26	D.I.R Lebak Semendawai	1.400	70,71	0,00	0,00	29,29
27	D.I.R Lebak Tobong	2.100	0,00	0,00	0,00	100,00
	Jumlah	49.509	15,69	0,00	0,00	84,31

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Berikut ini rekapitulasi Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015.

Tabel 2. 19 Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah D.I.	Luasan Total (Ha)
1	Kab. Empat Lawang	18	5.614
2	Kab. Lahat	214	13.348
3	Kab. Muara Enim	241	24.327
4	Kab. Musi Rawas	43	7.203
5	Kab. Ogan Komering Ulu	34	3.824
6	Kab. OKU Selatan	41	5.179
7	Kab. OKU Timur	1	650
8	Kota Lubuklinggau	5	1.529
9	Kota Pagar Alam	99	5.025
	Jumlah		66.699

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015

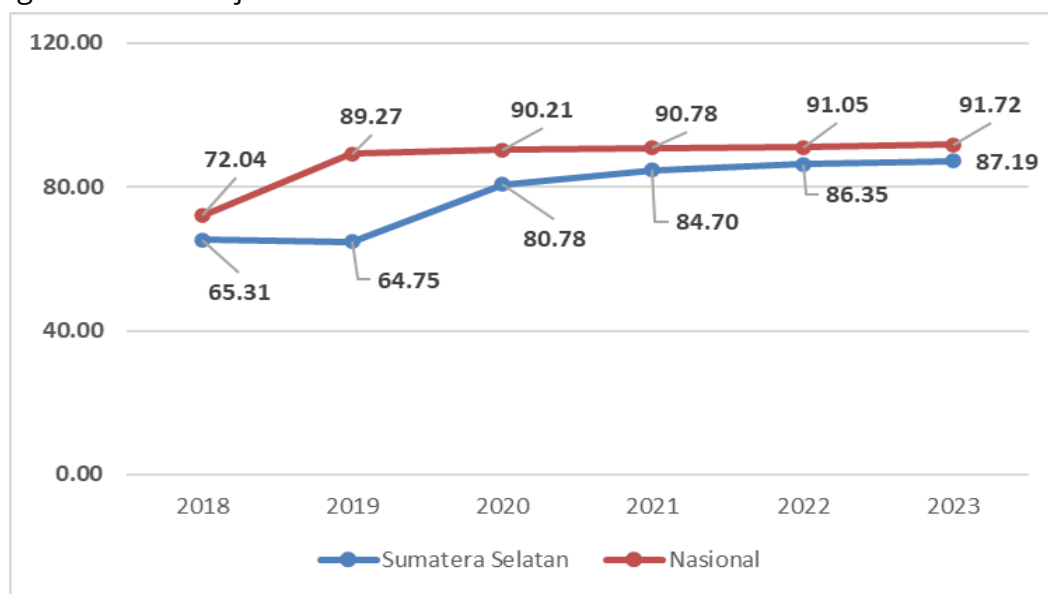
Tabel 2. 20 Rekapitulasi Luasan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah D.I.R	Luasan Total (Ha)
1	Kab. Banyuasin	3	2.066
2	Kab. Muara Enim	4	2.757
3	Kab. Musi Banyuasin	56	17.812
4	Kab. Ogan Ilir	50	14.704

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah D.I.R	Luasan Total (Ha)
5	Kab. Ogan Komering Ilir	3	1.019
6	Kab. OKU Timur	1	700
7	Kota Palembang	2	341
	Jumlah		39.398

Sumber: Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015

Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi air yang sangat besar, baik air permukaan maupun air tanah yaitu sebanyak 89.861.218.593,14 m³ per tahun dengan jumlah sungai utama sebanyak 9 sungai dan lebih dari 1.000 sungai kecil. Dari sisi pemanfaatannya, kebutuhan air di Provinsi Sumatera Selatan yaitu 37.040.269.526,98 m³ per tahun. Berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air setiap tahunnya, maka Provinsi Sumatera Selatan masih memiliki cadangan air sebanyak 52.820.949.066,16 m³ per tahun. Namun, Provinsi Sumatera Selatan juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dan isu yang harus diatasi untuk mengelola sumber daya air ini secara berkelanjutan, terutama tantangan terhadap dampak perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan penggunaan sumber daya air yang tidak berkelanjutan.



Gambar 2. 19 Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumsel, 2023

Berdasarkan Data Susenas BPS, akses rumah tangga terhadap fasilitas air bersih layak di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2019 sebesar 64,75% menjadi 87,19% pada tahun 2023. Pada tahun 2023, akses capaian tertinggi dicapai Kota Lubuklinggau sebesar 97,52% dan

terendah di Kabupaten Empat Lawang sebesar 65,94%. Tantangan yang cukup berat untuk mencapai target RPD 2024- 2026 Sumatera Selatan di tahun 2025 sebesar 89,35 persen.

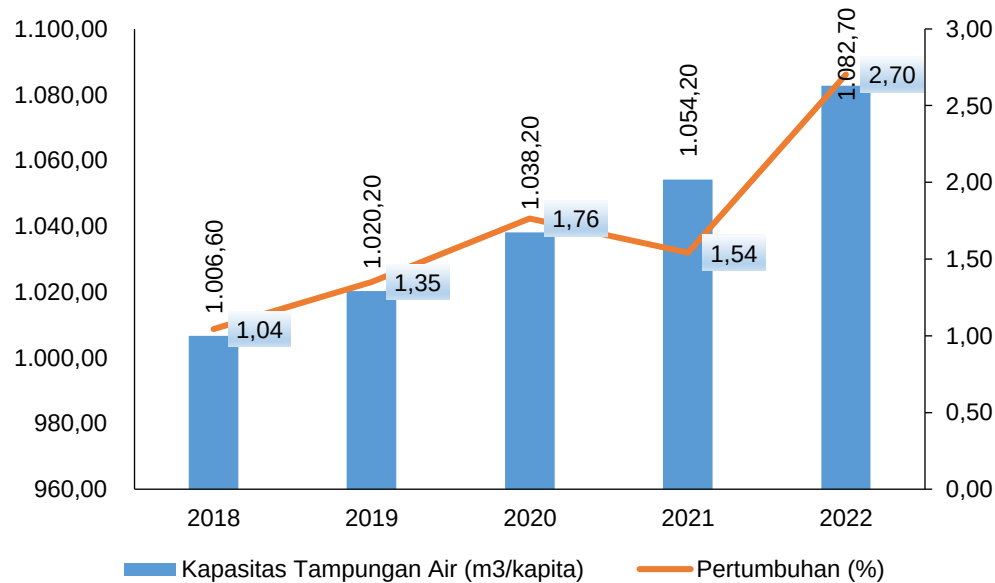
Capaian nasional Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak pada tahun 2023 adalah sebesar 91,72% dimana target yang harus dipenuhi pada akhir periode RPJMN 2020-2024 adalah sebesar 100%. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pusat telah menentukan kegiatan prioritas strategis berupa Akses Air Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) dimana pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha (Sumber: RPJMN 2020-2024). Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan SPAM Regional yaitu jaringan air bersih perpipaan yang melintasi dua Kabupaten/Kota dimana untuk pemenuhan kebutuhan domestik agar masyarakat menikmati air minum berkualitas. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu jarak antarkabupaten yang cukup jauh dan sebagian besar berupa hutan dan rawa.

Tabel 2. 21 Persentase Akses Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Ogan Komering Ulu	67.69	78,98	81.78	82.76	82.33
2	Ogan Komering Ilir	55.67	84,23	79.02	78.52	80.59
3	Muara Enim	60.51	82,15	89.48	91.51	90.78
4	Lahat	47.57	67,44	81.67	84.35	86.16
5	Musi Rawas	67.10	77,08	83.15	93.22	89.34
6	Musi Banyuasin	64.32	84,72	79.37	81.75	85.58
7	Banyu Asin	72.21	70,38	76.97	78.25	80.66
8	Ogan Komering Ulu Selatan	42.77	67,75	77.12	76.52	80.18
9	Ogan Komering Ulu Timur	59.71	89,91	93.32	94.15	96.92
10	Ogan Ilir	55.33	73,08	72.53	71.88	75.10
11	Empat Lawang	21.28	31,41	51.87	64.85	65.94
12	Penukal Abab Lematang Ilir	63.14	83,90	87.49	85.78	91.18
13	Musi Rawas Utara	49.87	73,24	80.33	87.13	86.25
14	Kota Palembang	92.78	92,40	97.43	97.96	96.71
15	Kota Prabumulih	69.54	96,40	93.77	98.42	95.69
16	Kota Pagar Alam	51.78	88,95	93.16	85.76	88.58
17	Kota Lubuklinggau	62.50	97,10	96.10	96.41	97.52
Sumatera Selatan		64.75	80.78	84.70	86.35	87.19
Nasional		89.27	90.21	90.78	91.05	91.72

Sumber : BPS Sumsel, 2023

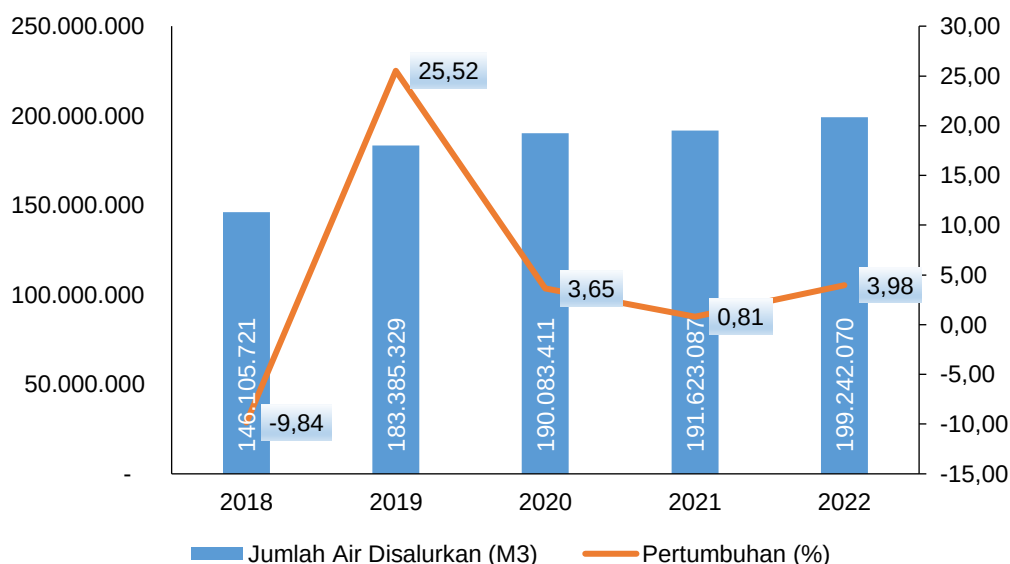
hambatan dalam pembangunan infrastruktur tampungan air seperti pembangunan waduk dan bendungan; dan (3) kesadaran masyarakat dalam penggunaan air yang efisien



Gambar 2. 21 Kapasitas Tampungan Air di Provinsi Sumatera Selatan (m³/kapita), 2018-2022

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2023

Potensi jumlah air disalurkan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 mencapai 199.242.070 m³ meningkat sebesar 3,98 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 191.623.087 m³ pada tahun 2021. Isu potensi jumlah air yang dapat disalurkan berkaitan dengan ketersediaan air dalam suatu wilayah, serta kapasitas infrastruktur dan sistem pengelolaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan air sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti curah hujan, sungai, danau, reservoir, sumber air tanah, dan sumber-sumber air lainnya. Hal ini sangat tergantung dari pembangunan infrastruktur baru di masing-masing wilayah dalam upaya penyediaan sumber air minum layak. Selain itu, ketersediaan air juga tergantung pada variabilitas musiman dan kekurangan pasokan air selama musim kemarau yang dapat memengaruhi pasokan air minum, serta isu lain yang mempengaruhi ketersediaan air seperti pencemaran air dari aktivitas industri, pertanian, dan limbah domestik.



Gambar 2. 22 Jumlah Air Disalurkan di Provinsi Sumatera Selatan (m^3), 2018-2022

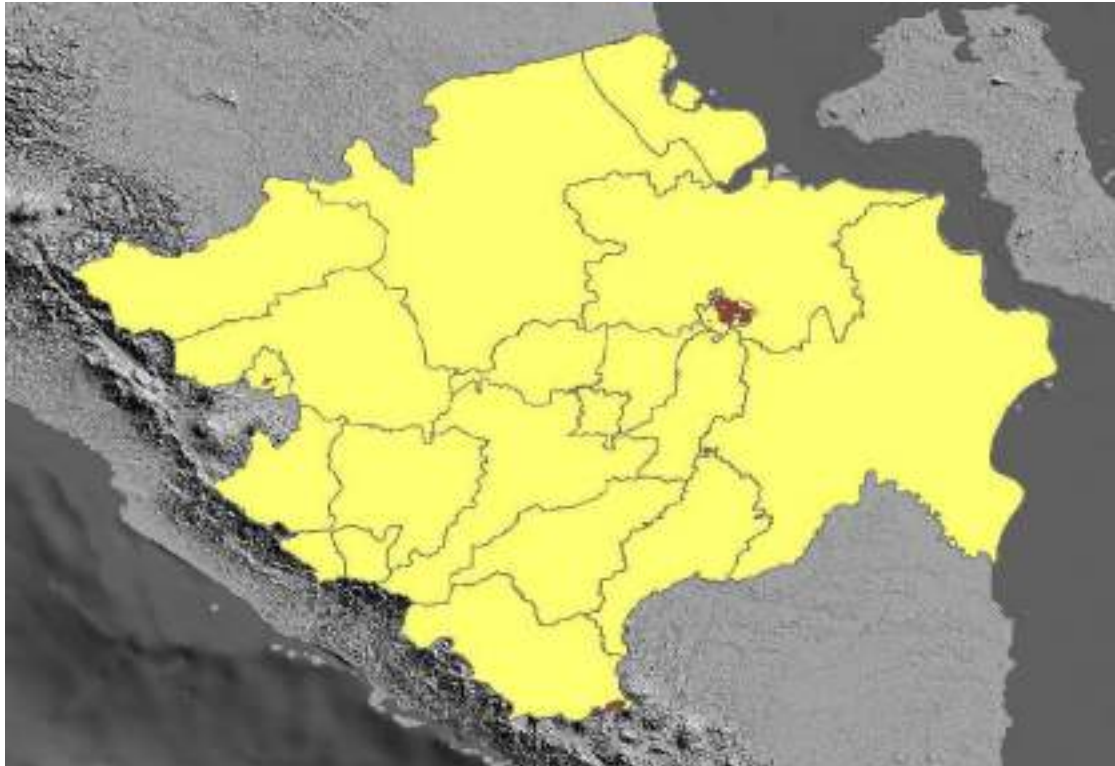
Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2023

2.1.1.4.2 Ketahanan Pangan

Adanya degradasi pada berbagai ekosistem di Sumatera Selatan memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Diantaranya, perubahan iklim membuat kemampuan lahan untuk menyediakan pangan yang bergizi untuk masyarakat menjadi rentan terhadap disrupsi, seperti gangguan hama, menurunnya kesuburan lahan, dan rusaknya hasil panen karena bencana.

Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan pangan di Provinsi Sumatera Selatan cukup tinggi. Pada tahun 2045 diperkirakan sebesar 8.370.305.158.500 Kkal/tahun, kabupaten/kota dengan kebutuhan cukup tinggi sebagian besar berada di Kota Palembang dengan kebutuhan sebesar 1.551.185.504.500 Kkal/tahun. Sementara kebutuhan pangan terendah berada di Kota Pagar Alam dengan jumlah kebutuhan pangan sebanyak 127.637.233.250 Kkal/tahun. Dilhat dari status daya dukung dan daya tampung pangan, Provinsi Sumatera Selatan secara umum masih tergolong aman. Luasan terlampaui di tahun 2045 diproyeksi sebesar 31.281 ha (0,36%), sedangkan luasan yang belum terlampaui 8.842.527 ha (99,64%). Kota dengan status melampaui tertinggi yaitu Kota Palembang dengan luasan 17,602 ha (48,24%).



Gambar 2. 23 Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Tahun 2045

Tabel 2. 22 Daya Dukung Daya Tampung Pangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2045

Kabupaten/Kota	DDDT Pangan						
	Kebutuhan Pangan Domestik (Kkal/tahun)	(Kkal/Tahun)	Selisih (Kkal/Tahun)	Belum Terlampaui		Terlampaui	
				Luas (Ha)	Luas (%)	Luas (Ha)	Luas (%)
Banyuasin	870.057.840.500	74.329.005.896.010	73.458.908.055.510	1.245.811	99,82%	2.244	0,18%
Empat Lawang	314.740.467.250	13.296.266.223.497	12.981.525.756.246	231.949	99,87%	300	0,13%
Kota Lubuk Linggau	247.603.535.250	1.839.267.717.888	1.591.664.182.638	35.317	96,18%	1.403	3,82%
Kota Pagar Alam	127.637.233.250	3.841.714.955.425	3.714.077.722.175	63.342	99,89%	71	0,11%
Kota Palembang	1.551.185.504.500	1.680.397.612.109	129.212.107.609	18.890	51,76%	17.502	48,24%
Kota Prabumulih	200.305.083.250	2.678.555.370.792	2.478.250.287.542	47.826	100,00%		0,00%
Lahat	485.503.098.250	22.925.208.090.294	22.439.615.001.044	423.583	100,00%	17	0,00%
Muara Enim	598.978.466.750	36.382.967.883.950	35.783.989.397.200	679.327	100,00%		0,00%
Musi Banyuasin	620.333.888.500	75.681.517.936.449	75.061.184.047.949	1.425.071	99,74%	3.772	0,26%
Musi Rawas	342.588.890.500	34.114.464.772.739	33.771.875.882.239	612.654	99,97%	186	0,03%
Musi Rawas Utara	185.826.217.250	32.513.209.006.275	32.326.382.789.025	593.746	99,88%	692	0,12%
Ogan Ilir	443.478.704.750	13.657.425.398.046	13.213.946.693.296	227.194	100,00%		0,00%
Ogan Komering Ilir	766.367.975.000	93.447.517.866.578	92.681.119.891.578	1.701.358	100,00%	58	0,00%
Ogan Komering Ulu	355.321.459.250	20.986.071.257.588	20.630.749.798.338	376.768	100,00%		0,00%
Ogan Komering Ulu Selatan	253.865.840.250	25.321.876.834.777	25.068.010.994.527	433.819	98,99%	4.418	1,01%
Ogan Komering Ulu Timur	771.462.613.000	22.603.204.471.931	21.831.741.858.931	341.781	99,85%	517	0,15%
Perukal Abab Lematang Ilir	213.888.321.000	10.146.999.683.534	9.933.111.362.534	184.091	100,00%		0,00%
Grand Total	8.370.305.158.500	485.445.670.986.882	477.075.365.828.382	8.642.527	99,64%	31.281	0,36%

Indeks ketahanan pangan dilihat dari pengukuran 3 (tiga) aspek pangan utama, yakni ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Menggunakan data IKP 2022 dari Kementerian Pertanian, secara umum Sumatera Selatan masuk ke kategori provinsi dengan status “Tahan” dan masih di atas Provinsi Riau. Meski masuk ke kategori yang cukup baik, namun Sumatera Selatan termasuk provinsi dengan status “Tahan” yang paling rendah. Oleh karena itu, perlu dioptimalkan penggunaan lahan pertanian guna meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Terlebih lagi, fokus pada pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan dan gizi diperlukan guna pencapaian TPB, terutama tujuan 1 (tanpa kemiskinan) dan tujuan 2 (tanpa kelaparan) (Gambar 2.24).



Gambar 2. 24 Peta Indeks Ketahanan Pangan Pulau Sumatera

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2022 (diolah)

Ketahanan pangan di antara kabupaten/kota menggambarkan bahwa ketahanan pangan di Sumatera Selatan sudah baik, namun ada beberapa kabupaten hingga kecamatan yang perlu menjadi fokus penanganan kerawanan pangan pada periode berikutnya. Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Banyuasin, Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir memiliki Indeks Ketahanan Pangan yang lebih tinggi, sedangkan Kota Pagar Alam memiliki nilai Indeks Ketahanan Pangan yang paling rendah. Diperlukan upaya untuk meningkatkan dan meratakan resiliensi pangan di Sumatera Selatan, utamanya kabupaten/kota di daerah Barat dan kabupaten/kota dengan nilai IKP tinggi perlu dipertahankan. Pada wilayah yang memiliki status agak tahan dan tahan perlu mempertahankan penggunaan lahan pertanian agar tetap dapat memenuhi pasokan pangan dengan baik.

Peta ketahanan pangan tahun 2020 menunjukkan mayoritas kecamatan berada dalam rentang kelas tahan dan sangat tahan. Sumatera selatan memiliki

12,8% kecamatan dengan status yang sangat rentan. Kecamatan ini perlu mendapatkan perhatian lebih dalam upaya peningkatan ketahanan pangan. Perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian secara efisien guna meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut.



Gambar 2. 25 Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan per Kabupaten/Kota

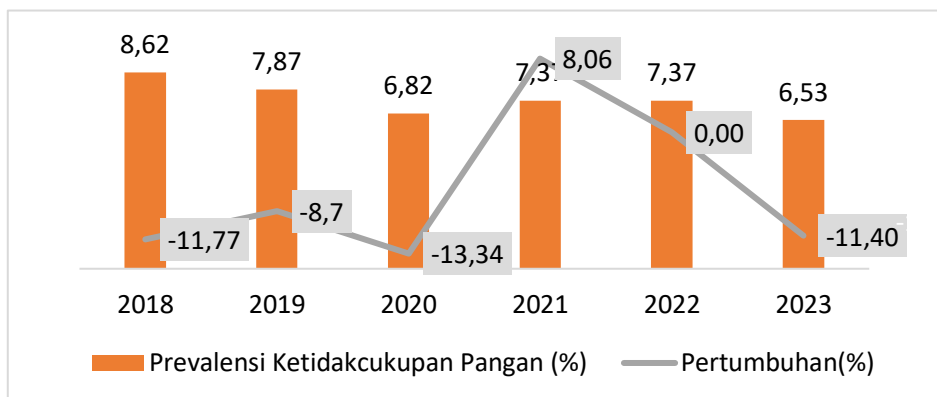
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2022 (diolah)

	Kabupaten/kota	HKP	Skor	Kelas Ketahanan dan kerentanan
1	Kota Palembang	73.83	5	Sangat tahan
2	Ogan Komering Ulu Timur	68.36	6	Sangat tahan
3	Banyuasin	76.30	6	Sangat tahan
4	Musi Rawas Utara	77.27	6	Sangat tahan
5	Ogan Komering Ilir	76.81	6	Sangat tahan
6	Musi Rawas	75.33	5	Tahan
7	Ogan Komering Ulu	74.03	5	Tahan
8	Ogan Komering Ulu Selatan	74.30	5	Tahan
9	Ogan Ilir	71.74	5	Tahan
10	Muara Enim	71.54	5	Tahan
11	Penukal Abab Lematang Ilir	71.31	5	Tahan
12	Lahat	66.83	5	Tahan
13	Kota Prabumulih	60.12	4	Agak tahan
14	Kota Sukalinggau	62.81	4	Agak tahan
15	Empat Lawang	66.02	4	Agak tahan
16	Musi Rawas Utara	60.35	4	Agak tahan
17	Kota Pagar Alam	47.09	3	Agak rentan

Gambar 2. 26 Peringkat Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2020

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2022 (diolah)

Aspek ketahanan pangan dapat diukur dari prevalensi ketidakcukupan pangan, berdasarkan data Susenas, prevalensi ketidakcukupan pangan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 (data termutakhir) mencapai 6,53%. Angka ini lebih rendah dari prevalensi ketidakcukupan pangan nasional yang mencapai 8,53% tahun 2023.



Gambar 2. 27 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (%), 2018-2023

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2024

Ketahanan pangan sangat rentan terhadap tingkat inflasi terutama inflasi pangan. Inflasi pangan secara umum didorong oleh kenaikan harga pangan terutama beras. Beras penyumbang inflasi tertinggi di Sumatera Selatan. Meningkatnya inflasi pangan berdampak pada menurunnya daya beli, dan akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Salah satu indikator dalam indeks ketahanan pangan (IKP) adalah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Di sisi lain, Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi pangan yang sangat besar. Luas lahan pertanian mencapai ± 1,5 juta ha, dengan komoditas unggulan berupa tanaman padi, palawija, dan perkebunan. Luas panen tanaman pangan padi di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 516.259,59 ha pada 2022 (data termutakhir) meningkat sebesar 4,03% dari tahun sebelumnya yang seluas 496.241,65 ha pada 2021.

Tabel 2.23 menyajikan data produktivitas tanaman pangan dan Palawija dimana rata-rata sebagian besar komoditas mengalami pertumbuhan produktivitas yang positif dalam 5 (lima) tahun terakhir (2019-2023). Komoditi yang mengalami pertumbuhan produktivitas yang signifikan adalah komoditi Kacang Hijau yaitu sebesar 35,44% selama 5 (lima) tahun terakhir. Sementara, komoditi Jagung dan Kacang Tanah yang mengalami produktivitas yang negatif yaitu masing-masing sebesar -1,04% dan -1,07%. Perhitungan produktivitas komoditi tanaman pangan dan palawija ini sangat tergantung keakuratan hasil survei ubinan yang didasari pada dua faktor utama: (i) luas lahan yang ditanami; dan (ii) hasil panen dari lahan sampel yang dipilih secara acak.

Tabel 2. 23 Produktivitas Tanaman Pangan dan Palawija di Provinsi Sumatera Selatan (kuintal/ha), 2019-2023

Komoditi	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan (%)
Padi	48,27	49,75	51,44	54,06	56,19	1,85
Jagung	61,91	67,60	64,17	71,05	63,36	-1,04
Kedelai	15,97	15,80	15,81	13,28	14,65	5,10
Kacang Tanah	19,75	15,58	13,83	14,42	15,47	-1,07
Kacang Hijau	2,73	7,23	6,07	7,47	8,54	35,44
Ubi Kayu	378,75	356,22	385,63	360,32	365,16	3,55
Ubi Jalar	199,66	265,75	245,04	247,83	240,27	3,85

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2024

Tanaman pangan utama seperti padi memiliki produktivitas mencapai 56,19 kuintal/ha pada tahun 2023, meningkat sebesar 3,94% dari tahun sebelumnya yang mencapai 54,06 kuintal/ha pada 2022. Sementara itu, wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan produktivitas tertinggi pada tahun 2023 adalah Kabupaten OKU Timur yaitu sebesar 67,19 kuintal/ha, daerah dengan produktivitas padi terendah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yaitu sebesar 43,9 kuintal/ha pada 2023.

Tabel 2. 24 Produksi Tanaman Pangan dan Palawija di Provinsi Sumatera Selatan (ton), 2019-2023

Komoditi	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan (%)
Padi	2,603,396	2,743,060	2,552,443	2,775,069	2,762,060	-1.28
Jagung	859,846	927,757	954,025	1,012,791	826,836	-3.74
Kedelai	16,022	1,066	402	39	48.79	-43.15
Kacang Tanah	5,090	2,331	1,712	1,491	1,566	9.82
Kacang Hijau	105	453	320	209	219.51	44.12
Ubi Kayu	176,741	154,975	307,088	242,044	184,875	3.86
Ubi Jalar	17,069	26,155	28,445	29,891	27,974	11.38

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2024

Sementara itu, pertumbuhan produktivitas tanaman palawija pada tahun 2023 seperti komoditi Jagung tumbuh negatif (-10.82%); Kedelai tumbuh positif (10,32%); Kacang Tanah tumbuh positif (7,28%); Kacang Hijau tumbuh positif

(14,32%); Ubi Kayu tumbuh positif (1,34%); dan Ubi Jalar tumbuh negatif (-3,05%) jika dibandingkan tahun sebelumnya pada 2022.

Tabel 2.24 menunjukkan bahwa produksi komoditi tanaman pangan dan palawija di Provinsi Sumatera Selatan mengalami beberapa pertumbuhan yang positif dan negatif selama 2019-2023. Penurunan produksi yang signifikan terdapat pada komoditi Kedelai yang mencapai -43,15% selama 5 (lima) tahun terakhir. Sementara komoditi pangan yang mengalami pertumbuhan positif selama 5 (lima) tahun terakhir adalah komoditi Kacang Tanah (9,82%); Kacang Hijau (44,12%); Ubi Kayu (3,86%) dan Ubi Jalar (11,38%).

Selain itu, komoditas pangan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi yang cukup baik, karena sektor perikanan memiliki peranan bagi pemasukan perekonomian melalui mata pencaharian masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk pangan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 memiliki total produksi tangkapan perikanan mencapai 117.737 ton, ini terdiri perikanan tangkap di laut sebesar 54.277 ton dan perikanan umum daratan sebesar 63.460 ton dari seluruh wilayah kabupaten dan kota, angka ini turun sebesar 6,07% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 25 Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi 2023

Peringkat	Provinsi	IKP	Peringkat	Provinsi	IKP
1	Bali	87,65	18	Sulawesi Tenggara	74,96
2	Jawa Tengah	84,80	19	Kalimantan Utara	74,59
3	DKI Jakarta	83,80	20	Sumatera Selatan	73,82
4	Sulawesi Selatan	83,36	21	Sulawesi Barat	73,03
5	Sumatera Barat	83,22	22	Aceh	72,96
6	DI Yogyakarta	83,17	23	Bengkulu	72,27
7	Jawa Timur	82,46	24	Kalimantan Barat	72,20
8	Jawa Barat	82,19	25	Jambi	72,17
9	Gorontalo	81,63	26	Nusa Tenggara Timur	71,25
10	Lampung	81,56	27	Kep. Bangka Belitung	71,14
11	Kalimantan Selatan	81,26	28	Kalimantan Tengah	68,90
12	Kalimantan Timur	79,29	29	Riau	68,68
13	Banten	78,71	30	Kep. Riau	65,10
14	Sulawesi Utara	77,32	31	Maluku	64,37
15	Nusa Tenggara Barat	76,51	32	Maluku Utara	62,34
16	Sumatera Utara	75,97	33	Papua Barat	47,95
17	Sulawesi Tengah	75,83	34	Papua	42,27

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023

Dilihat dari ketersediaan pangan, Sumatera Selatan memang relatif baik namun dilihat dari keterjangkauan (aksesibilitas) dan pemanfaatan pangan Sumatera Selatan memiliki kerentanan pangan yang tinggi. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Sumatera Selatan tahun 2023 menempati urutan ke 20 dari 34 provinsi. Secara regional IKP Sumatera Selatan masih jauh di bawah Provinsi Sumatera Barat, Lampung, dan Sumatera Utara (Tabel 2.25).

2.1.1.4.3 Perkebunan

Potensi perkebunan di Sumatera Selatan cukup beragam mulai dari karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, dan kakao. Potensi perkebunan khususnya produksi komoditi karet terbesar untuk produksi karet alam di Indonesia. Sumatera Selatan menyumbang 34% produksi karet alam nasional pada 2016. Perkembangan produksi Karet saat ini menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2019-2023, pada tahun 2023 (data termutakhir) produksi karet mencapai 997.303 ton meningkat dari 905.789 ton pada tahun 2018. Secara rill pertumbuhan produksi karet selama 2019-2023 meningkat sebesar 1,14%. Permasalahan yang dihadapi tanaman karet di Sumatera Selatan karena adanya serangan penyakit akar putih dan penyakit gugur daun yang disebabkan oleh jamur yang menyerang daun sehingga berakibat kurangnya jumlah produksi dan kualitas latex atau getah. Selain itu, harga komoditas karet yang tidak stabil bahkan cenderung turun disebabkan kualitas karet yang rendah atau kurang baik, hal ini menyebabkan praktek alih fungsi lahan, sehingga luas lahan berkurang karena konversi lahan dari perkebunan menjadi permukiman yang sejalan dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat.

**Tabel 2. 26 Produksi Tanaman Perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan
(ton), 2019-2023**

Komoditi	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan riil (%)
Karet	905,789	1,215,233	896,000	1,206,192	997,303	1.14
Kelapa Sawit	3,826,784	3,323,671	658,612	3,449,202	3,361,940	61.74
Kelapa	55,367	58,282	56,326	58,039	61,279	1.42
Kopi	181,294	198,945	162,975	206,307	198,015	2.53
Kakao	3,943	3,969	3,489	4,590	2,573	-5.55
Lada	8,677	-	-	-	-	0.00
Lainnya	99,508	85,522	-	116,437	151,082	-13.90

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2023

Tanaman Perkebunan lainnya di Sumatera Selatan yang tumbuh positif adalah kelapa sawit yang secara riil tumbuh sebesar 61.74% selama periode 2018-

2023, demikian juga tanaman kelapa tumbuh sebesar 1,42% serta tanaman kopi yang tumbuh sebesar 2.53% dalam periode yang sama, sementara untuk tanaman perkebunan Lada di Provinsi Sumatera Selatan masih cukup jarang dikembangkan hanya beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Selatan yang cocok untuk budidaya lada seperti Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Empat Lawang, Musi Rawas, Muara Enim, Lahat, dan Kota Pagar Alam tercatat dari jumlah produksi yang stagnan selama tahun 2020-2023

Perkembangan produksi kakao di Sumatera Selatan selama 2019-2023 mengalami penurunan, secara rill tumbuh negatif yaitu sebesar -5,55%. Penurunan ini disebabkan beberapa faktor seperti perubahan iklim dan cuaca, serangan hama dan penyakit tanaman, serta usia tanaman semakin tua. Selain itu, praktik budidaya yang kurang tepat juga dapat menyebabkan penurunan produktivitas, konflik lahan, serta harga jual tandan buah segar (TBS) yang rendah juga dapat mempengaruhi keputusan petani dalam melakukan produksi. Demikian juga produksi komoditi lainnya juga mengalami penurunan selama 2019-2023, secara rill tumbuh negatif yaitu sebesar -13,90% selama periode tersebut.

2.1.1.4.4 Kehutanan

Provinsi Sumatera Selatan memiliki kawasan hutan yang terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Konversi, Hutan Produksi Terbatas, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, Taman Nasional dan Taman Nasional Laut dengan luas total 3.387.791,43 ha. Fungsi kawasan hutan paling luas yaitu kawasan hutan produksi dengan luas sebesar 1.693.963,82 ha atau sebesar 19,52%. Sementara itu, fungsi kawasan hutan yang memiliki luas paling kecil adalah Taman Wisata Alam dengan luas 223,31 ha atau sebesar 0,003%. Fungsi kawasan hutan di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 27 Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Ha)	% terhadap Luas Wilayah Prov.
Hutan Lindung	566.918,41	6,53
Hutan Produksi	1.693.963,82	19,52
Hutan Produksi Konversi	144.873,44	1,67
Hutan Produksi Terbatas	213.817,01	2,46
Suaka Margasatwa	256.126,70	2,95
Taman Wisata Alam	223,31	0,003
Taman Nasional	464.824,05	5,36
Taman Nasional Laut	47.044,70	0,54
Luas Kawasan Hutan	3.387.791,43	39,04
Luas Wilayah Prov. Sumsel	8.676.933,55	100,00

Sumber: SK Pengukuhan Kawasan Hutan No 6.600 Tahun 2021

2.1.1.4.5 Perikanan

Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya perairan sungai dan laut yang cukup besar, namun produksi perikanan budidaya di Provinsi Sumatera Selatan masih cukup jarang dikembangkan dan perlu mendapat perhatian. Tercatat dari Tabel 2.28 bahwa pertumbuhan riil produksi perikanan budidaya mengalami penurunan yaitu sebesar -14,26% selama periode 2017-2022 (data termutakhir).

Produksi perikanan budidaya di beberapa wilayah di Sumatera Selatan juga mengalami penurunan yang signifikan, seperti Kota Pagar Alam sebesar -52.06%, diikuti oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir (-33.64%), Kabupaten Musi Rawas Utara (-33.39%), Kota Lubuklinggau (-30.89%), Kabupaten Musi Banyuasin (-24.26%), Kabupaten Musi Rawas (-17.27%), dan Kota Palembang (-5.30%) selama 2018-2022. Sementara wilayah yang produksi perikanan budidayanya tumbuh signifikan yaitu Kabupaten Lahat yang tumbuh sebesar 74.43%, diikuti oleh Kabupaten Empat Lawang (26.31%), Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (23.07%), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (19.57%), Kabupaten Muara Enim (13.61%), Kabupaten Ogan Komering Ulu (9.95%), Kabupaten Ogan Ilir (4.59%), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (4.20%), Kota Prabumulih (2.28%), dan Kabupaten Banyuasin (2.24%). Peningkatan dan penurunan produksi perikanan budidaya dipengaruhi faktor yang beragam, seperti kondisi geografis, cuaca, teknologi dan informasi pendukung, kualitas air, bibit, lahan dan pengetahuan tentang budidaya perikanan di suatu wilayah.

Tabel 2. 28 Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Sumatera Selatan (ton), 2018-2022

Prov/Kab/Kota	Total Produksi Perikanan Budidaya (Ton)					Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Sumatera Selatan	439,058	472,369	357,138	274,051	249,378	-13.19
Ogan Komering Ulu	416	605	447	465	608	9.95
Ogan Komering Ilir	71,093	93,793	89,276	19,120	13,785	-33.64
Muara Enim	4,964	8,855	7,645	7,959	8,269	13.61
Lahat	35	286	316	315	324	74.43
Musi Rawas	70,334	97,082	78,436	60,874	32,951	-17.27
Musi Banyuasin	80,023	42,193	23,960	25,120	26,340	-24.26
Banyuasin	40,458	59,241	41,423	42,724	44,214	2.24
OKU Selatan	823	3,498	1,180	1,928	1,888	23.07
OKU Timur	44,957	69,027	48,740	49,799	52,999	4.20
Ogan Ilir	7,967	11,171	8,161	8,811	9,533	4.59
Empat Lawang	416	599	877	1,108	1,059	26.31

Prov/Kab/Kota	Total Produksi Perikanan Budidaya (Ton)					Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	
PALI	251	723	522	573	513	19.57
Musi Rawas Utara	6,212	237	700	1,246	1,223	-33.39
Palembang	61,494	77,723	49,851	47,941	49,448	-5.30
Prabumulih	603	774	772	862	660	2.28
Pagar Alam	32,041	2,198	1,548	1,605	1,693	-52.06
Lubuklinggau	16,972	4,365	3,284	3,601	3,871	-30.89

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2023

2.1.1.4.6 Industri

Industri Provinsi Sumatera Selatan memiliki peranan yang sangat baik terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Selatan, berada pada posisi ke-2 setelah sektor pertambangan. Industri Provinsi Sumatera Selatan terbagi menjadi 2 kategori, yaitu industri besar sedang (IBS) dan industri menengah kecil (IMK). Klasifikasi industri tahun 2021 (data termutakhir) menunjukkan total IBS sebanyak 243 unit usaha dan IMK sebanyak 79.114 dengan industri makanan mendominasi IBS dan IMK di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2. 29 Klasifikasi Industri Besar Sedang dan Industri Menengah Kecil tahun 2021

No	Klasifikasi Industri	IBS	IMK
1	Makanan	105	25.795
2	Minuman	14	2.123
3	Tekstil	2	19.823
4	Pakaian Jadi	3	6.511
5	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	16	6.471
6	Kertas dan Barang dari kertas	5	1
7	Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	6	878
8	Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	5	-
9	Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	6	68
10	Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	2	5
11	Karet, Barang dari Karet dan Plastik	37	37
12	Barang Galian Bukan Logam	16	10.779
13	Logam Dasar	-	-
14	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	10	4.332
15	Mesin dan Perlengkapan YTDL	-	45

No	Klasifikasi Industri	IBS	IMK
16	Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	1	12
17	Alat Angkutan Lainnya	1	108
18	Furnitur	9	1.837
19	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	5	289
Jumlah		243	79.114

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2022

2.1.1.4.7 Pariwisata

Sumatera Selatan merupakan provinsi yang memiliki daya tarik yang lengkap, mulai dari daya tarik alam, sejarah dan budaya hingga daya tarik buatan. Daya tarik memiliki pengaruh dalam meningkatnya kunjungan wisatawan ke suatu daerah. Kunjungan wisatawan dalam negeri maupun luar negeri setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan kunjungan yang disebabkan terjadinya pandemi covid-19. Pada tahun 2021 kunjungan wisatawan ke Provinsi Sumatera Selatan mulai meningkat kembali, hal ini tentunya tidak terlepas dari daya tarik unggulan yang dimiliki Sumatera Selatan.

Tabel 2. 30 Daya Tarik Unggulan Provinsi Sumatera Selatan

No	Daya Tarik Unggulan	Kabupaten/Kota
1	Bukit Sulap	Lubuklinggau
2	Danau Ranau	Ogan Komering Ulu Selatan
3	Gunung Dempo	Pagar Alam
4	Hutan Punti Kayu	Palembang
5	Sungai Musi	Palembang
6	Benteng Kuto Besak	Palembang
7	Jembatan Ampera	Palembang
8	Kampung Kapiten 7 Ulu	Palembang
9	Klenteng 9 Ulu	Palembang
10	Masjid Agung	Palembang
11	Museum Balaputra Dewa	Palembang
12	Pulo Kemaro	Palembang
13	Rumah Rakit	Palembang
14	Pusat Kerajinan Songket 32 Ilir	Palembang
15	Situs Candi Bumiayu	Muara Enim

Sumber: Ripparprov Sumatera Selatan 2015 – 2025

2.1.1.4.8 Pertambangan

Pertambangan Provinsi Sumatera Selatan memiliki kontribusi yang sangat baik terhadap perekonomian wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pertambangan Sumatera Selatan meliputi mineral logam, panas bumi, dan batu bara. Provinsi Sumatera Selatan juga kaya akan sumber daya non logam, juga minyak dan gas bumi. Hal tersebut dapat dilihat dari cadangan terbukti SDA yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2. 31 Potensi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Selatan

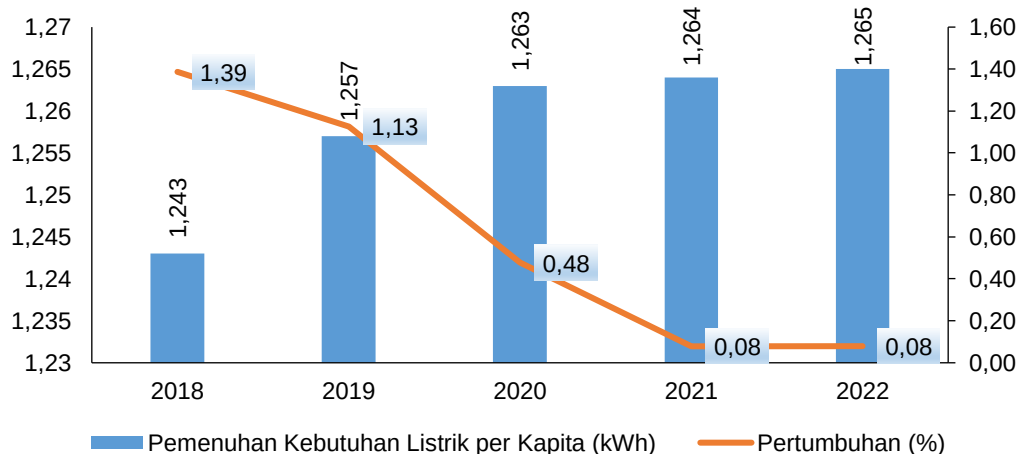
Sumber Daya Alam	Potensi Cadangan	Cadangan Tereka/Mungkin	Cadangan Terbukti
Mineral Logam	Besi Primer	1.131.840,00	0
Mineral Logam	Emas Primer	8,87	0,21
Mineral Logam	Perak	55,66	1,12
Mineral Logam	Seng	165,648	0
Mineral Logam	Tembaga	29	0
Mineral Logam	Timbal	19,488	122,792862
Panas Bumi	Panas Bumi Bukit Lumut Balai (Operasi)	0	110
Panas Bumi	Panas Bumi Lawang	55	0
Panas Bumi	Panas Bumi Marga Bayur	111	0
Panas Bumi	Panas Bumi Rantau Dedap - Segamit	49	92
Panas Bumi	Panas Bumi Tanjungsakti	80	0
Panas Bumi	Panas Bumi Ulu Danau	0	0
Panas Bumi	Panas Bumi Way Selabung	68	0
Batu Bara	Eksplorasi	13.867,33	-
Batu Bara	Evaluasi Potensi	13,38	-
Batu Bara	Konstruksi	81,24	-
Batu Bara	Operasi Produksi	29.378,47	-
Batu Bara	Propeksi	352,49	-
Batu Bara	Survei Tinjau	329,93	-
Minyak & Gas Bumi	Minyak Bumi	63,84	391,98
Minyak & Gas Bumi	Gas	901,02	4.428,26
Mineral Non Logam	Andesit	256.550.000	-
Mineral Non Logam	Granit	-	-
Mineral Non Logam	Marmer	-	-
Mineral Non Logam	Sirtu	210.000	-
Mineral Non Logam	Tras	1.650.000	-
Mineral Non Logam	Felspar	2.216.000	1.299.200
Mineral Non Logam	Kaolin	-	-

Sumber Daya Alam	Potensi Cadangan	Cadangan Tereka/Mungkin	Cadangan Terbukti
Mineral Non Logam	Lempung	2.594.958.673	15.751.311
Mineral Non Logam	Perlit	-	-
Mineral Non Logam	Toseki	-	-
Mineral Non Logam	Batugamping	861.753.289	235.743.000
Mineral Non Logam	Bentonit	749.000	-
Mineral Non Logam	Pasirkuarsa	1.650.000	-

Sumber: Diolah dari Geoportal ESDM, diunduh tahun 2022

2.1.1.4.9 Ketahanan Energi

Ketahanan energi adalah isu strategis yang penting untuk Sumatera Selatan, dan mencakup sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan dalam rangka menjaga pasokan energi yang andal, berkelanjutan, dan terjangkau. Berdasarkan data dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), pemenuhan kebutuhan listrik per kapita di Sumatera Selatan pada tahun 2022 (data termutakhir) mencapai 1.265 kWh. Angka ini masih lebih rendah dari pemenuhan kebutuhan listrik per kapita nasional yang mencapai 1.332 kWh. Pertumbuhan pemenuhan kebutuhan listrik per kapita di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren yang menurun, pada 2022 tumbuh melambat yaitu sebesar 0.08%.

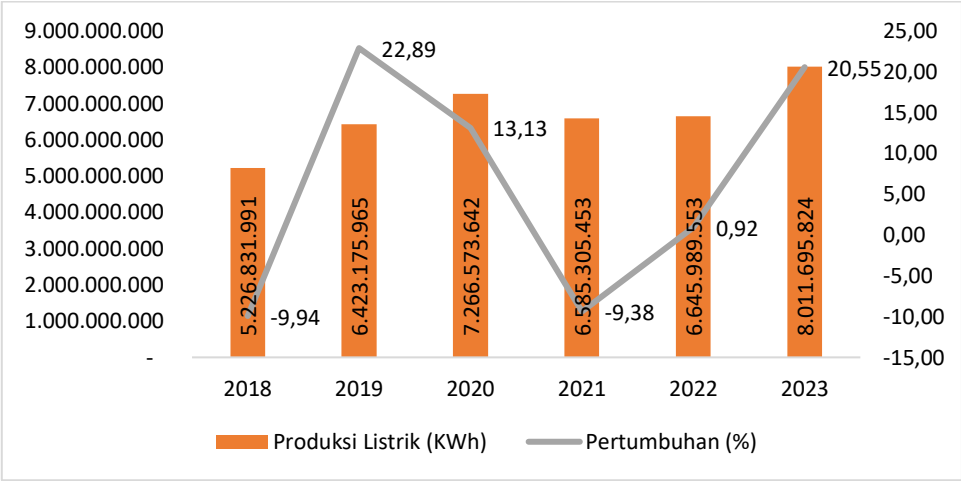


Gambar 2. 28 Pemenuhan Kebutuhan Listrik per Kapita di Provinsi Sumatera Selatan (KWh), 2018-2022

Sumber: Perusahaan Listrik Negara, 2022

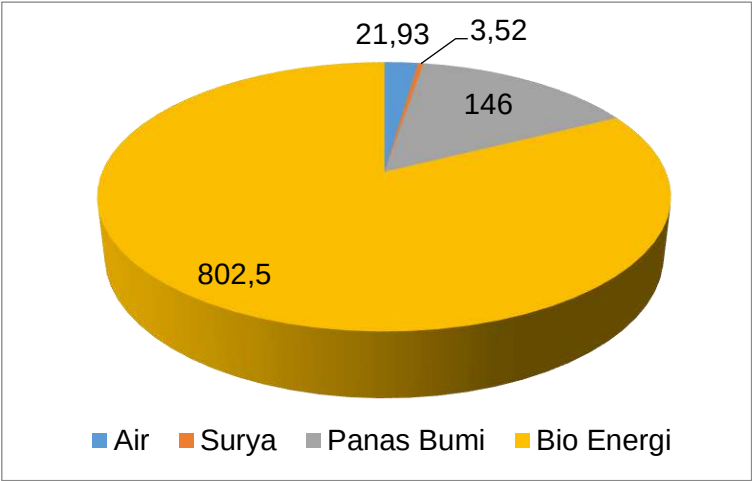
Selain itu, porsi kapasitas pembangkit terbarukan di Sumatera Selatan pada tahun 2022 mencapai 10,2%. Angka ini masih lebih rendah dari target pemerintah Indonesia yang sebesar 23,0% pada tahun 2025 (Perusahaan Listrik Negara, 2022). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi porsi kapasitas pembangkit terbarukan

di Sumatera Selatan yaitu; (1) potensi sumber daya alam untuk pembangkit listrik terbarukan, seperti biomassa, panas bumi, dan energi air; (2) implementasi dukungan kebijakan pemerintah yang menetapkan target bauran energi terbarukan sebesar 23,0% pada tahun 2025; dan (3) tingkat investasi terhadap pembangunan pembangkit listrik terbarukan.



Gambar 2. 29 Produksi Listrik di Provinsi Sumatera Selatan (KWh), 2018-2023
Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2024

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi listrik di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 (data termutakhir) mencapai 8.011.695.824 kWh. Angka ini meningkat sebesar 20,55% dari tahun sebelumnya yang mencapai 6.645.989.533 kWh pada 2022.



Gambar 2. 30 Pemanfaatan dan Pengembangan Aneka Energi Baru Terbarukan
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Provinsi Sumatera Selatan telah mengembangkan energi baru terbarukan yang bersumber dari Air sebesar 21.93 MW, Tenaga Surya sebesar 3,52 MW, panas

bumi dan bio energi masing-masing sebesar 146 MW, dan 802,5 MW. Sebaran aneka energi baru dan terbarukan menyebar di kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan total kapasitas sebesar 973,95 MW.

2.1.1.4.10 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Provinsi Sumatera Selatan memiliki kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada di 2 Kabupaten yaitu Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan materi teknis RZWP3K Tahun 2022, cakupan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Banyuasin mencakup 5 kecamatan pesisir dari 19 kecamatan, yaitu Kecamatan Banyuasin II, Makarti Jaya, Air Saleh, Muara Telang dan Muara Sugihan, sedangkan untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir juga mencakup 4 kecamatan dari 18 kecamatan, yaitu Kecamatan Air Sugihan, Tanjung Selapan, Cengal dan Sungai Menang. Untuk wilayah perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup perairan Selat Bangka, Laut Cina Selatan dan Laut Jawa.

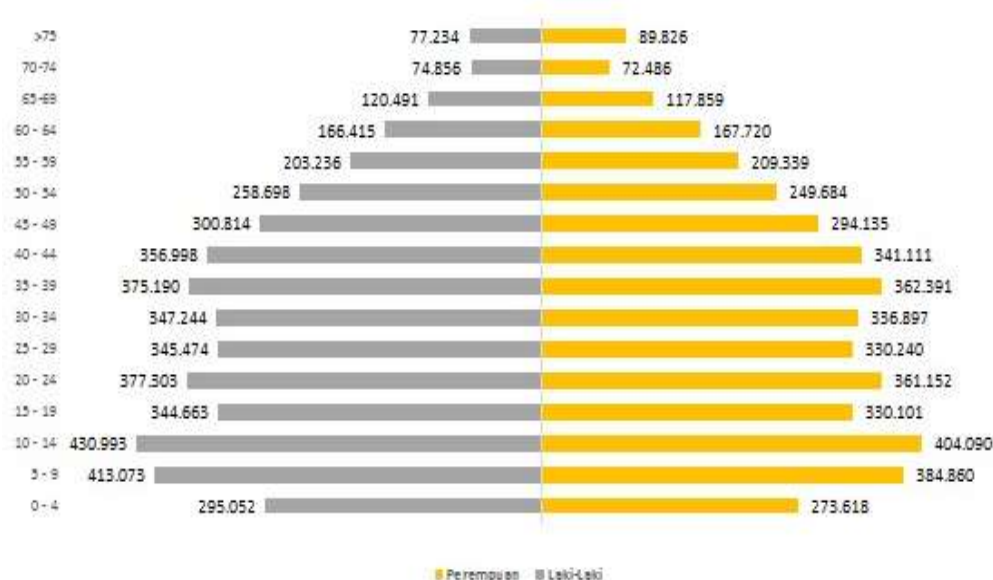


Gambar 2. 31 Peta Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Selatan

2.1.2 Demografi

Penduduk menjadi salah satu pusat dari kebijakan dan program dalam perencanaan pembangunan yang akan dilakukan, penduduk menjadi bagian dari subyek maupun obyek dalam pembangunan. Sebagai subyek dari pembangunan penduduk harus diarahakan dan dikembangkan sehingga dapat menjadi penggerak dalam proses pembangunan. Pembangunan juga harus dapat melihat penduduk sebagai obyek yang akan mendapatkan dampak secara langsung ataupun sebagai penerima manfaat dari proses pembangunan tersebut.

Penduduk Sumatera Selatan pada Juni 2023 (data termutakhir) berjumlah 8.813.243 jiwa telah meningkat 1,12% dibandingkan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 8.281.968 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2015-2022 rata-rata sebesar 1,31%, laju pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian juga migrasi. Tingkat migrasi keluar di provinsi Sumatera Selatan kecil dibandingkan tingkat migrasi masuk yaitu sebesar 228.897 jiwa. Hal ini sejalan dengan peningkatan kepadatan penduduk dari 93,36 orang/km² menjadi 100 orang/km². Berdasarkan kelompok umur menunjukkan adanya bonus demografi yaitu lebih besarnya proporsi penduduk usia kerja (15-64 tahun) terhadap penduduk bukan usia kerja dan mengalami peningkatan sebesar 0,29%.



Gambar 2. 32 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin

Sumber: Ducafil Provinsi Sumatera Selatan, Juni 2023

Perubahan struktur umur penduduk ini diiringi oleh peningkatan produktivitas penduduk usia kerja dari 7,28 miliar per pekerja pada tahun 2020 menjadi 7,64 miliar per pekerja pada tahun 2022 sehingga berdampak terhadap

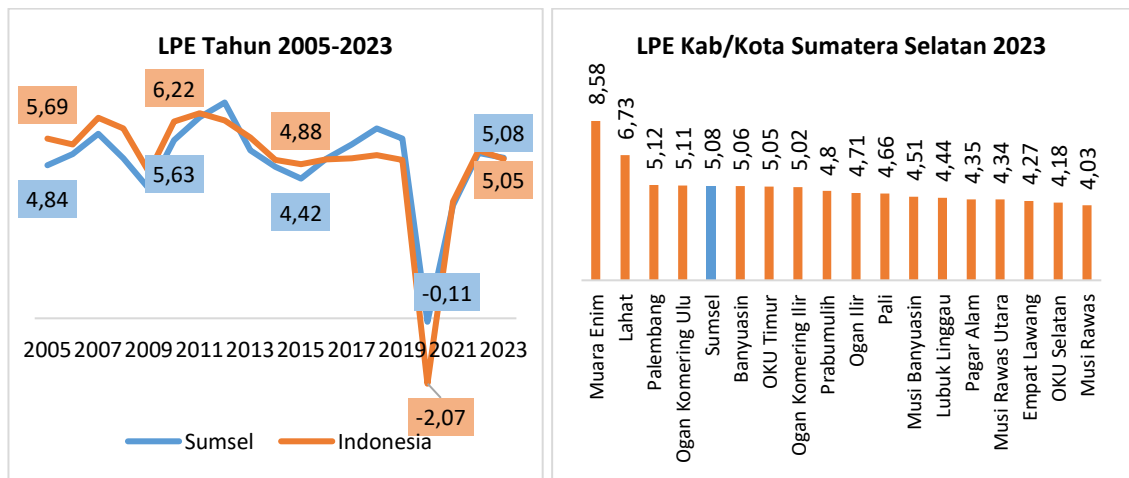
pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan kelompok umur, komposisi penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin tidak berubah signifikan dalam tiga tahun tersebut yaitu 104%. Jumlah penduduk sebagai modal dasar yang berkontribusi dalam kegiatan produksi, ditunjukkan dari bagian penduduk yang berstatus angkatan kerja.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sumatera Selatan dan nasional menunjukkan perkembangan positif sampai tahun 2023 (data termutakhir). Kinerja pertumbuhan ekonomi secara umum cenderung stabil pada interval 4-5% sejak tahun 2005. Namun kondisi terburuk terjadi pada tahun 2020 dimana perekonomian Sumatera Selatan mengalami kontraksi sebesar 0,11% dan nasional terkontraksi sebesar 2,07% akibat adanya pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi kembali menguat sebesar 5,2% pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 mengalami perlambatan yaitu sebesar 5,08%. Secara nasional juga tumbuh positif sebesar 5,31% tahun 2022 dan 5,05% pada tahun 2023. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 terdapat empat kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan di atas angka provinsi yaitu Kabupaten Muara Enim sebesar 8,58%, Kabupaten Lahat sebesar 6,73%, Kota Palembang sebesar 5,12%, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 5,11%, sedangkan kabupaten/kota lainnya memiliki angka pertumbuhan ekonomi di bawah angka provinsi.



Gambar 2. 33 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Sektor unggulan di Sumatera Selatan tahun 2023 yaitu sektor Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Konstruksi. Sektor unggulan tersebut tersebar di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. Sektor pertambangan dan penggalan Sebagian besar berada di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Musi Banyuasin. Sektor pertanian didominasi oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sementara itu, Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang didominasi oleh Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, dan Kab. Ogan Komering Ulu, sedangkan sektor konstruksi dan sektor *real estate* didominasi oleh Kota Lubuklinggau, Kota Pagar Alam dan Kota Prabumulih.

Secara sektor ekonomi, sektor sekunder menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh pada tahun 2023 sebesar 7,48%, dan sektor penyedia akomodasi dan makan minum sebesar 13,14%, serta sektor informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 6,35%. Tren pertumbuhan sektor sekunder dan tersier yang cukup tinggi dalam 10 tahun terakhir mengindikasikan terjadinya transformasi struktur ekonomi. Namun demikian, tingginya pertumbuhan sektor sekunder dan tersier belum diimbangi oleh peningkatan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB (Tabel 2.32).

Sektor tersier terus mengalami peningkatan utamanya sektor yang berbasis digital seperti *e-sport* (olahraga elektronik). Sejak revolusi industri 4,0 pemanfaatan teknologi sangat tinggi sehingga mendorong terjadinya efisiensi. Internet sebagai salah satu sumber informasi didorong untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia. Kecenderungan generasi Z dalam penggunaan internet telah mendorong peningkatan olahraga elektronik. *Sport Development Index* (SDI) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 sebesar 0,352 menempati urutan ke-24 di Indonesia. Beberapa indeks pembentuk SDI masih perlu ditingkatkan seperti Indeks Tingkat Partisipasi Olahraga, dan Indeks Tingkat Kebugaran.

Tabel 2. 32 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral (%)

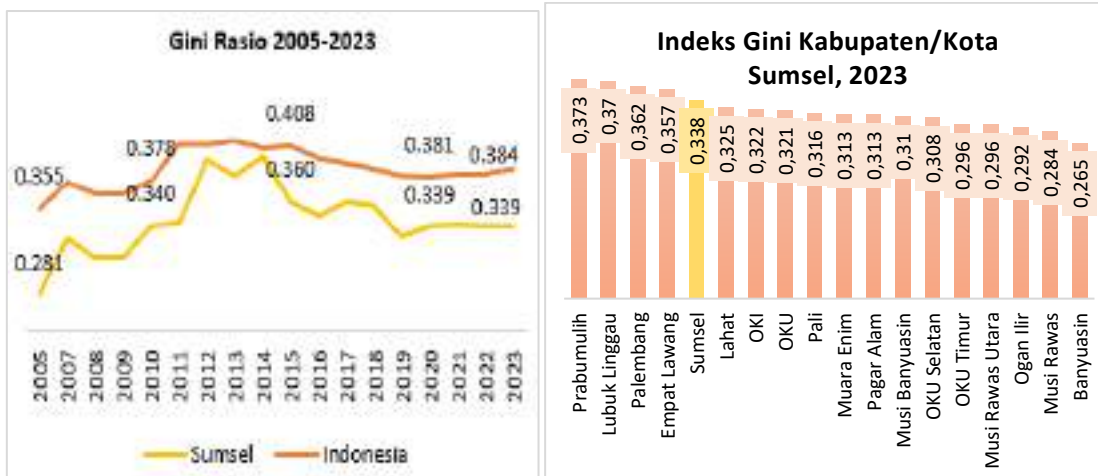
Sektor	2015	2020	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,59	1,75	2,15
Pertambangan dan Penggalan	3,94	-4,08	7,89
Industri Pengolahan	5,40	0,72	3,69
Pengadaan Listrik dan Gas	3,66	14,67	4,4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,67	4,83	0,33
Konstruksi	0,07	-0,01	3,55
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,57	-1,34	7,6

Sektor	2015	2020	2023
Transportasi dan Pergudangan	9,77	-5,91	7,48
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,87	-7,21	13,14
Informasi dan Komunikasi	8,68	12,79	6,35
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,34	1,64	4,6
Real Estate	7,10	2,24	4,28
Jasa Perusahaan	4,41	-2,08	2,03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,49	4,17	3,73
Jasa Pendidikan	7,90	-1,50	2,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,29	10,14	-0,02
Jasa lainnya	4,05	5,23	1,95
Produk Domestik Regional Bruto	4,42	-0,11	5,08

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

2.2.1.2 Gini Rasio

Ketimpangan pendapatan di Sumatera Selatan selama 2005-2023 terlihat memburuk walaupun masih terkategori ketimpangan rendah. Rata-rata gini rasio Sumatera Selatan selama 2005-2023 selalu lebih rendah dibandingkan gini rasio nasional. Gini rasio Sumatera Selatan tahun 2005 (data awal) sebesar 0,281 meningkat menjadi 0,339 pada tahun 2023 (data termutakhir). Komparasi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat empat kab/kota memiliki nilai gini rasio diatas provinsi yakni Kota Prabumulih 0,373; Kota Lubuklinggau 0,37; Kota Palembang 0,362; dan Kabupaten Empat Lawang 0,357. Perbedaan tingkat ketimpangan antarwilayah didasari oleh perbedaan perekonomian, seperti belum terjadi pemerataan pembangunan di setiap daerah sehingga hanya sebagian daerah yang memiliki perekonomian yang baik.



Gambar 2. 34 Gini Rasio Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

2.2.1.3 Nilai Tukar Petani/Nilai Tukar Nelayan

Perkembangan NTP dalam 20 tahun terakhir dari 133,08 pada 2005 (data awal) menurun menjadi 105,10 pada tahun 2023 (data termutakhir), angka ini masih di bawah NTP nasional yaitu 117,76. Angka tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan petani cenderung menurun. Subsektor NTP pada tahun 2023 yang bernilai di bawah 100 adalah tanaman pangan dan hortikultura. Sementara itu, sektor perikanan memiliki nilai tukar petani paling tinggi pada tahun 2023 sebesar 109,91. Nilai tukar petani tidak hanya dipengaruhi oleh harga komoditas, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti kondisi pasar, permintaan konsumen, musim tanam, faktor-faktor alam seperti cuaca, produktivitas, biaya produksi, akses ke pasar, dan kebijakan pemerintah.

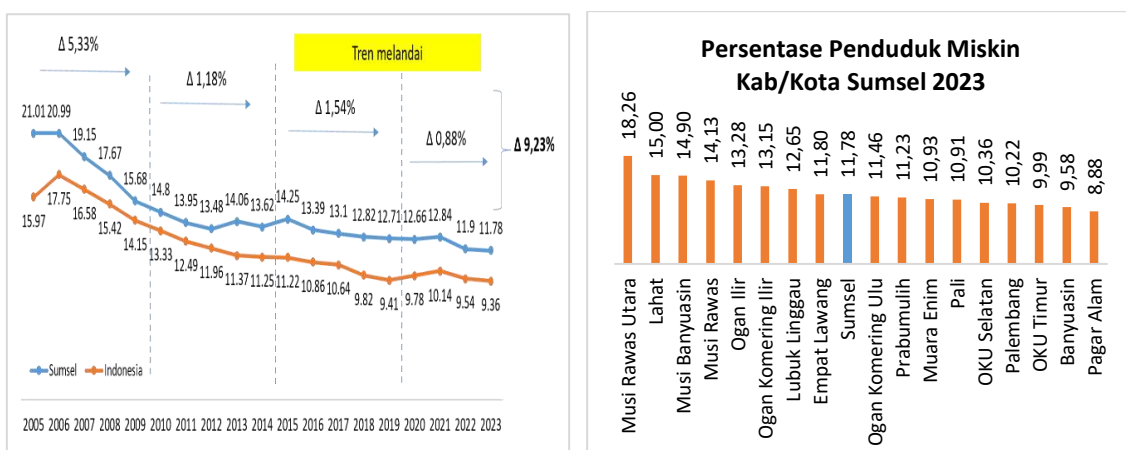
Tabel 2. 33 Nilai Tukar Petani Menurut Sektor di Sumatera Selatan

Nilai Tukar Petani	Perkembangan NTP menurut Sektor				
	2005	2010	2015	2020	2023
Nilai Tukar Petani Umum	133,08	104,91	96,87	95,37	105,10
Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan	135,67	114,26	98,62	98,28	95,54
Nilai Tukar Petani Tanaman Holtikultura	-	115,76	109,04	91,59	96,16
Nilai Tukar Pekebun	128,08	87,14	91,24	94,25	108,55
Nilai Tukar Peternak	-	106,40	104,26	101,94	102,04
Nilai Tukar Perikanan	-	113,30	98,58	97,47	109,91

Sumber: BPS Provinsi Sumsel, 2024

2.2.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Selama tahun 2005 (data awal) sampai dengan 2023 (data termutakhir) tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan sebesar 9,23%. Namun masih berada di atas nasional, tingkat kemiskinan nasional telah mencapai satu digit, tahun 2023 sebesar 9,36%, sedangkan tingkat kemiskinan Sumatera Selatan sebesar 11,78%. Kabupaten yang memiliki kemiskinan tertinggi di atas angka provinsi pada tahun 2023 yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Lahat, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Empat Lawang. Adapun kemiskinan terendah berada pada Kota Pagar Alam.



Gambar 2. 35 Perkembangan Kemiskinan Sumatera Selatan

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Persoalan kemiskinan tidak hanya melihat berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, akan tetapi penting pula melihat dimensi lainnya yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Program yang dilakukan selain mampu mengurangi dan memperkecil jumlah penduduk miskin juga berupaya untuk mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Tabel 2. 34 Indikator Kemiskinan Sumatera Selatan 2010-2023

Indikator	2010	2015	2020	2023
Garis Kemiskinan (Rupiah)	221.687	326.905	439.041	520.754
Indeks Kedalaman Kemiskinan	2.63	2.46	2.08	1,72
Indeks Keparahan Kemiskinan	0.71	0.64	0.48	0,39

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Garis kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 sebesar Rp. 221.687 meningkat mencapai Rp. 520.754 pada tahun 2023. Sementara itu, indeks

kedalaman kemiskinan (rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan) sudah menunjukkan penurunan, pada tahun 2010 sebesar 2,63 menjadi 1,72 pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan tingkat kesejahteraan sudah mulai membaik. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, ini bermakna semakin kecil nilai indeks keparahan kemiskinan, distribusi pendapatan diantara masyarakat miskin semakin merata. Data menunjukkan indeks keparahan kemiskinan semakin menurun, pada tahun 2010 sebesar 0,71 menjadi 0,39 pada tahun 2023.

2.2.1.5 Stunting

Prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 (data awal) sebesar 28,98% menurun menjadi 20,3% di tahun 2023 (data termutakhir). Persentase *stunting* di Sumatera Selatan berada di bawah *stunting* nasional yaitu sebesar 21,5% pada tahun 2023. Daerah dengan angka *stunting* tertinggi yaitu Kabupaten Musi Rawas sebesar 25,40% dan terendah di Kota Pagar Alam yaitu sebesar 11,60%. Penurunan *stunting* terkait erat dengan gizi buruk, dan kecukupan gizi bagi ibu hamil, oleh karena itu penting memfokuskan pada fasilitas kesehatan dan pendidikan masyarakat secara merata dan berkeadilan.



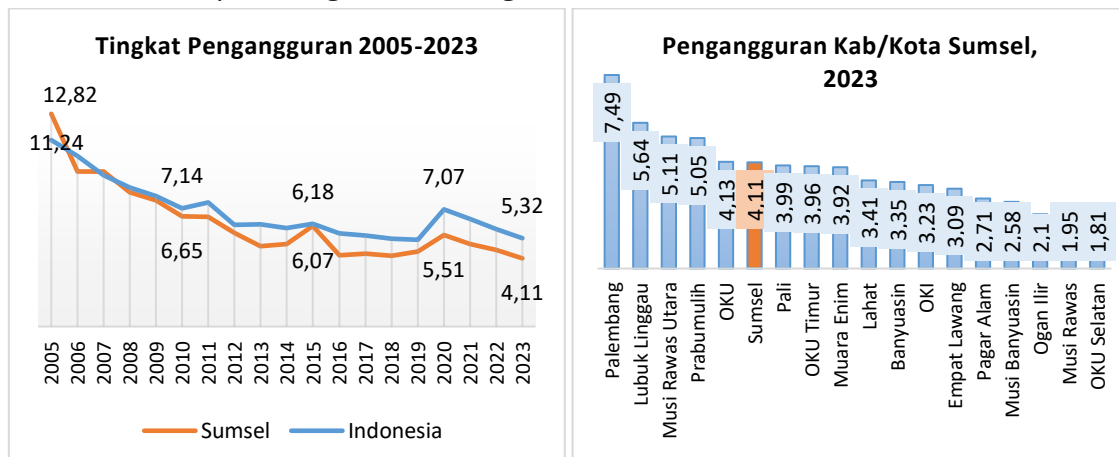
Gambar 2. 36 Stunting di Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2023

2.2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Angka pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Selatan dan nasional pada periode 2005-2023 menunjukkan tren menurun yang signifikan. Perkembangan pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Selatan berhasil diturunkan dari 12,82% tahun 2005 (data awal) menjadi 4,11% tahun 2023 (data termutakhir). Lonjakan tingkat pengangguran sempat terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi

COVID-19. Namun tingkat pengangguran dapat teratasi pada tahun berikutnya, ditunjukkan oleh tren yang mulai melandai dengan angka pengangguran terbuka sebesar 4,11% tahun 2023. Berdasarkan kabupaten/kota angka pengangguran terbuka 2023 tertinggi berada di Kota Palembang sebesar 7,49%, Kota Lubuklinggau (5,64%), Kabupaten Musi Rawas Utara (5,11%), Kota Prabumulih (5,05%) dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (4,13%). Sementara tingkat pengangguran terendah berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 1,81%.

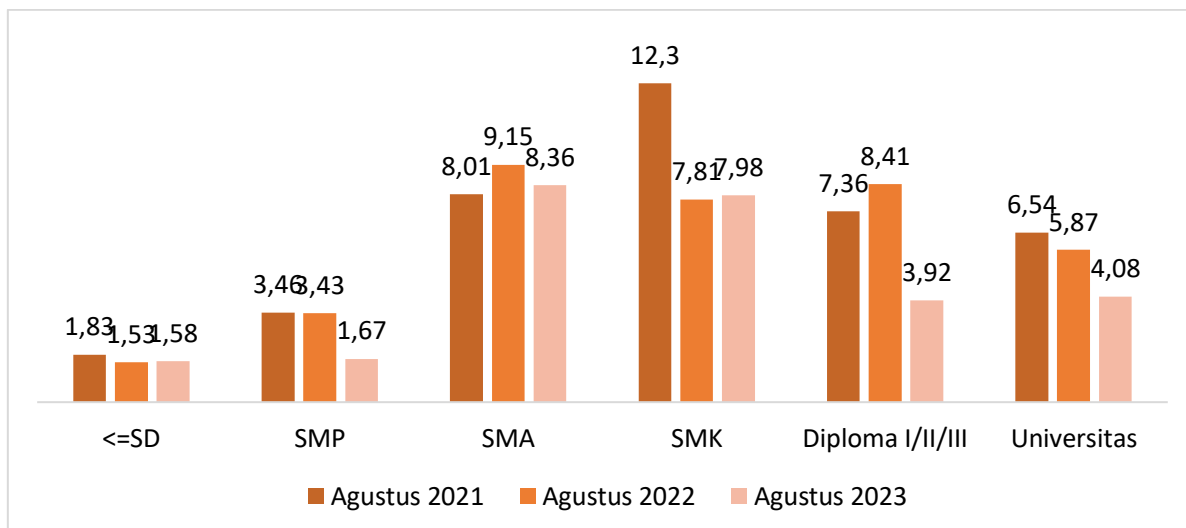


Gambar 2. 37 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Selatan

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Dilihat dari jenis kelamin, tren tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, tingkat pengangguran perempuan pada Agustus 2023 sebesar 4,34% sedangkan laki-laki sebesar 3,96%. Demikian pula, bila dilihat secara spasial tingkat pengangguran perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan, tingkat pengangguran perkotaan sebesar 6,18% dan perdesaan sebesar 2,84%.

Sementara itu, tingkat pengangguran menurut tingkat pendidikan tahun 2023 didominasi oleh jenjang pendidikan SMA sebesar 8,36%, SMK sebesar 7,98%, Universitas sebesar 4,08%, Diploma I/II/III sebesar 3,92%, sedangkan tingkat pengangguran SD dan SMP masing-masing 1,58% dan 1,67%. Komposisi pengangguran didominasi oleh jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi perlu menjadi perhatian ke depan terutama muatan pembelajaran yang kurang *link and match* dengan dunia kerja. Beberapa sekolah kejuruan harus mempersiapkan calon siswa yang akan lulus dengan memperhatikan kebutuhan kerja yang cenderung pada penggunaan digitalisasi.

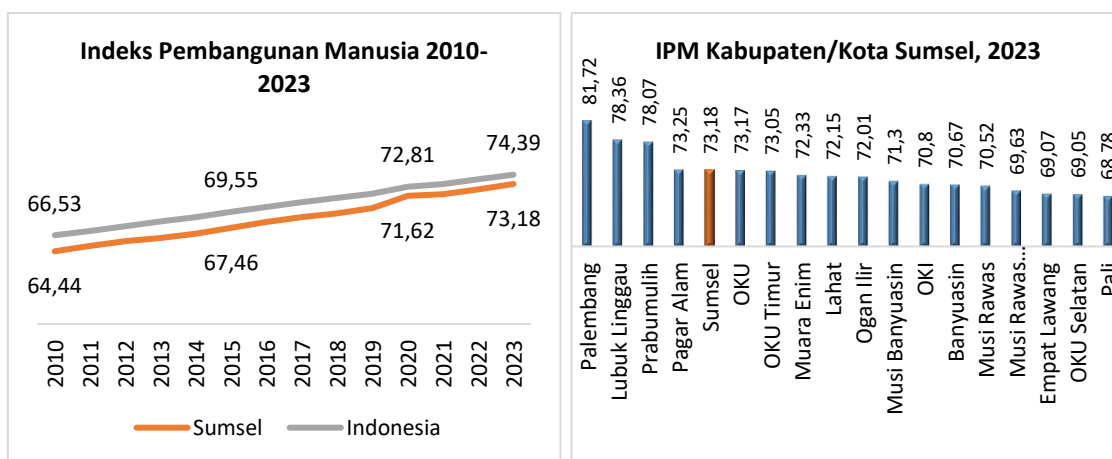


Gambar 2. 38 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Agustus 2021-Agustus 2023 (%)

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

2.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum IPM Sumatera Selatan tahun 2010-2023 berada di atas nasional. Nilai IPM pada tahun 2010 (data awal) yaitu sebesar 64,44 meningkat menjadi 73,18 tahun 2023 (data termutakhir), sedangkan nasional sebesar 66,53 juga mengalami peningkatan sebesar 74,39 pada tahun 2023. Nilai IPM dari tahun 2010-2023 pembangunan manusia di Sumatera Selatan menunjukkan tren yang meningkat meskipun berada di bawah angka nasional. Oleh karena itu diperlukan upaya keras untuk meningkatkan nilai IPM. Nilai IPM kabupaten/kota yang berada diatas IPM Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kota Prabumulih, dan Kota Pagar Alam. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.



Gambar 2. 39 Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Selatan

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Besaran indikator kesehatan, pendidikan dan pengeluaran meningkat setiap tahunnya. Dimensi kesehatan yaitu angka harapan hidup tahun 2005 (data awal) sebesar 68,3 meningkat menjadi 74,04 pada tahun 2023 (data termutakhir). Sementara dimensi pendidikan yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah pun menunjukkan tren meningkat. Komponen pengeluaran per kapita menunjukkan angka yang relatif signifikan peningkatannya dari Rp. 610,26 per kapita/tahun pada tahun 2005 menjadi Rp. 11.475 per kapita/tahun pada tahun 2023.

Tabel 2. 35 Komponen IPM Sumatera Selatan 2005-2023

Indikator	2005	2010	2015	2020*	2023*
Angka Harapan Hidup (AHH)	68,3	68,34	69,14	73,39	74,04
Harapan Lama Sekolah (HLS)	-	11,03	12,02	12,45	12,63
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,54	7,34	7,77	8,24	8,50
Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)	610,26	8.536	9.474	10.652	11.475
IPM	70,23	64,44	67,46	71,62	73,18

-) tidak tersedia; *) angka 2020-2023 menggunakan metode baru

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

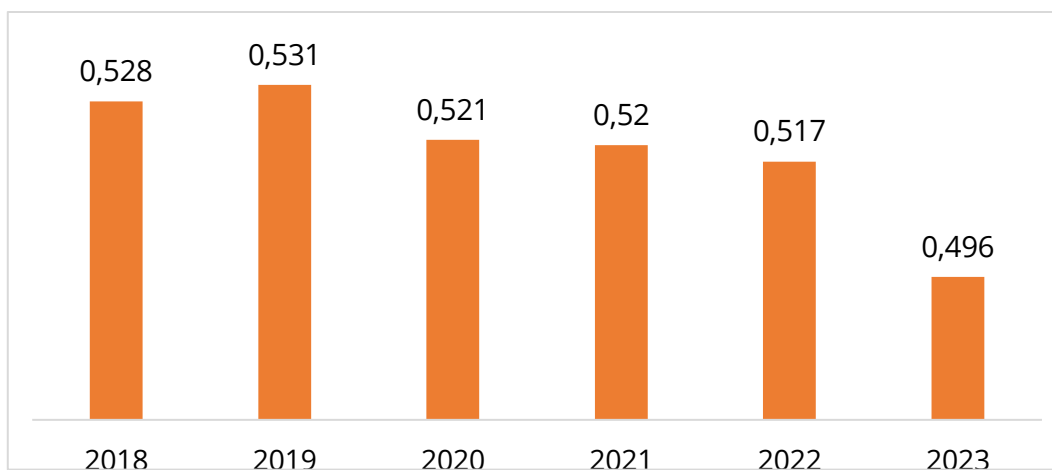
Indeks kualitas keluarga (IKK) tahun 2021 sebesar 73,09 meningkat dari 71,88 pada tahun 2020. Beberapa indikator capaian yang rendah diantaranya persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran mengalami penurunan sebesar -0,47. Kemudian terjadi peningkatan pada persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok mengalami peningkatan sebesar 0,22. Kepemilikan rumah juga mengalami penurunan, terlihat dari persentase rumah tangga yang memiliki rumah mengalami penurunan sebesar -0,42. Sementara itu, persentase rumah tangga tidak miskin di kabupaten/kota dan provinsi mengalami penurunan sebesar -0,08. Jaminan asuransi kesehatan menunjukkan penurunan sebesar -1,93, dan persentase rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,12.

2.2.2.2 Indeks Gender

Kesetaraan Gender (*gender equity*) dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi dalam segala bidang. Ketimpangan

gender di dunia diukur dengan *Gender Inequality Indeks* (GII), sementara di Indonesia diukur dengan menggunakan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

IKG menggambarkan kerugian/kegagalan (*loss*) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan pencapaian pembangunan perempuan dan laki-laki yang diukur dari 1) aspek Kesehatan Reproduksi yang terdiri dari 2 indikator yaitu a) Proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF); b) Proporsi perempuan 15-49 tahun saat melahirkan hidup pertama berusia < 20 tahun (MHPK20); 2) Aspek Pemberdayaan yang terdiri dari 2 indikator yaitu: a) Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA; b) Persentase anggota legislatif; 3) Akses dalam Pasar Tenaga Kerja dengan 1 indikator yaitu: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Semakin rendah nilai IKG maka semakin baik kesetaraan antara laki-laki dan perempuan begitu juga sebaliknya. Indeks Ketimpangan Gender dibagi menjadi 4 kategori yaitu: 1) Rendah (IKG kurang dari 0,399; 2) Menengah Bawah (IKG pada rentang 0,400-0,449); 3) Menengah Atas (IKG pada rentang 0,450-0,499); 4) Tinggi (IKG di atas atau sama dengan 0,500).



Gambar 2. 40 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2023

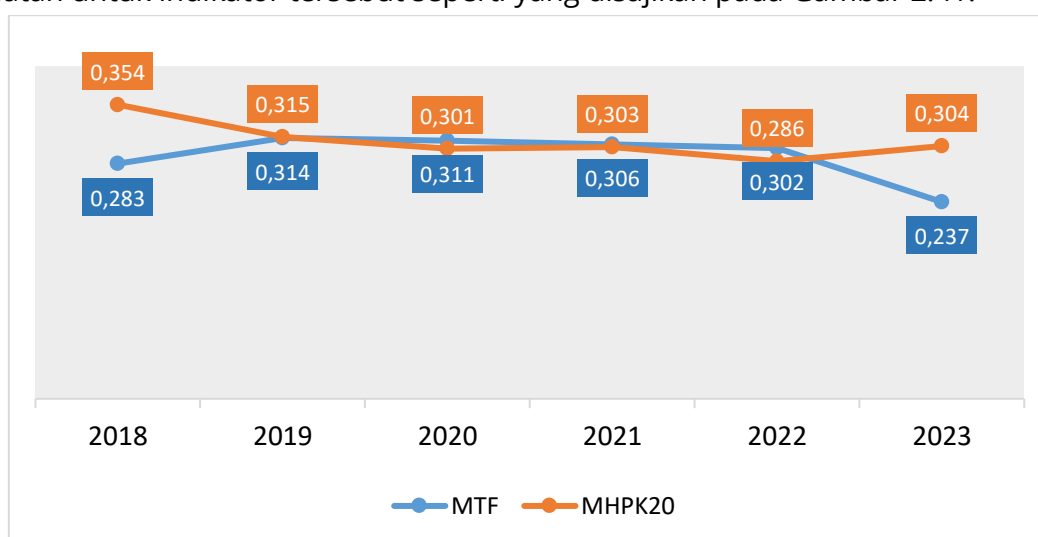
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Pengukuran IKG dilakukan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian pembangunan menurut gender dan memformulasikan kebijakan yang lebih tepat. Indeks Ketimpangan Gender akan optimal apabila kesehatan reproduksi perempuan baik, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja antara perempuan dan laki-laki setara. Perkembangan capaian Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.40.

Selama periode 2018-2023, angka IKG Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan sebesar 0,032 poin dengan posisi IKG Provinsi Sumatera Selatan masih

berada pada kategori “Tinggi” menjadi kategori “Menengah Atas”. Penurunan angka IKG Sumatera Selatan tersebut disebabkan membaiknya beberapa dimensi IKG.

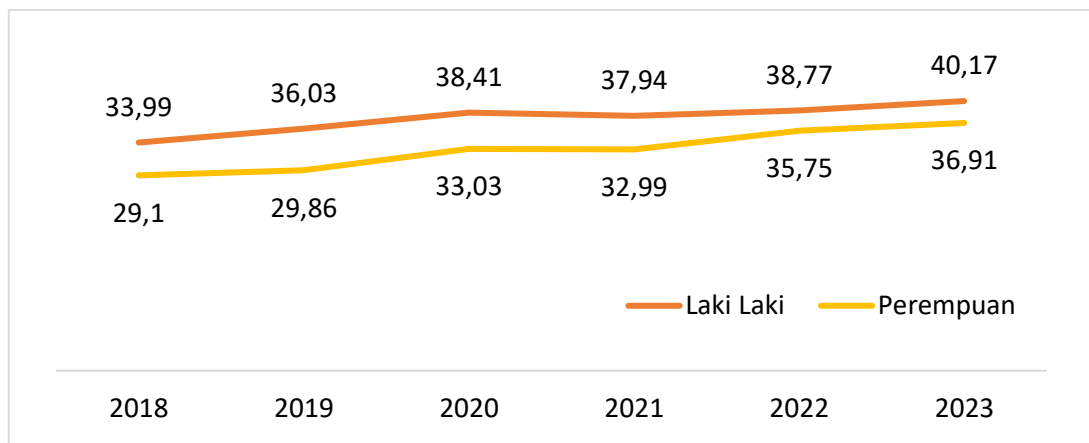
Dimensi kesehatan reproduksi dengan indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas Kesehatan (MTF) selama periode 2018-2023 menunjukkan kinerja yang membaik atau cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya terutama tahun 2023 (data termutakhir) mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 0,237. Sementara untuk indikator proporsi perempuan 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia <20 tahun (MHPK20) selama periode 2018-2023 berfluktuatif namun cenderung mengalami penurunan yang cukup hingga tahun 2023. Hal ini tentu menjadi perhatian ke depan bagi Sumatera Selatan untuk indikator tersebut seperti yang disajikan pada Gambar 2.41.



Gambar 2. 41 Perkembangan Dimensi Kesehatan Reproduksi, 2018-2023

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

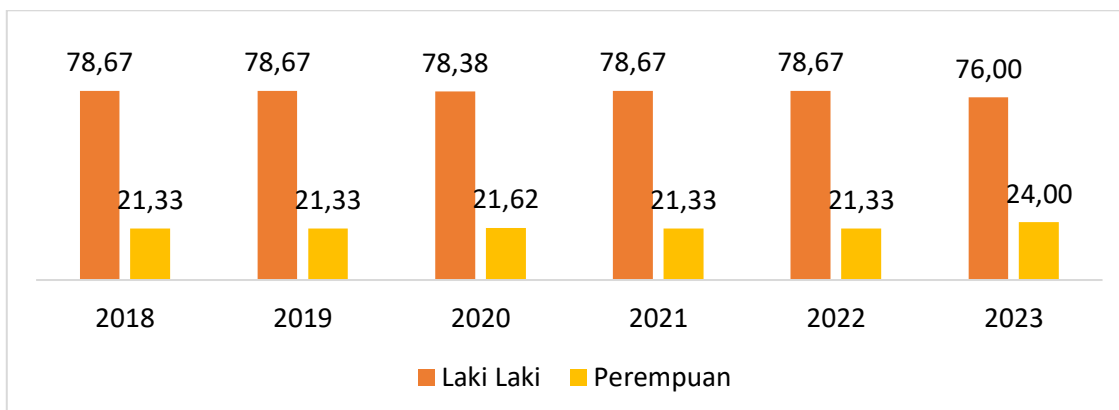
Sementara itu, dimensi pemberdayaan dengan indikator persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA baik laki-laki maupun perempuan selama periode 2018-2023 cenderung mengalami peningkatan, walaupun jika dibandingkan antara capaian laki-laki dan perempuan masih lebih tinggi capaian penduduk laki-laki setiap tahunnya. Hal ini tentunya menjadi tantangan kedepan bagaimana agar penduduk perempuan dengan pendidikan minimal SMA mengalami kesetaraan dengan penduduk laki-laki.



Gambar 2. 42 Perkembangan Indikator Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan dengan Pendidikan Minimal SMA, Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2023

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

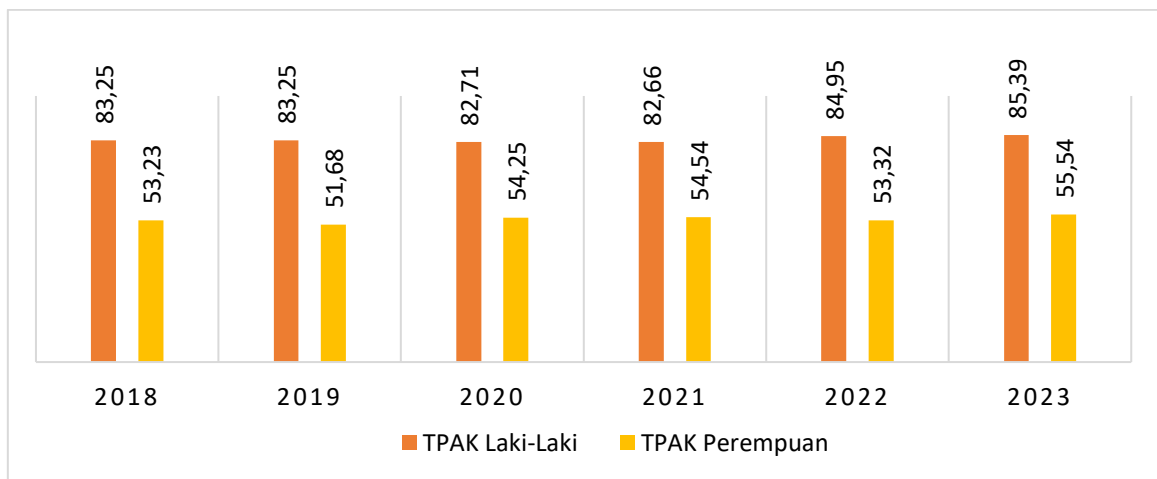
Capaian indikator dimensi pemberdayaan yang kedua yaitu persentase anggota legislatif selama periode 2018-2023 seperti yang disajikan pada Gambar 2.43, menunjukkan tingginya GAP antara legislatif perempuan dan laki-laki, walaupun pada tahun 2023 (data termutakhir) legislatif perempuan mengalami sedikit peningkatan. Ke depan perlu upaya untuk mendorong peningkatan keterwakilan legislatif perempuan agar setara dengan legislatif laki-laki.



Gambar 2. 43 Perkembangan Indikator Keterwakilan di Legislatif, 2018-2023

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

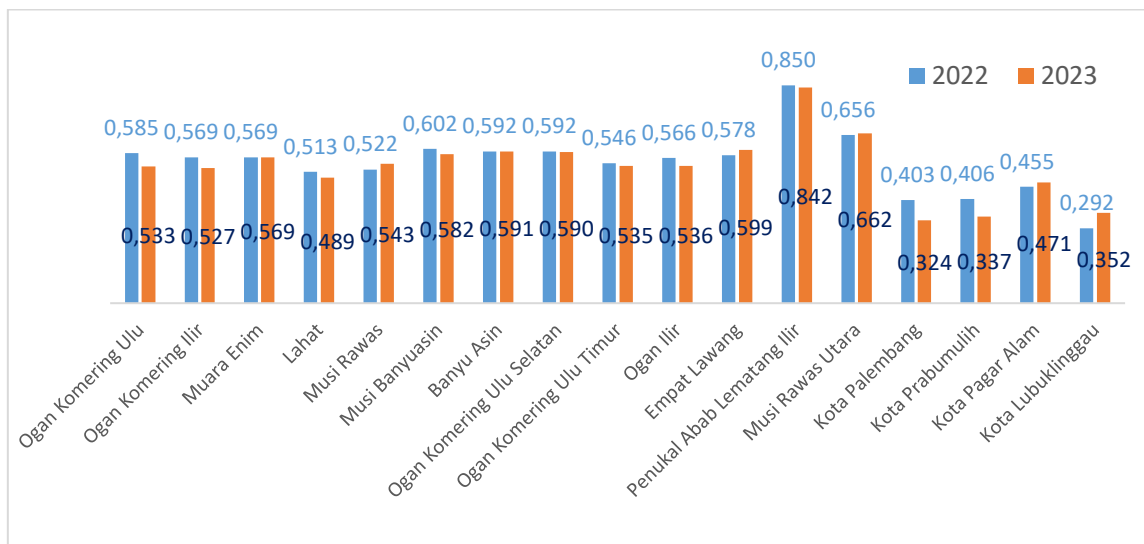
Selama periode 2018-2023 dimensi pasar tenaga kerja yang diukur melalui indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terdapat kesenjangan yang cukup besar antara TPAK Perempuan dan TPAK Laki-Laki walaupun di akhir periode yaitu tahun 2023 antara TPAK laki-laki maupun perempuan sama-sama mengalami peningkatan dan kenaikan perempuan pada tahun 2023 lebih besar dibandingkan dengan kenaikan TPAK laki-laki dapat dilihat pada Gambar 2.44.



Gambar 2. 44 Perkembangan Dimensi Pasar Tenaga Kerja, 2018-2023

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

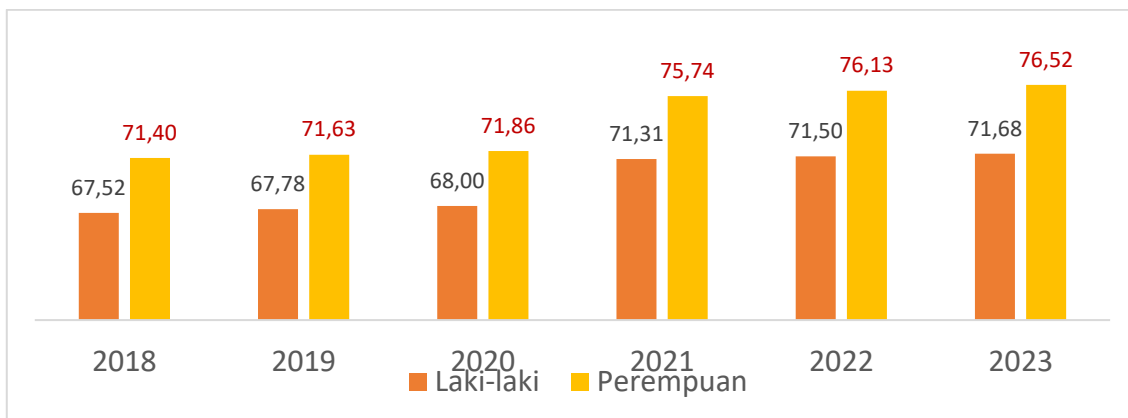
Capaian IKG Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan bervariasi, terdapat 13 kabupaten yang memiliki capaian IKG dengan kategori “Tinggi”, dan 1 kota yaitu Kota Pagar Alam memiliki nilai IKG dengan kategori “Menengah Atas” serta 2 kota yaitu Kota Palembang dan Prabumulih memiliki nilai IKG dengan kategori “Rendah”. Sementara Kota Lubuklinggau memiliki nilai IKG paling rendah, dan kategori tertinggi adalah Kabupaten PALI dengan capaian sebesar 0,850 seperti yang disajikan pada Gambar 2.45.



Gambar 2. 45 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota, 2022-2023

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

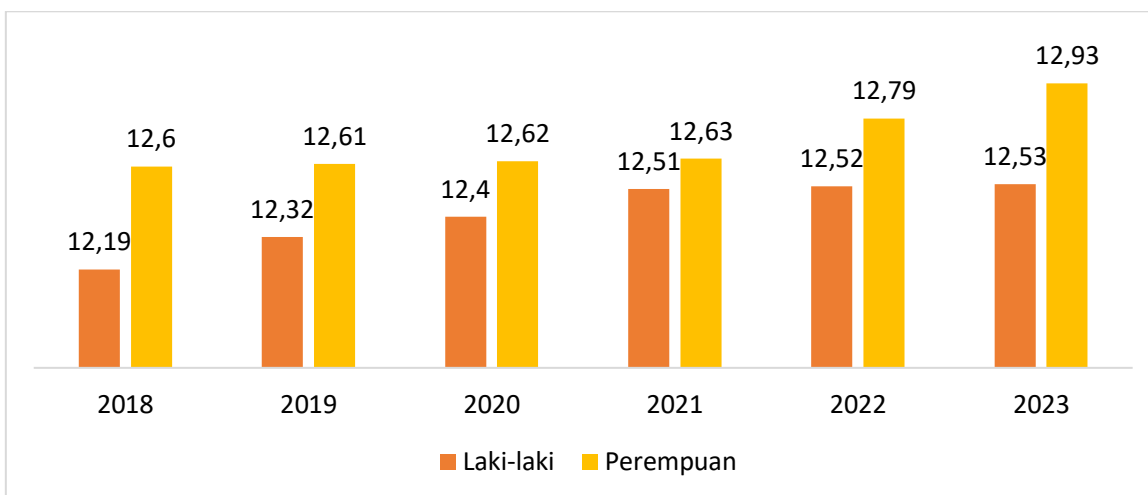
Secara spasial, kabupaten/kota yang mengalami kenaikan ketimpangan gender pada tahun 2023 adalah Kabupaten Musi Rawas, Empat Lawang, Musi Rawas Utara, Kota Pagar Alam dan Lubuklinggau.



Gambar 2. 46 Umur Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018-2023

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Usia Harapan Hidup yang merupakan salah satu komposit Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Sumatera Selatan selama periode 2018-2023 mengalami kenaikan baik itu perempuan maupun laki-laki, walaupun peningkatannya mulai mengalami perlambatan pada tiga tahun terakhir. Untuk Umur Harapan Hidup antara perempuan dan laki-laki di Provinsi Sumatera Selatan masih memiliki GAP yang cukup besar dengan keunggulan bagi Umur Harapan Hidup perempuan.

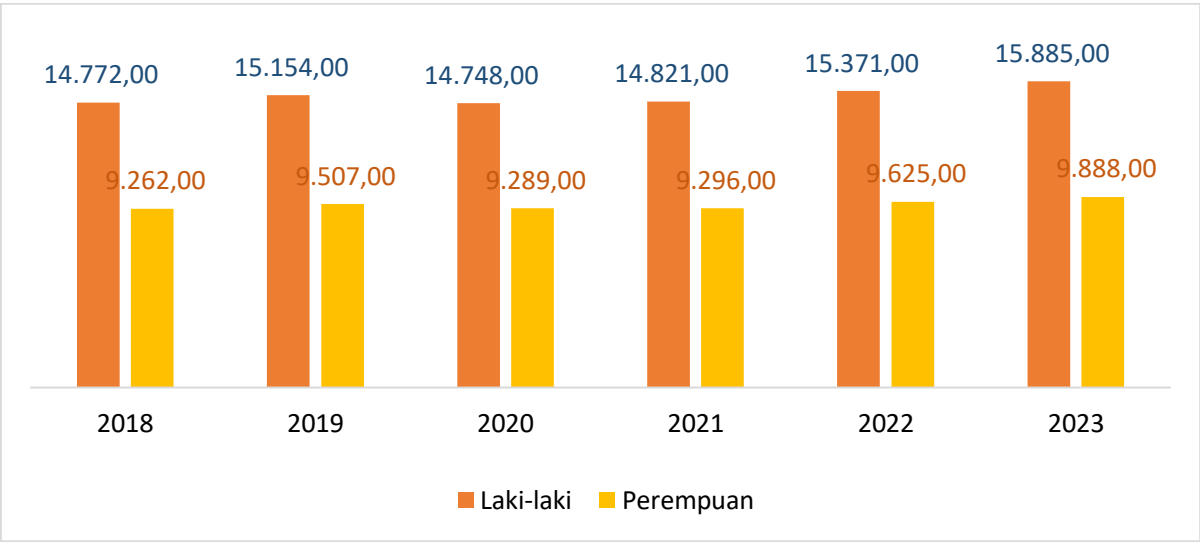


Gambar 2. 47 Harapan Lama Sekolah (HLS) Berdasarkan Jenis Kelamin, 2018-2023

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Begitu juga untuk Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2018-2023 memiliki GAP yang cukup besar antara HLS perempuan dan laki-laki, dimana HLS perempuan lebih tinggi dibandingkan HLS laki-laki, bahkan

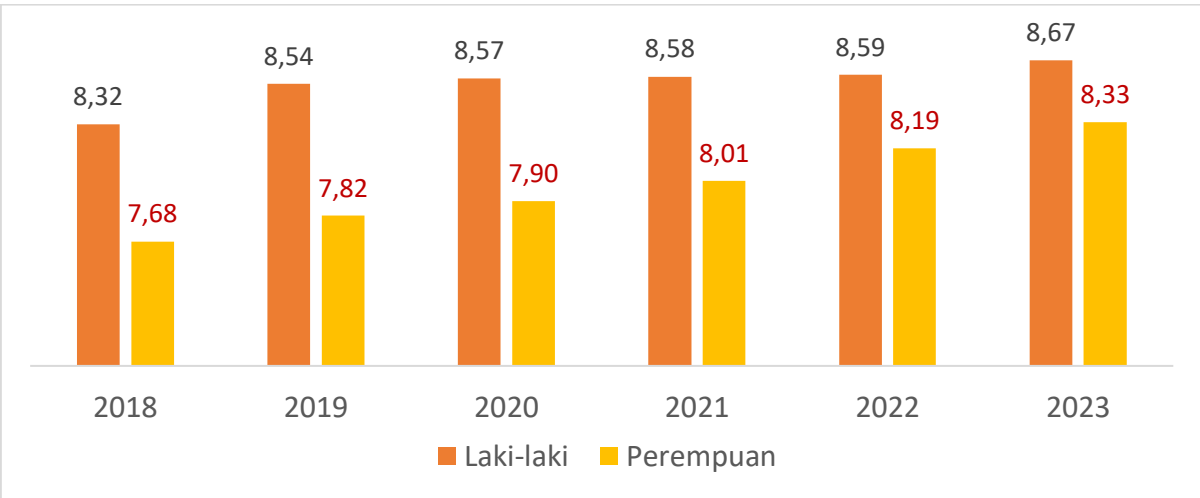
selama tiga tahun terakhir, HLS perempuan mengalami peningkatan yang lebih cepat dibandingkan peningkatan HLS laki-laki.



Gambar 2. 48 Pengeluaran Per Kapita Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2018-2023

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Pengeluaran per kapita, selama periode 2018-2023 GAP antara perempuan dan laki-laki cukup tinggi dan pengeluaran per kapita laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan Perempuan. Selama periode 2018-2023 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Sumatera Selatan walaupun masih lebih unggul RLS laki-laki dibandingkan HLS perempuan, namun kenaikan HLS perempuan lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan HLS laki-laki.

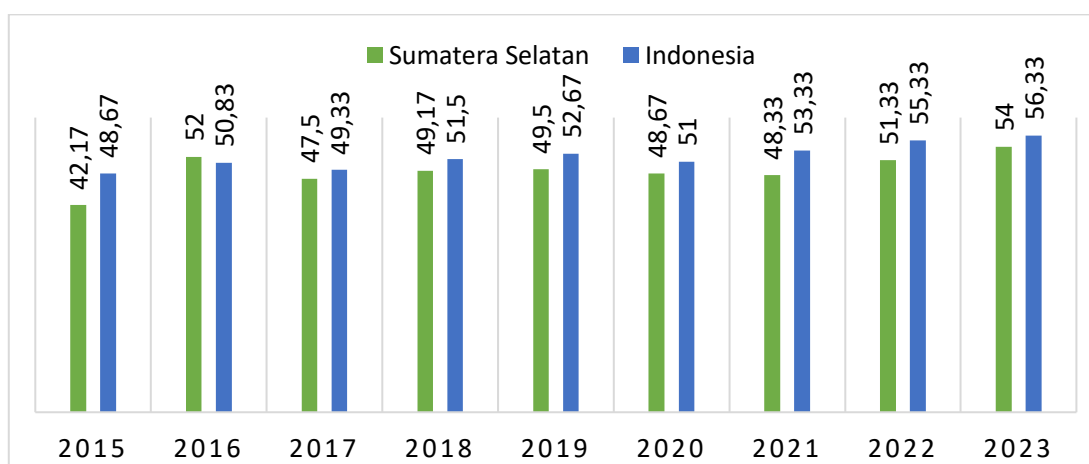


Gambar 2. 49 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Berdasarkan Jenis Kelamin. 2018-2023

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

2.2.2.3 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Provinsi Sumatera Selatan memiliki 2,13 juta pemuda pada tahun 2021, dengan komposisi sebanyak 1,08 juta pemuda laki-laki dan 1,05 juta pemuda perempuan. Domain pembentuk IPP yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi. Capaian pemuda Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan, pada tahun 2015 sebesar 42,17 menjadi 54,0 pada tahun 2023 (data termutakhir). Kondisi ini menunjukkan telah terjadi perbaikan dalam indikator pembentuk IPP seperti membaiknya kesehatan dan pendidikan, gender dan berkurangnya tingkat diskriminasi. Namun demikian, tingginya angka pengangguran yang didominasi pemuda memerlukan peningkatan kesempatan kerja.



Gambar 2. 50 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Kemenpora, Laporan Indeks Pembangunan Pemuda, 2023

2.3 Aspek Daya Saing

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Struktur PDRB

Perbaikan kinerja ekonomi tahun 2023 (data termutakhir) di Provinsi Sumatera Selatan terutama ditopang oleh peningkatan sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan. Aktivitas masyarakat yang kembali normal juga mendorong kegiatan konsumsi dan peningkatan sektor perdagangan dan eceran. Data menunjukkan PDRB harga berlaku tahun 2010 sebesar Rp. 194.013 miliar meningkat menjadi sebesar Rp. 569.675,3 miliar pada tahun 2023. PDRB ADHK 2010 pada tahun yang sama juga meningkat sebesar Rp. 194.013 miliar menjadi Rp. 360.911,0 miliar.

Tabel 2. 36 Perkembangan PDRB Harga Berlaku & Harga Konstan 2010

Tahun	PDRB (Miliar Rupiah)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan (2010)
2010	194.013,0	194.013,0
2015	331.765,7	254.044,9
2020	454.607,4	315.129,2
2023	569.675,3	360.911,0

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Lapangan usaha utama Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2007-2023 (data termutakhir) yaitu sektor primer, rata-rata sebesar 41,05%, sektor sekunder sebesar 29,72%, dan sektor tersier sebesar 29,23%. Sektor primer didukung oleh sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan; dan sektor pertambangan dan penggalian. Penurunan kontribusi sektor primer disebabkan oleh menurunnya andil sektor pertanian. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena akan mengganggu ketersediaan pangan di masa yang akan datang.

Tabel 2. 37 Lapangan Usaha Utama Sumatera Selatan

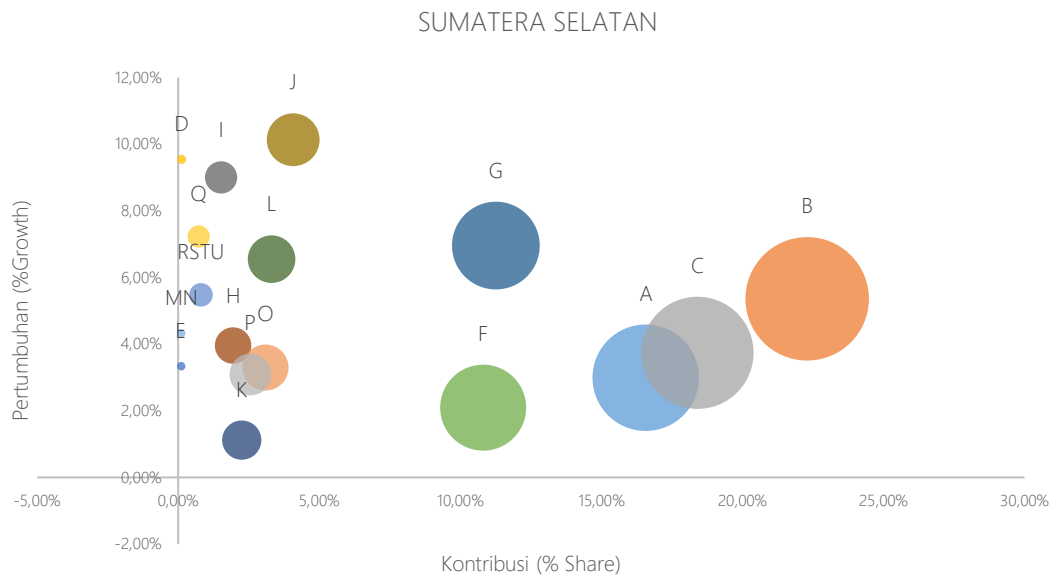
Sektor	2007	2010	2015	2020	2023
Sektor Primer	43,2	42,94	40,79	38,59	39,71
Sektor Sekunder	29,6	29,64	29,91	30,70	28,76
Sektor Tersier	27,2	27,42	29,30	30,71	31,52

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2023 (diolah)

Secara sektoral, sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, dan Pertanian memiliki kontribusi yang tinggi terhadap PDRB, akan tetapi dilihat dari pertumbuhan ketiga sektor ini relatif rendah. Struktur PDRB yang masih mengandalkan sektor primer memerlukan transformasi ekonomi baik secara vertikal maupun horizontal.

Data struktur PDRB menunjukkan kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan cukup tajam dari sebesar 19,76% tahun 2005 menjadi 13,10% pada tahun 2023. Sektor pertambangan memiliki kontribusi yang cukup stabil dan terjadi sedikit penurunan sebesar 26,86% tahun 2005 menjadi sebesar 26,61% pada tahun 2023. Sektor industri pengolahan mengalami kontribusi yang cukup stabil, terdapat peningkatan dari 17,74% tahun 2005 menjadi 17,84% pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan adanya gejala deindustrialisasi di Provinsi Sumatera Selatan. Namun demikian, transformasi ekonomi mulai bergerak ke sektor jasa dan lainnya yang

meningkat dari 35,64% menjadi 42,44%. Dengan demikian, struktur ekonomi di masa yang akan datang cenderung berfokus pada sektor jasa.



Gambar 2. 51 Analisis Growth PDRB Sumatera Selatan 2017-2022

Tabel 2. 38 Struktur Ekonomi Sumatera Selatan

Struktur Ekonomi % PDRB Sumsel			
	2005		2023
Pertanian	19,76	➡	13,10
Pertambangan	26,86	➡	26,61
Industri Pengolahan	17,74	➡	17,84
Jasa dan Lainnya	35,64	➡	42,44

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024 (berbagai edisi diolah)

Di wilayah sumatera bagian selatan, persentase PDRB provinsi terhadap total PDB Indonesia di Sumbagsel sebesar 7,66%, dan Provinsi Sumatera Selatan berkontribusi sebesar 3,09%. Sementara itu Provinsi Lampung sebesar 2,16%, Jambi sebesar 1,44%, Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,5% dan Bengkulu sebesar 0,47%. Kontribusi sektoral terbesar masing-masing daerah juga berbeda, Provinsi Sumatera Selatan didominasi sektor pertambangan dan penggalian, sedangkan Provinsi Lampung, Jambi dan Bengkulu yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sektor industri pengolahan.

Tabel 2. 39 PDRB ADHK 2010 Sumatera Selatan Tahun 2010-2023

Lapangan Usaha	PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)			
	2010	2015	2020	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38,067.01	48,287.68	53,281.53	58,153.5
B. Pertambangan dan Penggalan	45,242.85	55,330.27	68,330.87	82,639
C. Industri Pengolahan	36,600.12	47,066.75	59,276.64	65,561.6
D. Pengadaan Listrik dan Gas	151.28	232.29	395.09	442.6
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	229.69	296.43	381.08	366.8
F. Konstruksi	20,523.62	28,393.62	36,678.56	38,455.7
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,331.74	24,520.21	33,117.58	41,607.9
H. Transportasi dan Pergudangan	3,268.46	4,813.18	6,106.40	7,165.5
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,126.77	3,024.31	4,363.55	5,912.1
J. Informasi dan Komunikasi	5,536.33	8,021.41	12,214.33	14,892.5
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,420.20	6,651.74	7,477.61	8,100.4
L. Real Estat	4,915.91	7,360.89	10,214.87	11,860.3
M,N. Jasa Perusahaan	182.10	265.17	358.14	378.3
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,777.63	8,576.39	9,877.17	11,037
P. Jasa Pendidikan	4,635.62	7,405.48	8,082.90	9,003.1
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,230.40	1,757.35	2,272.24	2,499.2
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,773.22	2,041.70	2,700.64	2,835.8
Produk Domestik Regional Bruto	194,012.97	254,044.88	315,129.22	360,911

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

2.3.1.2 Pengganda Tenaga Kerja dan Pendapatan

Sektor yang memiliki nilai pengganda tenaga kerja di Sumatera Selatan berdasarkan analisis I-O adalah 1) industri karet, barang dari karet, dan plastik, 2)

pengadaan gas dan produksi es, dan 3) perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor, sedangkan sektor dengan penyerapan tenaga kerja terendah di Sumsel adalah pertambangan batu bara dan lignit. Sementara itu, sektor dengan nilai pengganda terbesar yaitu Sektor Jasa dan Komunikasi; Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; Tembakau, Padi, dan Angkutan Darat.



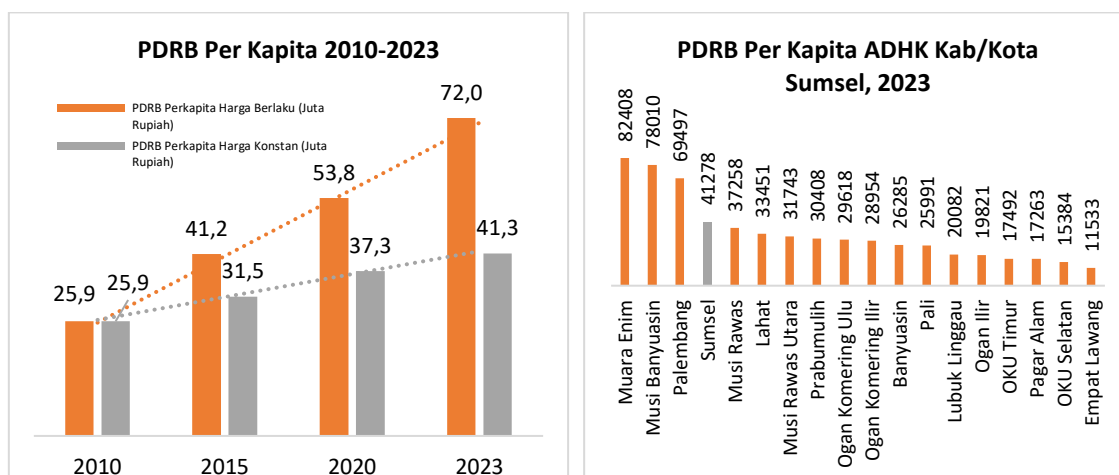
Gambar 2. 52 *Income dan Labour Multiplier Sumsel 2017-2022*

Tabel 2. 40 Rekapitulasi *Income dan Labour Multiplier* di Sumsel

	Income Multiplier	Labor Multiplier
1st	Jasa Informasi dan Komunikasi	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
2nd	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	Pengadaan Gas dan Produksi Es
3rd	Tembakau	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
4th	Padi	Jasa Informasi dan Komunikasi
5th	Angkutan Darat	Kehutanan dan Penebangan Kayu

2.3.1.3 PDRB Per Kapita

Sumatera Selatan atas dasar harga berlaku dan harga konstan pada tahun 2010-2023 (data termutakhir) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 PDRB per kapita harga berlaku sebesar Rp. 25,9 juta meningkat menjadi Rp. 72,0 juta tahun 2023. Sama halnya dengan harga konstan tahun 2010 sebesar Rp. 25,9 juta meningkat menjadi Rp. 41,3 juta. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah. Tingginya angka PDRB per kapita menunjukkan bahwa kemampuan Provinsi Sumatera Selatan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi sangat besar. PDRB per kapita berdasarkan kabupaten/kota atas dasar harga konstan tertinggi yakni berada di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Palembang. Ketiga wilayah ini merupakan penyumbang PDRB terbesar di Sumatera Selatan.



Gambar 2. 53 PDRB Per kapita Harga Berlaku dan Harga Konstan Sumatera Selatan

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2024

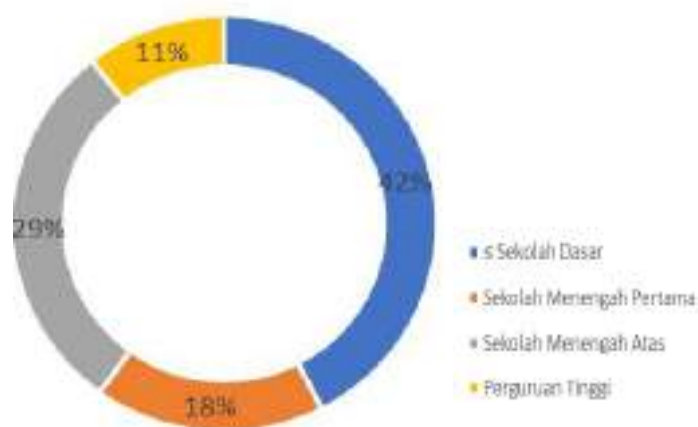
2.3.2 Daya Saing SDM

Salah satu indikator pembentuk daya saing adalah ketenagakerjaan dan SDM. Tingkat daya saing di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat Pendidikan penduduk yang masih rendah. Hal ini juga berlaku di Sumatera Selatan ditunjukkan dari angka rata-rata lama sekolah pada periode 2010-2022 berkisar 7,34 - 8,37 tahun atau setara SMP. Walaupun terjadi tren positif, namun aspek daya saing ini masih belum mencapai tujuan program wajib belajar 12 tahun atau setara SMA sebagai upaya mewujudkan Generasi Emas tahun 2045. Bahkan diamati dari distribusi Pendidikan yang ditamatkan, baik Angkatan Kerja Total (41 persen $\leq$ SD) maupun

penduduk yang bekerja (42 persen ≤ SD) di Sumatera Selatan masih didominasi oleh kelompok yang berpendidikan SD ke bawah.

Pendidikan berkualitas masih menjadi pekerjaan rumah di Sumatera Selatan. Saat ini, masih banyak anak yang belum menguasai kompetensi minimum literasi dan numerasi. Rata-rata Angka Kompetensi Minimum (AKM) Literasi dan Numerasi pada satuan Pendidikan SD hingga SMA masih di bawah 60 persen. AKM mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan secara nasional yang hasilnya dapat digunakan untuk pemetaan mutu pendidikan di Indonesia.

Pekerja dituntut harus memiliki keahlian atau skill yang dapat dikembangkan melalui sarana pelatihan atau pendidikan. Kedua hal tersebut merupakan investasi terbaik untuk dapat bersaing di pasar tenaga kerja. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang ditamatkannya semakin tinggi memiliki produktivitas dan kemampuan kerja yang semakin tinggi pula. Pekerja di sektor pertanian dan industri sebagian besar berkeahlian rendah. Sektor jasa dan lainnya cenderung membutuhkan keahlian menengah dan tinggi. Penduduk bekerja di Sumatera Selatan dengan kategori pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian tinggi masih sangat sedikit yaitu 12,86%. Hal ini selaras dengan struktur ketenagakerjaan dan tingkat pendidikan pekerja yang didominasi sektor pertanian dan industri dengan pendidikan SD ke bawah.



Gambar 2. 54 Distribusi Penduduk bekerja berdasarkan Pendidikan

Sumber: BPS, diolah (2022)

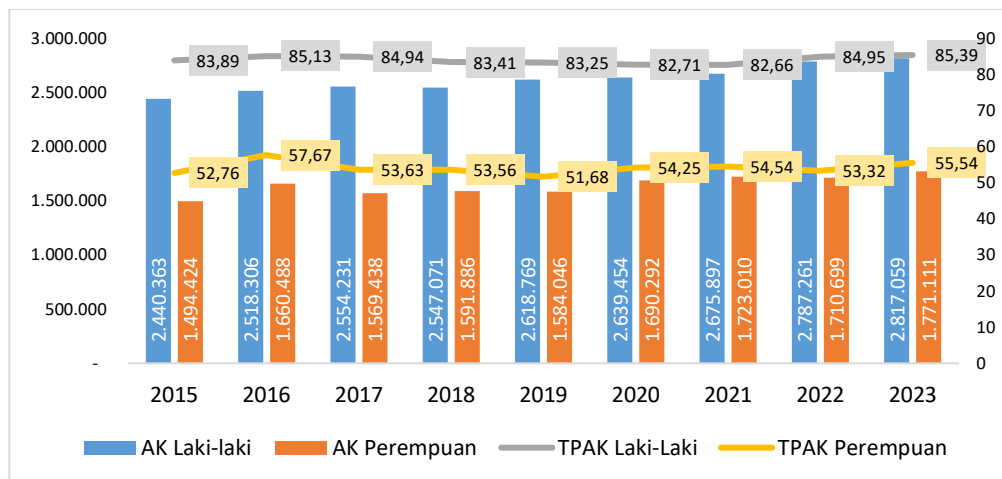
Struktur tenaga kerja di Sumatera Selatan, di dominasi pada sektor pertanian dan jasa masing-masing sebesar 44,7% dan 41,4% pada tahun 2023. Struktur ketenagakerjaan sektor pertanian selama periode 2020-2023 telah turun 1,20%, sementara sektor industri mengalami peningkatan 1,10% dan sektor jasa juga mengalami peningkatan 0,20%.

Tabel 2. 41 Struktur Ketenagakerjaan (% Total Tenaga Kerja)

Sektor	2020	2021	2022	2023
Pertanian	45,9	45,0	46,4	44,7
Industri	12,8	13,5	13,2	13,9
Jasa	41,2	42,0	40,3	41,4

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan kelompok umur, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2023 (data termutakhir) menunjukkan pola huruf U terbalik. TPAK kelompok umur 15-19 tahun adalah paling rendah dibandingkan kelompok umur lainnya dan semakin meningkat seiring peningkatan kelompok umur hingga puncaknya pada umur 40-44 tahun sebesar 84,63.



Gambar 2. 55 Perkembangan Angkatan Kerjadan TPAK Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Selatan

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai edisi

TPAK Laki-laki selama periode 2015-2023 lebih *flat* dibandingkan TPAK Perempuan yang lebih fluktuatif. Besaran TPAK Laki-laki berkisar antara 82,66 dan 85,39 masih jauh lebih tinggi daripada TPAK Perempuan pada kisaran 51,68 dan 57,67. TPAK Perempuan tahun 2023 adalah 55,54 naik 2,78 poin dibandingkan tahun 2015. Rendahnya TPAK Perempuan mencerminkan bahwa perempuan yang tidak bekerja tidak memiliki insentif untuk mengurangi waktu yang dialokasikan pada sektor rumah tangga sehingga tidak menyukai masuk ke pasar kerja. Jikapun terjadi kenaikan upah Minimum, kegiatan produksi rumah tangga masih dianggap lebih berharga. Kemungkinan lain hal ini karena dampak aktivitas membesarkan anak terhadap keputusan partisipasi. Umumnya di negara berkembang seperti Indonesia, termasuk Sumatera Selatan, banyak perempuan meninggalkan pasar kerja ketika menikah dan mengurus anak.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang menyebutkan bahwa infrastruktur disebut dengan prasarana. Prasarana dikenal sebagai kelengkapan dasar fisik suatu kawasan, wilayah atau kota. Dalam hal infrastruktur transportasi Provinsi Sumatera Selatan memiliki multimoda (Jalan, Kereta Api, Sungai, Laut, dan Udara) sebagai pintu gerbang yang dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas sehingga dapat meningkatkan peran Sumatera Selatan dalam persaingan regional maupun internasional.

2.3.3.1 Infrastruktur Transportasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya mendorong terciptanya transportasi yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau melalui penyediaan fasilitas keamanan transportasi, tersedianya moda yang cukup dan ramah lingkungan serta penerapan aturan keselamatan transportasi bagi semua pengguna dan penyedia jasa transportasi dan didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik. Perilaku sebagian besar pemakai jalan yang masih kurang memperdulikan keselamatan diri sendiri dan pemakai jalan lainnya harus ditekan, budaya dan disiplin pengguna jalan dari sebagian pengemudi kendaraan belum berjalan baik serta masih adanya sarana dan prasarana transportasi yang belum memenuhi standar keselamatan.

(1). Infrastruktur Jalan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, peruntukan Jalan dibagi atas Jalan Umum dan Jalan Khusus. Berdasarkan statusnya, jalan umum dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu: (1) Jalan Nasional, (2) Jalan Provinsi, (3) Jalan Kabupaten, (4) Jalan Kota, (5) Jalan Desa. Sementara itu, berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan, jalan umum menurut fungsinya terdiri dari: (1) Jalan Arteri, (2) Jalan Kolektor, (3) Jalan Lokal.

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 3 (tiga) ruas jalan utama, dimana 2 (dua) diantaranya memiliki fungsi strategis dan sangat vital sebagai penghubung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Adapun ketiga ruas jalan utama tersebut adalah:

- a). Lintas Timur Sumatera

Membentang dari Batas Lampung–Pematang Panggang–Simpang Penyandingan–Kayu Agung–Simpang Indralaya–Palembang–Betung–Batas Jambi sepanjang 405,32 km dan melewati lima kabupaten/kota dan pada umumnya terletak pada daerah dataran rendah serta rawa-rawa.

b). Lintas Tengah Sumatera

Membentang dari batas Lampung Martapura–Baturaja–Simpang Sugiwaras–Muara Enim–Lahat–Tebing Tinggi–Lubuklinggau–Terawas–Batas Jambi sepanjang 472,35 km dan melewati enam kabupaten/kota. Pada umumnya terletak pada daerah dataran tinggi (pegunungan) dan permukaan bergelombang.

c). Penghubung Antar Jalan Lintas

Pada saat ini jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan penghubung antar jalan lintas terdiri dari dua jalan penghubung:

(1). Penghubung Timur dan Tengah Simpang Indralaya–Prabumulih–Muara Enim. Jalan ini sepanjang 147,46 km melewati tiga kabupaten/kota. Secara umum ruas jalan ini terletak pada daerah dataran rendah.

(2). Penghubung Timur Tengah (II) Betung–Sekayu–Muara Beliti sepanjang 253,43 km dan melewati dua kabupaten. Secara umum ruas ini terletak pada daerah dataran rendah dan juga berada di pinggiran Sungai Musi.

(3). Penghubung Alternatif Bagian Timur

Jalan penghubung alternatif antar dua jalan lintas utama (Lintas Timur dan Lintas Tengah) di bagian sebelah timur wilayah Provinsi Sumatera Selatan dilayani ruas jalan Simpang Penyandingan–Simpang Kepuh–Kurungan Nyawa–Martapura sepanjang 138,74 km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,50 meter.

(4). Penghubung Alternatif Bagian Tengah-Barat

a). Ruas Jalan Martapura–Ujan Mas–Batas Bengkulu

Penanganan jalan ini masih secara terus menerus dilaksanakan peningkatannya. Pada ruas jalan ini kondisi geometriknya belum memenuhi persyaratan, sebagian besar alignment vertikal masih bergelombang karena berada di daerah perbukitan.

b). Ruas Jalan Lahat–Pagar Alam–Tanjung Sakti–Batas Bengkulu

Jalan ini terletak di dataran tinggi yang rawan longsor dan patahan dengan kondisi jalan dari Pagar Alam menuju Tanjung Sakti–

Batas Bengkulu dalam kondisi relatif dengan lebar jalan antara 3,5–4,5 meter.

c). Ruas Jalan Pagar Alam–Tanjung Raya–Batas Bengkulu

Panjang ruas jalan ini adalah 52,7 km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,5 meter dengan jenis perkerasan lapisan aspal dengan kondisi 60% baik. Trase jalan terletak di daerah perbukitan dan menyusuri sungai. Lokasi rawan longsor dan daerah patahan.

Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan tidak terlepas dari mobilitas orang maupun barang yang cukup tinggi. Mobilitas barang dan jasa ditentukan oleh Infrastruktur, salah satunya adalah infrastruktur jalan. Keberadaan infrastruktur jalan menjadi sangat vital karena fungsinya adalah untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi masyarakat serta menjamin aksesibilitas antar wilayah. Data menunjukkan bahwa total panjang jalan hingga tahun 2023 sebesar 17.876,27 km. Komposisi jalan tersebut terdiri atas jalan nasional sepanjang 1.581,148 km (8,84%), jalan provinsi sepanjang 1.779,27 km (9,95%) dan jalan kabupaten/kota sepanjang 14.515,85 km (81,20%). Adapun kondisi jalan nasional dan kondisi jalan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 – 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 42 Kondisi Jalan Nasional di Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2023

Kondisi Jalan	Satuan	Tahun	
		2022	2023
Panjang Jalan		1.600,16	1.581,148
Kondisi Baik	Km	807,22	844,598
	%	50,45	53,42
Kondisi Sedang	Km	705,08	690,61
	%	44,06	43,68
Kondisi Rusak Ringan	Km	78,45	40,86
	%	4,90	2,58
Kondisi Rusak Berat	Km	9,42	5,08
	%	0,59	0,32
Kondisi Jalan Mantap	Km	1.512,3	1.535,208
	%	94,51	97,09

Sumber: <https://data.pu.go.id/>, 2023

Tabel 2. 43 Kondisi Jalan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2023

Kondisi Jalan	Satuan	Tahun			
		2022		2023	
		Kabupaten	Kota	Kabupaten	Kota
Panjang Jalan		13.747,64	1.905,93	12.609,92	1.905,93
Kondisi Baik	km	4.663,11	578,83	5.137,19	663,47
	%	33,92	30,37	40,74	34,81
Kondisi Sedang	km	2.191,94	827,22	2.123,45	801,63
	%	15,94	43,40	16,84	42,06
Kondisi Rusak Ringan	km	3.701,19	224,66	2.316,36	143,56
	%	26,92	11,79	18,37	7,53
Kondisi Rusak Berat	km	3.191,39	275,22	3.032,90	297,27
	%	23,21	14,44	24,05	15,60
Kondisi Jalan Mantap	km	6.855,05	1.406,05	7.260,64	1.465,10
	%	49,86	73,77	57,58	76,87

Sumber: <https://data.pu.go.id/>, 2023

Kondisi transportasi darat atau jalan tidak terlepas dari kondisi kinerja jaringan jalan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2019 sampai dengan 2021 realisasi kondisi kemantapan jalan provinsi menggunakan SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 130/KPTS/DIS PU BM/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan primer menurut fungsinya sebagai jalan kolektor-2 dengan panjang 1.513,653 Km, dan untuk tahun 2022 menggunakan SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 902/KPTS/DIS.PUBMTR/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Primer menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi dengan panjang jalan 2.113,747 Km, sedangkan untuk tahun 2023 menggunakan SK Jalan Kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 130/KPTS/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan dalam Jaringan Primer menurut Statusnya sebagai jalan provinsi dengan panjang jalan sebesar 1.779,27 km. Adapun kondisi jalan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019–2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 44 Kondisi Jalan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023

Kondisi Jalan	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
		Jalan Provinsi				
Panjang Jalan		1.513,653	1.513,653	1.513,653	2.113,75	1.779,27
Kondisi Baik	km	857,29	938,15	1.322,02	1.609,01	1.121,60
	%	56,64	61,98	87,34	76,12	63,04
Kondisi Sedang	km	341,02	424,50	99,89	222,78	446,85
	%	22,53	28,04	6,60	10,54	25,11
Kondisi Rusak Ringan	km	163,80	64,42	30,74	56,57	140,13
	%	10,82	4,26	2,03	2,68	7,88
Kondisi Rusak Berat	km	151,53	86,58	61,00	225,29	70,71
	%	10,01	5,72	4,03	10,66	3,97
Kondisi Jalan Mantap	km	1.198,31	1.362,65	1.421,91	1.831,79	1.568,45
	%	79,17	90,02	93,94	86,66	88,15

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel, 2023

Ruas jalan berdasarkan SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 130/KPTS/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan dalam Jaringan Primer menurut Statusnya sebagai Jalan Statusnya Sebagai Jalan Provinsi dengan panjang jalan sebesar 1.779,27 Km (88 ruas).

Persentase kondisi jalan mantap merupakan hal penting untuk memperlancar arus pergerakan kendaraan dalam mendukung pelayanan transportasi masyarakat. Kemantapan jalan memungkinkan kendaraan untuk mencapai kecepatan yang optimal untuk mempersingkat waktu tempuh. Jalan dikategorikan dalam kondisi mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi baik dan sedang, sedangkan kondisi tidak mantap jika keadaan jalan tersebut dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Adapun rasio kemantapan jalan provinsi tahun 2023 yaitu sebesar 88,15%. Tabel 2.45 menunjukkan kondisi jalan mantap provinsi di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023.

**Tabel 2. 45 Komposisi Panjang Jalan Menurut Statusnya di Sumatera Selatan
Tahun 2023**

No	Kab/Kota	Panjang	Kondisi Jalan Provinsi							
			Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
			(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)
1	Palembang	74,08	59,55	80,39	9,48	12,80	4,80	6,48	0,25	0,34
2	Banyuasin	53,68	12,78	23,81	29,30	54,58	7,70	14,34	3,9	7,27
3	Musi Banyuasin	40,84	8,39	20,54	20,60	50,44	11,85	29,02	0,00	0,00
4	Ogan Ilir	102,18	36,61	35,83	48,39	47,36	14,67	14,36	2,51	2,46
5	Ogan Komering Ilir	204,68	60,02	29,32	87,21	42,61	30,05	14,68	27,4	13,39
6	Ogan Komering Ulu	101,65	29,35	28,87	56,20	55,29	15,3	15,05	0,80	0,79
7	Komering Ulu Timur	269,46	199,34	73,98	42,52	15,78	16,00	5,94	11,60	4,30
8	Komering Ulu Selatan	192,18	148,36	77,2	34,47	17,94	5,75	2,99	3,60	1,87
9	Muara Enim	123,48	98,53	79,79	14,26	11,55	3,69	2,99	7,00	5,67
10	Penukal Abab Lematang Ilir	186,00	152,5	81,99	21,42	11,52	7,88	4,24	4,20	2,26
11	Pagaralam	14,10	6,63	44,89	4,75	33,69	2,97	21,06	0,05	0,35
12	Lahat	83,17	50,57	60,80	27,00	32,46	5,60	6,73	0,00	0,00
13	Empat Lawang	146,86	104,26	70,99	28,85	19,64	6,75	4,60	7,00	4,77
14	Musi Rawas	113,45	94,93	83,68	11,6	10,22	4,52	3,98	2,40	2,12
15	Musi Rawas Utara	59,86	51,66	86,30	6,80	11,36	1,40	2,34	0,00	0,00
16	Lubuklinggau	13,62	8,42	61,82	4,00	29,37	1,20	8,81	0,00	0,00
Total		1.779,27	1.121,60	63,04	446,85	25,11	140,13	7,88	70,71	3,97
% Kondisi			88,15 (Kondisi Mantap)				11,85 (Kondisi Rusak)			

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel, 2023

Untuk meningkatkan nilai rasio kemantapan jalan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan fokus dalam penanganan infrastruktur jalan yaitu penanganan jalan dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan. Sementara untuk mempertahankan nilai rasio kemantapan jalan difokuskan pada pemeliharaan jalan dalam kondisi baik dan sedang.

(2) Infrastruktur Kereta Api

Jalan rel atau kereta api sebagai salah satu moda transportasi darat sampai saat ini diandalkan dalam mengangkut barang dan jasa. Jaringan kereta api di Sumatera Selatan meliputi Kertapati-Lubuklinggau dan Kertapati-Tarahan Lampung.

Pengangkutan barang dalam volume besar dan dengan jarak yang cukup jauh diangkut dengan menggunakan kereta api atau kapal. Provinsi Sumatera Selatan memiliki jalur kereta api rute Palembang-Lampung dan Palembang-Lubuklinggau. Dari 675,95 km jalan kereta api yang ada di Sumatera bagian selatan sebagian besar (89%) merupakan *single track* dan sisanya sepanjang 75 km merupakan jalur *double track*. Dari sisi kemampuan beban gandar sebagian besar jalan kereta api di Sumatera Selatan mempunyai kemampuan maksimal 13 ton dan baru sebagian kecil (32%) yang mempunyai beban gandar mencapai 18 ton.

Tabel 2. 46 Rute dan Panjang Rel PT. KA Divre III di Wilayah Sumbagsel

No	Lintasan	Panjang (Km)	Beban Gandar (Ton)
1	Kertapati-Prabumulih	77,8	13
2	Prabumulih-Baturaja	96	13
3	Baturaja-Martapura	32	18
4	Martapura-Kota Bumi	98	18
5	Kota Bumi-Tanjung Karang	86	18
6	Prabumulih-Tanjung Karang	74	13
7	Muara Enim-Lahat	38,3	13
8	Lahat-Tebing Tinggi	66	13
9	Tebing Tinggi-Lubuklinggau	49	13
10	Lintasan Lainnya	58,85	13
Total		675,95	

Sumber: PT. KA Divre III Wilayah Sumbagsel, 2023

Provinsi Sumatera Selatan memiliki moda *Light Rail Transit* (LRT) sepanjang 23,4 km yang dibangun dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin sampai Komplek Olahraga Jakabaring. Terdapat 13 stasiun, yaitu stasiun Bandara SMB II, Asrama Haji, Pundi Kayu, RSUD, Garuda Dempo, Demang Lebar

Daun, Bumi Sriwijaya, Dishub, Cinde, Ampera, Polresta, Jakabaring, dan DJKA. LRT dioperasikan pada tanggal 23 Juli 2018, di mana pengoperasional LRT dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia.

Pertumbuhan penumpang LRT sangat baik, kondisi ini terlihat dari adanya peningkatan jumlah rata-rata penumpang per bulanan. Pada tahun 2021, jumlah penumpang LRT sebanyak 1.599.133 orang dan meningkat menjadi 4.082.719 orang pada tahun 2023. Peningkatan ini dorong oleh mulai efektifnya angkutan umum *Feeder LRT* sehingga memberikan koneksi penumpang bisa *point to point*.

Tabel 2. 47 Jumlah Penumpang Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan

No.	Bulan	Penumpang		
		2021	2022	2023
1	Januari	102.919	193.990	316.521
2	Februari	91.648	156.520	261.581
3	Maret	117.297	195.842	279.622
4	April	112.398	156.521	361.765
5	Mei	147.850	355.840	336.260
6	Juni	159.642	260.710	355.364
7	Juli	102.552	245.984	370.468
8	Agustus	89.951	234.443	345.598
9	September	125.082	257.444	351.428
10	Oktober	178.517	310.270	344.388
11	November	173.679	310.171	342.228
12	Desember	197.598	410.000	417.496
Total		1.599.133	3.087.735	4.082.719

Sumber: PT. KA Divre III Wilayah Sumbagsel, 2023

(3) Infrastruktur Transportasi Air

Sumatera Selatan mempunyai banyak aliran sungai yang juga dapat dimanfaatkan untuk moda transportasi. Daerah yang memiliki akses ke alur sungai terdapat 8 kabupaten, 62 kecamatan, dan 356 desa/kelurahan atau 11,59% dari 3.079 desa di Sumatera Selatan.

Pelabuhan menjadi faktor penting dalam arus lalu lintas barang dan jasa di wilayah perairan. Sumatera Selatan memiliki pelabuhan Palembang sebagai pelabuhan sungai terbesar di Wilayah Sumatera dan menjadi urat nadi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan bongkar muat didominasi oleh barang curah kering dan peti kemas, di samping juga melayani barang dengan jenis kemasan lain. Pelabuhan Palembang memiliki sub-pelabuhan yang sangat potensial dan terbuka bagi kerjasama investasi, yaitu

Pelabuhan Sungai Lais, didukung oleh areal yang cukup luas untuk kegiatan industri pengolahan. Untuk mengantisipasi peningkatan arus komoditas di masa mendatang, pelabuhan ini telah memiliki terminal peti kemas yang dilengkapi dengan berbagai peralatan modern yang mampu menjamin pelayanan kapal dan barang.

Angkutan Sungai (Kapal) mengalami penurunan jumlah yang beroperasi antara lain dipengaruhi oleh pembukaan jalan baru dan pendangkalan pada alur pelayaran sungai sebagai dampak dari sedimentasi. Selain itu Pelabuhan Boom Baru Palembang yang saat ini sebagai *outlet* utama untuk pengangkutan barang melalui kapal juga memiliki beberapa kendala antara lain: sulit untuk dikembangkan karena berada di tengah pemukiman, kedalaman alur pelayaran relatif dangkal, sehingga pelayaran sangat tergantung dengan pasang surut sekitar 6 jam/hari dan panjang alur pelayaran sungai Musi (Kelas II dan Kelas III) sepanjang 221 *Nautical Mile*, Alur Sungai Banyuasin (Kelas II) sepanjang 11 *Nautical Mile* dan Alur Sungai Lematang 115 *Nautical Mile*.

Sistem pengangkutan dengan moda transportasi laut yang dikelola secara baik dan efisien merupakan faktor yang sangat penting untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Sumatera Selatan memiliki pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api yang menghubungkan antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 2. 56 Pelabuhan Penyebrangan Tanjung Api-api

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

Sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional Dermaga Laut Regional Tanjung Api-Api ditetapkan sebagai Pelabuhan Pengumpul. Pada tahun 2019 dermaga tersebut sudah

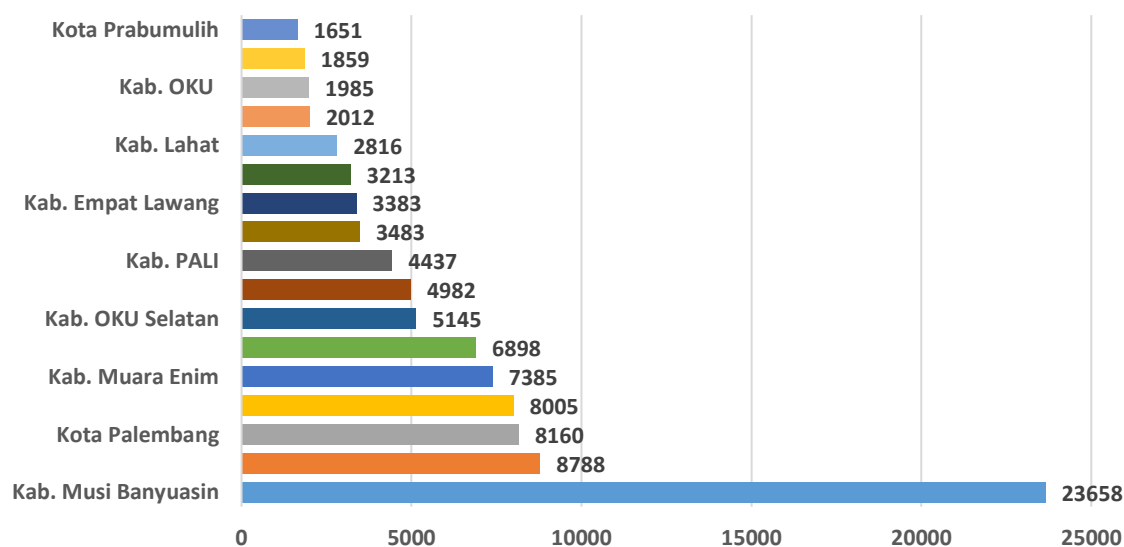
diresmikan dan mulai beroperasi sebagai pelabuhan pengumpul, Kementerian Perhubungan menunjuk PT. Pelindo dan KSOP untuk mengelolanya.

(4). *Infrastruktur Transportasi Udara*

Pelabuhan udara komersial pada tahun 2022 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3 buah, yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) di Kota Palembang, Bandar Udara Silampari di Kota Lubuklinggau dan Bandar Udara Atung Bungsu yang terletak di Kota Pagar Alam. Jumlah penerbangan komersial terjadwal yang datang untuk domestik dan internasional di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang di tahun 2022 tercatat sebanyak 8.629 unit pesawat atau naik 30,66% dan sebanyak 43 unit pesawat yang naik sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2021. Jumlah penerbangan komersial terjadwal yang berangkat untuk domestik dan internasional di tahun 2022 tercatat sebanyak 8.628 unit pesawat atau naik 30,12% dan sebanyak 47 unit pesawat yang juga naik sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2021.

2.3.3.2 Infrastruktur Permukiman dan Perumahan

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 97.680 Unit, paling sedikit berada di Kota Prabumulih sebesar 1.651 Unit dan paling tinggi ada di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 23.658 unit. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018 – 2023 tersebar di Kabupaten/Kota sebanyak 36.131 unit sehingga masih terdapat GAP sebesar 61.729 unit. Dilihat dari *Backlog* kepemilikan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pembangunan perumahan berbasis komunitas. Perumahan Berbasis Komunitas merupakan program pemerintah yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam hal ini adalah komunitas masyarakat yang memiliki pekerjaan tertentu. MBR yang tergabung dalam komunitas ini akan membeli lahan perumahan yang telah disediakan dan difasilitasi oleh komunitasnya, sedangkan untuk bahan bangunan rumah dan upah dibantu oleh pemerintah.



Gambar 2. 57 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Tabel 2. 48 Jumlah Kepala Keluarga Kekurangan Rumah (Backlog) di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

NO	WILAYAH	JML PENDUDUK TAHUN 2023	JUMLAH KK	Status Kepemilikan Rumah (unit)				Backlog (4-5) Unit
				Milik sendiri	Kontrak/ sewa	Bebas Sewa	Lainnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ogan Komering Ulu	383,039	116,687	94,703	5,683	15,624	677	21,759
2	Ogan Komering Ilir	807,085	263,200	235,827	2,290	25,083	-	27,373
3	Muara Enim	640,962	200,314	173,973	3,946	20,833	1,562	26,341
4	Lahat	450,281	137,318	116,226	4,477	15,874	742	21,092
5	Musi Rawas	411,787	135,040	122,765	486	11,924	-	12,275
6	Musi Banyuasin	651,950	222,445	196,308	5,650	19,775	734	26,137
7	Banyuasin	885,902	277,476	251,310	7,686	13,985	4,467	26,166
8	OKU Selatan	429,535	124,857	106,828	5,693	12,323	-	18,029
9	OKU Timur	674,184	218,197	212,698	-	5,499	-	5,499
10	Ogan Ilir	436,141	136,952	123,078	1,383	12,024	466	13,873
11	Empat Lawang	345,641	102,374	83,650	2,600	16,124	-	18,724
12	Pali	205,384	63,199	56,273	575	6,137	215	6,927
13	Muratara	198,413	62,961	54,178	1,259	6,498	1,026	8,783
14	Kota Palembang	1,718,440	530,007	369,150	48,920	106,266	5,724	160,857
15	Kota Prabumulih	203,312	62,573	52,786	5,300	4,480	-	9,786
16	Kota Pagar Alam	149,199	45,797	34,733	3,183	6,709	1,172	11,065
17	Kota Lubuk Linggau	246,046	74,320	60,935	5,529	7,856	-	13,385
Sumatera Selatan		8,837,301	2,773,719	2,345,422	104,661	307,014	16,785	428,073

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

Berdasarkan Data Statistik kesejahteraan rakyat tahun 2023 BPS, Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang tidak memiliki rumah pada tahun 2023 sebanyak 2,773,719 KK dan jumlah KK yang memiliki rumah sendiri pada tahun 2023 sebanyak 2.345.422 KK.



Gambar 2. 58 Jumlah Kepala Keluarga MBR yang Tidak Memiliki Rumah di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2023 (diolah)

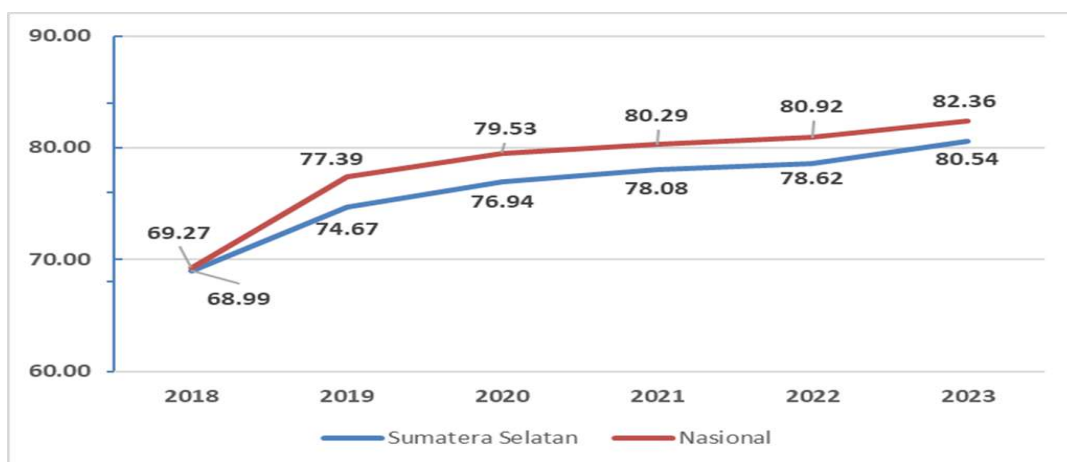
2.3.3.3 Infrastruktur Air Minum

Air bersih merupakan kebutuhan pokok yang selalu dikonsumsi masyarakat dan sangat berpengaruh pada kelancaran aktivitas masyarakat. Seiring meningkatnya jumlah penduduk di suatu wilayah, tuntutan pemenuhan kebutuhan akan air bersih merupakan hal yang tak terelakkan. Jumlah perusahaan air bersih di Provinsi sebanyak 18 perusahaan, terdiri dari 16 perusahaan pemerintah dan 2 perusahaan swasta yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 10.181 liter per detik di tahun 2020, dan kapasitas produksi efektif sebesar 9.102 liter per detik. Berdasarkan Data Susenas BPS pada tahun 2023 cakupan Pelayanan Air Minum Layak di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 87,19%, di mana dari angka tersebut terdapat pelayanan Akses Air minum perpipaan sebesar 28,62% dan Akses Air Minum Aman sebesar 7,59%.

Data RPJMN 2020-2024 menunjukkan bahwa akses rumah tangga terhadap fasilitas air bersih layak di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2019 sebesar 64,75% menjadi 87,19% pada tahun 2023. Pada tahun 2023, akses capaian tertinggi dicapai Kota Lubuklinggau sebesar 97,52% dan terendah di Kabupaten Empat Lawang sebesar 65,94%. Untuk meningkatkan capaian tersebut pemerintah pusat telah menentukan kegiatan prioritas strategis berupa Akses Air Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) di mana pelaksanaan kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha.

2.3.3.4 Sanitasi, Air Limbah dan Persampahan

Akses sanitasi yang layak Provinsi Sumatera Selatan sebesar 80,54% pada tahun 2023. Kondisi lahan basah di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Selatan menjadi tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan cakupan sanitasi yang layak. Diperlukan biaya yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur sanitasi di daerah lahan basah dibandingkan di daerah lahan kering. Tantangan yang dihadapi yaitu meningkatkan keterpaduan penanganan sanitasi antar Kabupaten/Kota. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.



Gambar 2. 59 Persentase Akses Sanitasi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 - 2023

Sumber: BPS Sumsel, 2023

Tabel 2. 49 Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2016 - 2023

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Ogan Komering Ulu	76,29	80,15	82,94	84,39	80,78
2	Ogan Komering Ilir	67,48	74,72	68,93	63,95	69,73
3	Muara Enim	77,37	84,99	84,80	84,16	85,58
4	Lahat	66,06	69,34	70,52	70,35	70,19
5	Musi Rawas	71,41	71,78	69,34	73,69	74,50
6	Musi Banyuasin	72,41	74,85	71,81	80,71	83,52
7	Banyu Asin	64,63	73,06	72,12	72,80	74,53
8	OKU Selatan	57,95	53,86	57,68	57,54	63,20
9	OKU Timur	84,57	78,80	84,63	87,48	88,25
10	Ogan Ilir	70,92	73,28	68,52	71,55	76,17
11	Empat Lawang	58,36	57,60	53,52	66,93	67,81

Untuk Kondisi Sarana persampahan Provinsi Sumatera Selatan memiliki 28 unit TPS3R dengan jumlah TPS3R terbanyak terdapat di Kabupaten Muara Enim sebanyak 4 TPS3R. Beberapa TPS3R telah menggunakan opsi teknologi pemilahan, pengkomposan dan pencacahan plastik dalam operasional TPS3R. Pengelolaan sampah di Provinsi Sumatera selatan pada Tahun 2023.

Tabel 2. 50 Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Timbulan (ton)	Pengurangan Sampah (ton)	Jumlah Timbulan Real di TPA (Ton)	Sampah Tidak Terkelola
1	Ogan Komering Ilir	55.556,50	12.076,37	30,09	43.450,04
2	Ogan Komering Ulu	113.429,59	867,73	55,56	112.506,30
3	Muara Enim	157.811,87	41.253,09	29,53	116.529,25
4	Lahat	98.406,85	8.172,63	67,5	90.166,72
5	Musi Rawas	93.259,27	4.402,73	93,26	88.763,28
6	Banyuasin	211.235,90	10.536,40	30,3	200.669,20
7	Musi Banyuasin	94.145,00	22.583,13	31,8	71.530,07
8	Ogan Ilir	297,52	25,55	40,5	231,47
9	OKU Selatan	59.708,31	206,56	34,22	59.467,53
10	OKU Timur	102.981,68	87.885,06	25,55	15.071,07
11	Empat Lawang	173,10	19,00	19	135,10
12	Palembang	439.815,66	93.169,76	900,28	345.745,62
13	Prabumulih	35.918,19	9.246,94	99,74	26.571,51
14	Pagaralam	96,54	38,23	58,31	-
15	Lubuk Linggau	62.468,47	51,36	87,69	62.329,42
16	PALI	37.316,32	19,50	38,22	37.258,60
17	Musi Rawas Utara	132,93	32,63	49,69	50,61
Sumsel		1.562.753,70	290.586,67	1.691,24	1.270.475,79

Sumber: Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN), 2023

2.3.3.5 Listrik

Produksi listrik di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 (data termutakhir) sebesar 6.645.989.553,23 kWh dan listrik terjual sebesar 5.878.306.668,42 kWh. Jumlah pelanggan listrik di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 sebanyak 2.372.578 pelanggan yang didominasi oleh jumlah pelanggan untuk rumah tangga. Tingkat pemenuhan listrik per kapita sebesar 660,64 kWh masih di bawah nasional sebesar 1.112 kWh. Sementara itu, tingkat elektrifikasi listrik tahun 2021 sebesar 99,37% dan pertumbuhan listrik rata-rata 6,66%, pertumbuhan listrik ini mengindikasikan perekonomian daerah mengalami peningkatan karena peningkatan konsumsi listrik diiringi peningkatan aktivitas industri, reatail, dan pariwisata. Energi listrik di Sumatera Selatan masih mengandalkan PLTU dan PLTG yang bersumber dari energi fosil batubara. Porsi kapasitas pembangkit listrik

terbarukan mencapai 7,68% dan masih di bawah porsi kapasitas nasional yaitu sebesar 15,47%. Provinsi Sumatera Selatan juga memanfaatkan jaringan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan perusahaan. Adanya konversi dari BBM ke bahan bakar gas memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan jaringan gas.

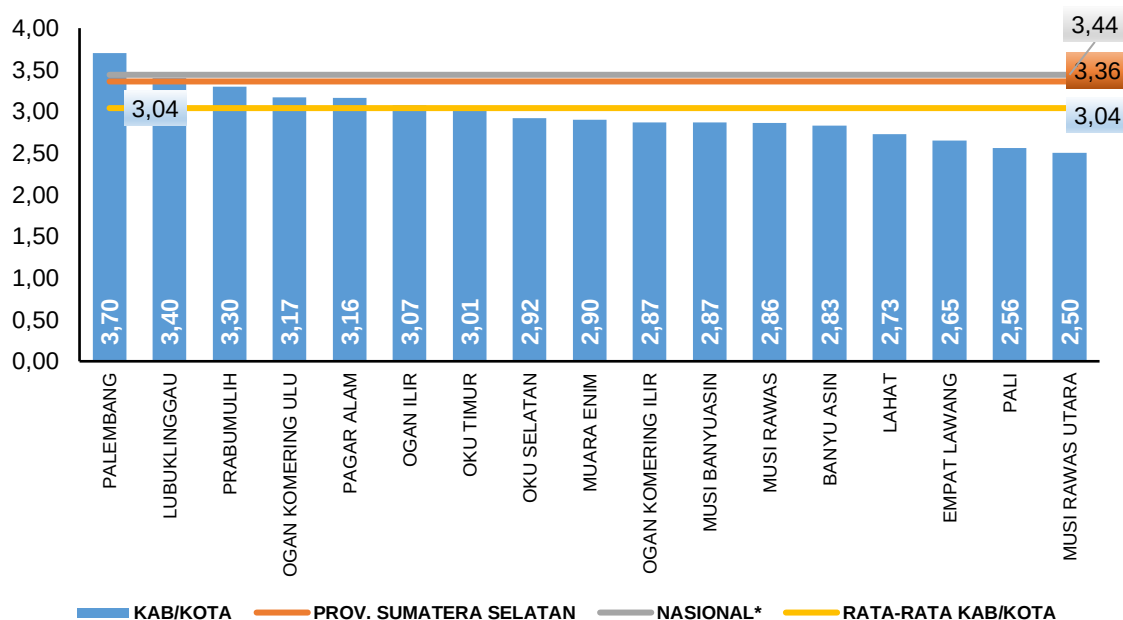
2.3.3.6 Telekomunikasi

Semakin luas wilayah jangkauan jaringan telekomunikasi digital akan memberikan dampak yang signifikan terhadap percepatan pembangunan daerah dari ekonomi, bisnis, pariwisata dan pendidikan. Jangkauan jaringan telekomunikasi sangat dibutuhkan dalam mendorong digitalisasi ekonomi. Jangkauan 4G di permukiman Sumatera Selatan tahun 2022 (data termutakhir) sebesar 98,22%. Masih terdapat 38 desa yang belum sama sekali terjangkau jaringan komunikasi dan sebanyak 145 desa belum terjangkau jaringan internet. Desa-desa yang paling banyak belum terjangkau jaringan internet yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu Timur, Penukal Abab Lematang Ilir dan Ogan Komering Ilir. Daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan komunikasi karena berlokasi di kawasan terpencil dengan topografi perbukitan dan perairan yang sulit di akses.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif sehingga dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

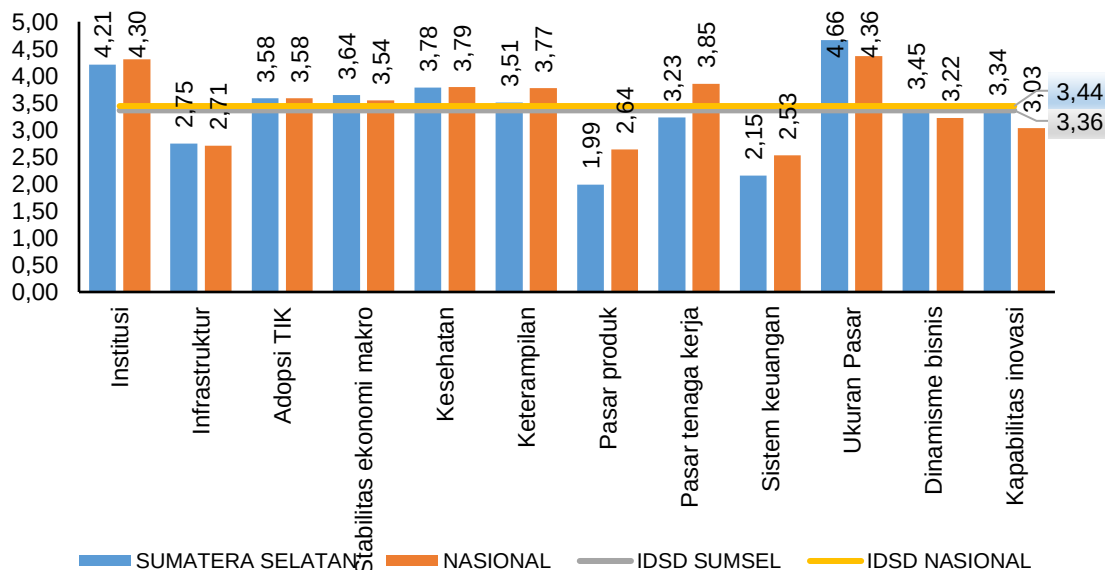
Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 (data termutakhir) yaitu sebesar 3,36, skor ini relatif lebih rendah dibandingkan skor IDSD Nasional yang mencapai 3,44 pada tahun 2023 (data termutakhir). Skor IDSD kabupaten/kota tahun 2023 yang tertinggi adalah Kota Palembang yaitu sebesar 3,70, kemudian diikuti oleh Kota Lubuklinggau yaitu sebesar 3,40, skor kedua kota ini berada di atas skor Provinsi Sumatera Selatan dan nasional. Sementara kabupaten/kota yang memiliki skor terendah dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah Musi Rawas Utara yaitu sebesar 2,50 pada tahun 2023.



Gambar 2. 61 Skor Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023

Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan nilai pada komponen Lingkungan pendukung dan sumber daya manusia. Skor IDSD ini bergantung pada (i) kualitas infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan; (ii) kualitas pendidikan dan kesehatan; (iii) keterampilan dan produktivitas tenaga kerja; (iv) daya saing produk dan jasa; dan (v) iklim inovasi.



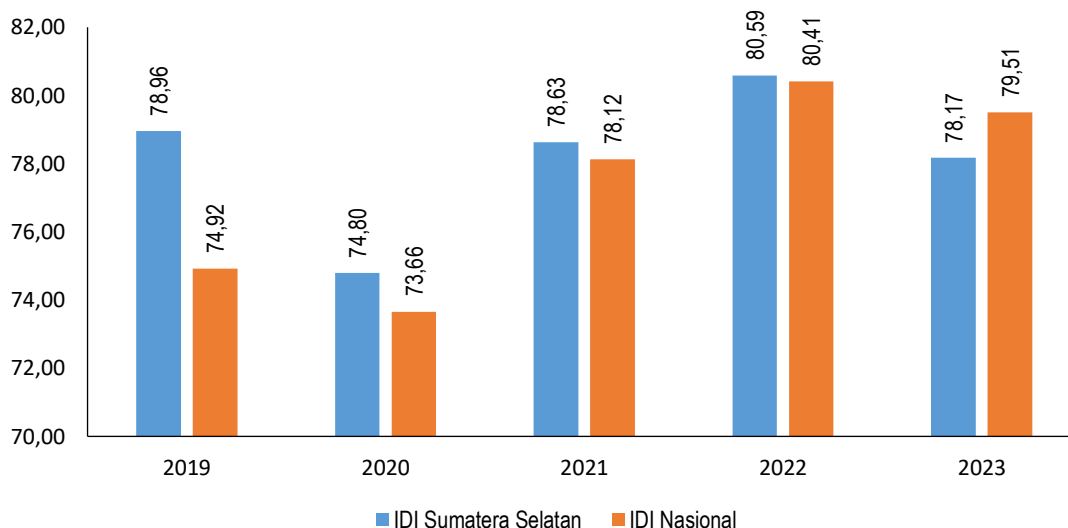
Gambar 2. 62 Skor Indeks Daya Saing Daerah menurut Pilar di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023

Kerangka pengukuran skor Indeks Daya Saing Daerah 2023 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Skor komponen tertinggi di Sumatera Selatan pada pilar ukuran pasar yaitu sebesar 4,66 relatif lebih tinggi dibandingkan skor nasional yaitu 4,36 pada 2023, sementara skor yang relatif lebih tinggi dibandingkan skor nasional yaitu pada pilar stabilitas ekonomi makro yaitu sebesar 3,64, dinamisme bisnis (3,45), kapabilitas inovasi (3,34), dan Infrastruktur (2,75).

2.3.4.1 Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah sebuah indeks yang mengukur tingkat demokrasi di Indonesia. IDI menggunakan 10 indikator untuk mengukur tingkat demokrasi di Indonesia diantaranya yaitu: (i) pemilihan umum; (ii) kebebasan sipil; (iii) pemerintahan yang baik; (iv) partisipasi politik; (v) keadilan sosial; (vi) kebebasan media; (vii) kebebasan beragama; (ix) kebebasan berpendapat; dan (x) kebebasan berserikat. IDI memiliki tiga kategori yaitu nilai IDI kurang dari 60 adalah kategori rendah; nilai IDI $60 \leq \text{IDI} \leq 80$ adalah kategori sedang; dan nilai IDI lebih dari 80 adalah kategori tinggi.



Gambar 2. 63 Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Selatan, 2019-2023

Sumber: BPS Sumatera Selatan

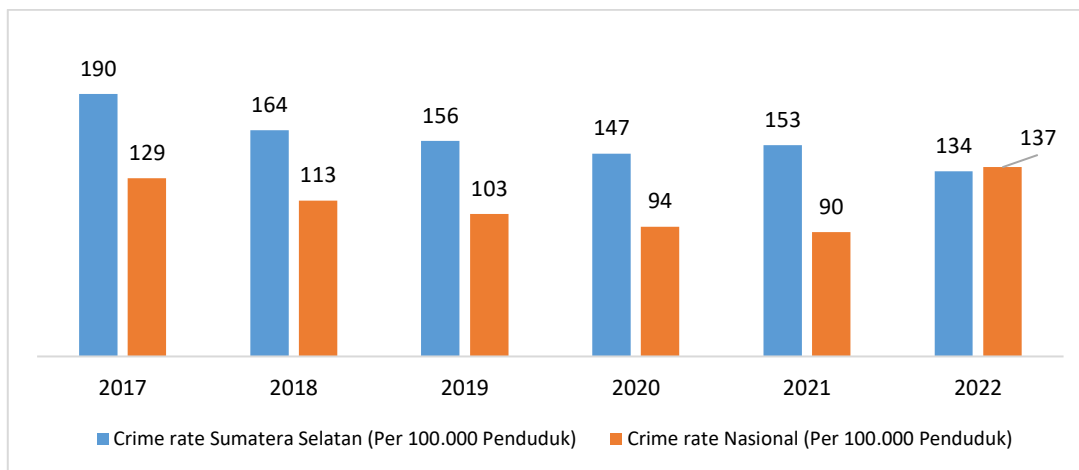
Nilai Indeks Demokrasi Indonesia untuk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 (data termutakhir) yaitu sebesar 78,17, angka ini berada pada kategori tinggi. IDI Sumatera Selatan tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan IDI nasional yang mencapai 79,51. IDI Sumatera Selatan juga paling tinggi dibandingkan provinsi Sumbagsel lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Sumatera Selatan ini memiliki karakteristik demokrasi yang kuat, berfungsi, dan masyarakat yang dapat terlibat dalam proses politik. Meskipun tingkat demokrasi di Indonesia terus meningkat,

masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas, adapun tantangan tersebut antara lain: (i) tingkat korupsi; (ii) ketidaksetaraan gender; (iii) intoleransi antar suku dan agama; dan (iv) kekerasan terhadap anak dan perempuan. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi IDI Provinsi Sumatera Selatan antara lain: (i) penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil dalam peningkatan kualitas demokrasi; (ii) kebebasan sipil dan hak asasi manusia dari demokrasi; (iii) keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah; dan (iv) partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam mewujudkan demokrasi yang partisipatif.

2.3.4.2 Indeks Kriminalitas

Indeks kriminalitas adalah ukuran atau metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat kejahatan atau tindakan kriminal dalam suatu wilayah. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah tingkat risiko penduduk mengalami tindak kejahatan (*crime rate*) merupakan statistik yang mengindikasikan peluang penduduk berisiko mengalami tindak pidana. Semakin kecil nilai *crime rate* menunjukkan indikasi yang baik sebab semakin kecil risiko penduduk mengalami tindak pidana.

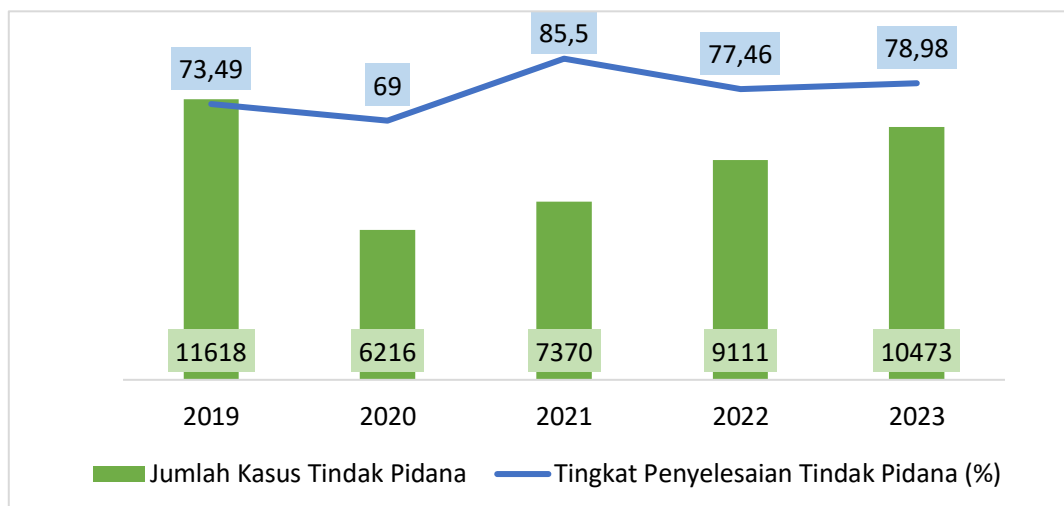
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, risiko penduduk terkena tindak pidana (*crime rate*) per 100.000 penduduk di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 (data termutakhir) adalah sebesar 134. Kondisi ini bermakna bahwa setiap 100.000 penduduk di Sumatera Selatan, terdapat 134 kasus tindak pidana yang terjadi. Risiko penduduk terkena tindak pidana tahun 2022 di Sumatera Selatan lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang sebesar 137. Namun demikian, capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di Sumatera Selatan masih cukup tinggi. Jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi di Sumatera Selatan adalah tindak pidana pencurian, yaitu sebesar 46,2% dari total tindak pidana yang terjadi. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menempati urutan kedua dengan persentase sebesar 12,1%, diikuti oleh tindak pidana narkoba sebesar 10,4%. Risiko penduduk terkena tindak pidana di Sumatera Selatan lebih tinggi di wilayah kabupaten/kota yang memiliki penduduk lebih banyak, seperti Kota Palembang, Prabumulih, dan Lubuklinggau. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran.



Gambar 2. 64 Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (Crime rate) (Per 100.000 Penduduk) di Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2022

Sumber: BPS Sumatera Selatan

Selain itu, indikator persentase tindak kejahatan yang diselesaikan juga dapat menjadi ukuran untuk melihat kinerja penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana. Persentase tindak kejahatan yang diselesaikan (*clearance rate*) ini merupakan statistik yang menyatakan persentase penyelesaian tindak pidana oleh polisi. Semakin besar persentase penyelesaian tindak pidana menunjukkan semakin besar tindak pidana yang berhasil diselesaikan oleh polisi.



Gambar 2. 65 Jumlah Kasus dan Penyelesaian Tindak Pidana di Provinsi Sumatera Selatan (%), 2019-2023

Sumber: BPS Sumatera Selatan, 2024

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persentase penyelesaian tindak pidana di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 (data termutakhir) yaitu sebesar 78,98% dengan jumlah kasus tindak pidana sebanyak 10.473, persentase ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar

77,46% pada 2022. Peningkatan (penurunan) persentase ini bergantung dari beberapa faktor, antara lain: (i) kualitas penyidikan dan penuntutan oleh Polri dan Kejaksaan Agung; (ii) koordinasi dan kerja sama antar instansi penegak hukum; dan (iii) kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana.

2.3.4.3 Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama

Indeks kerukunan antar umat beragama di Sumatera Selatan selama 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan, pada tahun 2017 sebesar 69,20 menurun menjadi 67,05 pada tahun 2022. Secara umum beberapa indikator yang berpengaruh terhadap indeks kerukunan antarumat beragama menurun yaitu: a) keberatan penganut agama lain membangun rumah ibadat tempat tinggal Anda setelah mendapat izin dari pemerintah setempat, b) keberatan penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/kelurahan tempat tinggal Anda, c) Keberatan anak-anak Anda bermain/berteman dengan anak-anak penganut agama lain, d) Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati/Kepala Desa), e) bersedia berkunjung ke rumah penganut agama lain (atau rumah Anda dikunjungi penganut agama lain), f) Bersedia terlibat usaha yang dikelola bersama teman/sahabat berbeda agama, g) bersedia berpartisipasi dalam komunitas/organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektifitas, pelayananan prima. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi penting dalam keberlangsungan penyelenggaraan yang berkelanjutan dan berkeadilan di masa yang akan datang. Evaluasi SPBE tahun 2018 menunjukkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai 2,83 dengan predikat Baik, dan di tahun 2021 Sumatera Selatan kembali memperoleh predikat Baik tetapi dengan nilai sebesar 2,62. Beberapa domain yang lemah yaitu Manajemen SPBE dengan nilai 1,09 atau setara predikat kurang, hal ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen SPBE belum optimal. Domain kedua yang masih rendah yaitu Tata Kelola SPBE dengan nilai 2,30 dengan predikat kurang, oleh karena itu perlu dioptimalkan aspek perencanaan strategis, teknologi informasi dan komunikasi dan penyelenggara SPBE.

Tabel 2. 51 Nilai Indeks SPBE Sumatera Selatan

No	Nama Instansi	Nilai 2018/2019		Nilai 2021/2022	
		Indeks	Predikat	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Sumsel	2,83*	Baik	2,62***	Baik
2	Pemerintah Kab. Banyuasin	2,03	Cukup	1,86****	Cukup
3	Pemerintah Kab. Empat Lawang	1,60*	Kurang	1,86****	Cukup
4	Pemerintah Kab. Lahat	2,03*	Cukup	2,14****	Cukup
5	Pemerintah Kab. Muara Enim	3,14*	Baik	2,91****	Baik
6	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	2,11*	Cukup	2,80****	Baik
7	Pemerintah Kab. Musi Rawas	2,79	Baik	1,92****	Cukup
8	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	1,3**	Kurang	1,53****	Kurang
9	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	1,21*	Kurang	2,52****	Cukup
10	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	3,12	Baik	2,39****	Cukup
11	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	2,94	Baik	2,67****	Baik
12	Pemerintah Kab. OKU Selatan	2,07*	Cukup	1,93****	Cukup
13	Pemerintah Kab. OKU Timur	1,16*	Kurang	2,25****	Cukup
14	Pemerintah Kab. PALI	1,20**	Kurang	1,83****	Cukup
15	Pemerintah Kota Lubuklinggau	1,97*	Kurang	2,45****	Cukup
16	Pemerintah Kota Pagar Alam	1,76*	Kurang	2,01****	Cukup
17	Pemerintah Kota Palembang	3,02	Baik		
18	Pemerintah Kota Prabumulih	1,72*	Kurang	2,62****	Baik

*) Indeks SPBE 2019; *) Indeks SPBE 2018; ***) Indeks SPBE 2021; ****) Indeks SPBE 2022

Sumber: <https://1data.menpan.go.id/>, 2023

Dilihat pemerintah kabupaten/kota, pada tahun 2018/2019 terdapat beberapa pemerintah daerah yang memiliki peringkat Baik yaitu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Komering Ulu, dan Kota Palembang. Namun di tahun 2022 (data termutakhir), Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami penurunan predikat dari baik menjadi cukup.

2.4.2 Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas birokrasi. Implementasi reformasi birokrasi di Provinsi Sumatera Selatan terlihat dari hasil evaluasi reformasi yang memiliki indeks RB Baik (predikat B). Akan tetapi, keberhasilan reformasi birokrasi di pemerintah provinsi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota, hal ini terlihat dari predikat RB yang Sebagian besar masih tergolong cukup dan kurang. Oleh karena itu ke depan perlu didorong penguatan tata laksana, penguatan akuntabilitas, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2. 52 Indeks Pelayanan Publik Sumatera Selatan

No	Kabupaten & Kota	RB	SAKIP	IPP
1	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	CC	B	A-
2	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	C	CC	B
3	Pemerintah Kab. Muara Enim	B	BB	B
4	Pemerintah Kab. Lahat	CC	B	C
5	Pemerintah Kab. Musi Rawas	CC	BB	B
6	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	C	B	B
7	Pemerintah Kab. Banyuasin	CC	B	A-
8	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	C	B	B-
9	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	C	B	B-
10	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	C	CC	B-
11	Pemerintah Kab. Empat Lawang	C	B	C
12	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	C	B	D
13	Pemerintah Kota Palembang	CC	B	A-
14	Pemerintah Kota Pagar Alam	C	B	C-
15	Pemerintah Kota Lubuklinggau	CC	BB	A-
16	Pemerintah Kota Prabumulih	C	B	B
17	Pemerintah Kab. Penukal Abab Pematang Ilir	C	CC	B-

Sumber: <https://1data.menpan.go.id/>, 2023

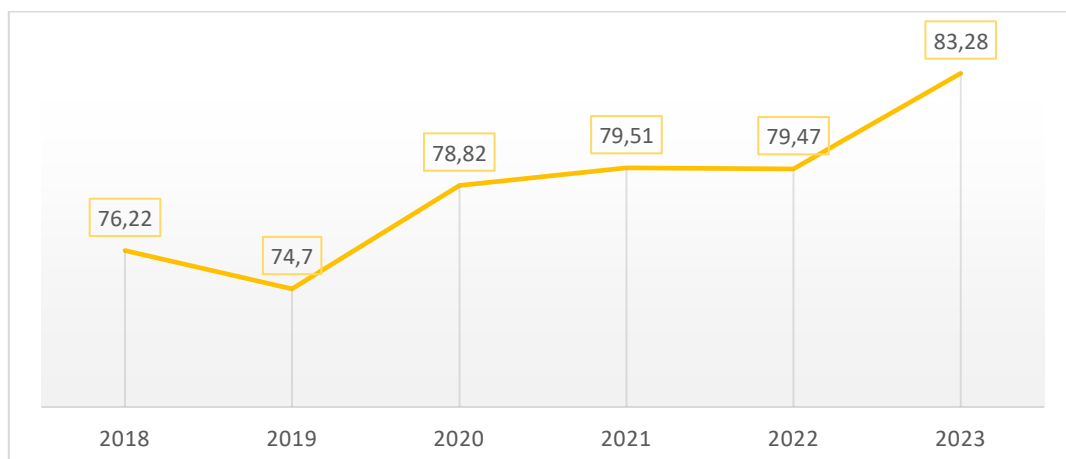
Dalam nilai Indeks pelayanan publik (IPP) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 terkategori pelayanan prima. Secara umum indeks pelayanan publik pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan tergolong baik, walaupun masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang terkategori cukup, dan buruk. Daerah yang memperoleh predikat cukup yaitu Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagar Alam sedangkan daerah yang termasuk dalam predikat buruk adalah Kabupaten Musi Rawas Utara. Beberapa faktor yang menyebabkan IPP kurang optimal yaitu belum optimalnya profesionalisme SDM aparatur, sistem informasi pelayanan publik yang masih minim terutama pada saat pemuktakhiran

data, dan belum tumbuh kembangnya inovasi pelayanan. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) daerah kabupaten/kota rata-rata sudah baik dan sangat baik, walaupun masih terdapat kabupaten/kota yang tergolong kurang.

2.4.3 Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi dari suatu daerah. IID dirancang untuk mengukur tingkat inovasi dalam berbagai bidang, termasuk tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya. IID terdiri dari 3 komponen, yaitu: (i) inovasi tata kelola pemerintahan, yang mengukur tingkat inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (ii) inovasi pelayanan publik, yang mengukur tingkat inovasi dalam penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat; dan (iii) inovasi daerah lainnya, yang mengukur tingkat inovasi dalam bidang-bidang lainnya, seperti ekonomi, sosial, dan budaya.

Provinsi Sumatera Selatan berhasil meraih predikat provinsi sangat inovatif dan berada pada posisi pertama tahun 2023 (data termutakhir). Predikat ini diraih oleh Provinsi Sumatera Selatan untuk keempat kalinya secara berturut-turut, sejak tahun 2020. Provinsi Sumatera Selatan telah menunjukkan peningkatan Indeks Inovasi Daerah secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, Provinsi Sumatera Selatan kembali berhasil meraih peringkat pertama dengan skor 83,28. Peningkatan Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (i) komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendorong inovasi daerah; (ii) dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan swasta; dan (iii) peningkatan jumlah dan kualitas inovasi daerah.



Gambar 2. 66 Skor Indeks Inovasi Daerah di Provinsi Sumatera Selatan, 2018-2023

Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Faktor-faktor penghambat peningkatan Indeks Inovasi Daerah (IID) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari: (i) Kurangnya dukungan politik dari pemerintah daerah; (ii) kurangnya anggaran untuk penelitian dan pengembangan; (iii) kurangnya sumber daya manusia yang kompeten; dan (iv) kurangnya budaya inovasi. Sementara itu eksternal terdiri dari: (i) persaingan inovasi dari daerah lain; (ii) kebijakan pemerintah pusat; dan (iii) lingkungan bisnis yang tidak kondusif akan menghambat inovasi.

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Provinsi Sumatera Selatan selama 2005-2025 telah mengalami perkembangan di berbagai bidang pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan. Berbagai kebijakan strategis dilaksanakan untuk mewujudkan Sumatera Selatan unggul dan terdepan. Pembangunan telah memberikan hasil signifikan dan telah berhasil menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di Pulau Sumatera. Sumatera Selatan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia secara merata di segala aspek pembangunan serta terus berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.

2.5.1 Capaian Pembangunan 2005-2025

Kinerja Bidang Ekonomi, Sosial dan Infrastruktur Membaik. Selama dua dekade terakhir, Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai perkembangan ekonomi yang konsisten dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5% telah berdampak positif, dengan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita. Tingkat kemiskinan secara agregat menurun lebih dari 10% dalam 20 tahun. Perkembangan ekonomi Sumatera Selatan semakin berkualitas, sebagaimana tercermin dalam peningkatan Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) dari 4,78% pada tahun 2012 menjadi 5,97% pada tahun 2022. Dalam beberapa periode, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan bahkan melampaui capaian nasional, seperti pada periode 2011-2012 dan 2016-2020. Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, Sumatera Selatan memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022, mencapai 5,23%. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan didukung oleh beberapa sektor, termasuk sektor primer berbasis sumber daya alam seperti pertambangan dan penggalian (27,64%) serta pertanian, kehutanan, dan perikanan (13,23%). Demikian pula Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) terus mengalami peningkatan, pada tahun 2009 sebesar

69,3% meningkat menjadi 72,12% pada tahun 2022, dan pada tahun yang sama Gas Rumah Kaca (GRK) mengalami penurunan sebesar 17,60%.

Aktivitas **ekonomi wilayah yang inklusif** telah mendorong peningkatan PDRB per kapita yang meningkat signifikan dari Rp 25,9 juta tahun 2005 menjadi Rp 39,68 juta per kapita per tahun di tahun 2022. Peningkatan pendapatan per kapita memiliki dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar telah meningkatkan kualitas hidup. Pembangunan manusia, diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terus membaik sejak tahun 2005 sehingga tergolong tinggi yaitu sebesar 72,48 pada tahun 2022. Akselerasi pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan telah mendorong percepatan peningkatan kualitas sumber manusia di Sumatera Selatan. Angka harapan hidup saat lahir mengalami peningkatan yang tinggi sejak 2010, dan harapan lama sekolah serta rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan yang tinggi.

Tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan pada tahun 2005 sebesar 21,01% turun menjadi 11,90% pada Maret 2022 atau secara agregasi menurun hampir 10% dalam 20 tahun terakhir. Penurunan angka kemiskinan didukung oleh menurunnya tingkat pengangguran dan penguatan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran menurun dari 11,24% di tahun 2005 menjadi 4,11% pada tahun 2022, berada di bawah tingkat pengangguran nasional. Prevalensi bayi *stunting* menurun menjadi 24,8% pada tahun 2021 dari 28,98% pada tahun 2019. Pembangunan infrastruktur antarwilayah menunjukkan kinerja yang baik, seperti kondisi jalan mantap yang semakin meningkat, pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera, bandara, pelabuhan, LRT, dan kereta api telah mendorong terbukanya aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Penyediaan akses dasar masyarakat terhadap air minum, sanitasi layak, listrik juga mengalami perbaikan, dan terus ditingkatkan agar mampu menjangkau seluruh penduduk dan wilayah.

Meski demikian, kemiskinan dan ketimpangan masih sering dijumpai dan cenderung memberikan kerentanan yang tidak proporsional pada kalangan masyarakat tertentu. **Nilai Tukar Petani (NTP)** di Sumatera Selatan cenderung mengalami penurunan dan mengalami defisit pada tahun 2014 hingga 2020, yang menunjukkan bahwa surplus untuk petani cenderung kecil. Perlu diperhatikan bahwa sebagian besar di antara rumah tangga petani adalah penduduk di atas 35 tahun sehingga perlu memperhatikan isu regenerasi petani usia muda. Di sektor pertambangan, sebagai sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Sumatera Selatan, juga perlu diperhatikan bagaimana sektor tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi tambang. Adapun penghidupan masyarakat di sekitar lahan gambut juga perlu diperhatikan dan

dioptimalkan, agar ekosistem yang kaya tersebut dapat menopang perekonomian lokal tanpa mengorbankan kondisi ekosistem yang rentan.

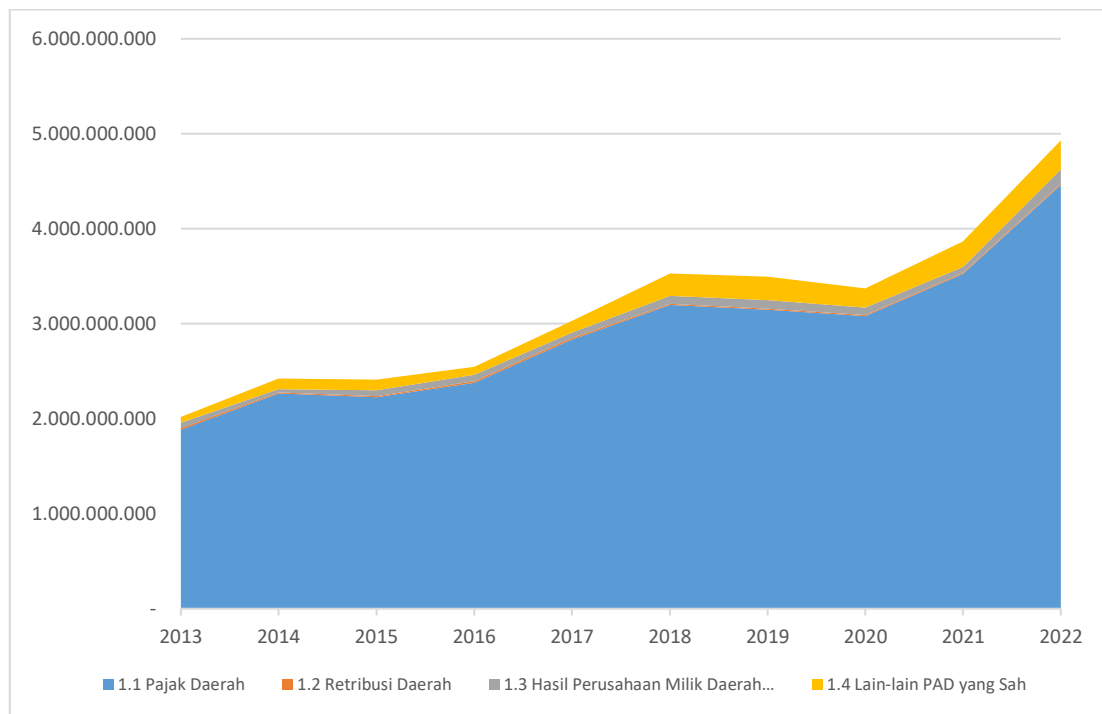
Selain itu, ke depan perlu diantisipasi juga isu kelas menengah di Sumatera Selatan yang berbasis sumber daya alam agar memiliki penghidupan yang layak. Kelas menengah sebagai kekuatan tenaga kerja yang tinggi perlu diarahkan untuk terserap dalam lapangan pekerjaan yang hijau, berbasis inovasi, dan memberikan perlindungan sosial yang kuat sehingga tidak rentan terhadap gangguan ekonomi, seperti krisis pangan, gagal panen, bencana, dan krisis ekonomi lainnya di masa depan.

Kemandirian Daerah dan Kinerja Pemerintah yang Meningkat. Tinjauan 20 tahun kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat mengindikasikan seberapa mampu pemerintah provinsi dalam mengelola anggaran pembangunannya untuk kebutuhan pembangunan, pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2005-2022, diperoleh rasio KFD Sumatera Selatan yang semakin menguat. Dari tahun 2005-2016, rasio KFD Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong rendah. Namun, dari tahun 2017 hingga 2022, terjadi penguatan rasio KFD yang cukup signifikan sehingga rasio KFD Provinsi Sumatera Selatan masuk dalam kategori tinggi. Adapun alokasi belanja pemerintah pusat untuk Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 tahun terakhir masih berpusat pada belanja untuk prasarana konektivitas darat (jalan), prasarana bidang SDA dan irigasi, jaringan sumber daya air, dan proyek perumahan dan permukiman.

Apabila dilihat dari peningkatan penerimaan daerah, dapat diketahui tahun 2017 terdapat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Transfer ke Daerah/TKD) yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selama periode pandemi COVID-19 (tahun 2020-2021), rasio KFD Provinsi Sumatera Selatan juga cenderung stabil. Kedepannya, perlu dipertahankan kekuatan fiskal daerah pemerintah provinsi Sumatera Selatan untuk memenuhi kebutuhan pembangunannya di masa yang akan datang, di antaranya melalui penguatan pendanaan alternatif.

Secara lebih spesifik, pertumbuhan PAD Provinsi Sumsel meningkat rata-rata 10,9% per tahun dalam 10 tahun terakhir. Meski demikian, pertumbuhan komponen PAD cenderung fluktuatif. Komponen penyumbang PAD yang paling tinggi yaitu pajak daerah, berupa pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor. Adapun retribusi daerah diperoleh dominan dari retribusi izin mendirikan bangunan, khususnya perizinan untuk membangun pabrik. Meskipun demikian, secara agregat, PAD Sumatera Selatan melampaui target yang telah ditetapkan. Kinerja pemerintah daerah juga mengalami peningkatan, tercermin dalam indeks reformasi birokrasi dan indeks penyelenggaraan

pemerintah daerah yang terkategori baik (B) yang diiringi perkembangan kualitas demokrasi yang baik. Pemerataan pembangunan terus dilakukan terutama di daerah perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan strategis, sinergitas pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Selatan dalam pembangunan desa telah berhasil menurunkan jumlah desa sangat tertinggal sehingga pada tahun 2022 tidak ada lagi desa dengan kategori sangat tertinggal.



Gambar 2. 67 PAD Sumatera Selatan 2013-2022

Pemerataan pembangunan terus dilakukan terutama di daerah perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan strategis, sinergitas pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Selatan dalam pembangunan desa telah berhasil menurunkan jumlah desa sangat tertinggal sehingga pada tahun 2022 tidak ada lagi desa dengan kategori sangat tertinggal.

Selain itu, pemerintah juga menunjukkan dukungan terhadap sektor unggulan lain yaitu pertanian dan kehutanan dengan alokasi anggaran 404,71 miliar di tahun 2022. Setidaknya dalam 5 tahun terakhir, masih terdapat dukungan yang kuat untuk pengembangan sektor pertambangan, pertanian dan kehutanan, serta *real estate* baik melalui APBN maupun APBD. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam perencanaan di masa yang akan datang. Mengingat arah pembangunan Provinsi Sumatera Selatan mengarah pada pertumbuhan ekonomi hijau, maka diperlukan penyesuaian alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.

2.5.2 Evaluasi Kinerja RTRW dan Rencana Sektoral

2.5.2.1. Evaluasi Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Evaluasi terhadap RTRW Provinsi Sumatera Selatan merupakan langkah strategis untuk meninjau kembali kesesuaian perencanaan tata ruang dengan dinamika pembangunan, kebutuhan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Proses ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan tata ruang tetap relevan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pelestarian sumber daya alam, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di tengah tantangan global maupun lokal.

Evaluasi tata ruang memiliki peran penting dalam memastikan sinkronisasi antara rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi tata ruang telah sesuai dengan tujuan perencanaan awal, serta mengidentifikasi kendala dan peluang yang ada. Hasil evaluasi tersebut menjadi landasan untuk menyelaraskan kebijakan tata ruang dengan program pembangunan di berbagai sektor, sehingga tercipta pemanfaatan ruang yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan. Dengan sinkronisasi yang baik, pemanfaatan ruang dapat mendukung pencapaian target pembangunan tanpa mengabaikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Di bawah ini merupakan tabel Matriks Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah yang Mendukung Rencana Tata Ruang pada RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036. Tabel ini menyajikan sinkronisasi antara program pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang yang masuk ke dalam kategori sinkronisasi rendah, sehingga perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan indikasi program tata ruang periode berikutnya.

Tabel 2. 53 Matriks Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah yang Mendukung Rencana Tata Ruang (pada Tingkat Sinkronisasi Rendah)

Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) tahun							Tahun Pelaksanaan					Tingkat Sinkronisasi
Kode	Program	Lokasi	Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan	Besaran	Sumber dan/ Atau Alternatif	Instansi Pelaksana	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	Ketenagalistrikan											
LIS.2	Pengembangan Pemanfaatan EBT	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	1 Paket	APBD/ KPBU/ Swasta/ BUMN	Dinas ESDM						Rendah
B.	Mineral dan Batubara											Rendah
MBB.1	Pembinaan dan Pengawasan Bidang pertambangan	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Kawasan Sekitar Peruntukan Pertambangan	1 Paket	APBD	Dinas ESDM						Rendah
MBB.2	Pemantauan dan Evaluasi Konservasi Sumber daya Mineral	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Kawasan Sekitar Peruntukan Pertambangan	1 Paket	APBD	Dinas ESDM						Rendah
C.	Informasi dan Komunikasi											
KOM.1	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	1 Paket	APBD	Dinas Kominfo						Rendah
KOM.2	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	1 Paket	APBD	Dinas Kominfo						Rendah
D.	Sarana dan Prasarana Permukiman											
KIM.1	Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	PKN Patung Raya	1 Unit	APBD	Dinas Lingkungan Hidup						Rendah
KIM.2	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	PKN Patung Raya	1 Paket	APBD	Dinas Lingkungan Hidup						Rendah

Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) tahun							Tahun Pelaksanaan Program					Tingkat Sinkronisasi
Kode	Program	Lokasi	Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan	Besaran	Sumber dan/ Atau Alternatif	Instansi Pelaksana	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIM.3	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	1 Paket	APBD	Dinas Kesehatan						Rendah
KIM.4	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	1 Paket	APBD	Dinas Kesehatan						Rendah
KIM.5	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	1 Paket	APBD	Dinas Kesehatan						Rendah
KIM.6	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Provinsi Sudut Kepentingan Ekonomi	20 Kawasan	APBD	Dinas Perkim						Rendah
KIM.7	Program Pengembangan Air Minum Layak Bagi Keluarga Miskin	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Kawasan Permukiman	17 Lokasi	APBD	Dinas Perkim						Rendah
E.	Sumber Daya Air											
SDA.10	Program Pengendalian Banjir	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Kawasan Rawan Bencana Banjir	77 Kawasan	APBD	Dinas PSDA						Rendah
F.	Program Infrastruktur Lainnya											
XX.1	Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	1 Paket	APBD	Dinas PUBMTR						Rendah
XX.3	Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan lindung	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Peruntukan Kawasan Lindung	1 Paket	APBD	Dinas Kehutanan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas PUBMTR; Dinas PSDA						Rendah

Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) tahun							Tahun Pelaksanaan Program					Tingkat Sinkronisasi
Kode	Program	Lokasi	Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan	Besaran	Sumber dan/ Atau Alternatif	Instansi Pelaksana	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XX.4	Rehabilitasi dan Restorasi Kawasan Lindung	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Peruntukan Kawasan Lindung	2 Ha	APBD	Dinas Kehutanan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas PUBMTR; Dinas PSDA						Rendah
XX.6	Pemantauan dan Pengendalian pada Kawasan Hutan	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Peruntukan Kawasan Hutan	3.471.044,6 8 Ha	APBD	Dinas Kehutanan						Rendah
XX.7	Pembangunan Jalan Inspeksi pada kawasan konservasi	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Peruntukan Kawasan Konservasi	1 Paket	APBD	Dinas Kehutanan						Rendah
XX.8	Pengelolaan hutan kemasyarakatan	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Kawasan Hutan Rakyat	1 Paket	APBD	Dinas Kehutanan						Rendah
XX.11	Pengembangan Pemanfaatan Lahan Pertanian	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	24 Kelompok	APBD	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura						Rendah
XX.12	Pengembangan pengaturan pola tanam sesuai dengan perubahan iklim	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	24 Kelompok	APBD	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura						Rendah
XX.13	Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	PKN Patung Raya; PKL Pagar Alam	1 Paket	APBD	Dinas Pariwisata						Rendah
XX.14	Peningkatan kualitas prasarana umum dan fasilitas pariwisata	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	PKN Patung Raya; PKL Pagar Alam	1 Paket	APBD	Dinas Pariwisata						Rendah
XX.15	Pengendalian Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	PKN Patung Raya; PKL Pagar Alam	1 Paket	APBD	Dinas Pariwisata						Rendah

Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) tahun							Tahun Pelaksanaan Program					Tingkat Sinkronisasi
Kode	Program	Lokasi	Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan	Besaran	Sumber dan/ Atau Alternatif	Instansi Pelaksana	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XX.16	Pengembangan Moda Transportasi dalam mendukung Pembangunan Pariwisata	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	PKN Patung Raya; PKL Pagar Alam	1 Paket	APBD	Dinas Pariwisata						Rendah
XX.19	Pengembangan Daya Tarik Wisata berdasarkan keunggulan komparatif	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	1 Paket	APBD	Dinas Pariwisata						Rendah
XX.20	Peningkatan iklim investasi kepariwisataan	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	1 Paket	APBD	Dinas PMPTSP						Rendah
XX.21	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	1 Paket	APBD	Dinas Pariwisata						Rendah
XX.22	Pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung pada wilayah peisir OKI	Kab. OKI	Kawasan Strategis Provinsi Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup	1 Kawasan	APBD	Dinas Kehutanan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas PUBMTR; Dinas PSDA						Rendah
XX.23	Pemantauan dan Pengawasan Kelestarian Kawasan Mega-lith Pagar Alam	Kota Pagar Alam	Kawasan Strategis Provinsi Sudut Kepentingan Sosial Budaya	1 Kawasan	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						Rendah
XX.24	Pemantauan dan Pengawasan	Kab. PALI	Kawasan Strategis Provinsi Sudut	1 Kawasan	APBD	Dinas Pendidikan						Rendah
XX.25	Pengembangan Kawasan Panas Bumi (Geotermal Lumut Balai)	Kab. Muara Enim	Kawasan Strategis Provinsi Sudut Kepentingan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi	1 Kawasan	APBD/ Swasta	Dinas ESDM						Rendah
XX.26	Pengembangan Kawasan Panas Bumi (Geotermal Rantau Dedap (Semendo Darat Laut, Darat Tengah, Darat Ulu Kabupaten Muara Enim)	Kab. Muara Enim	Kawasan Strategis Provinsi Sudut Kepentingan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi	1 Kawasan	APBD/ Swasta	Dinas ESDM						Rendah

Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah 5 (lima) tahun							Tahun Pelaksanaan Program					Tingkat Sinkronisasi
Kode	Program	Lokasi	Sasaran Pengembangan Wilayah/ Kawasan	Besaran	Sumber dan/ Atau Alternatif	Instansi Pelaksana	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XX.27	Pengembangan Infrastruktur Penunjang Kawasan Agropolitan Musi Rawas	Kab. Musi Rawas	Kawasan Agropolitan Musi Rawas	1 Kawasan	APBD	Dinas PUBMTR; Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura						Rendah
XX.29	Pengembangan Infrastruktur Penunjang Kawasan Agropolitan OKU Timur	Kab. OKU Timur	Kawasan Agropolitan OKU Timur	1 Kawasan	APBD	Dinas PUBMTR; Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura						Rendah
XX.30	Penyusunan Masterplan Peternakan	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Kawasan Peternakan	1 Dokumen	APBD	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan						Rendah
XX.31	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Kawasan Perkebunan	1 Paket	APBD	Dinas Perkebunan						Rendah
XX.32	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	Kawasan Peruntukan Industri	1 Dokumen	APBD	Dinas Perindustrian						Rendah

Sumber: Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Selatan, 2023

2.5.2.2. Evaluasi Terhadap Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Provinsi Sumatera Selatan pada RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036

Idealnya setiap kawasan strategis memiliki pusat pertumbuhan di dukung oleh beberapa sub pusat pertumbuhan yang berada di kabupaten/kota yang berada di wilayahnya dan antara pusat pertumbuhan dan sub-sub pusat pertumbuhan dihubungkan oleh jaringan (jalan, rel dan Jalan Tol) dan diperkirakan ke depan antara pusat-sub pusat, antar sub pusat-sub pusat akan tumbuh berkembang simpul-simpul pertumbuhan baru. Tumbuh berkembang koridor secara internal di masing-masing pusat pertumbuhan akan menghubungkan pusat pertumbuhan dengan sub-sub pusat pertumbuhan baru. Contoh kawasan strategis yang mampu menghubungkan tersebut yaitu berupa koridor yang relatif lebih panjang dengan melalui beberapa pusat pertumbuhan dan sub pusat pertumbuhan dengan cakupan *hinterland*-nya juga lebih luas.

Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Selatan terdapat 23 kawasan strategis baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, teknologi tinggi dan lingkungan. Dinamika perkembangan setelah disahkannya Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini telah terjadi berbagai perubahan baik perubahan kebijakan, perkembangan wilayah/kawasan, maupun perubahan prioritas program pembangunan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap implementasi KSP yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan ada beberapa KSP yang masih prospek untuk diimplementasikan, ada beberapa kawasan strategis yang perlu diprioritaskan dan ada beberapa kawasan strategis yang tidak perlu lagi diprioritaskan karena ada nya pemicu pengembangan kawasan tersebut.

Pembangunan jalan tol di Provinsi Sumatera Selatan di satu sisi akan memacu percepatan pengembangan wilayah, adanya akses menuju tol akan meningkatkan konektivitas, meningkatkan kawasan-kawasan menjadi sangat strategis lokasinya yang memacu menjadi pusat-pusat pengembangan kegiatan ekonomi. Di sisi lain kehadiran jalan tol menyebabkan beberapa kawasan menjadi kurang strategis sebagai pusat pengembangan ekonomi, karena jalan-jalan utama yang melewati kawasan tersebut bukan lagi menjadi pilihan pergerakan orang dan barang.

Pengembangan jalan tol menghubungkan Bakaheuni-Tanjung Karang-Kayu Agung-Palembang-Betung-Jambi, Indralaya-Prabumulih-MuaraEnim-Lahat-Lubuklinggau-Bengkulu menjadikan kota-kota yang dilalui jalan tol, dengan rencana pembangunan pintu tol di setiap kota sebagai akses keluar-masuk kendaraan. Hal ini membuat kota atau kawasan tersebut tumbuh dan berkembang lebih cepat dibandingkan dengan kota atau kawasan yang tidak dilalui jalan tol.

Beberapa kawasan strategis yang terpengaruh dengan keberadaan jalan tol di wilayah Provinsi Sumatera Selatan antara lain: Koridor Baturaja-Martapura,

dimana koridor tersebut merupakan Jalan Lintas Tengah yang menghubungkan kota-kota di Provinsi Lampung-Martapura-Baturaja-Muara Enim-Lahat-Lubuklinggau-Sorolangun-Muara Bungo-Padang, atau kota-kota di Provinsi Lampung-Martapura-Baturaja-Muara Enim-Lahat-Lubuklinggau-Curup-Bengkulu. Keberadaan tol Tanjung Karang-Kayu Agung-Prabumulih-Muara Enim-Lahat-Lubuklinggau menjadikan waktu perjalanan lebih singkat.

Keberadaan Jalan Tol Palembang-Betung-Jambi dan Indralaya-Prabumulih-Muara Enim- Lahat-Lubuklinggau menyebabkan sebagian wilayah Musi Banyuasin menjadi terhambat perkembangannya, khususnya kawasan sebelah barat yang menuju ke Musi Rawas dan Lubuklinggau. Pengembangan koridor Sekayu-Lubuklinggau menjadi penting dilakukan untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki. Potensi ekonomi yang dimiliki wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mulai perkebunan khususnya karet dan sawit, pangan (padi), perikanan, industri (antara lain karet dan sawit) dan migas.

Pengembangan jalan tol Indralaya-Prabumulih-Muara Enim-Lahat-Lubuklinggau, akan berpengaruh terhadap pergerakan orang dan barang dari wilayah Sumatera Selatan bagian selatan meliputi Kabupaten OKU Selatan, OKU Timur dan Ogan Komering Ulu. Hal ini menyebabkan Koridor Prabumulih –Baturaja memiliki peran yang strategis yang menghubungkan kota- kota di bagian selatan dengan Tol di Prabumulih.

Kebijakan pengembangan kawasan pesisir dalam dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) mengarahkan pengembangan perikanan (tangkap dan budidaya), pariwisata, pengembangan pulau- pulau di pantai timur, pengembangan kawasan prioritas pesisir timur karena kondisi saat ini perkembangannya relatif lambat.

Tabel 2. 54 Kajian Terhadap Kawasan Strategis Provinsi

No	Kabupaten/ Kota	Kebijakan	Potensi	Kawasan Strategis	Rekomendasi
1	Palembang	Pariwisata	Industri, Jasa, Wisata	KSPN Palembang	Kawasan prioritas semakin berkembang
		KSN Metropolitan • Pembangunan angkutan massal • Penyediaan air baku perkotaan • SPALD/SPALT/ TPA/TPST/TPS 3R		Metropolitan Patungraya Agung	Ada tumpang tindih kawasan prioritas antara KSN Patungraya Agung dengan KSP Palembang- Prabumulih
		Kawasan Andalan		Kawasan Andalan Palembang dan	

No	Kabupaten/ Kota	Kebijakan	Potensi	Kawasan Strategis	Rekomendasi
				sekitarnya	
				KSP Koridor Palembang-Prabumulih	
2	Lubuklinggau	KSP	Jasa, Pangan, Perkebunan	Kawasan Strategis Provinsi Lubuklinggau-Muara Beliti	Penguatan KSP Perkotaan Lubuklinggau
		Kawasan Andalan		Jalan Bebas Hambatan	
		Jalan Bebas Hambatan		Kawasan Andalan Lubuklinggau dan sekitarnya	Koridor Sekayu-Muara Beliti-Lubuklinggau-Rupit
				KSP Perkotaan Lubuklinggau	
3	Pagar Alam	Pariwisata	Wisata, Pangan (Hortikultura)	KSPN	
		KSP		KSP Sosial Budaya (Kawasan Megalith)	Penguatan KSPN Pagar Alam
				KSP Panas Bumi Rantau Dedap	
4	Prabumulih	KSP	Perkebunan besar, Pangan, Energi	KSP Koridor Palembang-Prabumulih	Penguatan Kota Prabumulih Kota Transit dan Jasa
		Jalan Bebas Hambatan		Jalan Tol Indralaya-Muara Enim-Lubuklinggau	Koridor Prabumulih-Baturaja
5	Muara Enim	KEK	Industri, Perkebunan Besar, Pangan, Energi	KEK Tanjung Enim	
		KSP		KSP Kawasan Muara Enim dan sekitarnya	
		Kawasan Andalan		KSP Koridor Muara Enim-Lahat	Penguatan Perkotaan Muara Enim
		Jalan Bebas Hambatan		KSP Panas Bumi Lumut Balai dan KSP Rantau	

No	Kabupaten/ Kota	Kebijakan	Potensi	Kawasan Strategis	Rekomendasi
				Dedap	
				KSP Hutan Rawa Gambut	
6	Musi Rawas	KSP	Industri, perkebunan besar, pangan	KSP Agropolitan Musi Rawas	Koridor sekayu-Muara Beliti-Lubuklinggau-Rupit
		Jalan Bebas Hambatan		KSP Minapolitan Musi Rawas	
				KSP Koridor Lubuklinggau-Muara Beliti	
7	Musi Rawas Utara		Perkebunan Besar, pangan		Pegembangan Agropolitan
8	Ogan Komering Ulu	KSP	Industri, perkebunan besar, pangan, energi	KSP Koridor Baturaja- Martapura	Pengembangan koridor Baturaja-Martapura-Muaradua-Danau Ranau
				KSP Panas Bumi Lumut Balai	Pengembangan Agropolitan
9	OKU Selatan	KSP	Pangan (Padi, Jagung, Hortikultura, perikanan)	KSP Panas Bumi Ulu Danau	Agropolitan Pangan
				KSP Minapolitan	Pengembangan koridor Baturaja-Martapura-Muaradua-Danau Ranau
				KSP Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu Danau Ranau	Penguatan KSP danau Ranau
10	OKU Timur	KSP	Industri, Perkebunan Besar, Pangan	KSP Agropolitan	

No	Kabupaten/ Kota	Kebijakan	Potensi	Kawasan Strategis	Rekomendasi
				KSP Minapolitan	Pengembangan koridor Baturaja-Martapura-Muaradua-Danau Ranau
				KSP Koridor Baturaja- Martapura	Koridor Pintu Tol Lempuing Raya-Belitang-Martapura
11	Ogan Komering Ilir	KSN Metropolitan	Industri, perkebunan Besar, Pangan	KSN Patungraya Agung	
		KSP		KSP Agropolitan OKI	
		Jalan Bebas Hambatan		KSP Minapolitan	
		Jembatan Sumsel-Babel		KSP Kerbau Rawa Pampangan dan Itik Pegagagan	Kawasan ekonomi pantai timur
				KSP Pesisir Timur Sumatera Selatan	
				KSP Hutan Rawa Gambut	
		RZWP3K	Perikanan, Pariwisata, Pelabuhan, pengembangan pulau-pulau		
12	Ogan Ilir	KSN Metropolitan	Perkebunan Besar, Pangan	KSN Patungraya Agung	
		Jalan Bebas Hambatan		KSP Minapolitan	
		KSP		KSP Kebun Raya Sriwijaya	
				KSP Kawasan Hutan Rawa Gambut	
13	Pali	KSP	Perkebunan Besar, Pangan, Energi	KSP Kawasan Candi Bumi Ayu	pengembangan industri/agropolitan
14	Lahat	KSP	Perkebunan Besar, Pangan, Energi	KSP Koridor Muara Enim-Lahat	Jalan Tol

No	Kabupaten/ Kota	Kebijakan	Potensi	Kawasan Strategis	Rekomendasi
		Jalan Bebas Hambatan		KSP Panas Bumi	Industri/agropolitan
				KSP Kawasan Megalith	
15	Empat Lawang	KSP	Pangan	KSP Panas Bumi Lumut Balai	
				KSP Agropolitan Pasemah Air Keruh	
16	Banyuasin	KSN Metropolitan	Industri, Perkebunan Besar, Pangan	KSN Patungraya Agung	Pengembangan Agropolitan
		KEK		KEK Tanjung Api-API	Industri
		Jalan Bebas Hambatan		KSP Kerbau Rawa Pampangan dan Itik Pegagan	
		KSP		KSP Minapolitan	
		RZWP3K		KSP Kawasan Hutan Rawa Gambut	
				KSP Pesisir Timur Sumatera Selatan	
17	Musi Banyuasin	Jalan Bebas Hambatan	Industri., Perkebunan Besar, Pangan, Energi	KSP Minapolitan	Industri, agropolitan
		KSP		Jalan Bebas Hambatan Palembang-Betung-Jambi	Koridor Sekayu-Muara Beliti-Lubuklinggau-Rupit

Sumber: Laporan Akhir Penyusunan Kajian Optimalisasi Penataan Ruang dalam Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, 2021

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Jumlah penduduk merupakan modal dasar pembangunan, penduduk yang berkualitas akan mendorong pembangunan semakin lebih baik. Namun, jumlah penduduk yang besar tanpa diimbangi dengan kualitas yang baik maka akan menjadi beban pembangunan. Tren global kependudukan di negara-negara maju seperti Jepang menunjukkan adanya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk sehingga di masa yang akan datang berdampak pada komposisi penduduk usia muda yang lebih sedikit dibandingkan penduduk usia tua. Demikian pula tren

pertumbuhan penduduk di Negara Tiongkok yang diprediksi akan mengalami penurunan jumlah penduduk pada dua dekade yang akan datang. Proyeksi penduduk Indonesia cenderung mengalami peningkatan dengan komposisi jumlah penduduk yang relatif seimbang, tren yang sama diikuti pula Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan jumlah penduduk berimplikasi pada peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di masa yang akan datang.

2.6.1 Proyeksi Demografi

Pemerintah memerlukan hasil proyeksi penduduk untuk merencanakan Pembangunan manusia sehubungan dengan tanggung jawabnya untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi dari rakyatnya melalui pembangunan yang terencana. Dinamika perubahan jumlah penduduk harus menjadi perhitungan dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan begitu juga sebaran penduduk agar perencanaan yang dilakukan dapat tepat sasaran. Adanya proses urbanisasi dan transmigrasi dapat membuat kepadatan penduduk pada suatu wilayah menjadi sangat dinamis. Oleh karena ini sangat penting dalam perencanaan yang dilakukan kita dapat melihat penduduk dan sebarannya saat ini serta kedepannya.

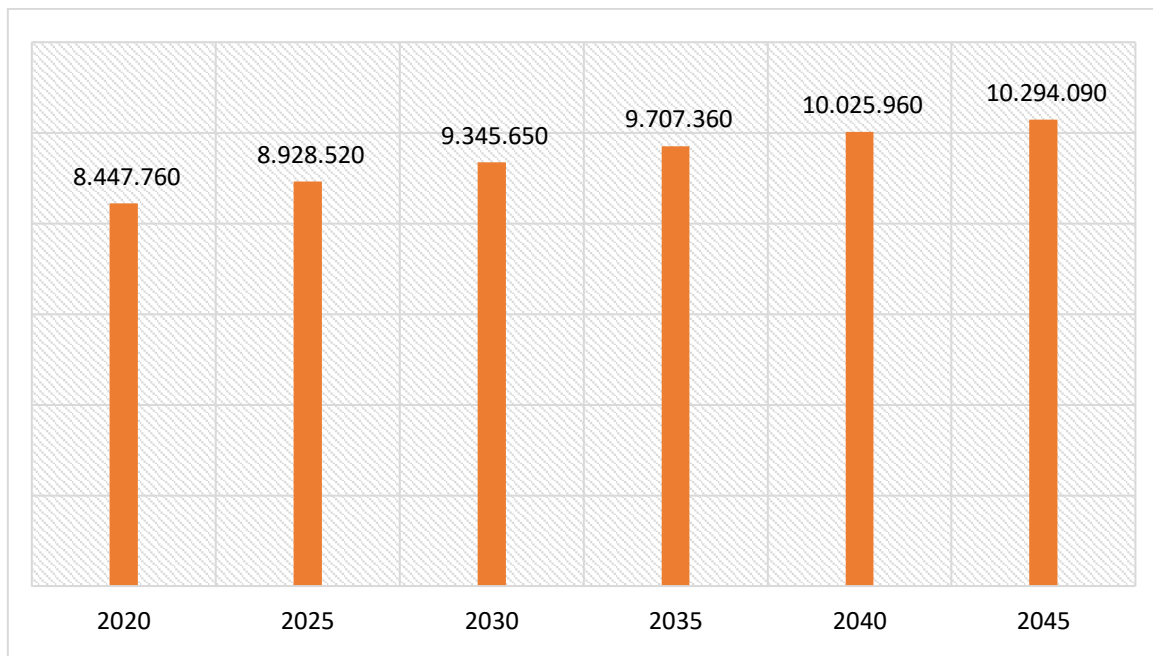
Mengingat semua rencana-rencana pembangunan, baik ekonomi maupun sosial, menyangkut pertimbangan tentang jumlah serta karakteristik penduduk di masa mendatang, proyeksi mengenai jumlah serta struktur penduduk dianggap sebagai persyaratan minimum untuk proses perencanaan pembangunan:

- a). *Di Bidang pangan*: menentukan kebutuhan akan bahan pangan sesuai dengan gizi serta susunan penduduk menurut umur.
- b). *Di bidang kesehatan*: menentukan jumlah medis, dokter, obat-obatan, tempat tidur di rumah sakit, rumah sakit yang diperlukan selama periode proyeksi.
- c). *Di bidang Tenaga Kerja*: menentukan jumlah angkatan kerja, penyediaan lapangan kerja yang erat hubungannya dengan proyeksi tentang kemungkinan perencanaan untuk memperhitungkan perubahan tingkat pendidikan, *skilled* dan pengalaman dari tenaga kerja.
- d). *Di bidang Pendidikan*: proyeksi penduduk dipakai sebagai dasar untuk memperkirakan jumlah penduduk usia sekolah, jumlah murid, jumlah guru, gedung-gedung sekolah pada masa yang akan datang.
- e). *Di bidang Produksi Barang dan Jasa*: Dengan proyeksi angkatan kerja dalam hubungannya dengan data mengenai produktivitas merupakan dasar estimasi produksi barang-barang dan jasa di masa mendatang.

2.6.1.1 Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk

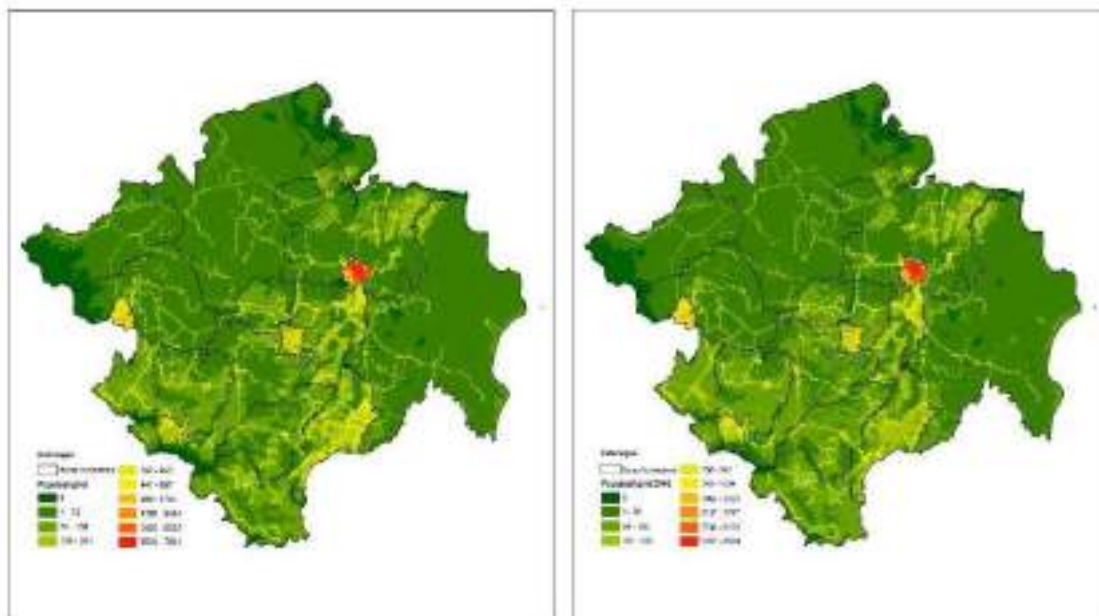
Proyeksi penduduk adalah suatu perhitungan yang menunjukkan keadaan penduduk di masa yang akan datang apabila diterapkan suatu kombinasi asumsi tentang perkembangan tertentu mengenai fertilitas, mortalitas dan migrasi pada masa yang akan datang (IUSSP, 1982). Proyeksi Penduduk disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang telah tersedia dengan menerapkan metode komponen kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik, serta dihitung dengan aplikasi *Rural Urban Projection (RUP)*.

Skenario yang digunakan dalam penyusunan Proyeksi Penduduk ini adalah skenario tren menggunakan asumsi, asimtot bawah *TFR (Total Fertility Rate)* sebesar 1,9 anak per wanita dan *IMR (Infant Mortality Rate)* sebesar 7,91 bayi per 1.000 kelahiran di tahun 2045. Berdasarkan SP 2020, Jumlah penduduk Sumatera Selatan tahun 2020 adalah sebanyak 8.447.760 jiwa. Sesuai proyeksi BPS jumlah penduduk ini akan terus bertambah hingga pada tahun 2045 menjadi sebanyak 10.294.090 jiwa.



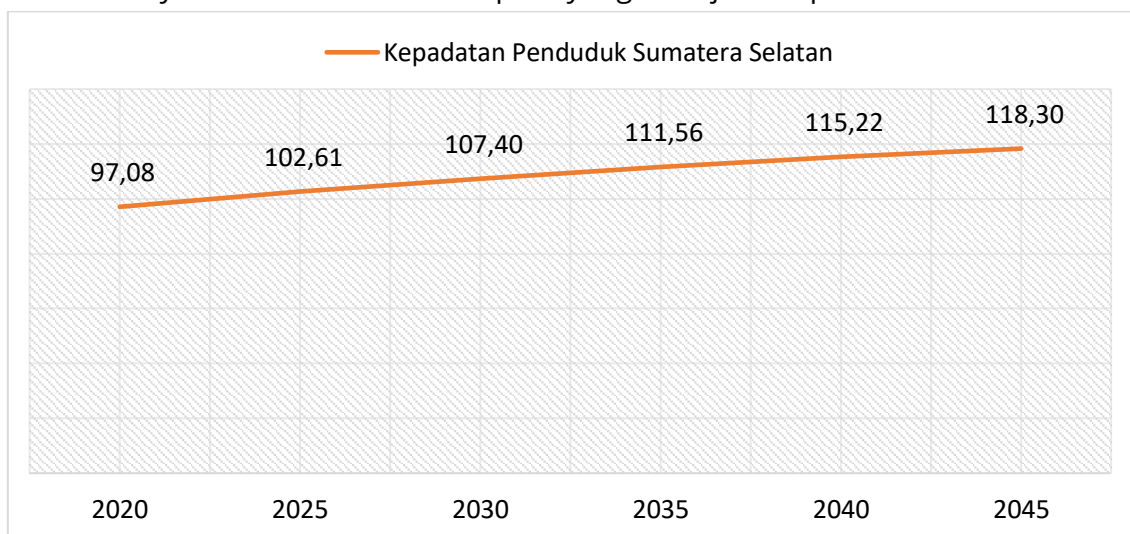
Gambar 2. 68 Proyeksi Jumlah Penduduk Sumatera Selatan 2020-2045

Sumber: BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020 dan Long Form Sensus Penduduk 2020



Gambar 2. 69 Peta Sebaran Penduduk tahun 2020-2045

Tren positif pertumbuhan penduduk di Sumatera Selatan juga diikuti dengan pertumbuhan kepadatan penduduk Sumatera Selatan. Kepadatan Penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukkan banyaknya penduduk yang tinggal dalam satu kilometer persegi wilayah, sehingga merupakan indikator tekanan penduduk di suatu daerah. Kepadatan penduduk ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; (1) Luasan Wilayah; (2) Jumlah Penduduk. Kepadatan penduduk di Sumatera Selatan dihitung untuk mengetahui banyaknya orang atau penduduk berdasarkan luasan wilayah Sumatera Selatan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.70.



Gambar 2. 70 Proyeksi Kepadatan Penduduk Sumatera Selatan 2020-2045

Sumber: BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020 dan *Long Form* Sensus Penduduk 2020

Proyeksi kepadatan Penduduk di Sumatera Selatan semakin meningkat hingga 118,30 orang/km² pada Tahun 2045. Hal ini berarti wilayah Sumatera Selatan semakin padat penduduk, walaupun angkanya masih di bawah tingkat kepadatan penduduk secara nasional yang mencapai 141 orang/km² (BPS, 2020). Dengan luasan wilayah tetap, kepadatan penduduk bertambah sebesar dua puluh persen dalam dua puluh tahun ke depan.

2.6.1.1.1 Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Secara terus menerus penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi di sisi lain akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Sementara itu, migrasi juga berperan dalam memengaruhi jumlah penduduk. Imigran (pendatang) akan menambah dan *emigrant* (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi (masuk/*immigration* dan keluar/*outmigration*).

Tabel 2. 55 Proyeksi Indikator Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dan 2045

No.	Indikator	Satuan	Proyeksi Capaian	
			2020	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kelahiran (Fertilitas)				
1	<i>Crude Birth Rate - CBR</i>	Kelahiran/1000 penduduk	17,84	13,98
2	<i>Total Fertility Rate - TFR</i>	Angka	2,23	2,02
3	Jumlah Kelahiran	Jiwa	150.710	143.920
Kematian (Mortalitas)				
1	<i>Crude Death Rate - CDR</i>	Kematian/1000 penduduk	5,17	8,78
2	<i>Infant Mortality rate - IMR</i>	Angka	17,59	8,48
3	Jumlah Kematian	Jiwa	43.710	90.430
Migrasi				
1	<i>Net Migration Rate - NMR</i>	Angka	-0,62	-0,59

Sumber: BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020 dan Long Form Sensus Penduduk 2020

Ukuran yang mencerminkan tingkat fertilitas dari suatu kelompok penduduk di suatu wilayah dalam suatu waktu tertentu antara lain adalah Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate - CBR*) dan Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate - TFR*).

Tinggi rendahnya tingkat kematian suatu komunitas penduduk diukur berdasarkan Mortalitas. Ukuran dasar mortalitas yang digunakan adalah Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate - CDR*) dan Angka Kematian bayi (*Infant Mortality rate - IMR*). *CDR* adalah jumlah kematian per seribu penduduk pada tahun tertentu. *IMR* adalah jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun (0-11 bulan) per seribu kelahiran hidup dalam tahun tertentu.

Migrasi dapat meningkatkan jumlah penduduk apabila jumlah penduduk yang masuk ke suatu wilayah lebih banyak daripada jumlah penduduk yang meninggalkan wilayah tersebut. Angka yang menunjukkan selisih banyaknya migran masuk dan keluar ke dan dari suatu wilayah per 1000 penduduk adalah Angka Migrasi Neto (*Net Migration Rate - NMR*). Proyeksi indikator-indikator perubahan jumlah penduduk ditunjukkan pada Tabel 2.55. Berdasarkan data indikator perubahan jumlah penduduk tersebut, pada Tahun 2045 di Sumatera Selatan terjadi penurunan beberapa hal yaitu:

- *Crude Birth Rate - CBR* diproyeksikan turun dari 17,84 pada tahun 2020 menjadi 13,98 pada Tahun 2045;
- *Total Fertility Rate - TFR* diproyeksikan turun dari 2,23 pada Tahun 2020 menjadi 2,02 di tahun 2045;
- Jumlah Kelahiran diproyeksikan turun dari 150.710 jiwa pada Tahun 2020 menjadi 143.920 jiwa pada Tahun 2045;
- *Infant Mortality Rate - IMR* diproyeksikan turun dari 17,59 pada Tahun 2020 menjadi 8,48 di Tahun 2045 dan

Sedangkan beberapa indikator lainnya mengalami peningkatan, yaitu:

- *Crude Death Rate - CDR* diproyeksikan naik dari 5,17 pada tahun 2020 menjadi 8,78 pada tahun 2045;
- Jumlah Kematian diproyeksikan naik dari 43.710 jiwa pada Tahun 2020 menjadi 90.430 jiwa di tahun 2045.
- *Net Migration Rate - NMR* diproyeksikan naik dari -0,62 pada tahun 2020 menjadi -0,59 di Tahun 2045. Angka ini berarti arus migrasi keluar dari Sumatera Selatan masih akan lebih banyak daripada arus migrasi masuk ke Sumatera Selatan.

2.6.1.1.2 Perkembangan Struktur Penduduk Sumatera Selatan

Komposisi penduduk dapat pula digambarkan dengan menggunakan grafik. Salah satu grafik yang umum digunakan adalah piramida penduduk. Pada dasarnya piramida penduduk adalah refleksi struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Pada tahun 2020 menunjukkan bagian lebih lebar di bagian dasar piramida

mengindikasikan besarnya proporsi penduduk muda dan kecilnya proporsi penduduk tua diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi.



Gambar 2. 71 Proyeksi Piramida Penduduk Sumatera Selatan 2020-2050

Sumber: BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020 dan Long Form Sensus Penduduk 2020

Mulai proyeksi Tahun 2030, 2040 dan 2050 badan piramida penduduk makin membesar. Hal ini menunjukkan peningkatan penduduk usia kerja dengan pesat, meningkatnya harapan hidup, dan penurunan tingkat kematian bayi yang sangat drastis. Peningkatan panjangnya usia harapan hidup juga kelihatan pada makin membesarnya bagian ujung atas piramida sebagai cerminan dari meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut.

2.6.1.2 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Pengelompokan penduduk menurut karakteristik demografi seperti jenis kelamin pada suatu saat bukan hanya merupakan pencerminan proses demografi masa lalunya tetapi juga menggambarkan perkembangan penduduk pada masa yang akan datang. Dari pengelompokan penduduk menurut jenis kelamin, ukuran yang dihasilkan adalah rasio jenis kelamin. Ukuran ini menyatakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk Perempuan. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan.

Tabel 2. 56 Proyeksi Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045

Uraian	Kondisi tahun 2020	Proyeksi Rasio Jenis Kelamin				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rasio Jenis Kelamin	104,17	103,57	102,85	102,05	101,25	100,48

Sumber: BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020 dan *Long Form* Sensus Penduduk 2020

Proyeksi rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk Perempuan sampai dengan Tahun 2045 menunjukkan tren negatif hingga pada tahun tersebut rasionya adalah 100,48. Angka rasio ini berarti dari setiap 100 penduduk Perempuan terdapat 100 penduduk laki-laki. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh hal-hal seperti: perbandingan antara bayi laki-laki dengan bayi Perempuan pada waktu lahir; pola mortalitas antar penduduk laki-laki dan Perempuan serta pola migrasi yang kemungkinan disebabkan banyaknya penduduk laki-laki bermigrasi keluar dari wilayah Sumatera Selatan. Dengan rasio yang seimbang tersebut, maka Pembangunan di Sumatera Selatan harus mengutamakan kesetaraan pelayanan bagi penduduk baik dalam bentuk akses layanan dasar maupun infrastruktur dasar.

2.6.1.3 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Dalam jangka Panjang penduduk Sumatera Selatan membentuk transisi demografi yang ditandai dari penurunan tingkat kematian bayi, dilanjutkan dengan penurunan tingkat kelahiran. Menurunnya tingkat kematian menyebabkan bayi yang lahir tetap hidup hingga mencapai usia dewasa, sedangkan menurunnya tingkat kelahiran akan mengurangi proporsi penduduk usia muda.

Gambaran struktur umur penduduk Sumatera Selatan akan semakin menua yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda dan meningkatnya proporsi penduduk usia lanjut. Terjadi peningkatan yang sangat besar pada proporsi penduduk usia lanjut (penduduk usia 60 tahun ke atas) di tahun

2045 yaitu menjadi 2,1 kali lipat dibandingkan Tahun 2020 atau 8,75% menjadi 19,00%. Penurunan cukup lambat pada proporsi penduduk usia muda yaitu dari 26,68% pada Tahun 2020 diproyeksikan turun menjadi 20,47% di tahun 2045, sedangkan bagian besar dari struktur umur penduduk Sumatera Selatan, diproyeksikan akan diisi oleh penduduk usia produktif yaitu di kisaran angka 60%.

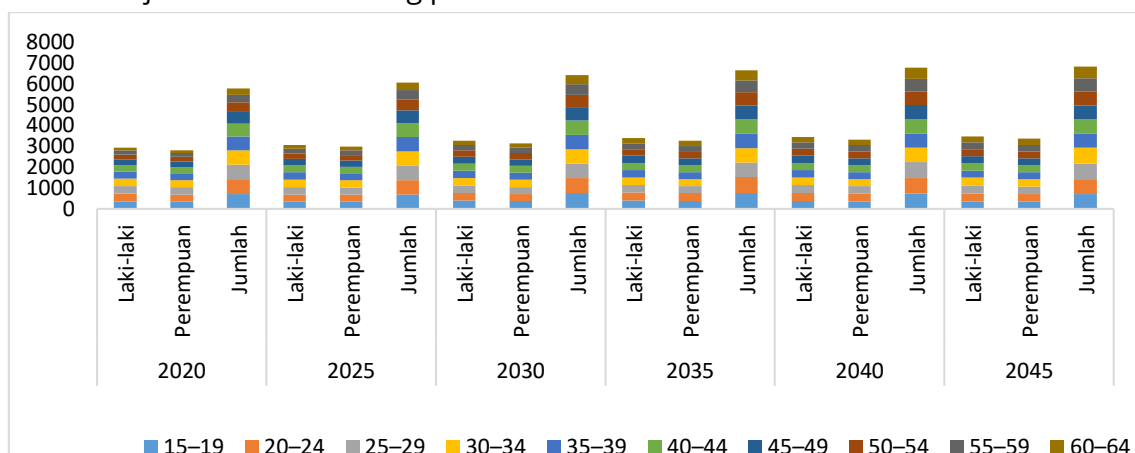
**Tabel 2. 57 Proyeksi Struktur Umur Penduduk Sumatera Selatan
Tahun 2025-2045**

Uraian Kelompok Umur	Kondisi 2020	Proyeksi Kelompok Umur (%)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 -14	26,68	25,39	23,49	21,89	20,98	20,47
15 – 59	64,57	63,99	63,85	63,25	61,96	60,53
60+	8,75	10,62	12,66	14,86	17,06	19,00

Sumber: BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020 dan *Long Form* Sensus Penduduk 2020

2.6.1.4 Proyeksi Penduduk Usia Kerja

Menurut BPS, batas usia kerja di Indonesia adalah 15 tahun hingga 64 tahun. Penduduk usia kerja ini terbagi menjadi dua, yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Proyeksi penduduk usia kerja di Sumatera Selatan dapat digambarkan pada Gambar 2.69. Pola menurun penduduk usia kerja muda (15-29) tahun diproyeksikan terjadi hingga tahun 2045. Namun, pada kelompok usia kerja lainnya tren positif terjadi dalam runtun waktu proyeksi. Secara keseluruhan proyeksi penduduk usia kerja meningkat dari jumlah 5.743.360 orang pada Tahun 2020 menjadi 6.805.180 orang pada Tahun 2045.



Gambar 2. 72 Proyeksi Penduduk Usia Kerja di Sumatera Selatan Tahun 2025-2045

Sumber: BPS, Hasil SP 2020 dan *Long Form* SP 2020

Secara detail proyeksi penduduk usia kerja di Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 terlihat pada Tabel 2.58.

Tabel 2. 58 Proyeksi Penduduk Usia Kerja Sumatera Selatan Menurut Jenis Kelamin, 2025–2045

Umur	Penduduk Tahun			Proyeksi Penduduk Usia Kerja														
	2020			2025			2030			2035			2040			2045		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
15–19	360.080	338.620	698.700	342.170	342.170	684.340	393.850	376.440	770.290	389.450	372.010	761.460	366.940	352.960	719.900	343.290	356.710	700.000
20–24	365.050	346.410	711.460	336.410	336.410	672.820	360.890	340.010	700.900	390.550	374.140	764.690	386.250	369.780	756.030	350.840	363.950	714.790
25–29	359.490	342.460	701.950	361.650	343.690	705.340	353.690	333.840	687.530	357.580	337.500	695.080	387.010	371.460	758.470	367.180	382.790	749.970
30–34	355.790	339.880	695.670	356.100	339.290	695.390	358.230	340.600	698.830	350.390	330.940	681.330	354.310	334.660	688.970	368.390	383.490	751.880
35–39	336.050	321.900	657.950	349.870	336.300	686.170	352.190	335.890	688.080	354.360	337.310	691.670	346.680	327.840	674.520	331.570	350.600	682.170
40–44	313.070	300.820	613.890	331.600	318.300	649.900	347.240	332.740	679.980	347.610	332.450	680.060	349.860	334.000	683.860	324.680	342.340	667.020
45–49	276.650	266.650	543.300	307.230	296.720	603.950	325.470	314.210	639.680	340.920	328.690	669.610	341.430	328.600	670.030	330.230	343.740	673.970
50–54	232.360	225.130	457.490	268.860	261.610	530.470	298.700	291.440	590.140	316.660	308.950	625.610	331.970	323.480	655.450	323.570	332.640	656.210
55–59	189.890	184.550	374.440	221.930	218.730	440.660	257.010	254.630	511.640	285.910	284.120	570.030	303.580	301.630	605.210	316.090	318.550	634.640
60–64	146.500	142.010	288.510	176.080	176.320	352.400	206.060	209.570	415.630	239.160	244.620	483.780	266.740	273.590	540.330	290.870	283.660	574.530
Total	2.934.930	2.934.930	5.869.860	3.051.900	2.969.540	6.021.440	3.253.330	3.129.370	6.382.700	3.372.590	3.250.730	6.623.320	3.434.770	3.318.000	6.752.770	3.346.710	3.458.470	6.805.180

Sumber: BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020 dan *Long Form* Sensus Penduduk 2020

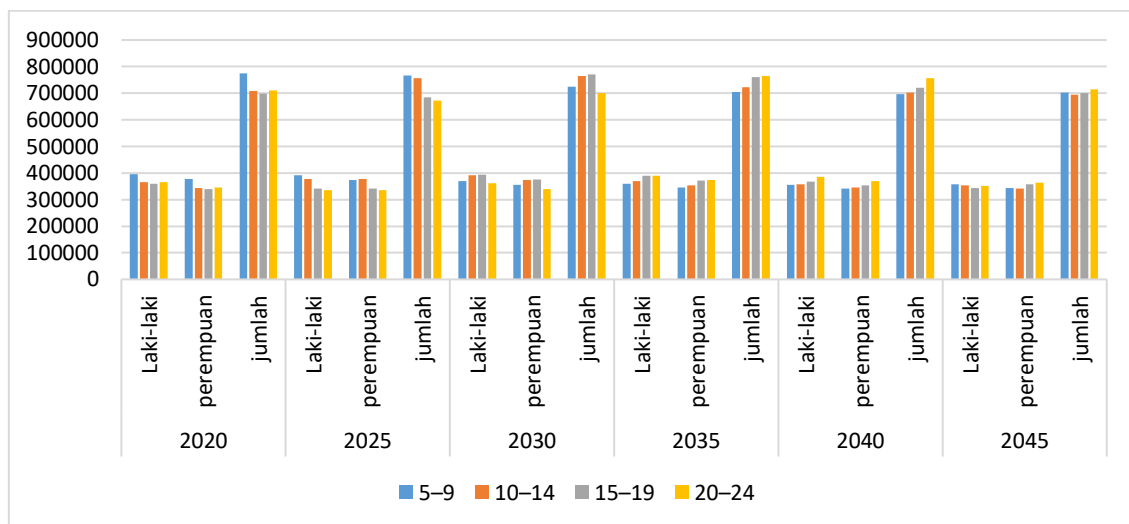
2.6.1.5 Proyeksi Penduduk Usia Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik baru pada TK, SD, SMP dan SMA telah mengatur batas usia atau minimal usia calon siswa. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan usia masuk SD adalah minimal 6 tahun dengan catatan khusus, tetapi anak usia 5 tahun bisa memasuki jenjang SD dengan syarat khusus. Menurut BPS, penduduk usia sekolah adalah penduduk pada umur 7–24 tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka penduduk usia sekolah adalah penduduk berusia 5–24 tahun. Proyeksi penduduk usia sekolah di Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.73.

Berdasarkan proyeksi, penduduk usia sekolah di Sumatera Selatan pada setiap kelompok umur menunjukkan kondisi yang fluktuatif di setiap tahapan periode waktu. Secara rinci adalah sebagai berikut:

- Proyeksi Penduduk usia sekolah kelompok 5–9 tahun mengalami peningkatan sampai Tahun 2025 kemudian terjadi tren menurun hingga Tahun 2045;
- Proyeksi Penduduk usia sekolah kelompok 10–14 mengalami peningkatan sampai tahun 2030, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2045;
- Proyeksi Penduduk usia sekolah kelompok 15–19 tahun pada awalnya menunjukkan pola menurun hingga tahun 2025, kemudian meningkat di tahun 2030 namun kembali menurun pada periode selanjutnya; dan
- Proyeksi Penduduk usia sekolah kelompok 20–24 tahun mengalami penurunan di awal tahapan periode (tahun 2020-2025), namun selanjutnya mengalami tren

positif dalam sepuluh tahun berikutnya (2030-2035) dan kembali mengalami penurunan hingga akhir periode proyeksi.



Gambar 2. 73 Proyeksi Penduduk Usia Sekolah Di Sumatera Selatan Tahun 2020-2045

Sumber: BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020 dan *Long Form* Sensus Penduduk 2020

Memperhatikan proyeksi penduduk usia sekolah seluruhnya mengindikasikan kondisi naik turun dalam periode proyeksi, maka hal ini perlu menjadi pertimbangan terkait kebijakan pengadaan layanan dasar Pendidikan di Sumatera Selatan.

2.6.1.6 Proyeksi Penduduk Usia Lanjut

Komposisi penduduk di Sumatera Selatan dalam dua puluh tahun kedepan diperkirakan akan didominasi penduduk Perempuan pada kelompok umur 60 tahun ke atas. Kelompok penduduk lanjut usia ini perlu menjadi perhatian. *Aging population* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan populasi lanjut usia. Tanpa adanya persiapan yang baik untuk menyambut bonus demografi, Sumatera Selatan hanya akan didominasi oleh Masyarakat usia lanjut. Angka harapan Hidup memang tinggi, namun populasinya hanya akan didominasi oleh penduduk lanjut usia. Kondisi ini akan membawa dampak buruk bagi kemajuan Provinsi Sumatera Selatan.

Jika penduduk lanjut usia ini adalah pekerja maka akan dihadapkan pada pilihan akan berhenti dari pekerjaannya. Pilihan yang dilakukan ini akan berpengaruh pada pendapatan keluarga, akan terjadi penurunan taraf hidup jika berhenti bekerja bahkan akan tergeser menjadi penduduk miskin. Dalam kondisi ini, pemerintah tidak dapat berdiam diri, harus ada kebijakan untuk menanggulangi penduduk yang terdampak menjadi penduduk miskin. Pilihan lainnya yang dapat

dilakukan ketika pekerja mencapai usia tua adalah tetap bekerja dengan kondisi yang tidak maksimal atau akan membuka usaha sendiri.

Menghadapi kondisi akibat pilihan pertama, Penduduk lanjut usia harus dilindungi masa tua dan kesejahteraannya, maka pemerintah dapat mengantisipasinya dengan mendorong peningkatan kepesertaan penduduk pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Hal ini mengingat BPJS, sebagai Jaring Pengaman Sosial yang dibentuk untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan memperhatikan interaksi faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan seperti cakupan program, tingkat bantuan, dan jumlah penerima manfaat.

Jika penduduk lanjut usia memilih untuk tetap bekerja, akan dihadapkan pada kendala menurunnya kemampuan fisik, berkurangnya kemampuan untuk mengerjakan berbagai tugas, menurunnya kemampuan mengikuti kemajuan teknologi dan menurunnya kemampuan mental. Namun sebenarnya kegiatan pemberdayaan penduduk lanjut usia ini adalah Upaya promotif dan preventif menjaga penduduk lanjut usia yang sehat tetap sehat dengan mengoptimalkan fungsi fisik, mental, kognitif dan spiritual.

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia diiringi juga dengan prevalensi demensia dan penyakit tidak menular. Kondisi ini akan berdampak pada ketergantungan penduduk lanjut usia akan bantuan orang lain atau perawatan jangka Panjang (*Long term Care*). Untuk itu diperlukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan penduduk lanjut usia di fasilitas Kesehatan. Strateginya adalah: 1) Memperkuat dasar hukum pelaksanaan pelayanan kesehatan lanjut usia, 2) Meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan, 3) Membangun dan mengembangkan kemitraan dan jejaring pelaksanaan pelayanan kesehatan lanjut usia, 4) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi di bidang kesehatan lanjut usia, 5) Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan keluarga, masyarakat, dan lanjut usia, 6) Meningkatkan peran serta Lanjut usia dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat .

Dengan demikian, penduduk Lanjut usia yang sakit diharapkan dapat meningkat status kesehatannya dan optimal kualitas hidupnya sehingga dapat sehat kembali. Jika pun kondisinya menurun karena proses alamiah maka diharapkan penduduk lanjut usia berada dalam kualitas hidup yang optimal atau meninggal dalam kondisi yang damai dan bermartabat. Hal ini dapat dilakukan melalui: 1) Pengembangan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan santun lanjut usia, 2) Pengembangan Rumah Sakit yang mempunyai pelayanan geriatric dengan tim terpadu, 3) Pengembangan Perawatan Jangka Panjang bagi penduduk lanjut usia, dan 4) Penguatan keluarga sebagai *caregiver*.

2.6.2 Bonus Demografi

Penghitungan proyeksi penduduk yang dilakukan oleh BPS menggunakan skenario tren menunjukkan bahwa dalam dua puluh tahun ke depan, penduduk Sumatera Selatan bertambah rata-rata 0,85% per tahun. Komposisi penduduk pada kelompok umur 15-64 tahun merupakan bagian terbesar dari keseluruhan struktur penduduk dan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Tren ini akan semakin menurun hingga -0,36% pada tahun 2045, walaupun masih dominan sebesar 66,11%. Transisi demografi atau perubahan struktur umur penduduk, dimana proporsi anak-anak usia 15 tahun ke bawah menurun dengan cepat diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk usia kerja dan peningkatan perlahan penduduk lanjut usia, maka Sumatera Selatan masih akan mengalami bonus demografi hingga tahun 2045.

Tabel 2. 59 Proyeksi Penduduk Sumatera Selatan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2025–2045 (Ribu)

Umur	2025		2030		2035		2040		2045	
	Laki2	Pr	Laki2	Pr	Laki2	Pr	Laki2	Pr	Laki2	Pr
0–4	371,21	356,11	360,69	346,23	356,49	342,12	359,54	344,84	362,75	347,81
5–9	392,08	374,02	369,35	354,83	358,96	345,04	354,89	341,01	357,99	343,75
10–14	377,84	377,84	391,21	373,37	368,56	354,22	358,25	344,49	354,22	340,49
15–19	342,17	342,17	393,85	376,44	389,45	372,01	366,94	352,96	356,71	343,29
20–24	336,41	336,41	360,89	340,01	390,55	374,14	386,25	369,78	363,95	350,84
25–29	361,65	343,69	353,69	333,84	357,58	337,50	387,01	371,46	382,79	367,18
30–34	356,10	339,29	358,23	340,60	350,39	330,94	354,31	334,66	383,49	368,39
35–39	349,87	336,3	352,19	335,89	354,36	337,31	346,68	327,84	350,60	331,57
40–44	331,60	318,30	347,24	332,74	347,61	332,45	349,86	334,00	342,34	324,68
45–49	307,23	296,72	325,47	314,21	340,92	328,69	341,43	328,60	343,74	330,23
50–54	268,86	261,61	298,70	291,44	316,66	308,95	331,97	323,48	332,64	323,57
55–59	221,93	218,73	257,01	254,63	285,91	284,12	303,58	301,63	318,55	316,09
60–64	176,08	176,32	206,06	209,57	239,16	244,62	266,74	273,59	283,66	290,87
65–69	129,86	131,49	156,41	164,07	183,72	195,93	214,17	229,67	239,42	257,48
70–74	86,17	90,07	107,24	115,96	129,94	145,95	153,75	175,66	179,97	206,87
75–79	44,24	49,86	63,19	72,24	79,35	94,49	97,28	120,67	115,88	146,44
80+	27,09	36,94	36,96	51,23	53,26	76,00	71,36	107,60	90,80	145,05
Total	4.542,62	4.385,89	4.738,37	4.607,29	4.902,87	4.804,49	5.044,03	4.981,93	5.159,49	5.134,60

Sumber: BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020 dan *Long Form* Sensus Penduduk 2020

Namun, Bonus Demografi tidak dapat serta merta terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif besar, melainkan harus diiringi dengan peningkatan produktivitas dari penduduk usia kerja tersebut. UNFPA menyatakan bahwa suatu wilayah dapat menikmati bonus demografi ketika setiap orang

menikmati kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan kemandirian anak muda. Kondisi ini dapat terjadi ketika suatu wilayah yang memiliki potensi jumlah penduduk tersebut juga memiliki kebijakan yang baik.

Meningkatnya jumlah penduduk yang termasuk dalam usia produktif dinilai sebagai peluang besar dalam dunia industri. Bonus Demografi adalah momen yang tepat bagi Perusahaan untuk mencari kandidat yang kompeten sehingga akan membantu perkembangan ekonomi. Dengan merancang sistem Pendidikan yang lebih baik, sektor Pendidikan juga akan mengalami peningkatan. Penduduk usia produktif yang besar dapat menjadi keuntungan karena semakin banyak individu yang berpeluang mendapatkan kesempatan kerja sehingga semakin banyak sumber daya manusia yang dimanfaatkan.

Momen bonus demografi tidak hanya mendatangkan keuntungan jika kesempatan itu tidak dipersiapkan dengan baik. Dengan jumlah penduduk usia produktif lebih dari 60% tersebut bisa mengakibatkan meningkatnya pengangguran karena semakin banyak usia produktif, perusahaan akan semakin selektif membuka peluang pekerjaan. Perlu menjadi perhatian juga gaya hidup yang kurang sehat memudahkan penduduk di usia produktif terkena penyakit sehingga kinerja menjadi kurang maksimal.

Persiapan yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan menyediakan segala sarana dan prasarana yang cukup dan baik dari segi kesehatan, misalnya pemantauan kesehatan ibu hamil dan anak. Hal ini untuk menjaga agar penduduk tetap bertahan hidup selama masa produktifnya. Dari segi pendidikan, pemerintah menyediakan sekolah dan sarana prasarana lain yang cukup dan berkualitas baik, perluasan akses pendidikan, latihan kerja dan pusat pelatihan, revitalisasi perguruan tinggi berbasis vokasi untuk membentuk tenaga kerja siap kerja dan membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing.

Bagi Perusahaan dapat berperan dengan membuka peluang pekerjaan sehingga risiko angka pengangguran akan diminimalisir. Dengan demikian penduduk usia produktif yang bekerja akan dapat menanggung penduduk non produktif. Bagi individu yang ada dalam usia produktif dapat mengoptimalkan setiap potensi diri sehingga dapat menjangkau kesempatan tak terbatas sehingga menjadi individu yang berkualitas dan kompeten.

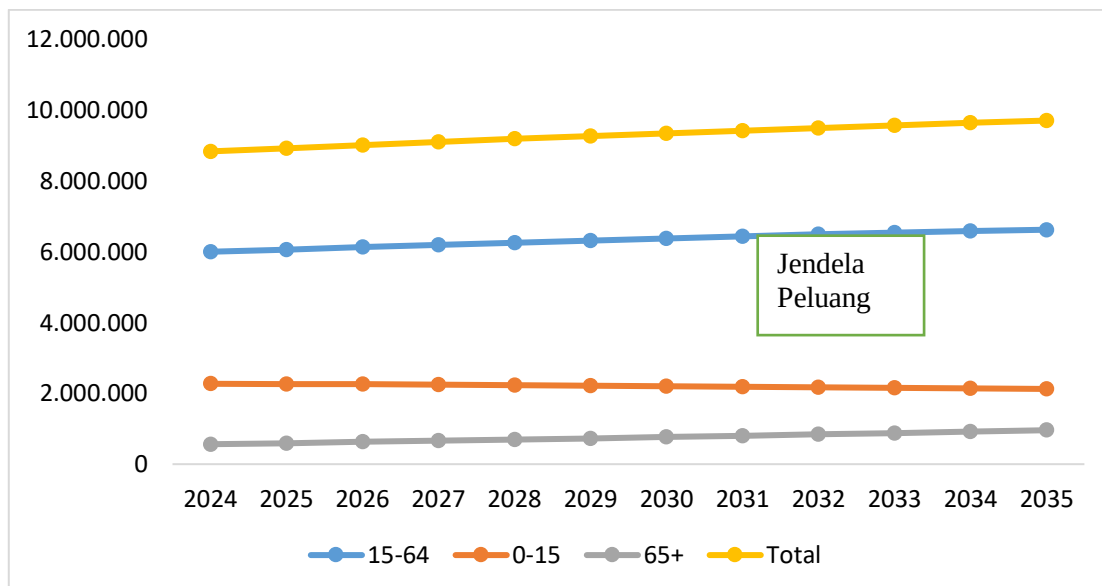
Tabel 2. 60 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Sumatera Selatan, 2020-2045

Uraian	Kondisi tahun 2020	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin						
Laki-Laki (000)	4.310,06	4.542,62	4.738,37	4.902,87	5.044,03	5.159,49
Perempuan (000)	4.137,70	4.385,89	4.607,29	4.804,49	4.981,93	5.134,60
Total (000)	8.447,76	8.928,52	9.345,65	9.707,36	10.025,96	10.294,09
Komposisi Umur (%)						
0-14	26,68	25,39	23,49	21,89	20,98	20,47
15-64	67,99	67,94	68,30	68,23	67,35	66,11
65+	5,33	6,67	8,21	9,88	11,67	13,42
Dependency Ratio (%)	47,09	47,19	46,42	46,56	48,47	51,27

Sumber: BPS, Hasil Sensus Penduduk 2020 dan *Long Form* Sensus Penduduk 2020

Bonus demografi dalam bentuk penduduk usia produktif adalah potensi. Dapat menjadi penentu pertumbuhan ekonomi jika benar-benar produktif dalam arti benar-benar bekerja sesuai kompetensi dan preferensinya sehingga produktivitasnya lebih tinggi. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berperan sebagai sumber faktor produksi sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan Pembangunan. Selain itu, penduduk usia produktif ini mampu mencukupi kehidupan mereka sendiri bahkan menopang penduduk yang tidak produktif. Hal ini akan berdampak pada kondisi ekonomi wilayah atau negara menjadi lebih baik dan Sejahtera sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan mempercepat Pembangunan menjadi lebih maju.

Sebagai bagian dari aspek demografi penduduk yang termasuk Angkatan kerja perlu dimanfaatkan supaya tidak menjadi kelompok penduduk usia produktif yang menganggur. Pertumbuhan ekonomi dapat dijaga *trend* positifnya dengan meningkatkan akses Angkatan kerja tersebut pada sumber daya produktif melalui: 1) penciptaan lapangan kerja; 2) Pengembangan kredit mikro untuk UKM; 3) Meningkatkan kegiatan yang bersifat padat karya; dan 4) Mendorong pekerja setengah penganggur untuk melaksanakan usaha produktif dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam dan teknologi tepat guna.



Gambar 2. 74 Proyeksi Bonus Demografi

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Aspek demografi berdasarkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dapat menjadi hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam dua puluh tahun ke depan, Sumatera Selatan memiliki jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang hampir tidak ada perbedaan signifikan. Kualitas dan kualifikasi sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin menjadi seimbang sehingga tidak ada bias gender dalam kegiatan perekonomian. Semua penduduk dapat berperan dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas penduduk sebagai faktor produksi agar kompetitif dan sesuai kebutuhan pasar dipenuhi melalui: 1) pendidikan dan juga latihan yang bisa meningkatkan kemampuan tenaga kerja dalam hal keterampilan, pengetahuan dan juga sikap yang baik; 2) Peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan melindungi penduduk yang sudah bekerja agar dapat terus bekerja, fokus pada kebijakan ekonomi yang mengarah pada prosedur investasi yang sederhana dan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian limpahan penduduk usia kerja dapat terserap di berbagai sektor sehingga pendapatan per kapita akan naik dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

2.6.3 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar

Kebutuhan sarana dan prasana dasar sangat erat kaitannya dengan perkembangan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong peningkatan kebutuhan akan sarana dan prasarana dasar. Sarana dan prasarana dasar menjadi modal pembangunan untuk mencapai visi pembangunan daerah. Penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berkualitas baik mampu mendorong peningkatan kualitas kehidupan. Berikut proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana dasar di Provinsi Sumatera Selatan selama 20 tahun yang akan datang. Dalam mewujudkan pembangunan wilayah, faktir pendorong yang penting adalah pembangunan sarana dan prasarana, terutama konektivitas, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi serta sarana dan prasarana dasar lainnya.

2.6.3.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Pemenuhan kebutuhan perumahan menjadi komponen penting dalam peningkatan kualitas hidup. Perhitungan kebutuhan sarana perumahan didasarkan pada jumlah prediksi penduduk yang dirinci per kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2045. Perhitungan kebutuhan rumah tersebut didasarkan dengan asumsi sebagai berikut: a) Satu kepala keluarga terdiri dari 5 jiwa / penduduk; b) Rumah tipe kecil diasumsikan sebanyak 60%; c) Rumah tipe sedang diasumsikan sebanyak 30%; d) Rumah tipe besar diasumsikan sebanyak 10%. Hasil perhitungan kebutuhan rumah di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.61. Pada tahun 2025 diperkirakan jumlah kebutuhan rumah sebanyak 1.785.703 unit, dan meningkat menjadi 2.058.817 unit. Peningkatan kebutuhan rumah akan berdampak pada pola ruang yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2. 61 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Uraian	Baseline 2020	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	8.447.760	8.928.515	9.345.663	9.707.356	10.025.956	10.294.086
Proyeksi Kebutuhan Rumah	1.689.552	1.785.703	1.869.131	1.941.471	2.005.191	2.058.817

2.6.3.2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti makan, minum, masak, mencuci dan lainnya. Untuk kawasan perkotaan air minum dilayani oleh jaringan perpipaan dari PDAM. Dari data prediksi pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan air bersih juga akan bertambah terutama pada kawasan pusat kota dan ramai penduduk dan juga di kawasan perkantoran. Dengan demikian diperlukan penambahan kapasitas dan juga *intake* yang dapat mencukupi kebutuhan Provinsi Sumatera Selatan. Penambahan *intake* juga akan menambah jaringan air bersih ke permukiman penduduk di sekitar maupun di luar lokasi. Dengan asumsi kebutuhan air bersih penduduk 125 liter per hari per orang, maka perkiraan kebutuhan air bersih ditunjukkan pada tabel perhitungan.

Tabel 2. 62 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Uraian	Baseline 2020	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih (000 liter)	380.783.175	401.783.175	420.554.385	436.831.020	451.168.020	463.233.870

2.6.3.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Perhitungan kebutuhan listrik didasarkan pada kebutuhan rumah tangga dan kegiatan lainnya, seperti untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dasar perhitungan kebutuhan listrik adalah sebagai berikut: a) Untuk rumah tipe kecil diasumsikan membutuhkan listrik 900 watt. b) Untuk rumah tipe sedang diasumsikan membutuhkan listrik 1.300 watt. c) Untuk rumah tipe besar diasumsikan membutuhkan listrik 2.200 watt. Untuk kebutuhan lainnya diasumsikan sebesar 30% dari total kebutuhan untuk rumah tangga, sedangkan acuan lainnya yaitu kebutuhan gardu listrik dengan perhitungan setiap 2.500 jiwa penduduk dibutuhkan luas lahan 30 m² dalam radius 500 m.

Tabel 2. 63 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Uraian	Baseline 2020	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	8.447.760	8.928.515	9.345.663	9.707.356	10.025.956	10.294.086
Proyeksi Kebutuhan Gardu	3.379	3.571	3.738	3.883	4.010	4.118
Proyeksi Kebutuhan Lahan	101.373	107.142	112.148	116.488	120.311	123.529

2.6.3.4 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Data prediksi pertumbuhan penduduk yang ada akan meningkatkan juga volume sampah disini, dimana pertumbuhan penduduk akan berbanding lurus dengan pertumbuhan volume sampah, sehingga perlu adanya perencanaan yang matang terhadap pengelolaan sampah ini sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan yang diakibatkan menumpuknya sampah.

Sesuai dengan sistem penanganan yang dilakukan selama ini, untuk masa yang akan datang pengolahan sampah menggunakan sistem *Sanitary Land* dengan cara penyediaan tempat sampah umum yang akan dibuang secara bersama pada lokasi yang ditentukan. Hal ini terutama dengan pertimbangan bahwa pada tahap akhir perencanaan pembuangan sampah secara individu sudah tidak efisien lagi.

Dari tiap lokasi, kontainer sampah ataupun sampah di TPS diangkut oleh kendaraan truk sampah atau kendaraan *dump-truck* dan *arm roll truck* yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ke lokasi tempat pembuangan akhir (TPA). Mengingat besarnya volume timbunan sampah yang akan terjadi, maka pengembangan dan peningkatan sistem pengelolaan persampahan merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi, baik itu sumber daya manusianya (manajemen) maupun utilitas atau peralatan persampahannya. Lokasi penempatan kontainer terutama di dekat daerah permukiman padat serta di kawasan komersil. Lokasi penempatan kontainer sebagai TPS diupayakan ditempatkan minimal 500 m dengan lokasi permukiman untuk menghindari polusi yang ditimbulkan sampah. Untuk itu, lokasi TPS ini harus disiapkan di tempat yang terlindung, sehingga tidak menimbulkan gangguan lingkungan. Penempatan TPS-TPS tersebut sebagian besar akan dialokasikan di lingkungan permukiman. Sedangkan pengambilan sampah dari TPS-TPS tersebut dilakukan setiap hari yang pengangkutannya langsung dibawa ke TPA.

Luas tempat pembuangan sampah sementara dan pembuangan akhir sampah diperkirakan dengan standar yang ada, yaitu:

- Depo (lokasi pembuangan sampah sementara), dengan kapasitas 100 m³, luas 250–300 m³/depo serta mempunyai kemampuan pelayanan $\pm$ 30.000 jiwa/depo, sedangkan untuk perkiraan 1 TPS mempunyai kapasitas 10 m³
- Lokasi pembuangan sampah biasanya tergantung pada jumlah sampah, hanya ditentukan tinggi timbunan maksimum yaitu 3 meter.

Pengelolaan persampahan meliputi pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS kemudian dari TPS ke TPA. Jumlah timbunan sampah akan dihitung berdasarkan prediksi jumlah penduduk dengan asumsi bahwa setiap orang akan menghasilkan timbunan sampah sebesar 2,5 liter setiap hari.

Tabel 2. 64 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Uraian	Baseline 2020	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	8.447.760	8.928.515	9.345.663	9.707.356	10.025.956	10.294.086
Proyeksi Jumlah Sampah Penduduk	7.602.984	8.035.663,5	8.411.087,7	8.736.620,4	9.023.360,4	9.264.677,4
Per Tahun (000 liter)						
Proyeksi Kebutuhan TPS (unit)	760.298	803.566	841.109	873.662	902.336	926.468

2.6.3.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut.

Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan

mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Beberapa jenis sarana yang dibutuhkan adalah:

- a). Posyandu yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita;
- b). Balai pengobatan warga yang berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (*curative*) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi;
- c). Balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA)/Klinik Bersalin), yang berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun;
- d). Puskesmas dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya;
- e). Puskesmas pembantu dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil;
- f). Tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan; dan
- g). Apotik, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan.

Tabel 2. 65 Standar Kebutuhan Sarana Kesehatan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan PerSatuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/rumah

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan PerSatuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencap aian	Lokasi dan Penyelesaian	
2.	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12	1.000 m'	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3.	Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1	4.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum.	
4.	Pembantu dan Balai Pengobatan	30.000	150	300	0,006	1.500 m'	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan
5.	Lingkungan Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000 m'	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6.	Tempat Praktek	5.000	18	-	-	1.500 m'	-idem-	Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotik
7.	Dokter Apotik / Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m'	-idem-	

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Berdasarkan standar kebutuhan sarana kesehatan tersebut di atas, maka dihitung proyeksi kebutuhan sarana Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan sampai akhir tahun rencana yaitu tahun 2045. Proyeksi kebutuhan sarana kesehatan akan dirinci per Kabupaten/kota dengan asumsi standar kebutuhan untuk setiap 1.000 penduduk dibutuhkan 1 tempat tidur rumah sakit, maka kebutuhan sarana kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 66 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2045

Uraian	Baseline 2020	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	8.447.760	8.928.515	9.345.663	9.707.356	10.025.956	10.294.086
Jumlah Kebutuhan Tempat Tidur (unit)	8.448	8.929	9.346	9.707	10.026	10.294
Jumlah Kebutuhan Posyandu (unit)	6.758	7.143	7.477	7.766	8.021	8.235
Jumlah Praktek Dokter (unit)	1.690	1.786	1.869	1.941	2.005	2.059
Jumlah Kebutuhan Apotek (unit)	282	298	312	324	334	343
Jumlah Kebutuhan Balai Pengobatan (unit)	3.379	3.571	3.738	3.883	4.010	4.118
Jumlah Kebutuhan Klinik Bersalin (unit)	282	298	312	324	334	343
Jumlah Kebutuhan Puskemas Pembantu (unit)	282	298	312	324	334	343
Jumlah Kebutuhan Puskemas (unit)	70	74	78	81	84	86

Peningkatan sarana kesehatan dapat memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan di berbagai wilayah di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tingkat yang lebih kecil peningkatan jumlah puskesmas diharapkan dapat mendorong peningkatan derajat kesehatan utamanya masyarakat di daerah. Demikian juga peningkatan jumlah klinik bersalin dapat mengurangi risiko kematian bayi dan ibu.

2.6.3.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT dan RW) maupun yang formal (kelurahan dan kecamatan) bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan sarana pendidikan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya, sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai. Sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal. Oleh karena itu, dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan: a) Berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan; b) Optimasi daya tampung dengan satu *shift*; c) Efisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu; d) Pemakaian sarana dan prasarana pendukung; e) Keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya.

Sarana pendidikan yang akan dihitung di sini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal / umum, yaitu meliputi tingkat prabelajar (Taman Kanak-kanak); tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU).

Penggolongan jenis sarana pendidikan dan pembelajaran ini meliputi:

- a) Taman kanak-kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;
- b) Sekolah dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;
- c) Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun sesudah (SD);
- d) Sekolah menengah umum (SMU), yang merupakan satuan pendidikan yang

menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;

- e) Sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan di suatu lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan.

Tabel 2. 67 Standar Kebutuhan Sarana Pendidikan dan Pembelajaran

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukun g(jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius penca paian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Taman Kanak-kanak	1.250	216 termasuk rumah penjaga 36 m ²	500	0,28 m ² /j	500 m'	Di tengah kelompok warga.Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung	2 rombongan prabelajar @ 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
2.	Sekolah Dasar	1.600	633	2.000	1,25	1.000 m'	dengan taman sehingga terjadi pengelompo kan kegiatan.	Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4. Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain,mis. SD, SMP, SMA dalam satukomplek
3.	SLTP	4.800	2.282	9.000	1,88	1.000 m'	Dapat dijangkau dengan	
4.	SMU	4.800	3.835	12.500	2,6	3.000 m'	kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan.	
5.	Taman Bacaan	2.500	72	150	0,09	1.000 m'	Di tengah Kelompok warga tidak menyebe- rang jalan lingkungan.	

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Proyeksi kebutuhan sarana pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2045 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Penyediaan sarana pendidikan yang meningkat disertai dengan peningkatan kualitasnya akan

mendorong pencapaian indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sehingga diharapkan indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkat.

Tabel 2. 68 Proyeksi Kebutuhan Kebutuhan Sarana Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2045

Uraian	Baseline 2020	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	8.447.760	8.928.515	9.345.663	9.707.356	10.025.956	10.294.086
Jumlah SMP (unit)	1.760	1.860	1.947	2.022	2.089	2.145
Jumlah SMU (unit)	1.760	1.860	1.947	2.022	2.089	2.145
Taman Bacaan (unit)	3.379	3.571	3.738	3.383	4.010	4.118

2.6.3.7 Proyeksi Kebutuhan Panjang Jalan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Prasarana jalan sangat penting dalam pengembangan wilayah dan mendorong pembangunan daerah. Ketersediaan yang mampu menjangkau seluruh wilayah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan arus barang dan jasa dari dan ke luar wilayah. Mobilitas penduduk yang meningkat memerlukan jalan sebagai prasarana untuk memudahkan pergerakan penduduk. Demikian pula, mobilitas barang dan jasa untuk memerlukan jalan sebagai akses menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baik itu kawasan industri, kawasan ekonomi khusus maupun Kawasan strategis lainnya. Jalur distribusi logistik dan transportasi darat masih menjadi tulang punggung pembangunan yang efektif dan efisien untuk hasil komoditas unggulan, dan pengiriman barang dan jasa. Kebutuhan jalan diperhitungkan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Indeks Aksesibilitas sesuai Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2001). Jumlah panjang jalan yang dibutuhkan diproyeksi sepanjang 4.338,58 km.

Tabel 2. 69 Proyeksi Kebutuhan Panjang Jalan Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Uraian	Baseline 2020	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	8.447.760	8.928.515	9.345.663	9.707.356	10.025.956	10.294.086
Luas Wilayah	86.771,68	86.771,68	86.771,68	86.771,68	86.771,68	86.771,68
Jumlah Penduduk per Luas Wilayah	97,36	102,897	107,704	111,872	115,554	118,634
Konsep Aksesibilitas	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05	>0,05
Indeks Aksesibilitas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Proyeksi Jumlah Panjan Jalan	4.338,58	4.338,58	4.338,58	4.338,58	4.338,58	4.338,58

2.6.3.8 Proyeksi Kebutuhan Pemadam Kebakaran

Sistem pemadam kebakaran memiliki peranan signifikan dalam upaya penanggulangan bencana. Salah satu upaya dalam peningkatan layanan pemadam kebakaran adalah optimalisasi jalur kendaraan dan pipa hidran yang tersebar serta perilaku kooperatif dari masyarakat. Selain itu, tim pemadam kebakaran dengan sikap tanggap atau tepat waktu akan sangat mempengaruhi dalam mengaatasi atau meminimalisir risiko bencana. Dalam proyeksi terkait sistem pemadam kebakaran maka akanterkait pada ketersediaan unit pos damkar yang melayani kebutuhan terhadap penanggulangan kebakaran. Sesuai dengan standar pelayanan ideal maka dibutuhkan 1 unit pos damkar pada setiap 10 ribu jiwa penduduk.

Tabel 2. 70 Proyeksi Kebutuhan Pemadam Kebakaran

Uraian	Baseline 2020	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	8.447.760	8.928.515	9.345.663	9.707.356	10.025.956	10.294.086
Proyeksi Pos Damkar (unit)	845	893	935	971	1.003	1.029

2.6.3.9 Proyeksi Kebutuhan Jamban

Jamban merupakan salah satu kebutuhan higienis yang wajib disediakan dalam setiap bangunan. Perhitungan kebutuhan jamban dilaksanakan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan tentang syarat higienis dan sanitasi dalam bangunan dengan poin dasar sebagai berikut: a) 1 - 10 orang sebanyak 1 buah; b) 11 – 25 orang sebanyak 2 buah, c) 26-50 orang sebanyak 3 buah.

Setiap ada penambahan sampai dengan 25 orang, ada penambahan 1 (satu) buah jamban. Dengan demikian dilakukan perhitungan umum proyeksi kebutuhan jamban dengan standar kebutuhan maksimal pada poin di atas yaitu pada setiap 26-50 orang dibutuhkan 3 buah jamban.

Tabel 2. 71 Proyeksi Kebutuhan Jamban

Uraian	Baseline 2020	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	8.447.760	8.928.515	9.345.663	9.707.356	10.025.956	10.294.086
Proyeksi Jamban (unit)	506.866	535.711	560.739	582.441	601.557	617.645

2.6.3.10 Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Air Limbah

Air limbah merupakan air sisa pembuangan baik yang berasal dari pembuangan rumah tangga ataupun air hujan dan banjir. Dari prediksi pertumbuhan penduduk terjadi peningkatan pada volume air limbah sehingga sangat diperlukan infrastruktur air limbah yang lebih baik dan memadai untuk menampung dan mempertahankan kelestarian lingkungan. Untuk perencanaan, produksi air limbah diasumsikan sebesar 80% dari kebutuhan air bersih, untuk itu perhitungan volume air limbah didasarkan pada kebutuhan air bersih.

Tabel 2. 72 Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Air Limbah

Uraian	Baseline 2020	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	8.447.760	8.928.515	9.345.663	9.707.356	10.025.956	10.294.086
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Jamban (unit)	506.866	535.711	560.739	582.441	601.557	617.645

2.6.3.11 Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Sarana pemerintahan dan pelayanan umum sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah, utamanya dari sisi peningkatan layanan kepada masyarakat. Sarana pemeritahan dan pelayanan umum mencakup: a) Kantor-kantor pelayanan/administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan; b) Kantor pelayanan utilitas umum dan jasa; seperti layanan air bersih (PAM), listrik (PLN), telepon, dan pos; c) Pos-pos pelayanan keamanan dan keselamatan; seperti pos keamanan dan pos pemadam kebakaran.

Dasar penyediaan sarana pemerintahan dan pelayanan umum untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT dan RW) maupun yang formal (kelurahan dan kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan sarana ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sementara itu, penempatan penyediaan sarana mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Gedung serba guna yang akan disediakan sebagai sarana kebudayaan dan rekreasi ini dapat sekaligus melayani kebutuhan kegiatan administrasi/keperintahan setempat, kegiatan warga seperti; karang taruna, PKK, dan sebagainya. Parkir umum yang disediakan akan diintegrasikan antara kebutuhan kantor kelurahan dengan kebutuhan gedung serba guna / balai karang taruna ini. Tempat sampah pada lingkup Kelurahan berupa bak sampah besar, merupakan tempat pembuangan sementara sampah-sampah dari lingkungan RW yang diangkut gerobak sampah. Gedung pertemuan/serba guna yang akan disediakan sebagai sarana kebudayaan dan rekreasi ini dapat sekaligus melayani kebutuhan

aktifitas administrasi/kepemerintahan setempat ataupun warga. Jumlah perkantoran kecamatan dan desa/kelurahan akan mengikuti jumlah kecamatan dan desa/kelurahan pada setiap kabupaten/kota.

2.6.3.11.1 Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Niaga

Sarana perdagangan dan niaga ini tidak selalu berdiri sendiri dan terpisah dengan bangunan sarana yang lain. Dasar penyediaan selain berdasarkan jumlah penduduk yang akan dilayaninya, juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu. Menurut skala pelayanan, penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah:

- a). Toko/warung (skala pelayanan unit RT 250 penduduk), yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari;
- b). Pertokoan (skala pelayanan 6.000 penduduk), yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang lebih lengkap dan pelayanan jasa seperti wartel, fotocopy, dan sebagainya;
- c). Pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan (skala pelayanan unit kelurahan 30.000 penduduk), yang menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah-buahan, beras, tepung, bahan-bahan pakaian, pakaian, barang-barang kelontong, alat-alat pendidikan, alat-alat rumah tangga, serta pelayanan jasa seperti warnet, wartel dan sebagainya;
- d). Pusat perbelanjaan dan niaga (skala pelayanan unit kecamatan 120.000 penduduk), yang selain menjual kebutuhan sehari-hari, pakaian, barang kelontong, elektronik, juga untuk pelayanan jasa perbengkelan, reparasi, unit-unit produksi yang tidak menimbulkan polusi, tempat hiburan serta kegiatan niaga lainnya seperti kantor-kantor, bank, industri kecil dan lain-lain.

Kebutuhan ruang dan lahan untuk sarana ini akan berkaitan juga dengan daya dukung lingkungan dan jalan yang ada di sekitar bangunan sarana tersebut. Besaran kebutuhan ruang dan lahan menurut penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah:

Tabel 2. 73 Standar Jenis Sarana Perdagangan dan Niaga

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Luas Lantai min (m ²)	Luas lahan min (m ²)	Stand ar d (m ² /jiwa)	Radius Pencapa ian	Lokasi
1	Toko/Warung	250	50 (termasuk Gudang)	100 (bila berdiri sendiri)	0,4	300 m'	Di tengah kelompok hunian dan dapat merupakan bagian dari sarana lain
2	Pertokoan	6.000	1.200	3.000	0,5	2.000 m'	Di pusat kegiatan sub lingkungan
3	Pusat Pertokoan + pasar Lingkungan	30.000	13.500	10.000	0,33		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4	Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko+pasar+ bank+kantor)	120.000	36.000	36.000	0,3		Terletak di jalan utama, termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Aktivitas ekonomi wilayah didukung sarana bidang ekonomi seperti warung/toko, dan pusat perbelanjaan. Kebutuhan sarana penunjang ekonomi diproyeksikan mengalami peningkatan sehingga dapat membangkitkan ekonomi daerah.

Tabel 2. 74 Proyeksi Kebutuhan Toko/Warung di Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2045

Uraian	Baseline 2020	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	8.447.760	8.928.515	9.345.663	9.707.356	10.025.956	10.294.086
Jumlah Kebutuhan Warung/Toko (unit)	33.791	35.714	37.383	38.829	40.104	41.176
Jumlah Kebutuhan Pertokoan (unit)	1.408	1.488	1.558	1.618	1.617	1.716

Uraian	Baseline 2020	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Kebutuhan Pertokoan Pasar Lingkungan (unit)	282	298	312	324	334	343
Jumlah Kebutuhan Pusat Perbelanjaan dan Niaga (unit)	70	74	78	81	84	84

2.6.3.11.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kebudayaan dan Rekreasi

Sarana kebudayaan dan rekreasi merupakan bangunan yang dipergunakan untuk memwadah berbagai kegiatan kebudayaan dan atau rekreasi, seperti gedung pertemuan, gedung serba guna, bioskop, gedung kesenian, dan lain-lain. Bangunan dapat sekaligus berfungsi sebagai bangunan sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sehingga penggunaan dan pengelolaan bangunan ini dapat berintegrasi menurut kepentingannya pada waktu yang berbeda. Penetapan jenis/macam sarana kebudayaan dan rekreasi pada suatu daerah sangat tergantung pada kondisi setempat area tersebut, yaitu faktor tata kehidupan penduduknya, dan struktur sosial penduduknya.

Tabel 2. 75 Standar Kebutuhan Sarana Kebudayaan dan Rekreasi

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Luas lantai min (m ²)	Luas lahan min (m ²)	Standard (m ² /jiwa)	Radius Penca paian	Lokasi
1	Balai warga/ Balai Pertemuan	2.500	150	300	0,12	100 m'	Di tengah kelompok hunian dan dapat merupakan bagian dari sarana lain
2	Balai Serbaguna	30.000	250	500	0,017	100 m'	Di pusat lingkungan
3	Gedung serbaguna	120.000	1500	3.000	0,025		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Luas lantai min (m ²)	Luas lahan min (m ²)	Standard (m ² /jiwa)	Radius Pencapaian	Lokasi
4	Gedung Bioskop	120.000	1000	2.000	0,017		Terletak di jalan utama, dapat merupakan bagian dari pusat perbelanjaan

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Proyeksi kebutuhan sarana kebudayaan dan rekreasi di Provinsi Sumatera Selatan selama 20 tahun yang akan datang diperkirakan mengalami peningkatan. Balai serba guna dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang terkait seni dan budaya sehingga dapat mendorong keberagaman seni dan budaya daerah seperti upacara adat, dan pentas/pergelaran seni.

Tabel 2. 76 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kebudayaan dan Rekreasi di Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2045

Uraian	Baseline 2020	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	8.447.760	8.928.515	9.345.663	9.707.356	10.025.956	10.294.086
Balai Warga (unit)	3.379	3.571	3.738	3.883	4.010	4.118
Jumlah Balai Serbaguna (unit)	282	298	312	324	334	343
Jumlah Gedung Serba Guna (unit)	70	74	78	81	84	86

2.6.3.11.3 Proyeksi Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga

Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu lansekap, *hardscape*, taman atau ruang rekreasi

dalam lingkup urban. Peran dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 1988, yang menyatakan "Ruang terbuka hijau yang populasinya didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman, dalam pemanfaatan dan fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan wilayah perkotaan. Kebutuhan luas lahan ruang terbuka hijau berdasarkan kapasitas pelayanan sesuai jumlah penduduk, dengan standar 1 m²/penduduk. Acuan perhitungan luasan berdasarkan angka kematian setempat dan/atau sistem penyempurnaan.

Tabel 2. 77 Standar Kebutuhan Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Luas Lahan Min.(m ²)	Standard (m ² /jiwa)	Radius pencapaian (m)	Kriteria Lokasi dan Penyelesaian
1.	Taman/ Tempat Main	250	250	1	100'	Di tengah kelompok tetangga.
2.	Taman/ Tempat Main	2.500		0,5	1.000'	Di pusat kegiatan lingkungan.
3.	Taman dan Lapangan Olah Raga	30.000	9.000	0,3		Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan.
4	Taman dan Lapangan Olah Raga	120.000	24.000	0,2		Terletak di jalan utama. Sedapat mungkin berkelompok dengan sarana pendidikan
5	Jalur Hijau			15		Terletak menyebar
6	Kuburan / Pemakaman	120.000				Mempertimbangkan

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Luas Lahan Min.(m ²)	Standard (m ² /jiwa)	Radius pencapaian (m)	Kriteria Lokasi dan Penyelesaian
	Umum					radius pencapaian dan area yang dilayani.

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Penyediaan kebutuhan sarana tempat bermain tidak hanya digunakan untuk bermain saja melainkan dapat menjadi wahana edukasi bagi anak sehingga anak dapat berkreasi sesuai dengan minat mereka. Arena bermain dapat dilengkapi dengan ayunan, panjat memanjat, berseluncur, arena bermain air, *flying fox*, rumah hewan-hewan ternak dan lain-lain sehingga dapat mendorong perkembangan syaraf motorik anak. Demikian pula ketersediaan lapangan olahraga sangat bermanfaat bagi masyarakat melakukan olahraga sehingga dapat menjaga kesehatan.

Tabel 2. 78 Proyeksi Kebutuhan Taman/Tempat Main, Lapangan Olahraga, Jalur Hijau, dan Pemakanandi Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2045

Uraian	Baseline 2020	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	8.447.760	8.928.515	9.345.663	9.707.356	10.025.956	10.294.086
Jumlah Kebutuhan Tempat Bermain (unit)	33.791	35.714	37.383	38.829	40.104	41.176
Jumlah Kebutuhan Tempat Bermain Lingkungan (unit)	3.379	3.571	3.738	3.883	4.010	4.118
Jumlah Kebutuhan	282	298	312	324	334	343

Uraian	Baseline 2020	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lapangan Olahraga						
Jumlah Kebutuhan Jalur Hijau	12.671,64	13.392,77	14.018,48	14.561,03	15.038,93	15.431,13
Jumlah Kebutuhan Tempat Pemakaman	70	74	78	81	84	86

Kebutuhan akan jalur hijau terutama diperkotaan diproyeksikan semakin meningkat namun keterbatasan ruang menjadi kendala oleh karena itu komitmen pemerintah untuk menyediakan jalur hijau sangat dibutuhkan. Jalur hijau dibutuhkan sebagai peneduh, penyerapan polusi udara, peredam kebisingan, pemecah angin, dan pembatas pandang. Proyeksi pada tahun 2045, Provinsi Sumatera Selatan membutuhkan 15.431,13 ha untuk jalur hijau. Seiring pertambahan penduduk, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan membutuhkan tempat pemakaman. Kondisi pemakaman perlu ditata secara baik sehingga tidak terkesan kumuh. Data proyeksi kebutuhan tempat pemakaman di tahun 2045 sebanyak 86 lokasi.

2.7 Arah Pengembangan Wilayah

2.7.1 Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045

Dalam mendorong transformasi ekonomi, arah kebijakan pengembangan wilayah sumatera diarahkan sebagai koridor ekonomi "industri berbasis SDA dan *Hub* Ekonomi Biru Barat Indonesia". Pengembangan wilayah dilakukan dengan cara:

- a). Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan yang dikembangkan pada beberapa kawasan strategis industri, antara lain kawasan strategis industri Medan-Dumai (klaster industri pengolahan sawit, kelapa, kopi, karet, dan hasil perkebunan lainnya, hilirisasi sumber daya mineral, dan pengolahan minyak dan gas bumi), kawasan strategis industri Bengkulu-Muara Enim-Palembang-Jambi (klaster industri hilirisasi batu bara dan pembangkitan energi listrik pada mulut tambang), dan kawasan strategis industri Batam-Bintan (klaster industri pengolahan petrokimia, pengolahan material dan metalurgi, industri berbasis ICT);.

- b). Pengembangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian menuju kedaulatan pangan di Aceh Utara, Aceh Barat, Sumatera Barat, dan Palembang-Bandar Lampung, serta kawasan strategis pertanian herbal di Aceh Tengah yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian guna meningkatkan nilai komoditas pertanian dan menurunkan biaya produksi;
- c). Peningkatan *up-skilling* dan *re-skilling* SDM utamanya terkait pariwisata, pertanian, dan industri antara lain melalui transformasi Balai Latihan Kerja bekerja sama DUDI;
- d). Pengembangan Pelabuhan Belawan-Kuala Tanjung, Dumai, dan Batam menjadi pelabuhan bertaraf global (*global port*) dan penguatan pelabuhan lainnya sebagai *major port* atau pelabuhan *logistic inlet/outlet* utama di Sumatera;
- e). Pemanfaatan SLoC (Selat Malaka) dan ALKI I di sisi Wilayah Sumatera bagian timur dan Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global;
- f). Pengembangan jaringan kereta api barang akses ke pelabuhan (termasuk fasilitas antarmoda) serta pembangunan kereta api antarkota secara bertahap;
- g). Pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTN) sebagai pasokan di wilayah Sumatera maupun antarpulau;
- h). Pengembangan interkoneksi jaringan transmisi listrik di Wilayah Sumatera;
- i). Pengembangan jaringan listrik cerdas (*smart grid*), untuk mendukung peningkatan keandalan dan dekarbonisasi pasokan tenaga listrik;
- j). Peningkatan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerjasama internasional lainnya;
- k). Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung, serta penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan, yaitu pada metropolitan Medan, metropolitan Palembang, dan Kota Batam-Bintan, serta pada pusat-pusat aglomerasi yaitu Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Sibolga, Padang, Dumai, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Pangkalpinang.

Pengembangan pusat pertumbuhan di Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari rencana strategis kawasan, tidak hanya kawasan strategis nasional tetapi juga antarprovinsi di Pulau Sumatera. Keterkaitan antarwilayah terlihat dari arus barang jasa dari dan ke wilayah lain di luar Sumatera Selatan. Ekspor antar wilayah komoditas sebagian besar dilakukan di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dan Pulau Jawa. Oleh karena itu, pengembangan kawasan strategis yang ada di Sumatera Selatan akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan berdampak pada daya dukung lingkungan hidup. Pusat pertumbuhan

menjadi katalisator perekonomian yang didorong oleh transformasi ekonomi, sosial dan tata Kelola yang berlandaskan pada supremasi hukum, stabilitas, kepemimpinan, dan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam mewujudkan pusat pertumbuhan, faktor pendorong yang penting adalah pembangunan, utamanya konektivitas, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, serta sarana dan prasarana dasar. Pembangunan wilayah harus memperhatikan aspek spasial dan karakteristik wilayah serta memberikan keberpihakan kepada daerah tertinggal, karena hal ini berkaitan dengan permasalahan implementasi tata ruang, baik pada tingkat wilayah maupun sektoral.

Keragaman dan karakteristik wilayah Sumatera, khususnya Provinsi Sumatera Selatan, dengan topografi berupa pegunungan/perbukitan dan wilayah perairan menjadi potensi yang perlu dioptimalkan. Namun, hal ini juga menghadirkan tantangan yang harus dimanfaatkan secara strategis serta hambatan yang perlu diminimalkan. Hasil pertanian dan pertambangan yang melimpah memerlukan industri pengolahan sebagai implementasi hilirisasi produk sektor unggulan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi di Kawasan Sumatera Selatan. Selain itu, masih terdapatnya wilayah dengan kantong kemiskinan yang cukup tinggi seperti Kabupaten Musi Rawas Utara memerlukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di wilayah tertinggal, dan mengantisipasi peningkatan urbanisasi ke kota besar. Pengembangan kawasan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu memperhatikan karakteristik potensi cepat tumbuh, sektor unggulan, memiliki sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi dan mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal. Kawasan strategis sebagai fungsi dan daya dukung lingkungan ditetapkan sebagai upaya perlindungan keanekaragaman hayati, keseimbangan neraca air, iklim dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

2.7.2. Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Konsep pengembangan pusat pertumbuhan utama di Sumatera Selatan melalui konsep aglomerasi berdasarkan pengelompokan kawasan/wilayah, kedekatan geografis dan interaksi yang kuat antar wilayah.

(1) Pusat Pertumbuhan Palembang

- a) meliputi Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin.
- b) arah pengembangan dan fungsi utama kawasan:

- Pengembangan sektor perdagangan jasa, kawasan pertanian, perikanan dan pariwisata.
- *Export processing zone*.
- Pengembangan *food estate* di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Banyuasin.
- Kawasan Pesisir.
- Prioritas Pengembangan Koridor Palembang Tanjung Carat.

(2) Pusat Pertumbuhan Muara Enim

- a) meliputi Kabupaten Muara Enim, Kota Prabumulih, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam.
- b) arah pengembangan dan fungsi utama kawasan:
 - Pusat industri pertambangan batubara dan turunannya.
 - Lumbung energi.
 - Pengembangan sektor pertambangan, perkebunan, pertanian pariwisata dan perdagangan jasa.
 - Prioritas Pengembangan Koridor Lahat-Pagar Alam (Pendukung KSPN Pagaralam dan sekitarnya).

(3) Pusat Pertumbuhan Baturaja

- a) meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- b) arah pengembangan dan fungsi utama kawasan:
 - Pengembangan Sentra Pangan/*food estate* di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Komering Ulu Selatan.
 - Lumbung Energi.
 - Kawasan Ekowisata Danau Ranau.
 - Prioritas Pengembangan Koridor Matapura Muaradua-Danau Ranau (Pendukung Danau Ranau); Koridor Martapura-Belitang-Tugumulyo Akses Tol Pematang Panggang).

(4) Pusat Pertumbuhan Lubuklinggau

- a) meliputi Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Empat Lawang.
- b) arah pengembangan dan fungsi utama kawasan:
 - Pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perdagangan jasa dan pariwisata.
 - Pengembangan Bandara di Lubuklinggau sebagai pendukung bidang transportasi.
 - Sebagai kawasan pendukung KSPN Pagar Alam dan sekitarnya.

- Prioritas Pengembangan Koridor Tebingtinggi-Pagaralam; Koridor Lubuklinggau Muara Beliti-Muara Lakitan-Sekayu; Koridor Muara Lakitan-Muara Rupit.



Gambar 2.73. Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

2.7.3 Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting secara nasional. KSN meliputi wilayah yang memengaruhi kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, serta telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang termasuk KSN adalah kawasan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai kawasan khusus. Penetapan KSN berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menerangkan bahwasanya kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional meliputi:

- (1). Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan warisan budaya nasional;
- (2). Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara;
- (3). Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional;
- (4). Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- (5). Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa;
- (6). Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan Ramsar;
- (7). Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan.

KSN di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi:

- a). KSN Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat;
- b). KSN Kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang;
- c). KSN Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; dan
- d). KSN Kawasan Perkotaan Palembang – Betung – Indralaya – Kayuagung.

2.7.3.1 Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat

Taman Nasional Kerinci Seblat membentang melintasi empat provinsi: Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Di Provinsi Sumatra Selatan, Taman Nasional Kerinci Seblat meliputi wilayah Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kota Lubuklinggau. Taman Nasional Kerinci Seblat adalah taman nasional terbesar di Sumatera yang memiliki luas wilayah sebesar 13.750 km². Taman Nasional ini merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.901/Kpts-II/1999.

Taman Nasional Kerinci Seblat berfungsi sebagai kawasan perlindungan untuk proses ekologis yang menunjang kehidupan, kawasan pengawetan keanekaragaman hayati untuk kepentingan pelestarian sumber genetik, wahana bagi pendidikan dan penelitian, serta menunjang pengembangan budaya.

2.7.3.2 Kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang

Kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang merupakan taman nasional yang berdampingan dengan Taman Nasional Berbak. Kawasan seluas 202.896,31 ha ini berada di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Beberapa tahun setelah diresmikan sebagai taman nasional, kawasan ini ditetapkan sebagai salah satu lahan basah. Hal tersebut sesuai dengan kondisi alam yang dimilikinya, yakni perpaduan antara dataran dan perairan. Lingkungan tersebut menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna yang bisa dijumpai di taman nasional ini.

2.7.3.3 Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

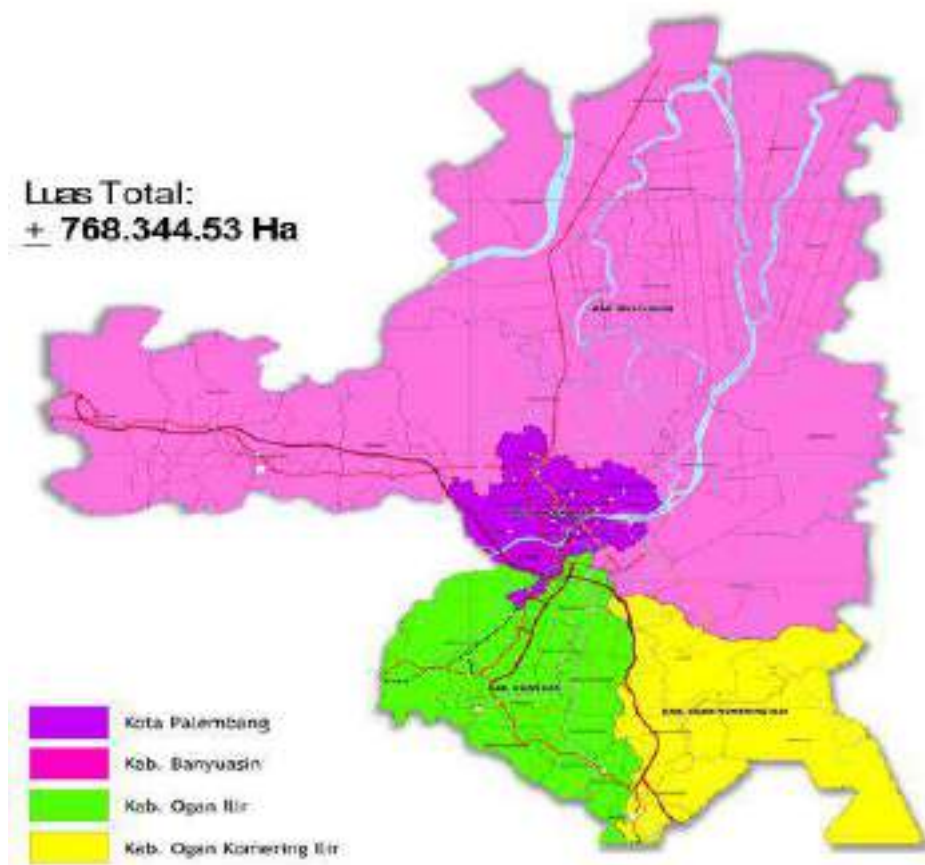
Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan taman nasional yang ditujukan untuk melindungi hutan hujan tropis Pulau Sumatera beserta kekayaan alam hayatinya. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan memiliki luas wilayah sekitar 313.572,48 ha.

Secara administrasi pemerintahan, Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terletak di wilayah Provinsi Lampung seluas 248.861,48 ha dan Provinsi Bengkulu seluas 64.711 ha. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebagai pelestarian Harimau Sumatera, Badak Sumatera dan Gajah Sumatera serta perlindungan sistem penyangga kehidupan yang didukung oleh pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

2.7.3.4 Kawasan Patungraya Agung

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Palembang Betung Indralaya dan Kayu Agung (Patungraya Agung), wilayah delineasi meliputi:

- (1). Seluruh wilayah Kota Palembang dengan luasan sebesar sebesar $\pm 36,647.94$ ha, meliputi 18 kecamatan;
- (2). Sebagian Wilayah Kabupaten Banyuasin dengan luasan sebesar $\pm 516,025.4$ ha, meliputi 14 kecamatan;
- (3). Sebagian Wilayah Kabupaten Ogan Ilir dengan luasan sebesar $\pm 87,747.29$ ha, meliputi 10 kecamatan;
- (4). Sebagian Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luasan sebesar $\pm 88,396.94$ ha, meliputi 4 kecamatan.



Gambar 2. 75 Lingkup Wilayah Patungraya Agung

Sumber: Direktorat Jenderal Tata Ruang Kemeterian ATR/BPN, 2024

Konsep pengembangan wilayah Patungraya Agung adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan aksesibilitas dan sarana angkutan umum yang terintegrasi untuk menghubungkan Kawasan Perkotaan Patungraya Agung dengan Kawasan lainnya, baik melalui jalur darat (jaringan jalan dan jaringan KA) maupun jalur sungai;
- Pengembangan Kawasan Perkotaan Betung sebagai pusat pelayanan transportasi darat skala nasional dan regional;
- Pengembangan Kawasan Perkotaan Pangkalan Balai sebagai pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
- Pengembangan Kawasan Perkotaan Kayu Agung sebagai pusat pelayanan transportasi darat dan pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan;
- Pemantapan fungsi lindung dan penyediaan infrastruktur tahan bencana dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengurangi risiko bencana;

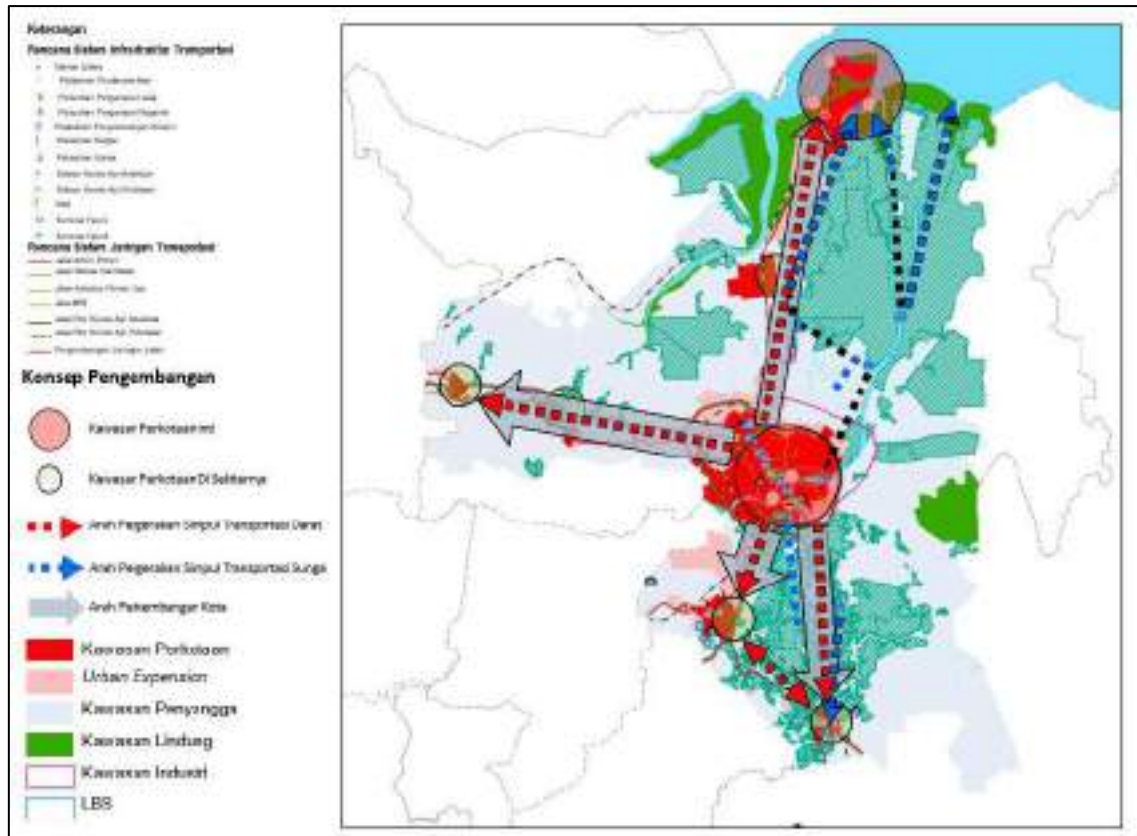
- f). Kawasan penyangga lingkungan dan sentra produksi pertanian sebagai *controlling* area terbangun perkotaan sekaligus perwujudan lumbung pangan nasional dan penopang perekonomian Kawasan Patungraya Agung berbasis sektor pertanian;
- g). Pengendalian banjir berupa program normalisasi dan penguatan tebing sungai dan penyediaan danau, embung, dan kolam retensi di Kawasan Perkotaan Patungraya Agung;
- h). Mengembangkan dan memantapkan Kawasan Perkotaan Inti Kota Palembang sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif skala nasional;
- i). Pengembangan SAUM untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas pusat permukiman;
- j). Mengintegrasikan simpul transportasi dan simpul kegiatan dalam wujud TOD yang dilengkapi sarana prasarana pendukung;
- k). Mempertahankan kearifan lokal dalam upaya pengembangan Kawasan Permukiman Masyarakat di sempadan sungai;
- l). Pengembangan Kawasan Perkotaan Indralaya sebagai pusat pendidikan tinggi dan riset skala nasional;
- m). Pengembangan danau, embung, bendungan, dan kolam retensi di Kawasan Perkotaan Patungraya Agung untuk pemenuhan air baku.

Kawasan Perkotaan Patungraya Agung terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti, Kawasan Perkotaan di Sekitarnya dan Kawasan penyangga lingkungan dan sentra produksi pertanian, yang membentuk Kawasan Metropolitan. Sementara itu, Kawasan Perkotaan Inti meliputi seluruh wilayah Kota Palembang dan sebagian wilayah Kabupaten Banyuasin yang mencakup sebagian Kecamatan Banyuasin II.

Kawasan Perkotaan di sekitarnya meliputi sebagian wilayah Kabupaten Banyuasin (sebagian Kecamatan Betung, sebagian Kecamatan Tanjung Lago, dan sebagian Kecamatan Banyuasin III), sebagian wilayah Kabupaten Ogan Ilir (sebagian Kecamatan Indralaya dan sebagian Kecamatan Indralaya Utara), dan meliputi sebagian Kecamatan Kayu Agung.

Kawasan penyangga lingkungan dan sentra produksi pertanian meliputi sebagian wilayah Kabupaten Banyuasin (seluruh Kecamatan Banyuasin I, sebagian Kecamatan Banyuasin III, seluruh Kecamatan Sumber Marga Telang, sebagian Kecamatan Tanjung Lago, seluruh Kecamatan Muara Telang, seluruh Kecamatan Makarti Jaya, seluruh Kecamatan Air Salek, seluruh Kecamatan Rambutan, seluruh Kecamatan Talang Kelapa, seluruh Kecamatan Sembawa, seluruh Kecamatan Suak Tapeh, sebagian Kecamatan Betung, sebagian Kecamatan Banyuasin II, dan seluruh Kecamatan Air Kumbang), sebagian wilayah Kabupaten Ogan Ilir (sebagian

Kecamatan Indralaya, sebagian Kecamatan Indralaya Utara, seluruh Kecamatan Indralaya Selatan, seluruh Kecamatan Pemulutan, seluruh Kecamatan Pemulutan Barat, seluruh Kecamatan Pemulutan Selatan, seluruh Kecamatan Rantau Panjang, seluruh Kecamatan Sungai Pinang, seluruh Kecamatan Tanjung Raja, dan seluruh Kecamatan Kandis), dan sebagian wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (seluruh Kecamatan Jejawi, sebagian Kecamatan Kayu Agung, seluruh Kecamatan Pampangan, dan seluruh Kecamatan Sirah Pulau Padang).

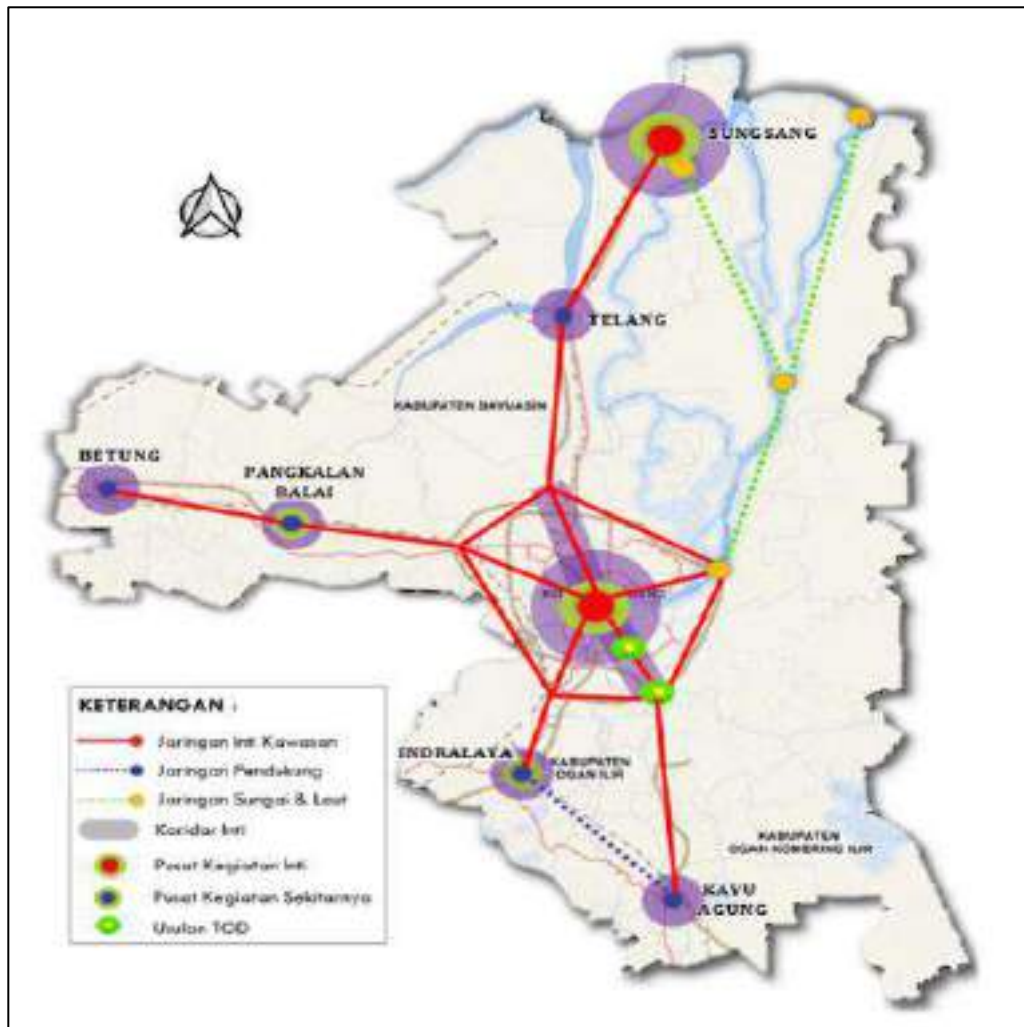


Gambar 2. 76 Konsep Pengembangan Wilayah Patungraya Agung

Sumber: Direktorat Jenderal Tata Ruang Kemeterian ATR/BPN, 2024

Rencana sistem pusat permukiman di Kawasan Perkotaan Patungraya Agung terdiri atas:

- pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti meliputi Kawasan Perkotaan Palembang dan Kawasan Perkotaan Sungsang.
- pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan di sekitarnya meliputi Kawasan Perkotaan Indralaya, Kawasan Perkotaan Pangkalan Balai, Kawasan Perkotaan Betung, Kawasan Perkotaan Telang dan Kawasan Perkotaan Kayu Agung.



Gambar 2. 81 Konsep Pengembangan Jaringan Kawasan Perkotaan Patungraya Agung Tahun 2025-2034

Sumber: Direktorat Jenderal Tata Ruang Kemeterian ATR/BPN, 2024

Arah pengembangan pusat kegiatan perkotaan metropolitan Patungraya Agung berdasarkan kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan sekitarnya ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 77. Konsep Pengembangan Kawasan Perkotaan Patungraya Agung

No	Pusat Kegiatan	Keterangan
Kawasan Perkotaan Inti		
1	Palembang	(1). Pusat pemerintahan provinsi dan pusat pemerintahan kota; (2). Pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; (3). Pusat pelayanan pendidikan tinggi dan riset skala nasional; (4). Pusat pelayanan olah raga skala internasional, nasional, dan regional; (5). Pusat pelayanan kesehatan skala nasional dan regional; (6). Pusat kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif; (7). Pusat pelayanan transportasi udara skala internasional, nasional dan regional; (8). Pusat pelayanan transportasi sungaidan laut skala nasional dan regional; (9). Pusat pelayanan transportasi darat skala nasional dan regional; (10). Pusat pertemuan, pameran, dan konvensi skala nasional dan internasional; dan (11). Pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara.
2	Sungsang	(1). Pusat pengembangan ekonomi skala nasional; (2). Pusat kegiatan industri; (3). Kawasan peruntukan pengembangan sistem <i>logistic</i> terpadu (multimoda); (4). Pusat pelayanan transportasi laut skala internasional, nasional dan regional; (5). Pusat kegiatan perikanan; dan (6). Pusat distribusi logistik.
Kawasan Perkotaan Sekitarnya		
1	Betung	Pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan dan jasa, pusat permukiman, pusat pelayanan transportasi darat skala nasional dan regional, dan pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.

No	Pusat Kegiatan	Keterangan
2	Pangkalan Balai	Pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan transportasi darat skala regional, pusat permukiman, dan pusat pelayanan kesehatan regional.
3	Telang	Pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengembangan pertanian terpadu, pusat pengembangan perkebunan, pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, dan pusat kegiatan perikanan.
4	Indralaya	Pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan tinggi dan riset skala nasional, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan transportasi nasional dan regional, pusat kegiatan industri dan pusat pelayanan kesehatan regional.
5	Kayuagung	Pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa, pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, pusat kegiatan industri dan pusat pelayanan transportasi darat skala regional.

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2024

2.7.4. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044

Kawasan Strategis Provinsi merupakan wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. Delineasi kawasan strategis provinsi berbentuk poligon dan bersifat indikatif.

Kawasan strategis provinsi ditetapkan berdasarkan kriteria:

- Mendukung tujuan penataan ruang wilayah provinsi;
- Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi penanganan kawasan;
- Kesepakatan Masyarakat berdasarkan kebijakan terkait tingkat kestrategisan kawasan yang telah ditetapkan di wilayah provinsi;
- Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi;

- f). Memperhatikan faktor-faktor dalam tatanan ruang wilayah provinsi yang memiliki karakteristik khusus;
- g). Memperhatikan kawasan strategis nasional yang berada di wilayah provinsi;
- h). Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi yang jelas;
- i). Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah provinsi untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;
- j). Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah provinsi;
- k). Dapat berupa kawasan yang berada pada satu kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota; dan
- l). Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, kawasan strategis yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari dua aspek yaitu Aspek pertumbuhan ekonomi dan Aspek daya dukung lingkungan, meliputi:

- a) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- b) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a). Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b). Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi;
- c). Memiliki potensi ekspor;
- d). Memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- e). Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- f). Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
- g). Ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- h). Memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- i). Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- j). Memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;

- k). Memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
- l). Memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a). Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b). Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem;
- c). Memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- d). Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; dan
- e). Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup.

2.7.4.1 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, meliputi:

- (1). KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya;
- (2). KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya;
- (3). KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya;
- (4). KSP Kawasan Muara Enim dan sekitarnya; dan
- (5). KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya.

a). KSP Kawasan Sekayu dan Sekitarnya

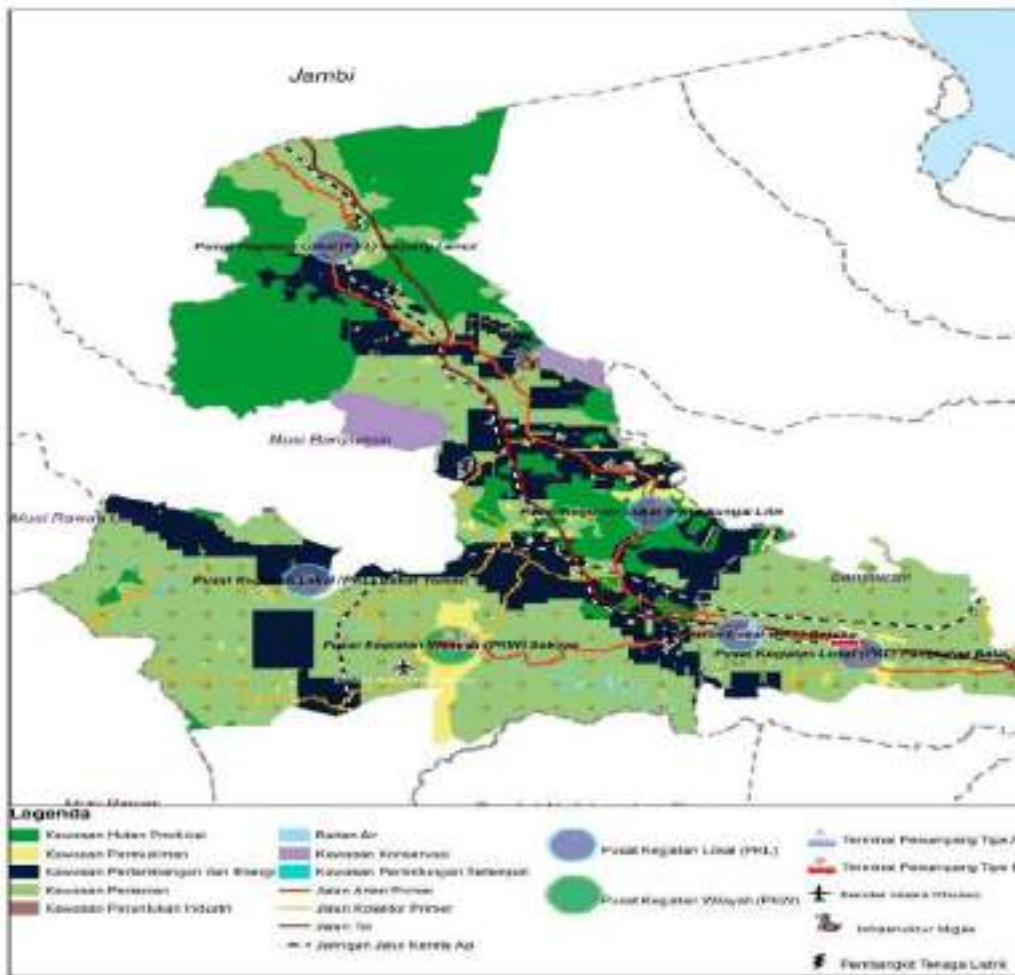
KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya meliputi:

- (1). Kawasan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang, Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya; dan
- (2). Kawasan wilayah Kabupaten Banyuasin meliputi seluruh kecamatan.

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Sekayu dan Sekitarnya adalah mengembangkan pusat kegiatan ekonomi berbasis hilirisasi sumber daya alam terintegrasi dengan KSN Patungraya Agung. Arah pengembangan KSP Kawasan Sekayu dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a). Pengembangan kawasan-kawasan yang dapat mendukung fungsi PKN Patungraya Agung dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di sekitarnya
- b). Pengembangan kawasan industri hijau desa Mulyo Rejo Kabupaten Musi Banyuasin;
- c). Pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biogas di Kabupaten Musi Banyuasin;
- d). Pengembangan *food estate* sentra produksi padi di Kabupaten Musi Banyuasin;
- e). Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik;
- f). Mencegah dan mengendalikan kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya; dan
- g). Menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

Selain arah pengembangan di atas, untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup perlu dilakukan upaya seperti pengendalian terhadap alih fungsi lahan yang memiliki fungsi konservasi atau area yang menghasilkan jasa lingkungan tinggi, melakukan rehabilitasi hutan/lahan kritis/terdegradasi, memperbaiki dan meningkatkan tata kelola persampahan maupun limbah (termasuk limbah B3), pengendalian dan pemantauan kualitas air, serta meningkatkan ketahanan terhadap risiko dan mitigasi bencana khusus terkait kekeringan.



Gambar 2. 77 KSP Kawasan Sekayu dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Sesuai rekomendasi pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan, berikut beberapa arah pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin terutama dalam sektor pertanian dan pengembangan sektor industri yaitu:

- Peningkatan produksi pertanian padi dan komoditas pangan lainnya melalui pendekatan pengembangan pertanian *holistic close loop model*, pengelolaan dengan system integrated farm management yang modern dan digital, dan penyediaan irigasi dan/atau irigasi presisi/*smart irrigation* sesuai kebutuhan komoditas.
- Mendorong optimalisasi industri dan UMKM pengolahan produk unggulan daerah.
- Peningkatan daya saing dan kualitas SDM.

- d). Peningkatan infrastruktur wilayah (jalan, drainase) dan infrastruktur dasar (air minum, air bersih, sanitasi, rumah layak huni).
- e). Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor industri, teknologi, dan pariwisata.
- f). Pemutakhiran rutin dan pemanfaatan data Registrasi Sosial EKonomi (Regsosek).
- g). Mendorong optimalisasi penurunan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- h). Pemerataan kapasitas, kualitas, dan kuantitas pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan sosial adaptif dan inklusif di kantong kemiskinan berdasarkan *spatial based policy*.
- i). Mendorong optimalisasi iklim investasi dan penanaman modal.

Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin

Sesuai Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Banyuasin termasuk dalam wilayah fokus pertanian dan kawasan perkotaan, berikut beberapa arah pembangunan daerah Kabupaten Banyuasin yaitu:

- a) Peningkatan produksi pertanian padi dan komoditas pangan lainnya melalui pendekatan pengembangan pertanian *holistic close loop model*, pengelolaan dengan *system integrated farm management* yang modern dan *digitalized* dan penyediaan irigasi dan/atau irigasi presisi/ *smart irrigation* sesuai kebutuhan komoditas;
- b) Mendorong optimalisasi industri dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pengolahan produk unggulan daerah;
- c) Peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia;
- d) Peningkatan infrastruktur wilayah (jalan, drainase) dan infrastruktur dasar (air minum, air bersih, sanitasi, rumah layak huni);
- e) Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor industri, teknologi, dan pariwisata;
- f) Pemutakhiran rutin dan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek);
- g) Mendorong optimalisasi penurunan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
- h) Pemerataan kapasitas, kualitas, dan kuantitas pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan sosial adaptif dan inklusif di kantong kemiskinan berdasarkan *spatial based policy*.
- i) Mendorong optimalisasi iklim investasi dan penanaman modal.

b). KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya

KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya meliputi:

- (1). Kawasan wilayah Kota Lubuklinggau meliputi seluruh kecamatan;
- (2). Kawasan wilayah Kabupaten Musi Rawas meliputi Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu, Kecamatan Selangit, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Muara Lakitan, dan Kecamatan Megang Sakti; dan
- (3). wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo.

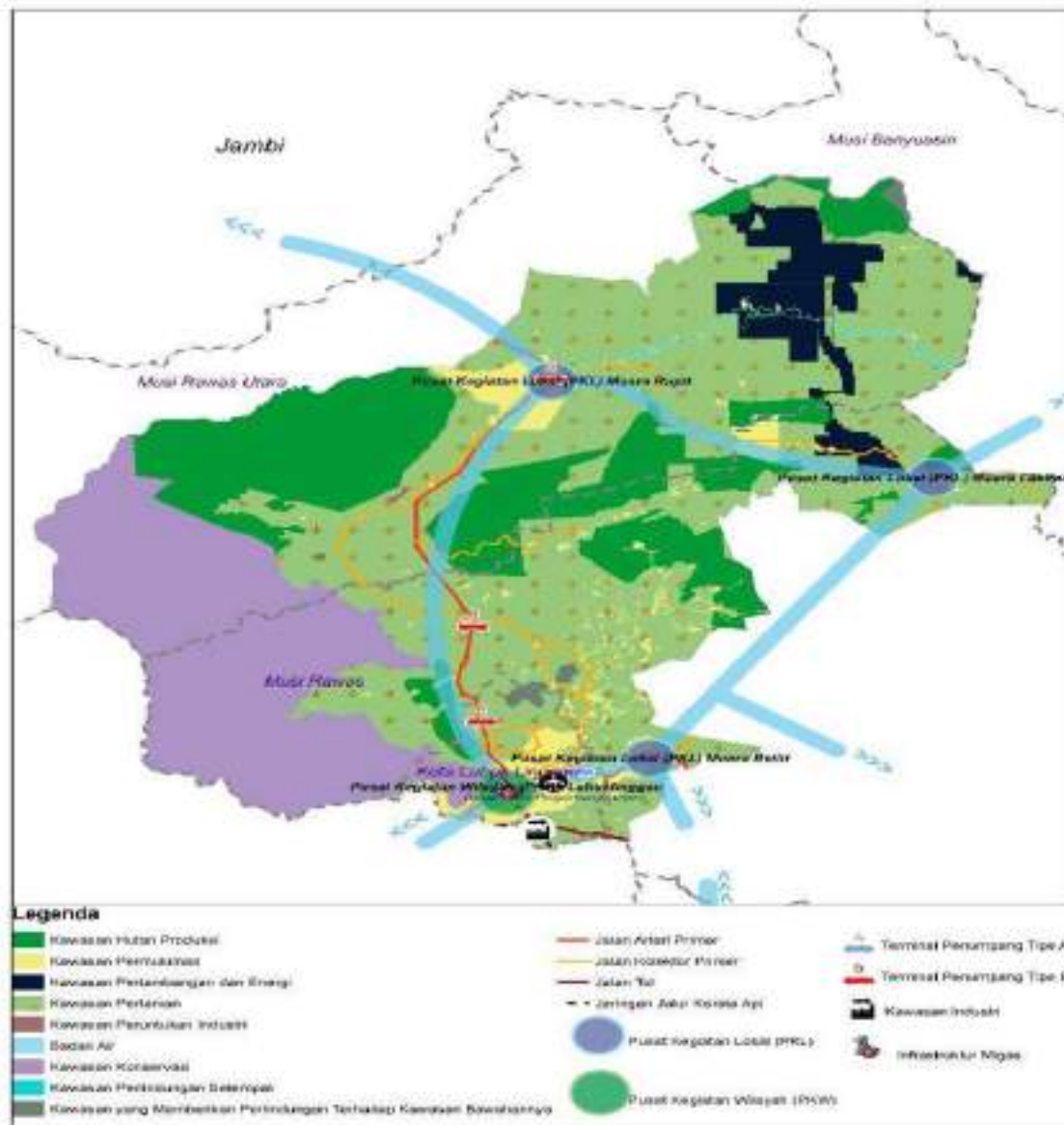
Tujuan pengembangan KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya adalah untuk mendukung percepatan peningkatan ekonomi dalam mendorong pertumbuhan kawasan tertinggal.

Arah pengembangan KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a). Pengembangan Kawasan Perkotaan Lubuklinggau yang dapat mendukung percepatan peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
- b). Pengembangan kawasan agropolitan Musi Rawas;
- c). Pengembangan kawasan yang mendukung PKW Lubuklinggau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya;
- d). Pengembangan desa tertinggal di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- e). Pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng, batu bara dan timah hitam di Kabupaten Musi Rawas Utara;
- f). Peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan;
- g). Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan Kawasan serta pelayanan publik;
- h). Menjaga Kawasan yang berfungsi lindung; dan
- i). Peningkatan kerjasama antar kawasan perbatasan.

Selain arah pengembangan di atas, untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup perlu dilakukan upaya seperti pengendalian terhadap alih fungsi lahan yang memiliki fungsi konservasi atau area yang menghasilkan jasa lingkungan tinggi,

melakukan rehabilitasi hutan/lahan kritis/terdegradasi, memperbaiki dan meningkatkan tata kelola persampahan maupun limbah (termasuk limbah B3), pengendalian dan pemantauan kualitas air, serta meningkatkan ketahanan terhadap risiko dan mitigasi bencana khusus terkait kekeringan.



Gambar 2. 78 KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya
 Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Arah Pengembangan Wilayah Kota Lubuklinggau

Pengembangan wilayah Kota Lubuklinggau diarahkan ke dalam 3 (tiga) prioritas pengembangan sentra dan klaster industri sentra, sektor perdagangan, sektor akomodasi makan dan minuman.

Adapun arah pengembangan wilayah Kota Lubuklinggau terdiri dari:

- a). Pengembangan konektivitas wilayah;
- b). Pemenuhan amenities perkotaan (antara lain ruang terbuka hijau, ruang terbuka publik, jalur pedestrian, *landmark* kota);
- c). Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan perkotaan;
- d). Pengembangan sekolah menengah unggul terintegrasi;
- e). Preservasi/peningkatan jalan;
- f). Optimalisasi kerjasama antar kabupaten/kota;
- g). Penguatan kebijakan pembangunan infrastruktur pendukung sektor perdagangan dan pariwisata;
- h). Penguatan promosi pariwisata;
- i). *Scaling-up* UMKM dan wirausaha muda;
- j). Optimalisasi investasi sektor swasta;
- k). Pengembangan dan penguatan sarana prasarana ketahanan pangan;
- l). Pengembangan revitalisasi.

Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas

Sesuai rekomendasi pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan oleh BAPPENAS RI, berikut beberapa arah pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan pengembangan sektor industri yaitu:

- a). Peningkatan cakupan akses rumah tangga dengan air minum layak;
- b). Mendorong realisasi investasi pada sektor riil terutama yang berfokus pada industri peningkatan nilai tambah dari sektor unggulan daerah (pertanian/perkebunan/ pertambangan);
- c). Menyusun strategi diversifikasi ekonomi dalam rangka peningkatan inklusivitas dan keberlanjutan ekonomi ke depan;
- d). Pemerataan jumlah fasilitas sarana dan prasarana layanan kesehatan terutama peningkatan jumlah faskes tingkat I;
- e). Pemerataan kualitas pelayanan dasar (kesehatan dan Pendidikan) khususnya melalui penguatan kapasitas SDM baik untuk tenaga kesehatan maupun

tenaga pendidik serta standarisasi sarana prasarana antar sekolah dan fasilitas kesehatan;

- f). Pemanfaatan data Regsosek sebagai upaya peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial ke depan;
- g). Peningkatan kerjasama perdagangan antardaerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu;
- h). Pengembangan konektivitas jalan intra kecamatan dan desa di wilayah Kabupaten Musi Rawas.

Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

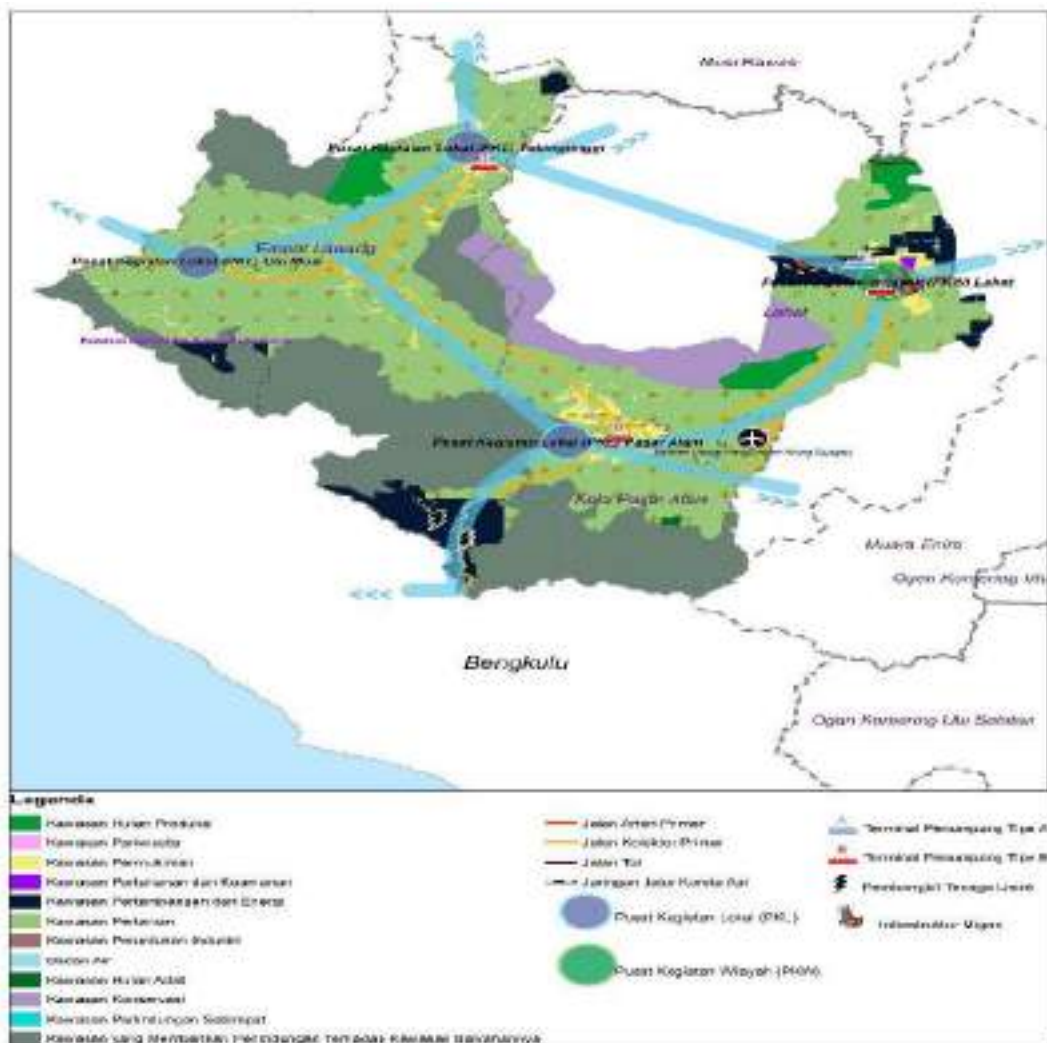
Sesuai rekomendasi pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan oleh BAPPENAS RI, berikut beberapa arah pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas Utara terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata yaitu:

- a). Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, sanitasi, dan rumah layak huni);
- b). Peningkatan cakupan akses rumah tangga dengan air minum layak;
- c). Peningkatan konektivitas transportasi dan logistic;
- d). Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan;
- e). Perluasan akses internet dan digitalisasi;
- f). Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan (pertanian/Perkebunan/perikanan/peternakan *high value*);
- g). Dukungan promosi dan kemudahan investasi penyediaan;
- h). Implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas, seperti pelatihan modal keterampilan, usaha, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);
- i). Mengembangkan program pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar, terutama bagi pemuda dan lulusan sekolah;
- j). Mengembangkan potensi pariwisata dengan mempromosikan objek wisata alam dan budaya, serta membangun infrastruktur pendukung penginapan dan aksesibilitas.

c). KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya

KSP Kawasan Pagar Alam dan sekitarnya meliputi:

- (1). Kawasan wilayah Kota Pagar Alam meliputi seluruh kecamatan;
- (2). Kawasan wilayah Kabupaten Lahat meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Sukamerindu, Kecamatan Lahat, Kecamatan Gumay Talang dan Kecamatan Lahat Selatan; dan
- (3). Kawasan wilayah Kabupaten Empat Lawang meliputi Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Lintang Kanan, Kecamatan Pendopo, Kecamatan Pendopo Barat, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kecamatan Ulu Musi, Kecamatan Sikap Dalam, Kecamatan Talang Padang dan Kecamatan Tebing Tinggi.



Gambar 2. 79 KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya adalah untuk mengembangkan pusat kegiatan ekonomi baru berbasis pariwisata dan sumber daya energi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

Arah pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a). pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu;
- b). Pengembangan kawasan agropolitan Pasemah Air Keruh di Kabupaten Empat Lawang;
- c). pengembangan objek daya tarik wisata kawasan situs Megalith yang terdapat di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam;
- d). pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan di Kabupaten Empat Lawang, Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- e). penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan;
- f). peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan; dan
- g). menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung.

Selain arah pengembangan di atas, untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup perlu dilakukan upaya seperti pengendalian terhadap alih fungsi lahan yang memiliki fungsi konservasi atau area yang menghasilkan jasa lingkungan tinggi, melakukan rehabilitasi hutan/lahan kritis/terdegradasi, memperbaiki dan meningkatkan tata kelola persampahan maupun limbah (termasuk limbah B3), pengendalian dan pemantauan kualitas air, serta meningkatkan ketahanan terhadap risiko dan mitigasi bencana khusus terkait kekeringan.

Arah Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam

Sesuai rekomendasi pembangunan daerah Kota Pagar Alam dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan oleh BAPPENAS RI, berikut beberapa arah pembangunan daerah Kota Pagar Alam terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, pariwisata dan perdagangan yaitu:

- a). Peningkatan produktivitas dan hilirisasi produk sektor pertanian dan Perkebunan;
- b). Pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya lokal dan peningkatan ekonomi kreatif serta UMKM dengan skema kerja sama swasta dan komunitas lokal;
- c). Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan, pariwisata, serta perdagangan
- d). Peningkatan dan pemerataan akses layanan kesehatan;
- e). Peningkatan daya saing dan kualitas SDM;
- f). Beasiswa daerah untuk mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat miskin;
- g). Peningkatan infrastruktur wilayah (jalan, terminal, dan bandara) dan infrastruktur dasar (air minum, air bersih, sanitasi, rumah layak huni);
- h). Optimalisasi pemberdayaan sosial, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah;
- i). Pemberian bantuan yang bersifat pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan.

Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat

Sesuai dengan rekomendasi pembangunan daerah Kabupaten Lahat berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan oleh Kementerian PPN/Bappenas, berikut adalah beberapa arah pembangunan daerah Kabupaten Lahat terutama dalam sektor pertanian, sektor industri dan pariwisata:

- a). Peningkatan daya saing dan kualitas SDM;
- b). Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan peningkatan daya tarik pariwisata di Kabupaten Lahat melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas lokal;
- c). Pengembangan koridor industri rintisan (Muaraenim-Lahat);
- d). Pemberian bantuan yang bersifat pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan sebagai upaya peningkatan ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan;
- e). Peningkatan infrastruktur wilayah (jalan) dan infrastruktur dasar (air minum, air bersih, sanitasi, rumah layak huni);
- f). Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor industri, teknologi, dan pariwisata;

- g). Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan tenaga pendidikan;
- h). Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan tenaga Kesehatan;
- i). Peningkatan investasi agro industri dan industri hilir pertanian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas;
- j). Mendorong efisiensi iklim investasi di Kabupaten Lahat;
- k). Pengadaan lapangan pekerjaan untuk menanggulangi tingkat pengangguran terbuka.

Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang

Sesuai dengan rekomendasi pembangunan daerah Kabupaten Empat Lawang berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan oleh Kementerian PPN/Bappenas, berikut adalah beberapa arah pembangunan daerah Kabupaten Empat Lawang terutama dalam sektor perikanan dan perkebunan:

- a). Peningkatan penanganan dan pelayanan kesehatan melalui pemenuhan fasilitas kesehatan khususnya fasilitas kesehatan tingkat I;
- b). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- c). Peningkatan nilai tambah dari sektor unggulan (Perikanan dan Perkebunan);
- d). Pengendalian pengembangan produktivitas pertanian;
- e). Peningkatan kapasitas pengelolaan teknologi informasi dan digitalisasi pemerintah daerah terutama dalam mendukung percepatan pelayanan publik berbasis digital;
- f). Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM penanggulangan bencana
- g). Inklusivitas pembangunan di antara berbagai kelas ekonomi;
- h). Peningkatan kapasitas tenaga kerja.

d). KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya

KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya meliputi:

- (1). Kawasan wilayah Kabupaten Muara Enim meliputi Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Benakat, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Empat Petulai Dangku;
- (2). Kawasan wilayah Kota Prabumulih meliputi seluruh kecamatan;
- (3). Kawasan wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir meliputi Kecamatan Penukal Utara, Kecamatan Talang Ubi dan Kecamatan Tanah Abang; dan
- (4). Kawasan wilayah Kabupaten Lahat meliputi Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Selatan dan Kecamatan Merapi Timur.

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya adalah untuk mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang

Arah pengembangan KSP Kawasan Muara Enim dan sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a). Pengembangan kawasan perkotaan Muara Enim untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya;
- b). pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- c). pengembangan kawasan industri di Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dan Kawasan Industri Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- d). pengembangan kawasan wisata Candi Bumi Ayu di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- e). pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional;
- f). peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan; dan
- g). penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan kawasan.

Selain arah pengembangan di atas, untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup perlu dilakukan upaya seperti pengendalian terhadap alih fungsi lahan yang memiliki fungsi konservasi atau area yang menghasilkan jasa lingkungan tinggi, melakukan rehabilitasi hutan/lahan kritis/terdegradasi, memperbaiki dan meningkatkan tata kelola persampahan maupun limbah (termasuk limbah B3), pengendalian dan pemantauan kualitas air, serta meningkatkan ketahanan terhadap risiko dan mitigasi bencana khusus terkait kekeringan.

- a). Pengembangan kawasan perkotaan Muara Enim untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya;
- b). Pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- c). Pengembangan kawasan industri di Tanjung Enim dan Kecamatan Gunung Megang;
- d). Pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional;
- e). Optimalisasi verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui pemanfaatan Data Regsosek;
- f). Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur *high value economy & industry*;
- g). Penguatan sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- h). Peningkatan infrastruktur wilayah (jalan) dan infrastruktur dasar (air minum, air bersih, sanitasi, rumah layak huni);
- i). Pembangunan jalan tol Prabumulih-Muaraenim;
- j). Peningkatan jalur kereta api Prabumulih-Muaraenim Lubuklinggau;
- k). Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan tenaga Kesehatan;
- l). Peningkatan pengetahuan sumber daya manusia terkait dengan mitigasi bencana.
- m). Pengembangan koridor industri rintisan (Muara Enim-Lahat)

Arah Pembangunan Daerah Kota Prabumulih

Sesuai rekomendasi pembangunan daerah Kota Prabumulih dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan oleh BAPPENAS RI, berikut beberapa arah pembangunan daerah Kota Prabumulih terutama dalam sektor industri dan UMKM yaitu:

- a). Pengembangan sistem transmisi migas;
- b). Peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan;
- c). Pengembangan Jalan Tol Trans Sumatra;
- d). Peningkatan jalur kereta api;
- e). Optimalisasi industri dan UMKM pengolahan produk unggulan daerah seperti hilirisasi produk nanas;
- f). Peningkatan daya saing dan kualitas SDM;
- g). Peningkatan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja;
- h). Peningkatan infrastruktur wilayah (jalan dan drainase) dan infrastruktur dasar (air minum, air bersih, sanitasi, dan rumah layak huni);

- i). Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor industri, teknologi, dan pariwisata;
- j). Pemutakhiran rutin dan pemanfaatan data Regsosek;
- k). Pemerataan kapasitas, kualitas, dan kuantitas pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan sosial adaptif dan inklusif di kantung kemiskinan berdasarkan *spatial based policy*;
- l). Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesadaran masyarakat terkait lingkungan.

Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

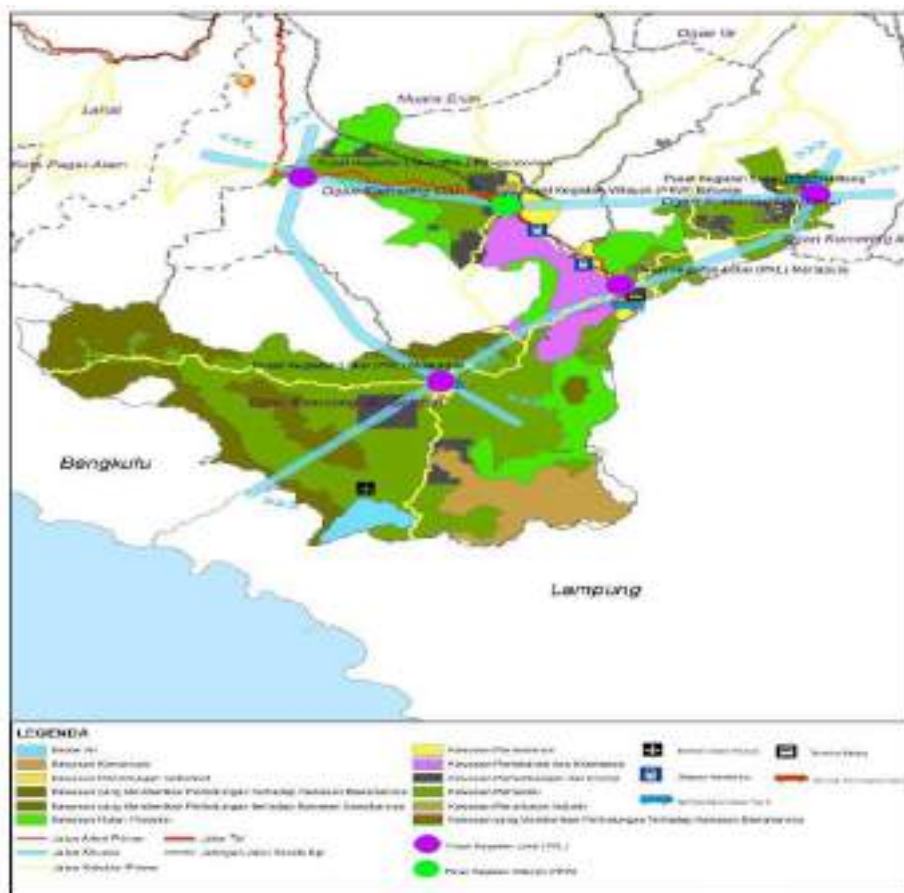
Sesuai rekomendasi pembangunan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan oleh BAPPENAS RI, berikut beberapa arah pembangunan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terutama dalam sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata yaitu:

- a). Preservasi/peningkatan infrastruktur jalan
- b). Diversifikasi ekonomi melalui optimalisasi hilirisasi sektor unggulan daerah seperti pertanian dan perkebunan
- c). Peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia
- d). Peningkatan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja
- e). Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan peningkatan daya tarik pariwisata di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas lokal
- f). Pemberian bantuan yang bersifat pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan
- g). Pemutakhiran rutin dan pemanfaatan data Registrasi Sosial EKonomi (Regsosek)
- h). Pemerataan kapasitas, kualitas, dan kuantitas pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan perlindungan sosial adaptif dan inklusif di kantung kemiskinan berdasarkan *spatial based policy*
- i). Peningkatan infrastruktur wilayah (jalan dan jembatan) dan infrastruktur dasar (air minum, air bersih, sanitasi dan rumah layak huni)
- j). Peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi untuk mendukung sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata

e). KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya

KSP Kawasan Martapura dan sekitarnya meliputi:

- (1). Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi Kecamatan Martapura, Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Jaya Pura, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kecamatan Buay Madang, Kecamatan Buay Madang Timur, Kecamatan Belitang Madang Raya, dan Kecamatan Belitang;
- (2). Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu meliputi Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Baturaja Barat; dan
- (3). Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meliputi Kecamatan Mekakau Ilir, Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Simpang, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Kisam Ilir, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Sindang Danau dan Kecamatan Sungai Are.



Gambar 2. 81 KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Martapura dan sekitarnya adalah untuk mengembangkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan berbasis pertanian, energi dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang. Arah pengembangan KSP Kawasan Martapura dan sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a). Pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- b). Pengembangan kawasan ekonomi terpadu danau ranau;
- c). Pengembangan kawasan agropolitan di kabupaten oku timur;
- d). Pengembangan kawasan wisata goa harimau dan goa puteri di kabupaten ogan komering ulu;
- e). Pengembangan kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam danau ranau berupa pengembangan pelabuhan dermaga danau ranau dan dermaga wisata
- f). Pengembangan energi panas bumi ulu danau sebagai salah satu energi terbarukan di kabupaten ogan komering ulu selatan.
- g). Pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biodiesel/ biofuel berbasis kelapa sawit di kabupaten ogan komering ulu timur;
- h). Pengembangan potensi sumber daya mineral logam bijih besi sebagai komoditas unggulan di kabupaten ogan komering ulu selatan;
- i). Pengembangan *food estate* sentra produksi padi di kabupaten ogan komering ulu timur dan kabupaten ogan komering ulu selatan;
- j). Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan melalui pengembangan jaringan jalan dan bandar udara banding agung; dan
- k). Menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

Selain arah pengembangan di atas, untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup perlu dilakukan upaya seperti pengendalian terhadap alih fungsi lahan yang memiliki fungsi konservasi atau area yang menghasilkan jasa lingkungan tinggi, melakukan rehabilitasi hutan/lahan kritis/terdegradasi, memperbaiki dan meningkatkan tata kelola persampahan maupun limbah (termasuk limbah B3), pengendalian dan pemantauan kualitas air, serta meningkatkan ketahanan terhadap risiko dan mitigasi bencana khusus terkait kekeringan.

Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Sesuai Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur termasuk dalam wilayah fokus pertanian, berikut beberapa arah pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yaitu:

- a). Peningkatan produktivitas di sektor pertanian dan perikanan tangkap;
- b). Optimalisasi jaringan irigasi melalui implementasi *water accounting* dan *single management irrigation* pada daerah irigasi komering;
- c). Pendekatan pengembangan pertanian holistik melalui model *closed-loop*;
- d). Peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan;
- e). Pengembangan konektivitas jalan penghubung kawasan agropolitan Belitang dengan Jalan Tol Trans Sumatera Peningkatan kerjasama perdagangan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung;
- f). Mendorong realisasi investasi sektor rill dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan daerah;
- g). Pemanfaatan data Regsosek sebagai upaya peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial;
- h). Optimalisasi konektivitas Kereta Api eksisting sebagai peningkatan efisiensi logistic;
- i). Pemerataan kualitas pelayanan dasar dan kapasitas SDM tenaga kesehatan maupun tenaga pendidik;
- j). Standardisasi sarana prasarana antar sekolah dan fasilitas kesehatan.

Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Sesuai dengan rekomendasi pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan oleh Kementerian PPN/Bappenas, berikut adalah beberapa arah pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu terutama dalam sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata:

- a). Revitalisasi infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas ke pusat aktivitas ekonomi masyarakat;
- b). Mempercepat hilirisasi dari sektor-sektor unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk;
- c). Mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan kemudahan berusaha guna menjaga momentum pergeseran struktur ekonomi menuju sektor sekunder;
- d). Peningkatan daya saing dan kualitas SDM;

- e). Mengadakan program pelatihan spesifik sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam rangka meningkatkan *employability* dari para tenaga kerja;
- f). Meningkatkan aksesibilitas masyarakat pelayanan dasar melalui pembangunan unit sekolah baru dan puskesmas pembantu;
- g). Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan;
- h). Intensifikasi kegiatan pemeriksaan *Antenatal Care (ANC)* terutama di daerah dengan akses kesehatan yang cenderung terbatas.

Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Sesuai dengan rekomendasi pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan oleh Kementerian PPN/Bappenas, berikut adalah beberapa arah pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terutama dalam pengembangan sektor-sektor unggulan daerah dan pariwisata:

- a). Optimalisasi infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi dan logistik ke pusat aktivitas ekonomi masyarakat;
- b). Pengembangan konektivitas jalan wilayah terisolir;
- c). Peningkatan penyediaan infrastruktur layanan dasar air baku, air minum perpipaan, sanitasi, dan rumah layak huni;
- d). Pengembangan potensi energi terbarukan PLTA Tiga Dihaji dan PLTP Danau Ranau;
- e). Perluasan akses internet dan digitalisasi;
- f). Mempercepat industrialisasi dan pemberdayaan aktivitas ekonomi dari sektor-sektor unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk;
- g). Dukungan promosi dan kemudahan investasi;
- h). Penyelesaian pembangunan dan pendayagunaan Waduk Tigadihaji dan waduk Sakagilas;
- i). Modernisasi irigasi melalui implementasi *water accounting* dan *single management irrigation* pada daerah irigasi komering;
- j). Mengadakan program pelatihan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan DUDI;
- k). Meningkatkan aksesibilitas pelayanan dasar melalui pembangunan unit sekolah baru dan penguatan peran puskesmas pembantu;
- l). Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan serta standarisasi kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

2.7.4.2 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan, ditetapkan yaitu KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan meliputi:

- (1). Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir meliputi Kecamatan Sungai Menang, Kecamatan Tulung Selapan, Kecamatan Cengal, Kecamatan Pangkalan Lampam dan Kecamatan Air Sugihan;
- (2). Kawasan wilayah Kabupaten Banyuasin meliputi Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Makarti Jaya dan Kecamatan Air Salek; dan
- (3). Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan adalah untuk mengendalikan ruang di Pesisir Timur Sumatera Selatan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan.

Arah pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- a). Perwujudan Kawasan Lindung untuk mendukung fungsi konservasi, keanekaragaman hayati, dan menjaga iklim makro, serta mencegah dan/atau mengurangi risiko bencana;
- b). Penerapan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budi daya ramah lingkungan, khususnya pada daerah budi daya pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c). Pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidrologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas;
- d). Optimalisasi lahan gambut fungsi budidaya sebagai kawasan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan potensial dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan;
- e). Pengembangan *food estate* sentra produksi padi di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- f). Pengembangan kawasan kerbau rawa Pampangan dan Itik Pegagan di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- g). Percepatan pertumbuhan kawasan tertinggal yaitu kawasan Tulung Selapan – Cengal di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- h). Melindungi kawasan pesisir dan pantai;

- i). Menjaga keterpaduan fungsi kawasan di darat dan pesisir;
- j). Peningkatan kerjasama kawasan perbatasan provinsi; dan
- k). pengembangan kawasan pariwisata pesisir (coastal ecotourism) berbasis *zero-waste*, terintegrasi dan mandiri energi.

Matriks ringkasan pengembangan wilayah kabupaten/kota berdasarkan Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045, Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 dapat dilihat pada matriks berikut.

Tabel 2.78. Matriks Pengembangan Wilayah Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Selatan

No	Kab/Kota	Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045	Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044
1	Palembang	(1) Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan yang dikembangkan pada beberapa kawasan strategis industri, antara lain kawasan strategis industri Medan-Dumai (klaster industri pengolahan sawit, kelapa, kopi, karet, dan hasil perkebunan lainnya, hilirisasi sumber daya mineral, dan pengolahan minyak dan gas bumi), kawasan strategis industri Bengkulu-Muara Enim-Palembang-Jambi (klaster industri hilirisasi batu bara dan pembangkitan energi listrik pada mulut tambang), dan kawasan strategis industri Batam-Bintan (klaster industri pengolahan petrokimia, pengolahan material dan metalurgi, industri berbasis ICT); (2) Pengembangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian menuju kedaulatan pangan di Aceh Utara, Aceh Barat, Sumatera Barat, dan	(1). Pengembangan sektor perdagangan jasa, kawasan pertanian, perikanan dan pariwisata. (2). Export processing zone. (3). Pengembangan <i>food estate</i> di Kab OKI, Kab. OI dan Kab. Banyuasin. (4). Kawasan Pesisir. (5). Prioritas Pengembangan Koridor Palembang Tanjung Carat.	Kawasan Patungraya Agung	-

No	Kab/Kota	Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045	Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044
		Palembang-Bandar Lampung, serta kawasan strategis pertanian herbal di Aceh Tengah yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian guna meningkatkan nilai komoditas pertanian dan menurunkan biaya produksi; (2). Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung, serta penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan, yaitu pada metropolitan Medan, metropolitan Palembang, dan Kota Batam-Bintan, serta pada pusat-pusat aglomerasi yaitu Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Sibolga, Padang, Dumai, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Pangkalpinang.			
2	Banyuasin	Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah	(1). Pengembangan sektor perdagangan jasa, kawasan pertanian,	(1). Kawasan Taman Nasional	Arah Pengembangan KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya:

No	Kab/Kota	Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045	Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044
		dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung, serta penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan, yaitu pada metropolitan Medan, metropolitan Palembang , dan Kota Batam-Bintan, serta pada pusat-pusat aglomerasi yaitu Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Sibolga, Padang, Dumai, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Pangkalpinang.	perikanan dan pariwisata. (2). <i>Export processing zone</i> . (3). Pengembangan food estate di Kab OKI, Kab. OI dan Kab. Banyuasin. (4). Kawasan Pesisir. (5). Prioritas Pengembangan Koridor Palembang Tanjung Carat.	Berbak Sembilang (2). Kawasan Patungraya Agung	(1). Pengembangan kawasan-kawasan yang dapat mendukung fungsi PKN Patungraya Agung dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di sekitarnya (2). Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik; (3). Mencegah dan mengendalikan kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya; dan (4). Menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

No	Kab/Kota	Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045	Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044
3	Ogan Komering Ilir	Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung, serta penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan, yaitu pada metropolitan Medan, metropolitan Palembang , dan Kota Batam-Bintan, serta pada pusat-pusat aglomerasi yaitu Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Sibolga, Padang, Dumai, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Pangkalpinang.	(1). Pengembangan sektor perdagangan jasa, kawasan pertanian, perikanan dan pariwisata. (2). <i>Export processing zone</i> . (3). Pengembangan <i>food estate</i> di Kab OKI, Kab. OI dan Kab. Banyuasin. (4). Kawasan Pesisir. (5). Prioritas Pengembangan Koridor Palembang Tanjung Carat.	Kawasan Patungraya Agung	-
4	Ogan Ilir	Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung, serta penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan, yaitu pada metropolitan Medan, metropolitan Palembang , dan Kota Batam-Bintan, serta	(1) Pengembangan sektor perdagangan jasa, kawasan pertanian, perikanan dan pariwisata. (2). <i>Export processing zone</i> . (3). Pengembangan <i>food estate</i> di Kab OKI, Kab. OI dan Kab. Banyuasin	Kawasan Patungraya Agung	-

No	Kab/Kota	Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045	Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044
		pada pusat-pusat aglomerasi yaitu Banda Aceh, Lhokseumawe, Meulaboh, Sibolga, Padang, Dumai, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Pangkalpinang.	(4). Kawasan Pesisir. (5). Prioritas Pengembangan Koridor Palembang Tanjung Carat.		
5	Musi Banyuasin	-	(1) Pengembangan sektor perdagangan jasa, kawasan pertanian, perikanan dan pariwisata. (2) <i>Export processing zone</i> . (3) Pengembangan <i>food estate</i> di Kab OKI, Kab. OI dan Kab. Banyuasin. (4) Kawasan Pesisir. (5) Prioritas Pengembangan Koridor Palembang Tanjung Carat.	-	Arah Pengembangan KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya: (1). Pengembangan kawasan industri hijau desa Mulyo Rejo Kabupaten Musi Banyuasin; (2). Pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biogas di Kabupaten Musi Banyuasin; (3). Pengembangan <i>food estate</i> sentra produksi padi di Kabupaten Musi Banyuasin; (4). Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan serta pelayanan publik;

No	Kab/Kota	Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045	Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044
					(5). Mencegah dan mengendalikan kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi pusat kegiatan di sekitarnya; dan (6). Menjaga kawasan yang berfungsi lindung.
6	Prabumulih	-	(1). Pusat industri pertambangan batubara dan turunannya. (2). Lumbung energi. (3). Pengembangan sektor pertambangan, perkebunan, pertanian pariwisata dan perdagangan jasa. (4). Prioritas Pengembangan Koridor Lahat-Pagar Alam (Pendukung	-	Arah Pengembangan KSP Kawaaan Muara Enim dan Sekitarnya: (1). Pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; (2). Pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional; (3). Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk

No	Kab/Kota	Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045	Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044
			KSPN Pagaralam dan sekitarnya).		mendukung fungsi kawasan; dan (4). Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan kawasan.
7	Penukal Abab Lematang Ilir	-	(1). Pusat industri pertambangan batubara dan turunannya. (2). Lumbung energi. (3). Pengembangan sektor pertambangan, perkebunan, pertanian pariwisata dan perdagangan jasa. (4). Prioritas Pengembangan Koridor Lahat-Pagar Alam (Pendukung KSPN Pagaralam dan sekitarnya).	-	Arah Pengembangan KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya: (1). Pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; (2). Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dan Kawasan Industri Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; (3). Pengembangan kawasan wisata Candi Bumi Ayu di

No	Kab/Kota	Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045	Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044
					Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; (4). Pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional; (5). Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan; dan (6). Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan kawasan.
8	Muara Enim	Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan yang dikembangkan pada beberapa kawasan strategis industri, antara lain kawasan strategis industri Medan-Dumai (klaster industri pengolahan sawit, kelapa, kopi, karet, dan hasil perkebunan lainnya, hilirisasi sumber daya mineral, dan	(1). Pusat industri pertambangan batubara dan turunannya. (2). Lumbung energi. (3). Pengembangan sektor pertambangan, perkebunan, pertanian	-	Arah Pengembangan KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya: (1). Pengembangan kawasan perkotaan Muara Enim untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya;

No	Kab/Kota	Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045	Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044
		pengolahan minyak dan gas bumi), kawasan strategis industri Bengkulu- Muara Enim -Palembang-Jambi (klaster industri hilirisasi batu bara dan pembangkitan energi listrik pada mulut vtambang), dan kawasan strategis industri Batam-Bintan (klaster industri pengolahan petrokimia, pengolahan material dan metalurgi, industri berbasis ICT);	pariwisata dan perdagangan jasa. (4). Prioritas Pengembangan Koridor Lahat-Pagar Alam (Pendukung KSPN Pagaralam dan sekitarnya).		(2). Pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; (3). Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dan Kawasan Industri Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; (4). Pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional; (5). Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan; dan (6). Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana

No	Kab/Kota	Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045	Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044
					wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan kawasan.
9	Lahat	-	(1). Pusat industri pertambangan batubara dan turunannya. (2). Lumbung energy.i (3). Pengembangan sektor pertambangan, perkebunan, pertanian pariwisata dan perdagangan jasa. (4). Prioritas Pengembangan Koridor Lahat-Pagar Alam (Pendukung KSPN Pagaram dan sekitarnya.	-	Arah Pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya: (1). Pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu; (2). Pengembangan objek daya tarik wisata kawasan situs Megalith yang terdapat di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam; (3). Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan; (4). Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk

No	Kab/Kota	Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045	Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044
					mendukung fungsi Kawasan; dan (5). Menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung. Arah Pengembangan KSP Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya: (1). Pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; (2). Pengembangan pemanfaatan sumber energi berwawasan lingkungan yang mendukung keberlanjutan energi nasional; (3). Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan; dan

No	Kab/Kota	Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045	Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044
					(4). Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana wilayah untuk mendukung pusat pertumbuhan kawasan.
10	Pagar Alam	-	(1). Pusat industri pertambangan batubara dan turunannya. (2). Lumbung energi. (3). Pengembangan sektor pertambangan, perkebunan, pertanian pariwisata dan perdagangan jasa. (4). Prioritas Pengembangan Koridor Lahat-Pagar Alam (Pendukung KSPN Pagaralam dan sekitarnya.	-	Arah Pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya: (1). Pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu; (2). Pengembangan objek daya tarik wisata kawasan situs Megalith yang terdapat di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam; (3). Pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan di Kabupaten Empat Lawang, Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering

No	Kab/Kota	Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045	Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044
					Ulu, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; (4). Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan; (5). Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan; dan (6). Menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung.
11	Empat Lawang	-	(1). Pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perdagangan jasa dan pariwisata. (2). Pengembangan Bandara di Lubuklinggau sebagai	-	Arah Pengembangan KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya: (1). Pengembangan potensi wisata minat khusus sejarah dan budaya dengan pemanfaatan jasa lingkungan yang seimbang dan terpadu;

No	Kab/Kota	Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045	Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044
			pendukung bidang transportasi. (3). Sebagai kawasan pendukung KSPN Pagar Alam dan sekitarnya. (4). Prioritas Pengembangan Koridor Tebingtinggi-Pagaralam; Koridor Lubuklinggau Muara Beliti-Muara Lakitan-Sekayu; Koridor Muara Lakitan-Muara Rupit.		(2). Pengembangan kawasan agropolitan Pasemah Air Keruh di Kabupaten Empat Lawang; (3). Pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan di Kabupaten Empat Lawang, Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; (4). Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dalam mendukung pengembangan kawasan; (5). Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan; dan (6). Menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung.

No	Kab/Kota	Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045	Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044
12	Lubuklinggau	-	(1). Pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perdagangan jasa dan pariwisata. (2). Pengembangan Bandara di Lubuklinggau sebagai pendukung bidang transportasi. (3). Sebagai kawasan pendukung KSPN Pagar Alam dan sekitarnya. (4). Prioritas Pengembangan Koridor Tebingtinggi-Pagaralam; Koridor Lubuklinggau Muara Beliti-Muara Lakitan-Sekayu; Koridor Muara Lakitan-Muara Rupit.	Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat	Arah Pengembangan KSP Kawasan Lubuklinggau dan sekitarnya: (1). Pengembangan Kawasan Perkotaan Lubuklinggau yang dapat mendukung percepatan peningkatan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang; (2). Pengembangan kawasan yang mendukung PKW Lubuklinggau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pusat kegiatan di sekitarnya; (3). Peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan;

No	Kab/Kota	Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045	Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044
					(4). Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan Kawasan serta pelayanan publik; (5). Menjaga Kawasan yang berfungsi lindung; dan (6). Peningkatan kerjasama antar kawasan perbatasan.
13	Musi Rawas	-	(1). Pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perdagangan jasa dan pariwisata. (2). Pengembangan Bandara di Lubuklinggau sebagai pendukung bidang transportasi. (3). Sebagai kawasan pendukung KSPN Pagar Alam dan sekitarnya.	Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat	Arah Pengembangan KSP Kawasan Lubuklinggau dan sekitarnya: (1). Pengembangan kawasan agropolitan Musi Rawas; (2). Pengembangan desa tertinggal di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara; (3). Peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan;

No	Kab/Kota	Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045	Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044
			(4). Prioritas Pengembangan Koridor Tebingtinggi-Pagaralam; Koridor Lubuklinggau Muara Beliti-Muara Lakitan-Sekayu; Koridor Muara Lakitan-Muara Rupit.		(4). Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan Kawasan serta pelayanan publik; (5). Menjaga Kawasan yang berfungsi lindung; dan (6). Peningkatan kerjasama antar kawasan perbatasan.
14	Musi Rawas Utara	-	(1). Pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perdagangan jasa dan pariwisata. (2). Pengembangan Bandara di Lubuklinggau sebagai pendukung bidang transportasi. (3). Sebagai kawasan pendukung KSPN Pagar Alam dan sekitarnya.	Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat	Arah Pengembangan KSP Kawasan Lubuklinggau dan sekitarnya: (1). Pengembangan desa tertinggal di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara; (2). Pengembangan potensi sumber daya mineral logam seng, batu bara dan timah hitam di Kabupaten Musi Rawas Utara; (3). Peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama

No	Kab/Kota	Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045	Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044
			(4). Prioritas Pengembangan Koridor Tebingtinggi-Pagaralam; Koridor Lubuklinggau Muara Beliti-Muara Lakitan-Sekayu; Koridor Muara Lakitan-Muara Rupit.		ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan; (4). Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan Kawasan serta pelayanan publik; (5). Menjaga Kawasan yang berfungsi lindung; dan (6). Peningkatan kerjasama antar kawasan perbatasan.
15	Ogan Komering Ulu	-	(1). Pengembangan Sentra Pangan/ food estate di Kab.OKU Timur, dan OKU Selatan. (2). Lumbung Energi (3). Kawasan Ekowisata Danau Ranau. (4). Prioritas Pengembangan Koridor Matapura Muaradua-Danau	-	Arah Pengembangan Kawasan KSP Martapura dan Sekitarnya: (1). Pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; (2). Pengembangan kawasan wisata Goa Harimau dan Goa Puteri di Kabupaten Ogan Komering Ulu;

No	Kab/Kota	Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045	Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044
			Ranau (Pendukung Danau Ranau); Koridor Martapura-Belitang-Tugumulyo Akses Tol Pematang Panggang).		(3). Menjaga kawasan yang berfungsi lindung
16	Ogan Komering Ulu Timur	-	(1). Pengembangan Sentra Pangan/ food estate di Kab.OKU Timur, dan OKU Selatan. (2). Lumbung Energi. (3). Kawasan Ekowisata Danau Ranau. (4). Prioritas Pengembangan Koridor Matapura Muaradua-Danau Ranau (Pendukung Danau Ranau); Koridor Martapura-Belitang-Tugumulyo Akses Tol Pematang Panggang).	-	Arah Pengembangan Kawasan KSP Martapura dan Sekitarnya: (1). Pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; (2). Pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten OKU Timur; (3). Pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biodiesel/ biofuel berbasis kelapa sawit di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; (4). Pengembangan food estate sentra produksi padi di

No	Kab/Kota	Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045	Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044
					Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; (5). Menjaga kawasan yang berfungsi lindung
17	Ogan Komering Ulu Selatan	-	(1). Pengembangan Sentra Pangan/ <i>food estate</i> di Kab. OKU Timur, dan OKU Selatan (2). Lumbung Energi. (3). Kawasan Ekowisata Danau Ranau. (4). Prioritas Pengembangan Koridor Matapura Muaradua-Danau Ranau (Pendukung Danau Ranau); Koridor Martapura-Belitang-Tugumulyo Akses Tol Pematang Panggang).	Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	Arah Pengembangan Kawasan KSP Martapura dan Sekitarnya: (1). Pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan; (2). Pengembangan kawasan ekonomi terpadu Danau Ranau; (3). Pengembangan kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam Danau Ranau berupa pengembangan pelabuhan dermaga Danau Ranau dan dermaga wisata (4). Pengembangan energi panas bumi Ulu Danau sebagai salah satu energi terbarukan di

No	Kab/Kota	Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Arah Kebijakan Kewilayahan Sumatera dalam RPJPN 2025-2045	Konsep Makro Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044
					Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. (5). Pengembangan potensi sumber daya mineral logam bijih besi sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; (6). Pengembangan food estate sentra produksi padi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; (7). Peningkatan konektivitas antar dan interkawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan melalui pengembangan jaringan jalan dan Bandar Udara Banding Agung; dan (8). Menjaga kawasan yang berfungsi lindung

2.7.5 Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Pemerintah Sumatera Selatan berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau dengan meningkatkan produksi di sektor pertanian dan kehutanan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan konsumen dengan tetap menjaga dan memulihkan hutan serta lahan gambut sebagai penyedia jasa lingkungan. Melalui pertumbuhan ekonomi hijau, diharapkan Sumatera Selatan dapat mengelola sumber daya alamnya secara lestari, termasuk mengelola dan melindungi ekosistem gambut secara berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Untuk itu, dengan adanya rencana pertumbuhan ekonomi hijau maka Sumatera Selatan berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai target nasional, yakni minimal 29% berasal dari sektor berbasis lahan. Kondisi ini hanya bisa terwujud apabila bekerja bersama melalui penguatan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, mitra pembangaunan, pemerhati konservasi dan masyarakat sipil. Upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau dijabarkan melalui tujuh strategi:

- (1) Alokasi dan tataguna lahan berkelanjutan yang merupakan penyelarasan antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan;
- (2) Peningkatan akses masyarakat terhadap modal penghidupan (*livelihood capital*);
- (3) Peningkatan produktivitas dan diversifikasi;
- (4) Perbaikan rantai nilai dengan pembagian manfaat yang adil;
- (5) Peningkatan konektivitas dan skala ekonomi;
- (6) Restorasi lahan dan hutan yang mengalami degradasi fungsi; dan
- (7) Insentif jasa lingkungan dan pendanaan inovatif komoditas berkelanjutan.

Setiap strategi dilengkapi dengan capaian dambaan yang bertujuan untuk membantu mengidentifikasi intervensi secara lebih rinci. Pengembangan pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi Sumatera Selatan mencakup intervensi kebijakan, program, dan investasi yang dirancang untuk menangani kemerosotan kualitas lingkungan, guna mencapai tujuan bersama pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pembangunan yang telah dilakukan pada dua dekade lalu tidak sepenuhnya dapat dicapai dan sesuai dengan keinginan semua masyarakat, bahkan menjadi permasalahan pembangunan di masa yang akan datang. Permasalahan pembangunan tidak saja bersumber dari internal akan tetapi juga berasal dari eksternal. Sementara itu, isu strategis merupakan tantangan dan peluang bagi daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan ke depan. Analisis terhadap permasalahan dan isu strategis akan menghasilkan kebijakan yang antisipatif dan solutif bagi keberlangsungan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan jangka panjang sangat penting untuk memastikan bahwa upaya-upaya pembangunan disusun dengan baik, dilaksanakan secara efektif, serta dapat menyesuaikan dengan perubahan keadaan. Hal ini akan membantu untuk menyelaraskan tujuan, sekaligus mengelola risiko, dan pada akhirnya dapat membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yaitu kerentanan dan risiko kondisi geografi, pengelolaan sumber daya air belum berkelanjutan, tingginya alih fungsi lahan dan gambut, pengembangan potensi ekonomi daerah belum optimal, kerentanan ketahanan pangan, kesenjangan infrastruktur antarwilayah masih tinggi, kualitas sumber daya manusia dan keluarga masih rendah serta ketimpangan gender masih tinggi, transformasi ekonomi belum optimal, ancaman stabilitas daerah masih tinggi, inovasi daerah masih belum optimal, dan reformasi birokrasi yang belum optimal.

3.1.1 Kerentanan dan Risiko Kondisi Geografi

Kondisi geografi Provinsi Sumatera Selatan memiliki kerentanan risiko bencana alam. Sebagian besar wilayah merupakan dataran aluvial dengan total luas 4.976.818 ha atau sekitar 57% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Tanah aluvial umumnya subur karena memiliki kandungan air yang cukup. Selanjutnya ada jenis tanah *histosol* 1.802.458 ha atau 21% yang lebih populer dikenal sebagai tanah gambut. Tanah gambut cenderung kurang subur karena memiliki kandungan unsur hara yang rendah. Terdapat 11 jenis potensi bahaya bencana di berbagai wilayah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi: Banjir, Banjir

Bandang, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan, Gempa Bumi, Cuaca Ekstrem, Kekeringan, Letusan Gunung Api, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Kegagalan Teknologi, dan Epidemi dan Wabah Penyakit. Adapun kerentanan dan risiko bencana alam karena kondisi geografis termasuk kelas Tinggi adalah bahaya banjir, secara total potensi luas keseluruhan adalah 6.476.932 ha; potensi luas bahaya tanah longsor adalah seluas 906.740 ha; potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar 8.851.703 ha; dan bahaya cuaca ekstrem luas secara keseluruhan adalah 6.339.456 ha.

Selain itu, permasalahan geografi lain adalah terkait perubahan iklim, seperti musim kemarau yang terjadi setiap tahun meningkatkan ancaman bencana kebakaran terutama di lahan gambut, bahkan kebakaran lahan gambut yang besar ini terjadi setiap 4 tahunan. Hal ini mengingat Sumatera Selatan merupakan rumah bagi ekosistem gambut terluas di Pulau Sumatera setelah Provinsi Riau. Lahan gambut di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 2,09 juta ha dengan 36 KHG yang berlokasi di 7 kabupaten, atau sekitar 24,07% dari total wilayah provinsi.

Tingginya risiko kebencanaan belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal. Data Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 sebesar 132,99, angka ini relatif menurun jika dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 143,93 dengan kategori sedang. Dengan penurunan Indeks Risiko Bencana tersebut, pencapaian tersebut masih perlu dioptimalkan dari aspek kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan bencana. Tantangan kebencanaan akan semakin tinggi sebagai akibat makin meningkatnya tekanan perubahan iklim.

Daerah dengan Indeks Risiko Bencana tertinggi di tahun 2022 yaitu Kabupaten Empat Lawang sebesar 154,31, sementara terendah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 106,15. Meskipun data Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumatera Selatan tersebut relatif turun selama 7 tahun terakhir, namun potensi risiko bencana alam di Sumatera Selatan masih sangat tinggi, terutama bencana banjir yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: (1) Faktor alam, seperti curah hujan yang tinggi dan letak geografis yang berada di daerah aliran sungai; (2) Faktor manusia, seperti alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan industri, serta pembuangan sampah sembarangan.

3.1.2 Pengelolaan Sumber Daya Air Belum Berkelanjutan

Masih terdapat keterbatasan dalam ketersediaan air bersih yang aman untuk diminum. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 mencapai 86,35%,

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 84,70% pada 2021. Angka tersebut relatif masih lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 91,05% pada 2022. Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak terendah adalah Kabupaten Empat Lawang (64,85%). Jumlah persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Provinsi Sumatera Selatan masih belum memenuhi standar Kementerian Pekerjaan Umum sebesar 91,32% pada 11 dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. **Keterbatasan sumber daya air** yaitu: (a) kurangnya kuantitas air, disebabkan oleh keterbatasan kapasitas infrastruktur dan sistem pengelolaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; keterbatasan dalam ketersediaan air bersih yang aman untuk diminum seiring dengan peningkatan kebutuhan air di berbagai sektor dan rumah tangga; degradasi lahan, seperti erosi dan sedimentasi, dapat menyebabkan berkurangnya kapasitas tampungan air di sungai dan danau; perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan menjadi tidak menentu yang dapat menyebabkan kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan, (b) rendahnya kualitas air, disebabkan adanya pencemaran air oleh berbagai faktor, seperti limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian; kerusakan lingkungan, seperti penebangan hutan dan pembakaran lahan, dapat menyebabkan berkurangnya cadangan air tanah dan pencemaran air permukaan, sehingga ada keterbatasan dalam ketersediaan air bersih yang aman untuk diminum.

3.1.3 Tingginya Alih Fungsi Lahan dan Gambut

Pertumbuhan penduduk meningkat dari tahun ke tahun sementara lahan terbatas dan terbagi habis sesuai peruntukan. Kecepatan pertumbuhan penduduk akan berdampak pada meningkatnya pemanfaatan ruang untuk perumahan dan perkantoran. Perkembangan wilayah terutama perkotaan memerlukan lahan yang luas untuk penyediaan sarana dan prasarana, pembangunan industri, akibatnya lahan semakin menyempit. Selain itu, berkurangnya tutupan lahan akibat dari alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan seperti sawit baik skala kecil maupun besar. Ketidaktepatan dalam pemanfaatan lahan gambut sesuai fungsinya (fungsi budidaya dan fungsi lindung ekosistem) akan berdampak pada sering terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan, meningkatnya biaya hidup masyarakat sehingga merugikan pembangunan, banjir, dan kemacetan. Permasalahan alih fungsi lahan sering menimbulkan konflik aturan seperti tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan tumpang tindih perizinan.

3.1.4 Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal

Pemanfaatan potensi sumber daya yang potensial masih didominasi oleh sektor primer yaitu sebesar 40%. Sumatera Selatan merupakan daerah terkaya ke-5 di era otonomi daerah dengan sektor unggulan yaitu sektor pertanian terutama sektor perkebunan, sektor pertambangan, industri manufaktur dan perdagangan. Sektor primer sebagai komoditas ekspor belum optimal, ini terlihat dari pertumbuhan sektor primer stagnan pada interval 2%-3%. Dilihat dari Indeks Ketergantungan Sumber Daya Alam atau *Natural Resource Dependency Index* (NRDI) Sumatera Selatan relatif tinggi sebesar 9,52, menempati posisi ke-8. Semakin tinggi nilai NRDI berarti semakin tinggi juga tingkat ketergantungan terhadap SDA. Umumnya wilayah yang memiliki NRDI tinggi tidak cukup mampu menciptakan kinerja pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang sebanding dengan kekayaan SDA tambang yang selama ini sudah dieksploitasi. Selain itu, *Indeks Natural Resource Curse* (NRC) Sumatera Selatan sebesar 9,50 (peringkat 8 tertinggi). Semakin tinggi nilai indeks NRC di suatu wilayah, artinya memiliki ketergantungan tinggi pula terhadap SDA tambang, terutama wilayah penghasil utama minyak bumi, gas bumi, mineral, dan batu bara.

Belum optimalnya pengembangan potensi daerah akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pengembangan potensi ekonomi daerah masih cenderung bersifat *business as usual*, kondisi ini terlihat masih terfokusnya kegiatan di sektor primer sehingga transformasi sektoral relatif lambat, dan hilirisasi produk untuk menciptakan nilai tambah masih terbatas. Permasalahan pengembangan sektor unggulan yaitu: (a) belum optimalnya pertumbuhan sektor pertanian yang disebabkan oleh tingginya alih fungsi lahan menjadi lahan peruntukan lainnya, dan (b) nilai tambah sektor pertanian relatif masih kecil dibandingkan sektor lainnya disebabkan oleh pengelolaan yang masih belum efisien. Oleh karena itu, sektor pertanian diarahkan pada kegiatan hilirisasi (*on farm*), artinya industrialisasi produk pertanian akan mendorong produktivitas hasil pertanian sejalan dengan produktivitas tenaga kerja.

3.1.5 Kerentanan Ketahanan Pangan

Share sektor pertanian terhadap PDRB terus mengalami penurunan, sementara disisi lain, sektor jasa menunjukkan tren yang meningkat. Data tahun 2022 menunjukkan pangsa sektor jasa sudah melampaui sektor pertanian yaitu 16,05% sedangkan sektor pertanian sebesar 13,23%. Isu pangan global semakin menguat seiring perubahan iklim yang ekstrem sehingga berdampak produksi sektor pertanian. Sektor pertanian sebagai sektor andalan dalam menopang ketahanan pangan cenderung mengalami penurunan kontribusinya terhadap PDRB. Dalam dua dekade kontribusi sektor pertanian menurun sebesar 6 persen. Sektor

perkebunan sebagai *leading* sektor pertanian menghadapi kendala volatilitas harga komoditas. Harga komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet dan kopi sangat ditentukan oleh permintaan dari luar negeri. Dilihat dari tingkat produktivitas, sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki produktivitas terendah di antara sektor lainnya dan cenderung menurun. Output yang dihasilkan sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang melambat.

Produktivitas padi di Sumatera Selatan tumbuh melambat dengan rata-rata 1,03% selama 2019-2022. Pada tahun 2022, produktivitas Sumatera Selatan sebesar 53,45 kuintal/ha, masih di bawah rata-rata nasional yang sebesar 57,00 kuintal/ha. Apabila dilihat dari pertumbuhan produktivitas padi di kabupaten/kota yang tertinggi adalah Kota Palembang (12,42%) sementara 5 daerah yang tumbuh negatif, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kota Lubuklinggau. Sebaran komoditas pangan seperti padi dan jagung masih terkonsentrasi di beberapa wilayah, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Komering Ulu Timur. Oleh karena itu, perlu dilakukan diversifikasi sektor pertanian untuk menjaga ketahanan pangan.

Produktivitas perikanan tangkap tumbuh negatif. Produktivitas perikanan tangkap di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 9,95 kuintal/RT, sementara itu rata-rata produktivitas perikanan tangkap kabupaten/kota sebesar 9,81 kuintal/RT tahun 2021, terendah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 8,35 kuintal/RT; produktivitas perikanan tangkap Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tumbuh signifikan pada tahun 2021 (185,30%) diikuti Ogan Komering Ulu Selatan (58,63%) dan Prabumulih (56,15%), sementara yang turun signifikan adalah Lahat (-89,56%) diikuti Lubuklinggau (-64,77%) dan Palembang (-40,71%). Perikanan budidaya Sumatera Selatan selama 2017-2021 turun signifikan yaitu sebesar -5,80% (yoy). Perikanan budidaya tersebar di kabupaten/kota, produksi terbesar berada di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada tahun 2021 masing-masing sebesar 60.874 ton dan 49.799 ton.

Rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan pangan. Tingkat aksesibilitas (keterjangkauan) pangan dan pemanfaatan tahun 2022 masih cukup rendah yaitu sebesar 74,11 dan 61,29, kedua indeks ini menjadi yang terendah di Pulau Sumatera. Secara regional IKP Sumatera Selatan masih jauh di bawah Provinsi Sumatera Barat, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, dan Aceh.

Menurunnya produktivitas ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan disebabkan oleh: (1) Produktivitas lahan yang mengalami *leveling off* sebagai akibat akumulasi pemupukan secara terus menerus sehingga untuk memperoleh tingkat produktivitas yang sama diperlukan input yang lebih. Ini terlihat dari nilai NTP yang cenderung tetap; (2) Ketersediaan lahan pertanian yang

semakin terbatas mendorong peningkatan jumlah rumah tangga petani gurem; (3) Konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian akibat persaingan penggunaan lahan terutama dengan sektor perumahan dan industri, perkebunan, dan pertambangan; (4) Ketersediaan air yang tidak merata di masing-masing wilayah; (5) Tingginya *food loss* dan *food waste* (kehilangan pangan dan sisa makanan) akibat belum maksimalnya teknologi pascapanen; (6) Perubahan iklim (kekeringan, banjir, dan perubahan pola tanam); (7) Serangan hama, penyakit tanaman, dan gulma; (8) Investasi dalam pengembangan penelitian di sektor pertanian masih rendah; (9) Gejolak pangan global menyebabkan terganggunya mata rantai pangan dan pupuk berdampak pada terbatasnya akses pangan sehingga mendorong tingginya inflasi pangan; (10) Harga pakan ikan yang tinggi dan tidak berkualitas, harga ikan yang relatif rendah dan penggunaan teknologi perikanan budidaya yang tidak tepat, serta penyakit ikan menyebabkan produksi perikanan budidaya turun; dan (11) masih tingginya tingkat kemiskinan dan masih tingginya balita *stunting*.

3.1.6 Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah masih Tinggi

Disparitas infrastruktur antarwilayah berdampak pada kesenjangan ekonomi. Infrastruktur yang buruk menyebabkan ketidakefisienan dalam ekonomi. Ketidakefisienan tersebut menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Perkembangan yang baik pada infrastruktur di Sumatera Selatan terutama jalan, seperti jalan tol lintas Sumatera dan infrastruktur lainnya, seperti bandara, pelabuhan, dan *Light Rail Transit* (LRT) namun secara spasial masih terdapat kesenjangan infrastruktur antarwilayah.

Masih Terdapatnya Jalan yang Berkualitas Kurang Mantap. Panjang jalan di Provinsi Sumatera Selatan dengan kategori jalan negara, provinsi dan kabupaten pada setiap kabupaten/kota, pada umumnya tidak mengalami penambahan sejak tahun 2019. Jalan pada Provinsi Sumatera Selatan, terdapat dua jenis permukaan jalan yang belum permanen dengan kategori tidak diaspal dan lainnya dengan angka yang relatif besar dari total panjang jalan yang ada; permukaan jalan tidak diaspal sepanjang 14,46 km dengan lokasi pada Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir, dan; permukaan jalan dengan kategori lainnya sepanjang 58,06 km dengan sebagian besar berada di Kabupaten Muara Enim dan 0,06 km di Kabupaten Banyuasin. Terutama pada daerah dengan ekosistem gambut, terdapat penurunan kualitas jalan bahkan pada daerah-daerah tertentu masih sulit diakses dengan jalur darat. Jumlah panjang jalan dan jenis permukaan jalan menunjukkan terhadap upaya peningkatan aksesibilitas yang lebih besar pada wilayah di Provinsi Sumatera Selatan.

Jalan di Provinsi Sumatera Selatan masih terdiri dari komposisi jalan dengan kondisi belum maksimal. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumsel (2023), pada tahun 2022, jalan di Provinsi Sumatera Selatan dalam kondisi baik 76,12%, dalam kondisi sedang 10,54%, kondisi rusak 2,68%, dan 10,66% dalam kondisi rusak berat. Kondisi ini juga memberikan tantangan terkait dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan yang terus meningkat setiap tahunnya dengan rincian sebagai berikut 277,24 ribu mobil penumpang, 1,68 ribu bus, 42,42 ribu truk, dan 898,92 ribu sepeda motor. Kondisi jalan dan jumlah kendaraan memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat keamanan dalam berlalu lintas dan kemudahan aksesibilitas.

Konektivitas dan Aksesibilitas yang Belum Merata. Sumatera Selatan memiliki beberapa wilayah yang masih sulit dijangkau moda transportasi dan memiliki indeks aksesibilitas yang masih rendah. Konektivitas di beberapa kawasan terutama kawasan Timur Sumatera Selatan/pesisir belum sepenuhnya memiliki jaringan jalan yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer II. Ketersediaan sarana jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk memperlancar akses ke wilayah-wilayah yang terisolir. Sementara itu, wilayah Koridor Timur masih perlu peningkatan jaringan Pelayanan Angkutan Umum. Permasalahan konektivitas lainnya adalah belum tersedianya terminal multimoda untuk angkutan barang dan penumpang kawasan metropolitan Patungraya Agung.

Selain itu, pelayanan dari jaringan Kereta Api masih terbatas pada wilayah Lampung dan Sumatera Selatan. Penambahan jalur Kereta Api yang diintegrasikan dengan ruas Lubuklinggau-Bengkulu dan Muara Enim-Tanjung Api-Api sebagai *outlet* memasarkan produk hasil pertanian, pertambangan, batubara, minyak bumi perlu segera direalisasikan sebagai upaya untuk mendorong perkembangan wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan. Angkutan Kereta Api diharapkan mampu menarik gerbong kemakmuran bagi masyarakat Sumatera Selatan, namun menghadapi beberapa kendala seperti daya dukung rel yang masih terbatas dimana jaringan rel rawan anjlok dan belum terealisasinya pembangunan konektivitas rencana Kereta Api Trans Sumatera (Palembang-Jambi dan Palembang-Lampung).

Sumatera Selatan juga memiliki LRT yang mampu mengatasi kemacetan di Kota Palembang, akan tetapi masih menghadapi kendala, yaitu: (1) Jaringan pelayanan (*trunk/feeder*) dan fasilitas fisik (stasiun/halte) belum sepenuhnya terintegrasi; (2) Tarif angkutan umum belum terintegrasi sehingga perjalanan (asal-tujuan) dengan angkutan umum dirasakan mahal; (3) Fasilitas pelayanan angkutan umum belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penumpang (barang bawaan, sepeda, dan lain-lain) belum terakomodasi dengan baik.

Konektivitas dan aksesibilitas yang belum merata berdampak pada tidak optimalnya *'economies of scale'* sehingga menghambat keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Agar Sumatera Selatan dapat unggul menjadi provinsi yang berorientasi pada arus perdagangan ekspor, terlebih dengan adanya industri hilir yang terintegrasi dengan sistem logistik yang berkembang, maka peningkatan konektivitas dan skala ekonomi perlu dilakukan. Selain meningkatkan produktivitas pertumbuhan regional, peningkatan konektivitas dan aksesibilitas berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi hijau melalui praktik pertanian berkelanjutan.

Transportasi sungai dan laut belum optimal dalam pengelolaan jalur sungai untuk angkutan barang, penumpang, dan wisata. Hal ini karena belum tersedianya pelabuhan internasional yang berfungsi sebagai outlet dan inlet angkutan barang dan hasil hilirisasi menjadi faktor penghambat dalam pengembangan moda transportasi laut. Simpul-simpul transportasi ini, seperti pelabuhan, bandara, dan terminal, masih perlu terkoneksi lebih baik dengan pusat pertumbuhan dan kawasan industri strategis.

Fasilitas angkutan udara masih relatif belum merata. Saat ini Sumatera Selatan memiliki 3 (tiga) bandara, yaitu: Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) di Kota Palembang, Bandar Udara Silampari di Kota Lubuklinggau, dan Bandar Udara Atung Bungsu yang terletak di Kabupaten Pagar Alam. Namun, belum tersedianya fasilitas angkutan udara untuk pergerakan penumpang di Kawasan Selatan pada Provinsi Sumatera Selatan. Pergerakan penumpang hanya dilakukan melalui akses darat sehingga mobilitas penumpang dari wilayah selatan relatif terbatas. Sebagian besar mobilitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dilakukan di luar Wilayah Sumatera Selatan seperti Provinsi Lampung. Fenomena ini menyebabkan terjadinya kebocoran wilayah. Transaksi komoditas unggulan wilayah bagian selatan Provinsi Sumatera Selatan seperti kopi dilakukan di kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Sumatera Selatan.

Belum Optimalnya Sarana Energi Kelistrikan dan Telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi seluler di wilayah Provinsi Sumatera Selatan masih dengan kualitas dan jangkauan yang belum merata sehingga masih terdapat wilayah yang belum terlayani jaringan listrik dan tidak terdapat jangkauan sinyal telepon. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Selatan (2023), pada 11 dari 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan masih terdapat desa yang tidak terjangkau dengan jaringan sinyal internet seluler. Masih terdapat 38 desa yang belum sama sekali terjangkau jaringan komunikasi dan sebanyak 145 desa belum terjangkau jaringan internet. Desa-desa yang paling banyak belum terjangkau

jaringan internet yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu Timur, dan Penukal Abab Lematang Ilir.

Kondisi lingkungan yang belum mendukung derajat kesehatan. Sanitasi yang baik akan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup, demikian pula tersedianya sarana pengelolaan limbah dan pembuangan sampah. Sumatera Selatan telah berupaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan, prasarana pembuangan tinja pada lingkungan belum seluruhnya menggunakan fasilitas tempat akhir pembuangan tinja yang sesuai dengan standar kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2022, sebagian besar pemakaian tempat akhir pembuangan tinja menggunakan tangki septik tank/IPAL *Sewage System* sebanyak 82,68%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 84,39%. Selain itu, yang masih menggunakan kolam/sawah/sungai/danau/laut sebanyak 4,35%, bahkan masih dijumpai pembuangan tinja di lubang tanah sebesar 11,66%, serta di pantai/tanah lapang/kebun/lainnya sebanyak 1,04%. Permasalahan dalam sanitasi, limbah, dan persampahan di Sumatera Selatan, yaitu: Lemahnya penegakan Perda Kebersihan, beberapa SPAL-T skala kawasan telah terbangun namun kondisinya kurang baik, beberapa kabupaten/kota belum memiliki SPALD-S skala kawasan atau IPLT, dan yang sudah memiliki tetapi kondisinya kurang baik, masih terdapat daerah yang belum memiliki TPA yaitu Kabupaten PALI dan Kabupaten Musi Rawas. Selain itu, Sumatera Selatan sering mengalami kejadian kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan asap. Bencana karhutlah ini, yang disebabkan oleh adanya pembukaan lahan dengan cara membakar, alih fungsi dan belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, serta diperparah oleh adanya El Nino, berdampak pada berkurangnya tingkat kesehatan masyarakat karena membuat masyarakat rentan terhadap penyakit ISPA, terutama untuk anak-anak dan lansia.

3.1.7 Kualitas Sumber Daya Manusia dan Keluarga masih Rendah serta Ketimpangan Gender masih tinggi

Sektor tenaga kerja di Sumatera Selatan di bidang keterampilan tinggi masih rendah. Ini disebabkan oleh kualitas SDM masih rendah dilihat dari angkatan kerja didominasi lulusan SD dan SMP. Degradasi pendidikan dalam dunia kerja terus terjadi, beberapa jenis pekerjaan mengharuskan lulusan perguruan tinggi sehingga pekerjaan yang semestinya dapat dilakukan oleh pekerja lulusan sekolah menengah beralih ke jenjang yang lebih tinggi. Adaptasi terhadap perubahan yang cepat akan berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran pada jenjang sekolah menengah dan perguruan tinggi.

Capaian IPM Sumatera Selatan masih relatif rendah. Tahun 2023 sebesar 73,18 masih berada di bawah capaian IPM nasional sebesar 74,39 bahkan menempati nomor 2 terbawah di Pulau Sumatera. Komponen yang menyebabkan IPM masih relatif rendah yaitu angka harapan hidup sebesar 74,04 dan rata-rata lama sekolah sebesar 8,5. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya pemerataan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Pemerataan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan sangat ditentukan oleh tersedianya fasilitas kesehatan dan pendidikan di desa-desa. Jarak antardesa dan permukiman yang masih jarang penduduk menyebabkan pelayanan kesehatan dan pendidikan kurang terlayani dengan baik.

Kurangnya SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Penyerapan tenaga kerja dilihat dari kualifikasi pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah. Pada tahun 2022 penduduk bekerja berdasarkan kualifikasi pendidikan, masih didominasi tenaga kerja yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 42 persen. Sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma I/II/III dan Universitas sebanyak 11 persen. Selain disebabkan oleh rata-rata tingkat pendidikan masih rendah, SDM yang kompeten dalam jumlah minim juga disebabkan oleh terbatasnya keberadaan sarana prasarana maupun tenaga pelatih BLK yang tersertifikasi.

Rendahnya Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk rerata kompetensi literasi dan numerasi. Masing-masing rerata tersebut adalah 58,41 dan 50,37 (pada satuan Pendidikan SMA); 56,59 dan 49,16 (pada satuan Pendidikan SMK); 51,87 dan 48,48 (pada satuan Pendidikan SMALB); 56,30 dan 52,17 (pada satuan Pendidikan SMPLB); 56,88 dan 44,78 (pada satuan Pendidikan SDLB). Penilaian AKM (Assesmen Kompetensi Minimum) ini dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif yaitu Literasi dan Numerasi. Kemampuan Literasi dan Numerasi dapat membantu siswa mempelajari bidang ilmu lainnya dengan membentuk cara berpikir dan melatih siswa mencerna informasi baik dalam bentuk tertulis atau angka-angka. Sistem Pendidikan sebagai sumber masalahnya sehingga sudah menjadi hal yang umum istilah seperti: kesenjangan keterampilan di kalangan dunia usaha dan industri.

Rendahnya keterkaitan antara lulusan pendidikan dengan dunia kerja. Keterkaitan (*link and match*) yang lemah antara lulusan pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan dunia kerja diindikasikan oleh tingginya tingkat pengangguran terbuka yang disumbang oleh lulusan SMK yaitu sebesar 16,64 persen. Belum adaptifnya kurikulum SMK dengan kebutuhan pasar kerja dan rendahnya potensi kemandirian wirausaha menjadi beberapa faktor penyebab hal ini.

Rendahnya jumlah pekerja berpendidikan tinggi dan bekerja di bidang keahlian menengah tinggi. Hanya terdapat 12,86 persen pekerja berpendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi. Kondisi tersebut menjadi permasalahan serius, karena lulusan pendidikan menengah dan tinggi pada beberapa bidang memiliki *supply* semakin banyak. Pekerjaan di bidang keahlian menengah tinggi yang tidak secara langsung berhubungan dengan bidang pendidikan yang diikuti tersebut terpaksa menjadi pilihan bagi para lulusan yang kesulitan untuk memanfaatkan pengetahuan dan keahlian yang dipelajarinya.

Belum optimalnya kualitas keluarga. Kualitas keluarga berperan penting dalam pembangunan manusia. Capaian indeks kualitas keluarga di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 yaitu sebesar 73,09 masih di bawah rata-rata nasional yang sebesar 73,43. Permasalahan kualitas keluarga Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari beberapa indikator capaian yang rendah diantaranya persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran mengalami penurunan sebesar -0,47. Kemudian terjadi peningkatan pada persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok mengalami peningkatan sebesar 0,22. Kepemilikan rumah juga mengalami penurunan, terlihat dari persentase rumah tangga yang memiliki rumah mengalami penurunan sebesar -0,42. Sementara itu, persentase rumah tangga tidak miskin di kabupaten/kota dan provinsi mengalami penurunan sebesar -0,08. Jaminan asuransi kesehatan menunjukkan penurunan sebesar -1,93, dan persentase rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,12.

Ketimpangan gender masih tinggi. Perlakuan atau tindakan yang tidak adil pada jenis kelamin tertentu, utamanya perempuan masih tinggi walaupun menunjukkan tren yang menurun. Namun, data tahun 2023 menunjukkan ketimpangan gender di Provinsi Sumatera Selatan masih berada pada posisi nomor dua tertinggi di Sumatera setelah Provinsi Jambi.

Ketimpangan gender di Sumatera Selatan dari dimensi pemberdayaan, sebagian besar disebabkan oleh: 1) masih rendahnya persentase penduduk perempuan dengan pendidikan minimal SMA; 2) masih rendahnya persentase anggota legislatif perempuan, sedangkan untuk dimensi pasar tenaga kerja, salah satu penyebab ketimpangan gender adalah TPAK perempuan yang capaiannya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan TPAK laki-laki. Selain itu, yang berkontribusi terhadap ketimpangan gender di Sumatera Selatan adalah komponen Indeks Pembangunan Gender bidang pendidikan, antara lain: 1) rata-rata lama sekolah perempuan masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki; 2) angka harapan hidup untuk perempuan di Provinsi Sumatera Selatan juga lebih rendah dan *gap*-nya sangat besar jika dibandingkan dengan laki-laki.

3.1.8 Transformasi Ekonomi belum Optimal

Sumatera Selatan masih mengandalkan sektor primer dalam pembangunan terutama sektor pertambangan batubara dengan kontribusi yang cenderung meningkat. Sementara itu, kontribusi sektor industri pengolahan/manufaktur cenderung stagnan dalam dua dekade yaitu berkisar 17%. Kontribusi terbesar dalam industri pengolahan adalah industri pulp dan kertas sedangkan kontribusi UMKM masih relatif terbatas. Terhambatnya sektor manufaktur terutama industri pengolahan pada UMKM mengindikasikan terjadinya proses “deindustrialiasi” di Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: (1) terbatasnya kemampuan mengadopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, (2) keterbatasan dukungan ekosistem industri dari luar Jawa, (3) terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat peningkatan biaya, seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, energi, logistik, dan tingkat bunga, dan (4) adanya penurunan daya beli masyarakat yang menyebabkan pergeseran permintaan terhadap barang impor yang lebih murah.

Mega tren dunia menunjukkan telah terjadinya transformasi ekonomi dari ekonomi coklat menuju ekonomi hijau. Transformasi ekonomi yang mengarah ke ekonomi hijau memerlukan hilirisasi SDA unggulan untuk meningkatkan produktivitas dan melakukan inovasi-inovasi di sektor prioritas terutama batubara untuk mendukung *zero emission*. Transformasi ekonomi hijau berlandaskan pada pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar sosial. Dalam dua dekade ke depan perekonomian akan beralih dari keuntungan komparatif ke keuntungan kompetitif, dan ekonomi ekstraktif seperti sektor pertambangan akan didorong untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi daerah.

Sumatera Selatan telah berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi hijau sejak tahun 2017, terutama pada sektor berbasis lahan. Dengan pertumbuhan ekonomi hijau, pengembangan sektor berbasis lahan dapat menjadi kekuatan ekonomi wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai penopang kehidupan pokok, dan sejalan dengan upaya menuju industri berbasis sumber daya yang kuat (*resources-based industri*). Pertumbuhan ekonomi hijau di Sumatera Selatan masih bisa lebih optimal lagi. Transformasi ekonomi yang berlandaskan ekonomi hijau mengharuskan kedepannya ada sinkronisasi rencana pembangunan dengan tata ruang untuk berbagai kegiatan (pertanian, perkebunan, kehutanan) serta memperhatikan daya dukung yang menjamin keberlangsungan pembangunan tersebut. Hal ini termasuk mengurangi emisi yang dihasilkan dari sektor ekonomi berbasis lahan yang selama ini menghasilkan emisi yang tinggi.

3.1.9 Ancaman Stabilitas Daerah Masih Tinggi

a) Tingkat Demokrasi Daerah

Terdapat potensi permasalahan stabilitas demokrasi daerah. Walaupun nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 yaitu sebesar 80,56, berada pada kategori tinggi, namun relatif masih belum maksimal. IDI Sumatera Selatan tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan IDI nasional yang mencapai 80,41. Tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas, antara lain: (1) Kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya konflik sosial dan politik. Hal ini karena masyarakat yang miskin dan tertinggal secara ekonomi cenderung lebih rentan terhadap provokasi dan propaganda dari pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas daerah. (2) Rendahnya ruang demokrasi terbuka dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga dapat memicu terjadinya protes dan demonstrasi yang dapat berujung pada konflik sosial.

b) Tingkat Kriminalitas

Risiko penduduk terkena tindak pidana di Sumatera Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sebesar 103,00. Berdasarkan data BPS, risiko penduduk terkena tindak pidana (*crime rate*) per 100.000 penduduk di Sumatera Selatan pada tahun 2021 adalah sebesar 153,00. Angka ini berarti bahwa setiap 100.000 penduduk di Sumatera Selatan, terdapat 153 kasus tindak pidana yang terjadi. Adapun potensi permasalahan stabilitas daerah dari aspek tingkat kriminalitas antara lain: (1) Potensi rawan terhadap tindak pidana terorisme karena memiliki perbatasan dengan negara Malaysia, yang merupakan salah satu negara asal jaringan terorisme internasional; (2) Potensi rawan terhadap tindak pidana narkoba, karena Sumatera Selatan merupakan daerah transit dan tujuan peredaran narkoba dari berbagai wilayah di Indonesia; (3) Potensi rawan terhadap tindak pidana premanisme didorong oleh tingkat urbanisasi yang tinggi, yang dapat memicu terjadinya kriminalitas akibat persaingan antar kelompok masyarakat.

3.1.10 Inovasi Daerah Masih Belum Optimal

Provinsi Sumatera Selatan berhasil meraih predikat Provinsi Sangat Inovatif dalam ajang *Innovative Government Award* (IGA) tahun 2022. Pada tahun 2022, Provinsi Sumatera Selatan berhasil meraih peringkat pertama dengan skor 79,47. Provinsi Sumatera Selatan telah menunjukkan peningkatan Indeks Inovasi Daerah secara konsisten dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, masih terdapat potensi permasalahan internal yaitu antara lain: (1) Kurang tersedianya sumber daya manusia yang kompeten di bidang inovasi di Provinsi Sumatera Selatan seperti

kurangnya jumlah peneliti, inventor, dan *entrepreneur*; (2) Kurang tersedianya dana yang memadai dalam mendorong inovasi yang terlihat dari terbatasnya anggaran untuk penelitian dan pengembangan, serta insentif bagi pelaku inovasi; (3) Belum optimalnya dukungan dari pemerintah dalam mendorong inovasi yang terlihat dari masih kurangnya regulasi yang mendukung inovasi, serta belum optimalnya koordinasi antar-lembaga pemerintah dalam mendorong inovasi; (4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendorong inovasi yang terlihat dari masih kurangnya minat masyarakat untuk berinovasi, serta masih kurangnya apresiasi terhadap hasil-hasil inovasi.

Potensi permasalahan eksternal antara lain: (1) Persaingan global dan antarwilayah yang semakin ketat menuntut daerah untuk terus berinovasi agar dapat bersaing dengan daerah lain; (2) Perubahan teknologi yang semakin cepat menuntut daerah untuk terus mengikuti perkembangan teknologi agar dapat memanfaatkannya secara optimal; (3) Ketidakpastian ekonomi global dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga dapat berdampak negatif terhadap inovasi.

3.1.11 Reformasi Birokrasi yang Belum Optimal

Kebijakan reformasi birokrasi akan mendukung capaian pembangunan daerah melalui perbaikan indikator pembangunan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan dapat diprediksi (*predictability*). Reformasi birokrasi Provinsi Sumatera Selatan belum optimal terlihat dari Indeks Keterbukaan Informasi dan Integritas di bawah nasional. Dari 17 kabupaten/kota hanya Kabupaten Muara Enim yang terkategori B sedangkan kabupaten/kota lainnya masih terkategori C atau CC. Sementara itu, indeks pelayanan publik masih belum merata di pemerintah kabupaten/kota. Permasalahan dalam meningkatkan tata kelola yang baik yaitu: (1) kebijakan tata kelola pada tingkat pemerintah pusat masih terkesan belum terintegrasi (*fragmented*), tumpang tindih dan cenderung cepat berubah seperti aturan SKP. Fungsional dan aturan rentang kendali antara pejabat struktural dan pejabat fungsional sehingga berdampak pada kebijakan yang inkonsisten di pemerintah daerah; (2) Kualitas sumber daya ASN terutama fungsional di setiap daerah yang belum merata.

3.2 Isu Strategis Daerah

3.2.1 Isu Strategis Global

Perekonomian global dalam beberapa tahun terakhir mengalami berbagai ketidakpastian. Strategi ekonomi global adalah rencana jangka panjang yang

dirancang oleh negara atau kelompok negara untuk mengelola dan mempengaruhi perkembangan ekonomi dunia. Tujuan strategi ini biasanya termasuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas keuangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai tantangan peristiwa ekonomi global terjadi seperti pada tahun 2017-2018 adanya ketegangan hubungan perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok yang kemudian menyebabkan gejolak pasar keuangan global dan membuat volume perdagangan dunia merosot, dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia tahun 2020 menyebabkan krisis multidimensi, serta ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina berdampak pada pelemahan transaksi perdagangan, kenaikan harga komoditas, dan ketidakpastian pasar keuangan global. Isu strategis global yang mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, teknologi, lingkungan hidup, politik, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya hingga tahun 2045 melibatkan proyeksi dan perkiraan yang sulit untuk dipastikan dengan akurasi mutlak. Hasil **Konvensi LRTAP (*Long-Range Transboundary Air Pollution*) yang dimuat dalam *European Environment Agency* (2023), publikasi *World Health Organization* (2021), *UNEP* (2023), dan *WMO* (2023) serta pertemuan negara-negara G-20** mengungkapkan beberapa isu strategis lingkungan yang dapat menjadi perhatian dalam konteks global, yaitu:

Penguatan mitigasi terhadap emisi gas rumah kaca. Peningkatan mitigasi ini mengurangi adanya perubahan iklim yang memberikan dampak negatif pada berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, perikanan, pariwisata, dan kesehatan. Selain itu juga adanya transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan dan rendah emisi karbon.

Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlanjutan ekonomi. Persediaan sumber daya alam yang semakin menipis, seperti air, energi, dan pangan, dapat menimbulkan konflik antarnegara dan antarkelompok masyarakat. Kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi dapat menyebabkan masyarakat tidak mampu mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk melindungi lingkungan.

Pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Kunci untuk mengatasi isu lingkungan global dapat berupa: pengembangan teknologi baru, seperti teknologi digital dan bioteknologi, dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Teknologi digital dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, walaupun dapat menyebabkan peningkatan konsumsi energi dan sumber daya alam. Pengembangan potensi bioteknologi untuk mengembangkan produk dan proses yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan risiko baru, seperti risiko biosekuritas.

Dampak perubahan iklim. Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan yang menyebabkan berbagai potensi penyakit, seperti penyakit pernapasan, penyakit kardiovaskular, dan penyakit menular.

Polusi udara, air, dan tanah. Masalah lingkungan yang serius di banyak negara yang menimbulkan berbagai dampak kesehatan, ekonomi, dan lingkungan akibat adanya polusi tersebut. Hal ini juga memberikan dampak degradasi lingkungan, seperti deforestasi, degradasi lahan, dan erosi, menyebabkan hilangnya sumber daya alam dan habitat. Dampak polusi terhadap kesehatan dapat menyebabkan berbagai potensi penyakit, seperti kanker, penyakit pernapasan, dan penyakit jantung.

Penguatan kerjasama internasional. Isu lingkungan global dapat diatasi melalui perjanjian, organisasi internasional, dan mekanisme lainnya. Selain itu dapat pula menggunakan aspek penguatan penegakan hukum yang efektif untuk melindungi lingkungan melalui kebijakan, peraturan, dan sanksi. Didukung pula penguatan partisipasi masyarakat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan melalui berbagai kegiatan, seperti pemantauan lingkungan, pengaduan, dan advokasi.

Penguatan terhadap pendidikan lingkungan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan dapat dilakukan melalui kurikulum pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, dan media komunikasi. Penguatan terhadap pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan lingkungan di masa depan, hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, dan program pelatihan.

Penguatan kesetaraan gender. Untuk mengatasi isu lingkungan dapat dilakukan salah satunya dengan mengoptimalkan peran perempuan yang sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dan polusi. Didukung pula penguatan ketahanan sosial untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan polusi, ini dapat dibangun melalui peningkatan akses perempuan ke layanan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

Penguatan nilai-nilai budaya. Hal ini dalam upaya mendorong perilaku ramah lingkungan, seperti nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal, perlu dilestarikan dan dikembangkan. Penguatan sosialisasi nilai-nilai budaya yang mendukung lingkungan hidup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang dilakukan melalui berbagai media, seperti pendidikan, media massa, dan media sosial.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis lingkungan nasional yang mencakup ekonomi, teknologi, lingkungan hidup, politik, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya sampai tahun 2045 seperti tercantum dalam RPJPN (Bappenas, 2024) adalah sebagai berikut:

Penguatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan yang dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, pengendalian terhadap kesenjangan ekonomi dan sosial yang dapat menyebabkan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas sehingga mengurangi pengangguran dan kemiskinan, pengendalian peningkatan kebutuhan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan, mengurangi intensitas emisi GRK yang menyebabkan perubahan iklim yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian, seperti meningkatnya risiko bencana alam, menurunnya produktivitas pertanian, dan meningkatnya biaya kesehatan.

Mendorong perkembangan teknologi baru. Adanya teknologi digital dan teknologi energi terbarukan, dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan ketersediaan akses teknologi secara merata sehingga dapat mengendalikan kesenjangan ekonomi dan sosial. Dapat pula dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, energi, transportasi, industri, dan pertanian, serta penguatan kapasitas teknologi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara berkelanjutan.

Penguatan mitigasi terhadap perubahan iklim. Hal ini dapat mengurangi risiko bencana alam, menurunnya produktivitas pertanian, dan meningkatnya biaya kesehatan. Selain itu isu lingkungan berupa penguatan mitigasi dalam menjaga keanekaragaman hayati yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan penguatan mitigasi dan menjaga kualitas lingkungan.

Peningkatan kualitas demokrasi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, kualitas demokrasi sebagai bentuk isu politik perlu ditingkatkan. Selain itu, diperlukan juga peningkatan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang representatif; peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi dan kerukunan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera; serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas di daerah. Isu ini sekaligus berupa peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi untuk menjaga kesehatan masyarakat; penguatan mitigasi terhadap dampak perubahan

iklim terhadap kesehatan; serta penguatan mitigasi dan menjaga kualitas lingkungan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi.

Peningkatan akses layanan pendidikan yang berkualitas di daerah.

Didukung juga dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia seperti tenaga pendidik; peningkatan pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi; dan peningkatan keterampilan tenaga kerja untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Penguatan dan pengendalian terhadap kesenjangan gender.

Perempuan lebih rentan terhadap dampak perubahan lingkungan, seperti perubahan pola cuaca, banjir, dan kekeringan. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian kesenjangan ekonomi dan sosial terutama terhadap tekanan terhadap lingkungan; peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; dan pengendalian ketimpangan sosial yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan.

Bonus demografi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar di dunia, Indonesia diproyeksikan pada tahun 2045 memiliki jumlah penduduk mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Tantangan memiliki jumlah penduduk yang besar saat ini adalah kualitas pendidikan yang masih rendah. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, hingga sekitar 15 tahun ke depan, sehingga Indonesia masih memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan penduduk usia produktif yang tinggi sebagai modal utama pembangunan. Memiliki penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting sebagai faktor produksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi jika diimbangi dengan peningkatan kualitas melalui peningkatan produktivitasnya.

Penguatan nilai-nilai budaya yang mendukung pelestarian lingkungan.

Isu ini perlu dicermati melalui penguatan peran masyarakat dalam menjaga lingkungan; penguatan nilai-nilai lingkungan sejak dini untuk mendukung pembangunan berkelanjutan; serta penguatan dan pelestarian budaya lokal untuk menjaga kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan.

3.2.3 Isu Strategis Regional

Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup. Perubahan iklim yang terjadi akan menurunkan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari: a) terjadinya **peningkatan luas lahan kritis** dalam periode waktu 2015 – 2019 (penambahan luas lahan sangat kritis pada tahun 2019 hampir delapan kali luas lahan sangat kritis pada tahun 2015; b) telah terjadi **peningkatan laju deforestasi** dari $\pm 2.853,5$ ha/tahun menjadi ± 17.438 ha/tahun; c) alih fungsi dan pemanfaatan lahan gambut melalui pengeringan dan pembakaran memicu terjadinya **kebakaran hutan dan lahan** (yang semakin diperparah oleh adanya El Nino) dan **peningkatan emisi** dari sektor lahan; dan d) **terjadinya polusi udara** yang berdampak pada penurunan kualitas udara.

Isu strategis terkait penurunan kualitas lingkungan hidup di sektor pertambangan salah satunya adalah bekas tambang. Terdapat 359 usaha tambang yang izinnya putus (tambang rakyat), hal ini dapat menimbulkan beberapa dampak seperti lingkungan, sosial, ekonomi, dan keamanan. Dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan antara lain pencemaran air, udara, dan tanah. Dampak sosial yang dapat ditimbulkan antara lain pengangguran, kemiskinan, konflik sosial, dan gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan bahan kimia karena tidak ada mekanisme reklamasi dan pengelolaan limbah. Dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan antara lain berkurangnya pendapatan negara dari pajak dan retribusi. Dampak keamanan yang dapat ditimbulkan antara lain menjadi tempat berkumpulnya kelompok kriminal.

Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia. Perkembangan aspek demografi menunjukkan adanya fenomena *degrowth* atau pertumbuhan penduduk yang menurun. Kondisi ini berimplikasi kepada penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana di masa yang akan datang.

Bonus demografi yang akan dialami 10 tahun ke depan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Salah satu indikator kondisi pendidikan yang sedang berjalan adalah indikator akses dan pemerataan pendidikan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar cakupan pelayanan pendidikan sekaligus untuk mengetahui berapa banyak anak yang belum terlayani pendidikannya di setiap jenjang pendidikan. Salah satu aspek pemerataan pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM). APM SMA menunjukkan cakupan pelayanan Pendidikan jenjang SMA. APM SMA di Sumatera Selatan periode 2017-2023 masih berkisar 60 persen, menunjukkan bahwa hampir setengah penduduk Sumatera Selatan belum tuntas Pendidikan SMA, padahal rata-rata semua lowongan pekerjaan mensyaratkan minimal Pendidikan SMA. Untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata di bidang pendidikan, ketersediaan data terpilah ke depannya untuk APM serta indikator pendidikan lainnya menjadi penting. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga terlihat dari

IPM, nilai IPM Sumatera Selatan masih rendah, dan menempati urutan kedua terbawah di wilayah Sumbagsel (setelah Provinsi Lampung). Nilai IPM Sumatera Selatan tahun 2023 sebesar 74,39.

Peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja melalui penguatan kompetensi yang ada dan kompetensi baru, pendidikan kewirausahaan, serta ekosistem kemitraan DUDI sangat penting. Namun, kualitas dan kualifikasi SDM saat ini tidak seimbang. Dengan banyaknya populasi usia produktif, dunia usaha yang akan membuka peluang pekerjaan akan semakin selektif dengan kualifikasi yang semakin sulit. Jika pemerintah tidak berhasil menyediakan fasilitas untuk membentuk sumber daya manusia dengan baik, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Pemerintah harus menyediakan kebutuhan pendidikan yang memadai untuk membentuk sumber daya yang bagus.

Masih belum terjalinnya hubungan industrial antara pemerintah, pekerja, dan perusahaan dengan baik mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja dan menjadi salah satu penyebab pengangguran. Sistem hubungan industrial yang terbentuk antarpelaku dalam proses produksi barang dan jasa melibatkan unsur pengusaha, pekerja buruh, dan pemerintah. Namun, permasalahan yang terjadi adalah hubungan industrial saat ini masih belum harmonis, seperti: peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), lembaga kerja sama (LKS) bipartit, lembaga kerja sama (LKS) tripartit, peran SP/SB dan asosiasi pengusaha. Peran pemerintah juga diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya pergeseran fungsi sosial dan ekonomi karena meningkatnya penduduk lanjut usia dalam bentuk perlindungan sosial dan biaya pengobatan.

Tingginya Tingkat Kemiskinan. Tingkat kemiskinan menjadi isu di setiap daerah dan penanganannya bersifat multidimensi. Terdapat pola yang relatif sama dalam tren penurunan kemiskinan, yaitu penurunan kemiskinan akan sangat drastis dari di atas 30% menjadi 20%, kemudian menunjukkan perlambatan pada saat menurun dari 20% menuju 10%, dan stagnan pada interval 10-13%. Oleh karena itu, isu kemiskinan tetap menjadi isu strategis untuk diselesaikan di masa yang akan datang. Sumatera Selatan masih memiliki tingkat kemiskinan di atas kemiskinan nasional yaitu sebesar 11,78%, dan **tertinggi kedua** setelah Provinsi Bengkulu di wilayah Sumbagsel. Ada anomali, dimana tingkat kemiskinan tinggi terkonsentrasi di beberapa wilayah kabupaten dengan pendapatan per kapita tinggi terutama daerah dengan SDA yang melimpah, seperti pada ekosistem gambut, dan di Sumatera Selatan masih terdapat wilayah tertinggal dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Selain itu, tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan masih tinggi.

Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan pangan tetapi juga keterjangkauan dan pemanfaatan. Ketersediaan

pangan cukup melimpah namun keterjangkauan dan pemanfaatan pangan masih rendah. Beberapa isu ketersediaan pangan, keterjangkauan/aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan secara global dan daerah, yaitu: (1) Harga pangan dunia (Inflasi pangan) yang tinggi akibat faktor iklim, gangguan pasokan, serta kompetisi penggunaan produk pertanian untuk pangan, pakan, dan bahan bakar akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga cenderung mendorong meningkatnya gizi buruk dan tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga menimbulkan kerentanan pangan; (2) Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian akan berdampak pada berkurangnya lahan pertanian; (3) Sumber daya manusia di sektor pertanian mulai menua, rata-rata petani berusia antara 35-64 tahun dengan tingkat pendidikan rendah; (4) Peningkatan jumlah rumah tangga petani gurem yang menguasai lahan sempit (kurang dari 0,50 ha); (5) Masih tingginya *food loss* dan *food waste* (kehilangan pangan dan sisa pangan) akibat belum maksimalnya teknologi pasca panen, persoalan terkait agrologistik (infrastruktur jalan, fasilitas pendingin, kondisi geografis), dan perilaku konsumen yang tidak tepat dengan menyisakan makanan.

Meski Sumatera Selatan merupakan salah satu lumbung pangan nasional, namun tetap perlu mengantisipasi berbagai fenomena yang dapat mengancam ketahanan pangan daerah. Dari segi keterjangkauan, distribusi pangan perlu dipastikan dapat menjangkau semua daerah dengan harga yang terjangkau. Hal ini perlu diantisipasi mengingat masih adanya daerah-daerah di Sumatera Selatan dengan kondisi jalan belum mantap. Selain itu, adanya dampak perubahan iklim, berupa tidak tentunya musim dan cuaca, berpotensi mempengaruhi jadwal tanam dan panen sehingga muncul risiko gagal tanam atau gagal panen. Terjadinya permasalahan gagal tanam atau gagal panen berpengaruh pula pada kualitas dan kuantitas produksi, termasuk kandungan gizi yang tidak optimal.

Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan. Provinsi Sumatera Selatan masih mengandalkan sumber daya alam sebagai penopang ekonomi dengan sektor unggulan sektor pertanian dan pertambangan batu bara. Perubahan struktur ekonomi dari sektor primer ke sekunder terlihat melambat, indikasinya sektor manufaktur stagnan dalam dua dekade. Oleh karena itu, transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dengan penciptaan nilai tambah perlu dilakukan. Selain itu, Pemerintah Sumatera Selatan perlu mengantisipasi sekaligus mencegah kontraksi ekonomi yang mungkin muncul akibat gejolak eksternal, misalnya karena penurunan permintaan batubara di masa datang.

Perubahan struktur ekonomi dan bauran energi daerah menuju ekonomi hijau akan berdampak, baik positif maupun negatif pada masyarakat Sumatera Selatan. Peran serta keseluruhan pihak sebagai aktor pembangunan sangat diperlukan dalam membahas dan memberikan input terkait rencana dan kebijakan transformasi ekonomi dan transisi energi daerah. Upaya mitigasi yang bisa

dilakukan adalah menyediakan forum konsultasi pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu penting dalam upaya transformasi ekonomi Sumatera Selatan.

Transformasi ekonomi dilakukan sejalan dengan transisi energi sangat penting untuk mengatasi krisis iklim yang sedang terjadi secara global, nasional, maupun regional. Sumatera Selatan mempunyai potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan dengan potensi besar terhadap energi surya, pembangkit listrik tenaga air, angin, dan panas bumi. Sumatera Selatan ditetapkan menjadi Lumbung Pangan dan Lumbung Energi Nasional. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui pemanfaatan batubara, minyak bumi, gas alam, energi panas bumi, gas metan, dan energi terbarukan. Berdasarkan data tahun 2022, produksi batubara Sumatera Selatan mencapai 90 juta ton atau sebesar 13% dari total produksi batubara nasional. Realisasi bauran energi terbarukan di Sumatera Selatan pada tahun 2022 mencapai 23,85%. Namun, seiring dengan berbagai komitmen Pemerintah Indonesia baik di level internasional maupun nasional terkait target pengurangan emisi, pemerintah terus melakukan pengkajian potensi pemanfaatan energi terbarukan agar secara bertahap dapat bertransisi dari penggunaan energi fosil, termasuk batubara, menuju penggunaan energi bersih.

Pemerataan dan Kesenjangan Antarwilayah. Kesenjangan antarwilayah di Sumatera Selatan masih tergolong tinggi. Hal ini tercermin dari nilai **Indeks Entropi Theil** pada tahun 2021 (data mutakhir) sebesar 1,345, masih lebih tinggi dari provinsi lain di Sumbagsel. Kondisi ini disebabkan oleh terpusatnya sumber daya penggerak ekonomi, seperti ketidakmerataan persebaran penduduk, tenaga kerja terdidik dan terampil, investasi dan kredit perbankan, serta sarana dan prasarana. Selain itu, kondisi wilayah dengan topografi yang sulit seperti daerah pengunungan dan daerah perairan/rawa. Wilayah di bukit barisan masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, demikian pula wilayah di Pantai Timur Sumatera Selatan terkendala moda transportasi, dan terbatasnya sarana prasarana sehingga menimbulkan inefisiensi.

Pembangunan infrastruktur regional dan/atau lintas wilayah harus diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata. Terdapat wilayah yang memiliki indeks aksesibilitas yang rendah dan terdapat daerah yang masih sulit dijangkau moda transportasi. Selain itu, masih terdapat *gap* kinerja Infrastruktur Jaringan Jalan (Kondisi jalan provinsi tergolong mantap sebesar 88,15%). Kemudian, masih terdapat wilayah yang belum terlayani jaringan listrik dan tidak terdapat jangkauan sinyal telepon dan akses internet. Tidak meratanya kualitas infrastruktur berkualitas berpotensi untuk menghambat distribusi pangan, logistik, dan pertumbuhan Sumatera Selatan secara regional.

Rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah Dalam Mendorong Pengembangan Wilayah. Isu kemandirian daerah mengemuka setelah dua dekade otonomi daerah. Sebagian besar daerah masih menggantungkan pendapatan dari Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) dengan kontribusi rata-rata hampir 90% terhadap total pendapatan daerah, dan selebihnya bersumber dari kontribusi PAD. Kondisi ini terlihat dari indeks kemandirian fiskal di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong belum mandiri. Dari 17 kabupaten/kota hanya Kota Palembang yang termasuk dalam kategori **menuju mandiri**, sementara kabupaten/kota lainnya masih belum mandiri. Masih relatif tingginya proporsi belanja operasi, yaitu rata-rata 60% dari total pengeluaran menyebabkan celah fiskal untuk belanja modal menjadi sempit.

Pembagian pendapatan dari dana bagi hasil yang relatif masih kecil bagi daerah menjadi isu ke depan dalam meningkatkan pendapatan, dan kreativitas pemerintah daerah dalam mencari sumber pendapatan, serta peningkatan efisiensi dan alokasi belanja berkualitas akan menjadi faktor kunci dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kedepannya, Sumatera Selatan dapat memanfaatkan berbagai skema pendanaan inovatif, seperti penyaluran dana lingkungan hidup untuk menjalankan berbagai program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengelolaan perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi keanekaragaman hayati, dan revitalisasi ekonomi masyarakat serta berbagai isu strategis daerah lainnya secara mandiri. Selain itu, terdapat pula peluang untuk memperoleh pendanaan inovatif dari pasar karbon domestik. Potensi ekonomi dari perdagangan karbon di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari Rp8.000 triliun (USD565,9 miliar) dari sektor kehutanan, mangrove, dan gambut. Sebagai ekosistem yang mampu menyimpan karbon cukup besar (18-60% dari total bobot keringnya), gambut memiliki potensi perdagangan karbon, terutama melalui skema pembayaran berbasis kinerja. Hasil pungutan karbon juga dapat digunakan untuk pembiayaan pemulihan dan perlindungan ekosistem gambut. Mengingat luasnya ekosistem gambut di Sumatera Selatan, maka Sumatera Selatan memiliki potensi berkontribusi dalam pasar karbon domestik untuk memperoleh sumber pendanaan inovatif tersebut.

Reformasi Birokrasi. Transformasi tata kelola dapat dilihat dari indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dan indeks pelayanan publik. Tata kelola birokrasi yang telah dilakukan Provinsi Sumatera Selatan masih perlu ditingkatkan karena Indeks Keterbukaan Informasi dan Integritas di bawah nasional. Indeks SPBE menunjukkan sebagian besar kabupaten/kota masih terkategori C atau CC, dan hanya Kabupaten Muara Enim yang terkategori B. Ke depan diperlukan regulasi sebagai aturan main, kelembagaan efektif, serta meritokrasi dan integritas, dimana

kelembagaan yang efektif akan mendorong pelayanan publik yang berkualitas dan begitu pun sebaliknya.

Era digitalisasi mendorong kemudahan akses pelayanan dan keterbukaan informasi sehingga reformasi birokrasi menuntut pelayanan yang terintegrasi antar sektor dengan manajemen ASN yang strategis dan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menegakkan tata kelola yang baik.

3.2.4 Tinjauan terhadap Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan

RPJPD Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Selatan. RPJPD Provinsi Sumatera Selatan memuat strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang untuk mewujudkan pembangunan yang merata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100.4.4/110/SJ tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, serta Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2044, muatan RTRW Provinsi Sumatera Selatan perlu diacu dan diselaraskan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2045. Dengan demikian, untuk menjaga kesinambungan antara muatan dokumen rencana daerah dengan dokumen rencana tata ruang daerah, perlu dilakukan tinjauan terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 – 2044, sebagai upaya internalisasi muatan – muatan rencana struktur ruang dan pola ruang. Sesuai peraturan perundang-undangan penyelarasan dokumen RTRW terhadap dokumen RPJPD, dilakukan tiga langkah penyelarasan muatan rencana yaitu: (1) penyelarasan visi misi RPJPD dengan tujuan penataan ruang dalam RTRW; (2) penyelarasan arah kebijakan RPJPD dengan strategi penataan ruang dalam RTRW; dan (3) penyelarasan sasaran pokok RPJPD dengan indikasi program utama dalam RTRW. Adapun hasil tinjauan muatan RTRW dalam tiga langkah penyelarasan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Penyelarasan Tujuan Penataan Ruang terhadap Visi dan Misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, “ruang” dijelaskan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan,

dan memelihara kelangsungan hidupnya. Adapun “tata ruang” dijelaskan sebagai wujud struktur dan pola ruang sebagai bagian yang diatur dalam dokumen RTRW. Tujuan RTRW dimaksudkan untuk diacu dalam perumusan visi dan misi RPJPD. Penyelarasan muatan tujuan penataan ruang terhadap muatan visi dan misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2045 dapat dirumuskan seperti pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Penyelarasan RTRW terhadap RPJPD: Langkah 1, Penyelarasan Tujuan Penataan Ruang terhadap Visi dan Misi RPJPD

Tujuan Penataan Ruang (Tujuan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044)	Muatan Penyelarasan terhadap Visi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045	Muatan Penyelarasan terhadap misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045
Mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang Produktif, Berkualitas dan Harmonis Berbasis Potensi Sumber daya Lokal Menuju Provinsi Maju, Unggul dan Terdepan Secara Berkelanjutan	Sumatera Selatan Maju, Terdepan dan Berkelanjutan	Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia Berkarakter dan Berdaya Saing.
		Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional.
		Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Berkualitas.
		Memantapkan Ketahanan Daerah Tangguh, Berkualitas dan Berkelanjutan.
		Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.
		Mewujudkan Pemerataan Antardaerah dan Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan.
		Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.

Tujuan Penataan Ruang (Tujuan RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044)	Muatan Penyelarasan terhadap Visi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045	Muatan Penyelarasan terhadap misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045
		Menguatkan Kemandirian dan Inovasi Pembiayaan Pembangunan.

Tujuan RTRW Provinsi Sumatera Selatan memiliki beberapa poin utama yaitu mewujudkan ruang yang produktif, Berkualitas dan Harmonis Berbasis *“Potensi Sumber daya Lokal”* menuju Provinsi *“maju, unggul, dan terdepan secara berkelanjutan”*. Masing-masing muatan tersebut dapat diakomodasi ke dalam visi RPJPD dalam mewujudkan pembangunan Sumatera Selatan yang maju, unggul dan terdepan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Sejalan dengan itu, misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dapat mengakomodasi muatan lingkungan, perekonomian dan sosial kemasyarakatan sebagai dasar dalam mewujudkan tujuan penataan ruang dan visi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan.

b) Penyelarasan Kebijakan dan Strategi RTRW terhadap Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045

Sesuai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, kebijakan penataan ruang Provinsi Sumatera Selatan merupakan upaya mewujudkan tujuan penataan ruang. Untuk itu, terdapat 7 (tujuh) kebijakan tata ruang Provinsi Sumatera Selatan, yang masing – masing dioperasionalkan melalui beberapa strategi penataan ruang untuk kemudian diacu dalam arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045. Pemetaan dan penyelarasan kebijakan tata ruang dan strategi penataan ruang dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2024 - 2044 terhadap muatan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2045 dapat dirumuskan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Penyelarasan RTRW terhadap RPJPD: Langkah 2, Penyelarasan Kebijakan dan Strategi Tata Ruang terhadap Arah Kebijakan RPJPD

No	Kebijakan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044	Strategi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044	Muatan Penyelarasan terhadap Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045
1	Pengembangan sistem pusat permukiman secara berhierarki, terpadu dan berkualitas	Memantapkan dan meningkatkan fungsi PKN dan PKW	Peningkatan infrastruktur dasar sanitasi dan infrastruktur terutama di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi dalam rangka mendukung pusat pertumbuhan.
		Mengembangkan PKL dan sentra-sentra produksi komoditas unggulan sumber daya alam dengan memperhatikan keanekaragaman hayati.	Identifikasi produk unggulan yang berkelanjutan dalam menuju hilirisasi produk.
		Meningkatkan peran PKL sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.	Penyelarasan rencana pembangunan dan tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
		Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan/perdesaan dan antar kawasan perkotaan/perdesaan	Identifikasi potensi <i>green economy</i> , <i>blue economy</i> , <i>bio economy</i> , dan <i>circular economy</i> di seluruh wilayah.

No	Kebijakan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044	Strategi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044	Muatan Penyelarasan terhadap Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045
		dengan sentra produksi komoditas unggulan sumber daya alam serta antar kawasan perkotaan/perdesaan dengan wilayah sekitarnya, termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil.	
		Mengembangkan prasarana permukiman secara berkelanjutan yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di wilayah sekitarnya.	Peningkatan infrastruktur dasar sanitasi dan infrastruktur terutama di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi dalam rangka mendukung pusat pertumbuhan.
2	Pengembangan dan peningkatan konektivitas serta aksesibilitas sistem jaringan prasarana wilayah yang berkualitas secara terpadu	Mengembangkan keterkaitan sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, laut, udara dan kereta api yang menghubungkan antar kawasan perkotaan dan Kawasan Perdesaan dengan konsep ramah lingkungan dan penggunaan transportasi massal.	Peningkatan infrastruktur dasar sanitasi dan infrastruktur terutama di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi dalam rangka mendukung pusat pertumbuhan.

No	Kebijakan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044	Strategi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044	Muatan Penyelarasan terhadap Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045
		Mengembangkan dan memantapkan jaringan transportasi dan akses sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, laut, udara dan kereta api antar pusat kegiatan pelayanan.	Peningkatan infrastruktur dasar sanitasi dan infrastruktur terutama di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi dalam rangka mendukung pusat pertumbuhan.
		Mengembangkan dan memantapkan pelabuhan untuk mendukung pelayaran regional, nasional, dan internasional.	Peningkatan infrastruktur dasar sanitasi dan infrastruktur terutama di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi dalam rangka mendukung pusat pertumbuhan.
		Mengembangkan dan memantapkan bandar udara untuk mendukung konektivitas regional, nasional, dan internasional.	Peningkatan infrastruktur dasar sanitasi dan infrastruktur terutama di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi dalam rangka mendukung pusat pertumbuhan.
		Mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan energi secara optimal serta mewujudkan	Pengembangan teknologi di bidang energi dalam mendukung transisi energi yang berkeadilan

No	Kebijakan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044	Strategi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044	Muatan Penyelarasan terhadap Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045
		keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik dalam mewujudkan provinsi sebagai lumbung energi nasional.	menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan.
		Mengembangkan jaringan telekomunikasi di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan pesisir.	Peningkatan infrastruktur dasar sanitasi dan infrastruktur terutama di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi dalam rangka mendukung pusat pertumbuhan.
		Mengembangkan jaringan prasarana sistem penyediaan air minum pada kawasan permukiman.	Peningkatan infrastruktur dasar sanitasi dan infrastruktur terutama di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi dalam rangka mendukung pusat pertumbuhan.
		Mengembangkan jaringan prasarana sumber daya air pada kawasan pertanian dan perikanan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.	Pengembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas SDA di bidang pangan dan air.

No	Kebijakan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044	Strategi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044	Muatan Penyelarasan terhadap Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045
		Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan jaringan prasarana lainnya di seluruh kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan pesisir.	(1). Peningkatan Pembangunan infrastruktur dasar bidang pendidikan dan kesehatan di semua wilayah terutama di daerah terpencil dan tertinggal. (2). Peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan keterampilan.
3	Pemantapan kawasan berfungsi lindung secara berkelanjutan	Menetapkan kawasan berfungsi lindung darat dan perairan sesuai dengan kondisi ekosistemnya.	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut.
		Mempertahankan luasan kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut.
		Melindungi dan melestarikan	Peningkatan perlindungan dan

No	Kebijakan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044	Strategi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044	Muatan Penyelarasan terhadap Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045
		keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa pada kawasan berfungsi lindung.	pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut.
		Memulihkan dan memelihara kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi serta menjaga keseimbangan ekosistem wilayah.	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut.
		Menetapkan kawasan konservasi perairan sesuai potensi luas wilayah perairan.	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut.
4	Pengembangan fungsi budidaya secara produktif, terpadu dan berkelanjutan berbasis potensi wilayah	Mengembangkan dan meningkatkan kawasan pertanian serta mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan mendukung ketahanan pangan nasional.	Pengembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas SDA di bidang pangan dan air.
		Mengembangkan potensi sektor perikanan yang didukung teknologi	Pengembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas SDA di bidang pangan dan air.

No	Kebijakan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044	Strategi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044	Muatan Penyelarasan terhadap Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045
		tepat guna dan ramah lingkungan.	
		Mengembangkan potensi sektor pertambangan dan energi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.	Pengembangan teknologi di bidang energi dalam mendukung transisi energi yang berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan.
		Mengembangkan kawasan peruntukan industri didukung teknologi tepat guna dan ramah lingkungan serta berbasis mandiri. energi dan konservasi gambut dan mangrove.	Peningkatan iklim investasi bidang perdagangan, investasi, teknologi, dan digitalisasi. ekonomi bagi seluruh sektor perekonomian (UMKM, Koperasi, BUMD, BUMDes).
		Mengembangkan kawasan pariwisata unggulan termasuk obyek wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berciri lokal.	Pengembangan daya tarik daerah, terutama dalam bidang pariwisata, budaya, dan investasi.
		Meningkatkan produktivitas sumber daya alam dan komoditas unggulan serta pengembangan	Identifikasi produk unggulan yang berkelanjutan dalam menuju hilirisasi produk.

No	Kebijakan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044	Strategi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044	Muatan Penyelarasan terhadap Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045
		keterkaitan hulu dan hilir.	
5	Pengembangan kawasan strategis berbasis potensi wilayah	Menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis klaster pengembangan wilayah.	Penyelarasan rencana pembangunan dan tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
		Menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi pada koridor pusat industri pengolahan dan pusat industri jasa hasil pengolahan komoditas unggulan sumber daya alam.	Peningkatan iklim investasi bidang perdagangan, investasi, teknologi, dan digitalisasi. ekonomi bagi seluruh sektor perekonomian (UMKM, Koperasi, BUMD, BUMDes).
		Menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi lingkungan hidup pada wilayah yang perlu dijaga kelestariannya.	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut.
6	Pemanfaatan ruang secara produktif, harmonis dan berkelanjutan	Memanfaatkan, mengoptimalkan, dan membatasi pemanfaatan ruang	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman

No	Kebijakan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044	Strategi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044	Muatan Penyelarasan terhadap Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045
		pada kawasan berfungsi lindung.	hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut.
		Memanfaatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang pada kawasan berfungsi budidaya.	Penyelarasan rencana pembangunan dan tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
		Menguatkan nilai-nilai budaya lokal masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya termasuk di pesisir dan pulau-pulau kecil.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan keterampilan.
7	Pengendalian fungsi lindung dan fungsi budidaya secara berkelanjutan	Mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan berfungsi lindung dan fungsi budidaya.	Penyelarasan rencana pembangunan dan tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
		Mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan di kawasan rawan bencana dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Penyelarasan rencana pembangunan dan tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
		Mengembangkan dan menata zona	Penyelarasan rencana pembangunan dan tata

No	Kebijakan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044	Strategi Penataan Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044	Muatan Penyelarasan terhadap Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045
		penyangga sebagai pemisah dan area interaksi antara kawasan lindung dan kawasan budidaya.	ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
		Membatasi pengembangan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi lahan kawasan lindung.	Penyelarasan rencana pembangunan dan tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.

Muatan kebijakan penataan ruang dalam Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan yang perlu diacu dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2045 meliputi arah kebijakan pengembangan sistem pusat permukiman, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan kawasan strategis serta pemanfaatan ruang dengan memperhatikan keberlanjutan. Dalam rangka untuk pengembangan ekonomi maka perlu dilakukan peningkatan konektivitas antar bagian wilayah untuk memfasilitasi mobilitas dan pengembangan sektor dan potensi unggulan daerah.

Selain itu, penyediaan layanan dasar seperti konektivitas jalan, air bersih, sistem drainase, dan energi harus diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pengembangan infrastruktur transportasi, termasuk jaringan jalan yang terintegrasi, simpul transportasi darat, air dan udara menjadi langkah penting dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, kegiatan bermukim, serta pengembangan kawasan strategis provinsi.

c) Penyelarasan Indikasi Program Utama RTRW terhadap Sasaran Pokok RPJPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, muatan tata ruang diwujudkan melalui struktur dan pola ruang. Adapun struktur ruang dijelaskan sebagai susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100.4.4/110/SJ tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah bahwa pada langkah ketiga penyelarasan antara RTRW dan RPJPD adalah dengan melakukan penyelarasan antara indikasi program utama RTRW terhadap sasaran pokok RPJPD. Pada indikasi program utama RTRW terdiri dari perwujudan struktur ruang dan pola ruang. Muatan struktur ruang dalam Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Selatan dijelaskan melalui arah pemanfaatan struktur ruang dan indikasi program struktur ruang, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 3 Penyelarasan RTRW terhadap RPJPD: Langkah 3, Penyelarasan Indikator Utama RTRW (Struktur Ruang) terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW						Muatan Sasaran Pokok dalam RPJPD	
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan dalam Periode RPJPD					
				I	II	III	IV		
1	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman								
a.		Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Palembang – Betung (Kab.Banyuasin) – Indralaya (Kab. Ogan Ilir) - Kayu Agung (Kab. Ogan Komering Ilir)	v	v	v	v	Terwujudnya Perkotaan dan	
b.		Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Prabumulih; Muara Enim; Lubuklinggau; Sekayu; Baturaja; Lahat; Kayu Agung.	v	v	v	v	Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan	
c.		Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	PKL Peninjauan; PKL Pengandonan; PKL Sungai Lumpur; PKL Air Sugihan; PKL Tugumulyo; PKL Muara Beliti; PKL Muara Lakitan; PKL Sungai Lilin; PKL Bayung Lencir; PKL Babat Toman; PKL Sungsang; PKL Pangkalan Balai; PKL Gumawang; PKL Martapura; PKL Muaradua; PKL Indralaya; PKL Tebingtinggi; PKL Ulu Musi; PKL Talang	v	v	v	v		

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW							Muatan Sasaran Pokok dalam RPJPD
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan dalam Periode RPJPD					
				I	II	III	IV		
			Ubi/Pendopo; PKL Muara Rupit; dan PKL Pagar Alam.						
2	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi								
a.		Perwujudan Sistem Jaringan Jalan.						Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional	
		Pemantapan dan Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Arteri Primer.	Seluruh ruas jalan arteri primer eksisting; Kota Palembang; Kota Lubuklinggau.	v	v	v	v		
		Pemantapan dan Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Kolektor Primer.	Seluruh ruas jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) dan Kolektor Primer Dua (JKP-2) eksisting; Jln. Akses Jalan Pesisir Timur Kabupaten OKI (Lempuing Jaya - Cengal - Tulung Selapan – Sungsang); Air Sugihan – Tanjung Tapa; Tanjung Tapa – Sungai Lumpur.	v	v	v	v		
		Pemantapan dan Pengembangan Sistem Jalan Tol.	Kota Palembang; Kab. Ogan Ilir; Kota Prabumulih; Kab. Muara Enim; Kab. Lahat; Kab. Musi Rawas;	v	v	v	v		

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW						Muatan Sasaran Pokok dalam RPJPD
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan dalam Periode RPJPD				
				I	II	III	IV	
			Kota Lubuklinggau; Kab. Banyuasin; Kab. Musi Banyuasin.					
		Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Jalan Tol.	Provinsi Sumatera Selatan.		v	v	v	
		Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Jalan Non Tol.	Provinsi Sumatera Selatan.		v	v	v	
		Pengembangan <i>Exit</i> Tol pada Ruas Jalan Tol.	Provinsi Sumatera Selatan.		v	v	v	
		Pemantapan dan Pengembangan Terminal Penumpang, Terminal Barang, dan Jembatan Timbang.	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.	v	v	v		
		Pengembangan dan Peningkatan Kualitas	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.		v	v	v	

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW						Muatan Sasaran Pokok dalam RPJPD
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan dalam Periode RPJPD				
				I	II	III	IV	
		Terminal Penumpang, Terminal Barang, dan Jembatan Timbang.						
b.		Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api.	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.	v	v	v	v	
c.		Perwujudan Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.	v	v	v	v	
d.		Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut.	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.	v	v	v	v	
e.		Penataan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus.	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.	v	v	v	v	
1. Perwujudan Sistem Jaringan Energi								

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW						Muatan Sasaran Pokok dalam RPJPD
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan dalam Periode RPJPD				
				I	II	III	IV	
a.		Perwujudan Sistem Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.	v	v	v	v	Terwujudnya Berketahanan Energi, Air dan Kemandiran Pangan
b.		Perwujudan Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.	v	v	v	v	
4	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi		Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.	v	v	v	v	Terwujudnya Transformasi Digital
5	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air		Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	v	v	v	v	Terwujudnya Berketahanan Energi, Air dan Kemandiran Pangan
6	Perwujudan Sistem Jaringan		Seluruh Wilayah Sumatera Selatan	v	v	v	v	Terwujudnya Perkotaan

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW						Muatan Sasaran Pokok dalam RPJPD
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan dalam Periode RPJPD				
				I	II	III	IV	
	Prasarana Lainnya							dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan

Sesuai muatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sasaran pokok pembangunan daerah dalam RPJPD dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan, dan diharuskan memiliki indikator kuantitatif yang dapat menilai kinerja pembangunan sesuai misi yang diacu. Berdasarkan penjelasan tabel di atas maka telah dilakukan penyelarasan antara indikasi program struktur ruang Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan ke dalam sasaran pokok RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 dengan mengacu pada waktu pelaksanaan program di dalam Ranperda RTRW Provinsi Sumatera Selatan meliputi perwujudan sistem pusat permukiman, pembangunan sistem jaringan transportasi, pengembangan sistem jaringan energi, pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, pengembangan dan pembangunan sistem jaringan sumber daya air serta prasarana lainnya.

Selanjutnya, sesuai penjelasan dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pola ruang dijelaskan sebagai distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Adapun muatan pola ruang dalam Perda RTRW Provinsi Sumatera Selatan dijelaskan melalui arah pemanfaatan pola ruang dan indikasi program pola ruang, seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 4 Penyalarsan RTRW terhadap RPJPD: Langkah 3. Penyalarsan Indikator Utama RTRW (Pola Ruang) terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW						Muatan Sasaran Pokok dalam RPJPD
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan dalam Periode RPJPD				
				I	II	III	IV	
A. Perwujudan Kawasan Lindung								
1.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya.		Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.	v	v	v	v	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas.
2.	Kawasan Perlindungan Setempat.		Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.	v	v	v	v	Terwujudnya Berketahanan Energi, Air dan Kemandiran Pangan.
3.	Kawasan Konservasi.		Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.	v	v	v	v	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas.

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW						Muatan Sasaran Pokok dalam RPJPD
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan dalam Periode RPJPD				
				I	II	III	IV	
4.	Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan.		Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.	v	v	v	v	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas.
5.	Kawasan Ekosistem Mangrove.		Wilayah Pesisir Sumsel.	v	v	v	v	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas.
6.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).		Kab. Banyuasin dan Kab. OKI.	v	v	v	v	Terwujudnya Berketahanan Energi, Air dan Kemandiran Pangan.
B. Perwujudan Kawasan Budidaya								
1.	Kawasan Hutan Produksi.		Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.	v	v	v	v	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau.
2.	Kawasan Pertanian.		Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.	v	v	v	v	Terwujudnya Berketahanan Energi,

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW						Muatan Sasaran Pokok dalam RPJPD
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan dalam Periode RPJPD				
				I	II	III	IV	
								Air dan Kemandiran Pangan.
3.	Kawasan Perikanan.							
		Perwujudan Kawasan Perikanan Tangkap.	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.	v	v	v	v	Terwujudnya Berketahanan Energi, Air dan Kemandiran Pangan.
		Perwujudan Kawasan Perikanan Budidaya.	Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.	v	v	v	v	
4.	Kawasan Pertambangan dan Energi.		Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.	v	v	v	v	Terwujudnya Berketahanan Energi, Air dan Kemandiran Pangan.
5.	Kawasan Peruntukan Industri.		Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.	v	v	v	v	Terwujudnya Pengembangan IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi.
6.	Kawasan Pariwisata.		Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.	v	v	v	v	Terwujudnya Pengembangan IPTEK,

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW						Muatan Sasaran Pokok dalam RPJPD
		Arah Pemanfaatan Ruang / Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan dalam Periode RPJPD				
				I	II	III	IV	
								Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi.
7.	Kawasan Permukiman.		Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.	v	v	v	v	Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan.
8.	Kawasan Transportasi.		Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.	v	v	v	v	Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional.
9.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan.		Seluruh Wilayah Sumatera Selatan.	v	v	v	v	Terwujudnya Ketangguhan Daerah.

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi

Perumusan Visi Provinsi Sumatera Selatan selaras dengan visi RPJPN 2025-2045. Visi Indonesia Emas 2045 menjadi **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan** dengan delapan misi (agenda) pembangunan yaitu Transformasi Sosial; Transformasi Ekonomi; Transformasi Tata Kelola; Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan Kestinambungan Pembangunan.

Tabel 4. 1 Keselarasan Visi dan Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045

Visi RPJPN 2025-2045	Visi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045	Penjelasan Visi
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERSATU, BERDAULAT, MAJU DAN BERKELANJUTAN	SUMATERA SELATAN MAJU, TERDEPAN DAN BERKELANJUTAN	
Misi RPJPN 2025-2045	Misi RPJPD 2025-2045	
Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia Berkarakter dan Berdaya Saing	Maju
Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional	Maju & Terdepan
Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Berkualitas	Maju
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan Ketahanan Daerah Tangguh, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Berkelanjutan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Berkelanjutan

Visi RPJPN 2025-2045	Visi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045	Penjelasan Visi
Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Pemerataan Antardaerah dan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan	Maju & Terdepan
Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Berkelanjutan
Kesinambungan Pembangunan	Menguatkan Kemandirian dan Inovasi Pembiayaan Pembangunan	Berkelanjutan

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang (*clarity of direction*). Dalam mewujudkan pembangunan jangka panjang daerah diperlukan pemahaman dan perencanaan strategis untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam rangka mencapai pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan dalam jangka waktu yang lebih lama dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, tantangan 20 tahun mendatang, modal dasar yang dimiliki, dan kesepakatan seluruh pemangku kepentingan serta nilai-nilai kunci (*core values*) dengan memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Sumatera Selatan merupakan provinsi yang memiliki sumber daya alam yang mumpuni terutama pertanian dan energi sehingga menjadi salah satu provinsi sebagai lumbung pangan dan energi nasional. Masyarakat Sumatera Selatan juga dikenal sebagai masyarakat yang memiliki warisan budaya Nusantara yang mendunia dengan Kerajaan Sriwijaya. Nilai-nilai **kearifan lokal** yang tertanam di masyarakat Sumatera Selatan sejak Kerajaan Sriwijaya seperti **bersifat terbuka** sehingga menjadi kerajaan maritim yang terkemuka, dan budaya **gotong royong** menjadi salah satu modal sosial bagi masyarakat Sumatera Selatan. Jiwa kepemimpinan juga tergambar dari Prasasti Talang Tuo yang menegaskan bahwa Kerajaan Sriwijaya memiliki jiwa **kepemimpinan** yang taat beragama, **adil**, dan **bijaksana**.

Dalam Kitab Simbur Cahaya diatur tentang pola dan tata kelola kehidupan madani. Nilai-nilai tersebut terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang mengutamakan nilai **kesetaraan antara laki-laki dan perempuan** (kesetaraan gender), dan **kelestarian alam**. Masyarakat di perdesaan sangat patuh terhadap larangan membakar hutan ketika berladang serta larangan *nubai* sungai (membuang tuba ke sungai agar ikan-ikannya mabuk dan mati).

Keberadaan sumber daya alam yang melimpah dan akar budaya yang sangat kuat menjadi pilar penting bagi pembangunan daerah Sumatera Selatan untuk tumbuh menjadi salah satu provinsi maju dan terdepan serta berkelanjutan. Potensi sumber daya alam dan sosial budaya yang mumpuni perlu dukungan SDM unggul dan terdepan, dan berkomitmen dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati yang dicerminkan dengan pembangunan berbasis ekonomi hijau serta didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik dari sisi perekonomian maupun kehidupan sosial masyarakatnya sehingga dapat tercipta perekonomian yang maju. Untuk itu, Visi Pembangunan Jangka Panjang Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 adalah:

“SUMATERA SELATAN MAJU, TERDEPAN DAN BERKELANJUTAN”

Visi pembangunan perlu diberikan makna untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan filosofis yang terkandung sehingga seluruh pihak yang terkait dan berkepentingan dapat secara sinergis, harmonis, dan optimal dalam memberikan kontribusi pencapaian visi.

Maju. Maju diartikan sebagai suatu kondisi dimana Sumatera Selatan sebagai provinsi yang maju ekonominya, berbasiskan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumatera Selatan menjadi provinsi berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil sehingga memiliki daya saing yang tinggi di tingkat nasional, fondasi ekonomi yang kuat terhadap perubahan global dan berkeadilan. **Berdaya:** Sumatera Selatan berdaya saing didukung oleh kemampuan untuk mandiri dalam mencukupi kebutuhannya baik papan maupun sandang. **Modern:** memiliki infrastruktur yang maju, tata kelola yang transparan, pemerintah yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sumatera Selatan mampu memenuhi layanan masyarakat dengan teknologi dan layanan terkini berbasis sistem informasi. **Inovatif:** memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi di berbagai sektor, dan mampu menciptakan nilai tambah produk berbasis sumber daya alam sehingga berdaya saing tinggi di pasar global. **Tangguh:** Sumatera Selatan memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan dan gejolak eksternal dengan kemampuan yang kuat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. **Adil:** kemajuan pembangunan Sumatera Selatan

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata baik laki-laki dan perempuan secara merata, terutama dengan memperhatikan kepentingan kelompok marginal, seperti alokasi dan distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan bekerja, dan pendidikan tanpa adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu.

Terdepan. Terdepan bermakna suatu kondisi Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi terbaik di Indonesia baik dari **sisi ekonomi**, lingkungan, maupun pembangunan sosial. Dalam perspektif ekonomi kata terdepan dimaknai bahwa perekonomian Sumatera Selatan memiliki **pertumbuhan ekonomi**, dan **pendapatan per kapita** menjadi salah satu yang terbaik di tingkat nasional dengan memanfaatkan sumber daya alam dan melakukan transformasi ekonomi dan energi baru terbarukan. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan hilirisasi produk unggulan sektor perkebunan dan pertambangan sehingga mampu menciptakan nilai tambah. Aktivitas ekonomi yang tinggi diarahkan seimbang dalam mendukung pembangunan sosial yang terefleksi dalam peningkatan **kualitas sumber daya manusia** secara inklusif serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara lestari.

Berkelanjutan. Berkelanjutan diartikan sebagai suatu kondisi Sumatera Selatan sebagai provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dari sisi **ekonomi**: pertumbuhan ekonomi yang seimbang yang mengedepankan prinsip pertumbuhan ekonomi hijau (*green growth*) yang rendah karbon, efisien terhadap sumber daya, dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi disertai berkurangnya disparitas antarwilayah, antar golongan/kelompok. **Sosial**: kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan, pendidikan yang prima. **Lingkungan**: penggunaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kualitas lingkungan asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, sampah serta kondisi hutan, sungai, danau, laut, dan gambut terjaga dengan baik.

Tabel 4. 2 Indikator 5 Sasaran Visi

No	Sasaran Visi	Baseline 2025	Sasaran 2045
1	Peningkatan Pendapatan Per Kapita		
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	78,68 - 79,03	498,40 - 585,54
	b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	20,19	56,16
	c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	17,86-17,95	23,66–24,82

No	Sasaran Visi	Baseline 2025	Sasaran 2045
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan		
	a. Tingkat Kemiskinan (%)	9,37-10,37	0,21-0,71
	b. Rasio gini (Indeks)	0,316-0,320	0,270-0,321
	c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	3,06	3,56
	d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30 – 5,50	5,47 – 6,77
3.	Kepemimpinan		
	a. Indeks Daya Saing Daerah	3,2	5,0
4.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
	Indeks Modal Manusia	0,53	0,69
5	Penurunan Emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>		
	i. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	69,97	97,29
	ii. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	68,19	73,26

4.2 Misi

Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi aktif masyarakat, koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan implementasi yang berhasil dan berkelanjutan. Dengan upaya yang terarah dan sinergi semua pihak, diharapkan visi ini dapat tercapai dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh. Misi Sumatera Selatan mencakup tiga domain transformasi, yaitu Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola. Dalam rangka mewujudkan Visi Provinsi Sumatera Selatan menjadi daerah yang Maju, Terdepan dan Berkelanjutan sampai Tahun 2045, Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia Berkarakter dan Berdaya Saing

Mewujudkan transformasi sosial untuk sumber daya manusia berkarakter dan berdaya saing global di Provinsi Sumatera Selatan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun keterampilan. Misi ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan kualitas kehidupan masyarakat diarahkan untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Misi ini diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing global. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang memiliki

kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan, perubahan teknologi, dan tuntutan zaman. Sumber daya manusia yang berkarakter adalah sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai moral dan etika yang kuat berdasarkan agama dan budaya. Sumber daya manusia yang berdaya saing adalah sumber daya manusia yang mampu bersaing, berinovasi, dan meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tantangan pembangunan di tingkat nasional maupun internasional. Aspek penting pada misi ini adalah menciptakan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta pelatihan dan keterampilan yang berkualitas pada masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di masa depan, Sumatera Selatan perlu menyiapkan berbagai strategi dalam meningkatkan resiliensi. Selain itu, menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan sumber daya manusia sehingga dapat menjadi masyarakat yang produktif, berkarakter, dan berdaya saing.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional

Transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang mapan dan menjadi pusat pertumbuhan regional yang mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu melakukan berbagai upaya, antara lain: (1) meningkatkan infrastruktur dan konektivitas; (2) mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial; dan (3) menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, agenda ini juga bertujuan menjadikan perekonomian Sumatera Selatan yang memiliki struktur yang kokoh dan berkelanjutan. Untuk mencapai agenda ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu melakukan berbagai upaya, antara lain: (1) meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha dan produk melalui peningkatan kapasitas SDM, akses terhadap modal penghidupan, inovasi iptek, ekonomi produktif, dan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) mengelola sumber daya alam secara bijak untuk keberlanjutan pembangunan; (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing nasional dan global; dan (4) meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui restorasi dan insentif jasa lingkungan. Aspek penting pada misi ini adalah mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur dasar dan transportasi yang terintegrasi dan berkualitas, serta mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi tinggi, seperti pertanian, industri pengolahan, ekonomi biru, ekonomi kreatif, badan usaha pemerintah, UMKM dan koperasi, perdagangan, dan pariwisata alam, sejarah dan budaya. Tentunya perlu dukungan transformasi digital,

integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki letak strategis yang didukung oleh sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara, ini berpotensi mendorong peningkatan daya saing daerah sehingga mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi perdagangan seperti Pelabuhan Laut dan Kereta Api di Sumatera Selatan dapat mendorong percepatan akses mobilitas ekonomi dan perdagangan dari dan ke dalam kawasan yang akan memberikan nilai tambah dan menciptakan *multiplier effect* pada perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Dengan dukungan akses transportasi dan komunikasi akan mendorong para pelaku usaha pada sektor-sektor potensial untuk terus berkembang dan berkelanjutan.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Berkualitas

Mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas memiliki makna sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik dalam melayani dan memenuhi aspirasi masyarakat, menyelenggarakan pembangunan, dan menegakkan hukum dan ketertiban, serta memajukan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Transformasi tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang baik harus mampu mencapai tujuannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan berkarakter dalam konteks ini bermakna pemerintahan yang menjunjung nilai-nilai luhur, seperti kejujuran, keadilan, dan kemakmuran. Tata kelola yang berkualitas harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pemerintahan juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Pemerintahan berkualitas dalam konteks ini bermakna pemerintahan yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi kompetensi maupun integritas. Pemerintahan yang berkualitas harus memiliki aparatur yang profesional dan berintegritas tinggi. Aparatur pemerintahan juga harus memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Aspek penting pada misi ini adalah menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis dan partisipatif, serta meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah dengan membangun regulasi tata kelola berintegritas dan adaptif.

4. Memantapkan Ketahanan Daerah Tangguh, Berkualitas, dan Berkelanjutan

Ketahanan daerah tangguh, berkualitas, dan berkelanjutan adalah kondisi suatu daerah yang mampu menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan dan ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar daerah, dengan tetap menjaga kualitas kehidupan dan lingkungan, serta mampu memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan. Ketahanan daerah adalah kemampuan daerah untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang datang dari luar maupun dari dalam daerah termasuk tantangan ekologi dan iklim. Ketahanan daerah yang tangguh, berkualitas, dan berkelanjutan dapat dicapai melalui pemantapan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan. Untuk mewujudkan ketahanan daerah dibutuhkan penegakan supremasi hukum secara konsisten, adil, dan merata, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, kesadaran hukum bagi masyarakat, dan mencegah terjadinya konflik sosial. Dimensi stabilitas menjadi pilar penting dalam mewujudkan ketahanan daerah, ini ditandai dengan terciptanya stabilitas politik, keamanan, maupun stabilitas ekonomi. Stabilitas daerah sangat penting dalam menjamin kelancaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya dimensi kepemimpinan merupakan pilar penting dalam mewujudkan ketahanan daerah. Kepala daerah harus memiliki visi yang jelas, kepemimpinan yang kuat, kemampuan membangun hubungan baik dengan semua pihak, dan kemampuan untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Aspek penting pada misi ini adalah untuk memantapkan stabilitas ekonomi, politik, ekologi, iklim, hukum dan keamanan bagi masyarakat, serta memperkuat ketangguhan hubungan diplomasi di tingkat daerah maupun global.

5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Misi ini bertujuan mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi di Provinsi Sumatera Selatan yang sangat penting dalam menjaga ketahanan nasional. Ketahanan sosial bermakna kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dan mengatasi berbagai tantangan sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan konflik. Ketahanan budaya berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai dan identitas budayanya. Sementara itu, ketahanan ekologi berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Agenda ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan penguatan perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kesenjangan pendapatan antargolongan dengan prinsip berkeadilan sosial. Agenda ini juga diarahkan untuk menciptakan upaya dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan pola ruang dan struktur ruang. Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam menghadapi

perubahan iklim dengan potensi hutan dan lahan gambut. Jika tidak dikelola dengan baik, degradasi pada ekosistem gambut dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Untuk itu, Sumatera Selatan berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai target nasional. Perencanaan pembangunan dilakukan secara seimbang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Perwujudan lingkungan berkelanjutan dapat meminimalkan alih fungsi lahan produktif menjadi non pertanian, lahan suboptimal (lahan gambut) menjadi lahan pertanian. Perencanaan pengembangan wilayah perkotaan yang terarah mendorong tata ruang yang efisien.

6. Mewujudkan Pemerataan Antardaerah dan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan

Pemerataan Pembangunan antardaerah harus diwujudkan mengingat masih kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya belum merata di seluruh wilayah Sumatera Selatan, belum memadainya ketersediaan infrastruktur di wilayah yang tertinggal serta masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. Selain itu perwujudan misi pemerataan antardaerah harus dilakukan karena masih tingginya risiko bencana dan lemahnya tata kelola kebencanaan, pertimbangan karakteristik wilayah sehingga tidak satu ukuran untuk semua (*one size fits all*), dan pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi belum optimal akibat kebijakan asimetris dan afirmatif.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ditujukan pada perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Pusat pertumbuhan difokuskan untuk peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, pemanfaatan ketersediaan energi dengan teknologi rendah karbon, pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar.

7. Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi mewujudkan meningkatnya infrastruktur dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan khususnya aspek lingkungan akibat proses pembangunan. Infrastruktur ramah lingkungan atau dikenal dengan infrastruktur hijau dapat ditingkatkan melalui beberapa cara. Pertama, meningkatkan kualitas udara dengan meningkatkan kadar oksigen dan memperlancar sirkulasi udara melalui penanaman pohon dan tanaman. Kedua, memodifikasi iklim mikro. Pembangunan terus menerus dapat menimbulkan pemanasan global karena hutan digunduli dan diganti dengan beton, besi dan kaca. Untuk mengurangi efek

pemanasan akibat perubahan iklim dan penyerapan radiasi matahari secara langsung oleh bangunan dapat diterapkan dengan membuat *green roof* atau *green street*. Ketiga, manajemen air hujan. Manajemen air hujan merupakan usaha mengurangi limpasan permukaan (*run off*) dengan menginfiltrasi air hujan ke dalam tanah sebagai usaha pencegahan banjir. Selanjutnya, memperkaya habitat dan keanekaragaman hayati. Infrastruktur hijau ini berupa memperluas habitat, meningkatkan populasi dari spesies yang terancam punah serta memperluas ruang gerak makhluk hidup. Terakhir, kesempatan rekreasi dan transportasi. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar ini dilakukan melalui konsep ruang terbuka hijau berupa tempat rekreasi dan rute hijau untuk berjalan kaki dan bersepeda daripada bepergian menggunakan kendaraan bermotor. Adanya ruang terbuka hijau dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.

8. Memperkuat Kemandirian dan Inovasi Pembiayaan Pembangunan

Misi memperkuat kemandirian pembiayaan pembangunan merupakan upaya untuk memperkuat kemampuan pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah Sumatera Selatan sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil dan pendapatan asli daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi penyelenggaraan pemerintahan.

Kebutuhan pembiayaan pembangunan akan terus meningkat sehingga diperlukan upaya inovasi untuk mengembangkan berbagai sumber, skema, dan instrumen pembiayaan. Dalam rangka memperkuat inovasi pembiayaan pembangunan diperlukan: (1) memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pemanfaatan bauran pembiayaan. Pelaksanaan dan pengembangan bauran pembiayaan dapat dilakukan antara lain dengan memposisikan pembiayaan pemerintah sebagai pengungkit (*leveraging*) dan katalisator untuk mengembangkan sumber pembiayaan non pemerintah; mengutamakan penggunaan sumber-sumber pembiayaan non pemerintah sesuai dengan kelayakan finansial, ekonomi, dan sosialnya. (2) Mengembangkan prinsip transfer berbasis kinerja. Untuk memperkuat pengendalian program serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, mekanisme transfer berbasis kinerja ditujukan untuk mendukung pembiayaan pelayanan dasar kepada masyarakat atau mendukung target-target pembangunan tertentu. Pendanaan inovatif pada sektor berbasis lahan juga dapat menunjang upaya menuju pembangunan ekonomi hijau Sumatera Selatan. Pendanaan ini difokuskan pada investasi finansial maupun non-finansial untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan (resiliensi), dan menyediakan jasa lingkungan.



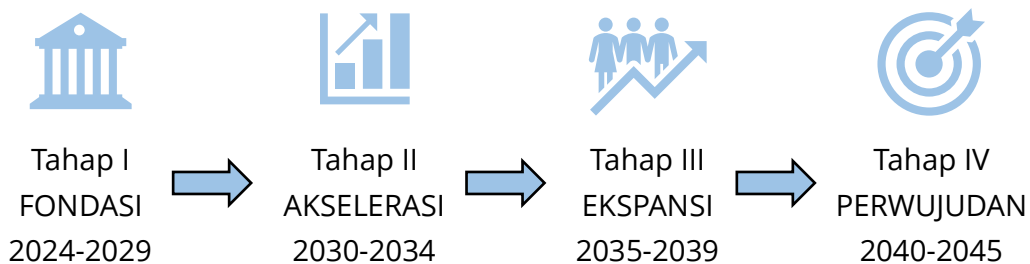
Gambar 4. 1 Nilai-Nilai dan Visi, Misi dan Sumatera Selatan

Dalam melaksanakan misi pembangunan untuk mencapai visi Sumatera Selatan “maju, terdepan dan berkelanjutan”, diperlukan nilai-nilai yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaannya, utamanya nilai-nilai luhur Pancasila, selain nilai-nilai kearifan lokal yang tertanam di masyarakat Provinsi Sumatera Selatan seperti hidup bergotong royong dan bersifat terbuka terhadap perubahan menjadi landasan. Kedua nilai tersebut mendorong terciptanya kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan SUMSEL MAPAN tahun 2045.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan memuat tentang prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. Arah kebijakan pembangunan Sumatera Selatan diarahkan untuk mencapai visi Sumatera Selatan Maju, Terdepan dan Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan Sumatera Selatan dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi dan tantangan pembangunan daerah, serta arahan pembangunan nasional yang dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan selama periode 2025-2045. Arah kebijakan setiap tahapan memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok dalam mewujudkan visi daerah yang sejalan dengan pentahapan pembangunan yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Untuk mencapai visi tersebut, perlu dilakukan pembangunan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan mengikuti proses tahapan ini, sehingga kebijakan yang dirumuskan untuk melaksanakan misi akan menjadi lebih terarah dan responsif terhadap dinamika yang terus berubah. Tahapan pembangunan tersebut disajikan pada Gambar 5.1 berikut.



Gambar 5. 1 Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045

Pembangunan jangka panjang daerah membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk mencapai sasaran pokok yang disebutkan di atas. Tahapan dan skala prioritas ini harus mencerminkan urgensi masalah yang harus diselesaikan, tanpa mengabaikan masalah lainnya. Skala prioritas yang ditetapkan setiap tahun dapat berubah tergantung pada tingkat urgensi masalah yang dihadapi, tetapi mereka harus konsisten dan terarah sepanjang tahun untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang. Dalam setiap fase, setiap sasaran utama dari lima misi pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Selatan dapat diberi prioritas. Untuk setiap misi, prioritas dapat diperas kembali menjadi prioritas utama, yang

menunjukkan makna strategis dan urgensi masalah. Secara umum, arah kebijakan pembangunan Sumatera Selatan untuk 20 tahun ke depan dapat dirumuskan pada Tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan dan Tahapan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		Penguatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Regional	Mewujudkan Sumsel MAPAN
Provinsi Sumatera Selatan Maju, Terdepan Dan Berkelanjutan	(1). Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan (vokasi), kesehatan, serta perlindungan sosial	Mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan inklusif	Memperluas pembangunan sumber daya manusia berkualitas, inklusif, dan keberlanjutan kesejahteraan	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara menyeluruh dan berkelanjutan
	(2). Mewujudkan Transformasi Ekonomi menuju Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional	Meningkatkan ketahanan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan	Mengakselerasi pengembangan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis yang berimbang dan berkelanjutan	Memperluas jaringan dan memperkuat sinergi antara inovasi dan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan	Mewujudkan perekonomian yang mapan secara menyeluruh dan berkelanjutan
	(3). Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Berkualitas	Meningkatkan kualitas regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju pelayanan publik berkualitas	Mengakselerasi peningkatan kualitas regulasi dalam mendorong efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah	Memperluas aksesibilitas pelayanan publik dan kualitas regulasi bagi masyarakat yang adil dan setara	Mewujudkan kualitas regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik secara menyeluruh
	(4). Memantapkan Ketahanan Daerah Tangguh,	Meningkatkan ketahanan daerah: ideologi, politik, ekonomi,	Mengakselerasi peningkatan ketahanan daerah:	Memperluas ketahanan daerah: ideologi, politik,	Mewujudkan ketahanan daerah: ideologi, politik,

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		Penguatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Regional	Mewujudkan Sumsel MAPAN
	Berkualitas, dan Berkelanjutan	sosial budaya, dan keamanan yang tangguh	ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan tangguh dan berkualitas	ekonomi, sosial budaya, dan keamanan tangguh, berkualitas, dan berkelanjutan	ekonomi, sosial budaya, dan keamanan tangguh, berkualitas, dan berkelanjutan
	(5). Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berkelanjutan	Mengakselerasi ketahanan sosial budaya dan ekologi yang merata berkelanjutan	Memperluas ketahanan sosial budaya dan ekologi secara merata	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam masyarakat secara merata dan berkelanjutan
	(6). Mewujudkan Pemerataan Antardaerah dan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan	Meningkatkan pemerataan antardaerah dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan	Mengakselerasi pemerataan antardaerah dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan	Memperluas pemerataan antardaerah dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan	Mewujudkan pemerataan antardaerah dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan
	(7). Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Meningkatkan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui pengembangan potensi EBT	Mengakselerasi peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk kualitas lingkungan hidup melalui pengembangan teknologi dan kapasitas pembangkit EBT yang berkelanjutan	Memperluas infrastruktur dan pelayanan dasar menuju transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan kualitas lingkungan hidup yang baik	Mewujudkan ekosistem yang sehat dan produktif serta transisi energi berkeadilan melalui peningkatan sektor ekonomi hijau yang berdaya saing dan berkelanjutan
	(8). Memperkuat Kemandirian dan Inovasi Pembiayaan Pembangunan	Meningkatkan kemandirian dan inovasi pembiayaan pembangunan	Mengakselerasi Inklusi keuangan dalam mendorong	Memperluas dan mempercepat kemandirian dan inovasi	Mewujudkan kemandirian dan inovasi pembiayaan yang kokoh dan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
		Penguatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Regional	Mewujudkan Sumsel MAPAN
			kemandirian dan inovasi pembiayaan pembangunan	pembiayaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	merata dalam mendukung pembangunan

5.2.9 Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029): Penguatan Fondasi Transformasi

Pada tahap pertama, fokus utama adalah pada pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur. Hal ini penting untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi pembangunan selanjutnya. Di bidang pendidikan, pemerintah akan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah tertinggal dan terpencil. Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik, serta mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sisi kesehatan, pemerintah akan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, serta mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan. Dalam bidang infrastruktur, pemerintah akan meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan listrik. Pemerintah juga akan meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti pelabuhan, bandara, dan kawasan industri. Dari segi regulasi dan pendanaan, pemerintah akan meningkatkan kapasitas pengelolaan dana daerah yang semakin mandiri dengan memperkuat kelembagaan untuk memanfaatkan pendanaan inovatif.

Pada tahap pertama, arah kebijakan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- (1). Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan, keterampilan dan kesehatan.
- (2). Peningkatan perlindungan sosial adaptif melalui perluasan perlindungan yang menyeluruh sesuai dengan kerentanan yang berprinsip adil dan inklusif.
- (3). Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kompetensi (*upskilling/reskilling*).
- (4). Peningkatan infrastruktur terutama di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi dalam rangka mendukung pusat pertumbuhan.
- (5). Peningkatan iklim investasi di seluruh sektor perekonomian pada lingkup Industri Kecil dan Menengah, UMKM, Koperasi, BUMD, BUMDes.
- (6). Pengembangan IPTEK, inovasi dan digitalisasi di seluruh sektor pembangunan.

- (7). Pengembangan potensi *green economy*, *blue economy*, dan *circular economy* di seluruh wilayah.
- (8). Pengembangan daya tarik daerah, terutama dalam bidang pariwisata dan budaya.
- (9). Identifikasi produk unggulan yang berkelanjutan dalam menuju hilirisasi produk.
- (10). Pengembangan teknologi di bidang energi dalam mendukung transisi energi yang berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan.
- (11). Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.
- (12). Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, kebebasan sipil dan kesetaraan, kapasitas fungsi dan integritas lembaga demokrasi.
- (13). Peningkatan ketahanan keluarga dan pengarusutamaan gender.
- (14). Penguatan toleransi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan menghargai keberagaman, serta penguatan kebudayaan dalam melestraikan warisan budaya lokal dan nasional.
- (15). Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut.
- (16). Penyelarasan rencana pembangunan dan tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup.
- (17). Pengembangan teknologi di bidang pangan dan air untuk meningkatkan produktivitas Sumber Daya Alam.
- (18). Peningkatan Pembangunan infrastruktur dasar kawasan permukiman, bidang pendidikan dan kesehatan di semua wilayah terutama di daerah terpencil dan tertinggal.

5.2.10 Arah Kebijakan Tahap II (2030-2034): Akselerasi Transformasi

Pada tahap kedua, fokus utama adalah pada peningkatan daya saing dan daya tarik Sumatera Selatan. Hal ini penting untuk menarik investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang perdagangan, pemerintah akan meningkatkan daya saing produk-produk Sumatera Selatan di pasar global. Pemerintah juga akan meningkatkan kerja sama perdagangan dengan negara-negara lain. Dalam bidang investasi, pemerintah akan meningkatkan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah juga akan menyediakan berbagai insentif bagi investor. Dalam bidang pariwisata, pemerintah akan mengembangkan potensi pariwisata

Sumatera Selatan. Pemerintah juga akan meningkatkan promosi pariwisata Sumatera Selatan di tingkat nasional dan internasional. Pada tahap kedua, arah kebijakan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- (1) Penguatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan.
- (2) Percepatan perlindungan sosial adaptif melalui perluasan perlindungan yang menyeluruh sesuai dengan kerentanan yang berprinsip adil dan inklusif.
- (3) Penguatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kompetensi (*upskilling/reskilling*).
- (4) Penguatan infrastruktur terutama di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.
- (5) Peningkatan dan penguatan daya saing daerah, terutama dalam bidang industri pengolahan produk unggulan, perdagangan, investasi, teknologi, dan digitalisasi.
- (6) Peningkatan daya tarik daerah, terutama dalam bidang pariwisata, budaya, dan investasi.
- (7) Pengembangan hilirisasi produk unggulan yang berkelanjutan.
- (8) Peningkatan IPTEK, inovasi dan digitalisasi di seluruh sektor pembangunan.
- (9) Penguatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, hutan, dan lahan gambut.
- (10) Peningkatan ketahanan dan kemandirian terutama dalam bidang pangan dan air.
- (11) Pengembangan *green economy*, *blue economy*, *bio economy*, dan *circular economy* di wilayah yang ditentukan.
- (12) Percepatan keamanan dan ketertiban masyarakat, kebebasan sipil dan kesetaraan, kapasitas fungsi dan integritas lembaga demokrasi.
- (13) Penguatan ketahanan keluarga dan pengarusutamaan gender.
- (14) Percepatan toleransi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan menghargai keberagaman, serta penguatan kebudayaan dalam melestarikan warisan budaya lokal dan nasional.
- (15) Penguatan infrastruktur dasar kawasan permukiman, bidang pendidikan dan kesehatan di semua wilayah terutama di daerah terpencil dan tertinggal.
- (16) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintahan melalui penyederhanaan birokrasi, penyelarasan kebijakan dan program, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.

5.2.11 Arah Kebijakan Tahap III (2035-2039): Pemantapan dan Ekspansi Regional

Pada tahap ketiga, fokus utama adalah pada peningkatan inovasi dan kolaborasi. Hal ini penting untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Sumatera Selatan. Dalam bidang inovasi, pemerintah akan mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*Research and Development* atau R&D) terutama yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi hijau. Pemerintah juga akan memberikan dukungan bagi para inovator. Dalam bidang kolaborasi, pemerintah akan memperkuat kerja sama antardaerah, antarsektor, dan antargenerasi. Pemerintah juga akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pada tahap ketiga, arah kebijakan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- (1) Pemantapan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- (2) Pemantapan perlindungan sosial adaptif melalui perluasan perlindungan yang menyeluruh sesuai dengan kerentanan yang berprinsip adil dan inklusif.
- (3) Pemantapan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kompetensi (*upskilling/reskilling*).
- (4) Pemantapan infrastruktur terutama di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.
- (5) Pemantapan infrastruktur dasar kawasan permukiman, bidang pendidikan dan kesehatan di semua wilayah terutama di daerah terpencil dan tertinggal.
- (6) Pemantapan IPTEK, inovasi dan digitalisasi di seluruh sektor pembangunan.
- (7) Pemantapan daya tarik daerah, terutama dalam bidang pariwisata, budaya, dan investasi.
- (8) Pemantapan hilirisasi produk unggulan.
- (9) Penguatan transisi energi yang berkeadilan.
- (10) Pemantapan keseimbangan alam: daya dukung lingkungan dalam perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut.
- (11) Penguatan ketahanan dan kemandirian terutama dalam bidang pangan dan air.
- (12) Peningkatan *green economy*, *blue economy*, *bio economy*, dan *circular economy*.
- (13) Penguatan, pemantapan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai untuk mencegah ketimpangan pembangunan.
- (14) Pemantapan keamanan dan ketertiban masyarakat, kebebasan sipil dan kesetaraan, kapasitas fungsi dan integritas lembaga demokrasi.
- (15) Pemantapan ketahanan keluarga dan pengarusutamaan gender.

- (16) Peningkatan keadilan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyediaan pelayanan publik yang merata dan berkualitas bagi semua warga serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

5.2.12 Arah Kebijakan Tahap IV (2040-2044): Perwujudan Sumsel MAPAN

Pada tahap keempat, fokus utama adalah pada perwujudan Sumatera Selatan sebagai pusat pertumbuhan dan destinasi unggulan. Hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Dalam bidang ekonomi, pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga akan meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Sumatera Selatan. Dalam bidang sosial, pemerintah akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sumatera Selatan. Pemerintah juga akan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam bidang lingkungan, pemerintah akan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah juga akan mengembangkan ekonomi hijau dan fokus pada mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pada tahap keempat, arah kebijakan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan daerah yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
- (2) Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.
- (3) Mewujudkan daerah yang sejahtera, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.
- (4) Mewujudkan daerah yang berdaya saing dalam bidang perdagangan, investasi, teknologi, dan digitalisasi.
- (5) Mewujudkan daerah yang memiliki daya tarik daerah terutama dalam bidang pariwisata, budaya, dan investasi.
- (6) Mewujudkan daerah yang berdaya saing terutama dalam hilirisasi produk.
- (7) Mewujudkan daerah yang menerapkan ekonomi hijau terutama pengelolaan dan penggunaan energi baru terbarukan.
- (8) Mewujudkan daerah yang mengedepankan perlindungan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut.
- (9) Mewujudkan ketahanan dan kemandirian terutama dalam bidang pangan dan air.
- (10) Pemantapan transisi energi yang berkeadilan.
- (11) Perwujudan pemantapan ketahanan keluarga dan pengarusutamaan gender.
- (12) Pemantapan *green economy*, *blue economy*, *bio economy*, dan *circular economy*.
- (13) Mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

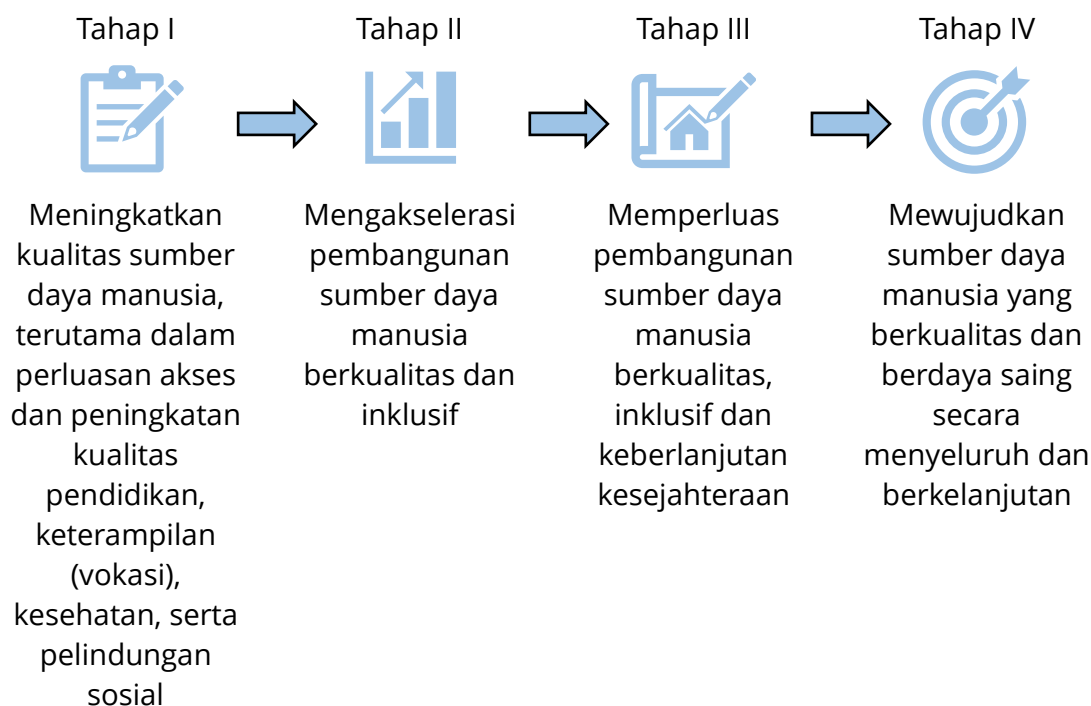
- (14) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara menyeluruh melalui penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Arah kebijakan pembangunan pada setiap tahap tersebut disusun secara sistematis dan terintegrasi untuk mewujudkan Visi Sumatera Selatan Maju, Terdepan, dan Berkelanjutan. Dengan kerja keras dan kolaborasi dari semua pihak, visi Sumatera Selatan Maju, Terdepan, dan Berkelanjutan sampai tahun 2045 dapat diwujudkan. Mengacu kepada Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan 20 tahun ke depan, serta prioritas pembangunan pada setiap tahap, maka arahan umum kebijakan pembangunan Sumatera Selatan untuk setiap misi adalah sebagai berikut:

▪ **Misi Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia Berkarakter dan Berdaya Saing**

Transformasi sosial menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan di masa datang yang mengalami perubahan dengan cepat, rumit, penuh dengan pembaharuan dan membingungkan (*Turbulent, Uncertain, Novel, dan Ambiguous-TUNA*). Beberapa perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergolakan geopolitik, pergeseran ekonomi, dan kemajuan budaya. Dalam mewujudkan transformasi sosial dengan sumber daya manusia berkarakter dan berdaya saing di Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan keterampilan merata berkualitas, tetapi juga perlindungan sosial yang adaptif.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kunci utama untuk mewujudkan Sumatera Selatan yang maju dan sejahtera. SDM yang berkualitas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing bangsa, dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Secara umum, peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan jangka pendek dan pendekatan jangka panjang. Pendekatan jangka pendek berfokus pada peningkatan kualitas SDM yang sudah ada, sedangkan pendekatan jangka panjang berfokus pada peningkatan kualitas SDM yang akan datang. Untuk mengakselerasi peningkatan kualitas SDM, diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.



Gambar 5. 2 Tahapan Misi Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Sumber Daya Manusia Berkarakter dan Berdaya Saing

Tahap I: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan (vokasi), kesehatan, serta perlindungan sosial

Arah kebijakan pemerintah dalam transformasi sosial ke depan untuk mengantisipasi perubahan besar yang akan terjadi. Perkembangan teknologi saat ini disadari memang telah mendistorsi nilai, norma, dan perilaku masyarakat, namun perkembangan teknologi juga akan mendorong kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan baru, utamanya yang berbasis digital. Untuk itu, perlu upaya *upskilling* dan *reskilling* untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal guna mendapatkan pekerjaan yang layak dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan pasar. *Upskilling* mengacu pada upaya meningkatkan keterampilan yang sudah ada saat ini untuk mempersiapkan kemajuan dalam bidang atau industri dimana dia bekerja. *Reskilling* atau keterampilan ulang berfokus untuk mempelajari atau memperbaharui keterampilan yang ada pada pekerja saat ini agar bisa beradaptasi dengan perubahan dalam persyaratan pasar kerja atau kebutuhan industri di masa depan. Baik *upskilling* maupun *reskilling* dapat mencakup pengetahuan tentang teknologi baru, penguasaan alat-alat atau mesin yang lebih canggih, serta pengembangan kompetensi lain di bidang yang dibutuhkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui *upskilling* dan *reskilling* juga memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara dunia industri dan dunia pendidikan dalam

mempersiapkan infrastruktur pelatihan dan pendidikan yang diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dari dunia industri. Infrastruktur tersebut berupa kurikulum, modul, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, standar kompetensi, dan sertifikasi.

Pemerintah perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja. Dunia usaha perlu berperan aktif dalam mengembangkan pendidikan kejuruan dan pelatihan kerja serta masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu, diperlukan arah kebijakan seperti: (i) bidang pendidikan dengan melakukan peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum adaptif; peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik; peningkatan *soft skills*, *social skills*, dan *life skills* dalam pembelajaran; serta peningkatan akses dan pemerataan pendidikan; (ii) bidang kesehatan meliputi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik dari segi ketersediaan sarana dan prasarana, tenaga kesehatan, maupun obat-obatan; peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan; serta peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas; (iii) bidang keterampilan melalui peningkatan ketersediaan pelatihan keterampilan secara luas sesuai dengan kebutuhan; peningkatan kualitas pelatihan keterampilan secara profesional dan menghasilkan lulusan yang kompeten; serta peningkatan akses dan pemerataan pelatihan keterampilan yang berkualitas; (iv) bidang perlindungan sosial adaptif melalui peningkatan perlindungan sosial yang menyeluruh meliputi percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan sistem jaminan sosial, peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok lainnya sebagai angkatan kerja.

Tahap II: Mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan inklusif

Mengakselerasi pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan inklusif terutama dalam aksesibilitas dan layanan pendidikan, kesehatan, keterampilan secara merata dan berkeadilan adalah salah satu kunci penting untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan. SDM yang berkualitas akan mampu menghasilkan inovasi dan produktivitas yang tinggi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan, dan keterampilan juga merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendukung penguatan kualitas SDM. Dengan akses yang lebih luas dan berkualitas, masyarakat akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan potensinya dan meningkatkan keterampilannya. Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas tersebut agar semua masyarakat dapat memperoleh pendidikan, kesehatan, dan keterampilan yang berkualitas. Untuk meningkatkan sumber daya berkualitas dan inklusif diperlukan langkah dan implementasi kebijakan yang tepat seperti: (i) meningkatkan anggaran pendidikan, kesehatan, dan keterampilan; (ii) meningkatkan kualitas guru, tenaga kesehatan, dan instruktur keterampilan; (iii) membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan keterampilan yang memadai; (iv) menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja; peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha; pemenuhan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat; dan (v) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan keterampilan; (vi) percepatan penuntasan kemiskinan; peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; pengembangan bantuan sosial yang lebih adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim; percepatan sistem jaminan sosial yang efektif dan mencapai cakupan universal yang adil dan merata bagi anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; penguatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok lainnya sebagai angkatan kerja melalui penguatan norma keluarga, dan pemanfaatan teknologi digital.

Tahap III: Memperluas pembangunan sumber daya manusia berkualitas, inklusif, dan keberlanjutan kesejahteraan

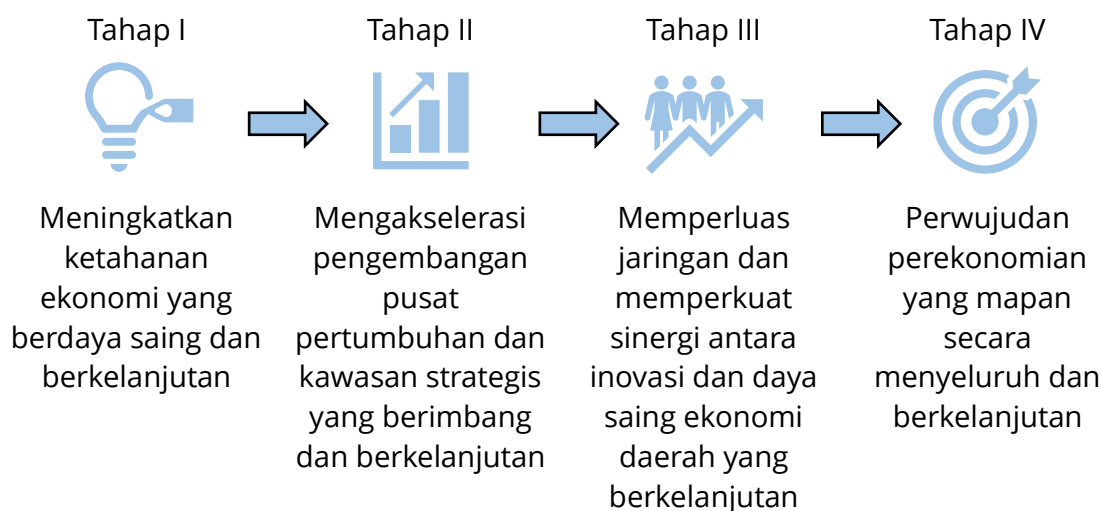
Memperluas pembangunan sumber daya manusia berkualitas, inklusif, dan keberlanjutan kesejahteraan merupakan upaya yang penting untuk mewujudkan Sumatera Selatan Maju, Terdepan, dan Berkelanjutan. Untuk itu diperlukan kerjasama dan sinergi dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Peningkatan pendidikan kualitas dan merata merupakan salah satu upaya terpenting dalam SDM. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan SDM yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang mumpuni. Pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Untuk itu, langkah-langkah kebijakan yang dapat dilakukan, yaitu: (i) memperluas akses pendidikan melalui peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM; peningkatan kualitas dan distribusi guru, utamanya di daerah terpencil dan tertinggal dalam rangka penyediaan layanan pendidikan yang inklusif; peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidikan guru dan dosen; peningkatan instruktur bersertifikat kompetensi; revitalisasi pendidikan nonformal serta penguatan pendidikan berbasis komunitas; (ii) pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas layanan

sarana dan prasarana kesehatan sesuai kondisi wilayah; pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat; perluasan pemenuhan kebutuhan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif terhadap masyarakat termasuk pengurangan waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan; (iii) memperkuat dan memperluas perlindungan sosial adaptif berkesinambungan.

Tahap IV: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara menyeluruh dan berkelanjutan

Perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara menyeluruh dan berkelanjutan merupakan upaya untuk menciptakan manusia Indonesia, utamanya masyarakat Sumatera Selatan yang memiliki kemampuan dan potensi yang unggul di berbagai bidang, sehingga mampu bersaing secara nasional dan global.

▪ Misi Mewujudkan Transformasi Ekonomi menuju Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional



Gambar 5. 3 Tahapan Misi Mewujudkan Transformasi Ekonomi menuju Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan dan daya saing ekonomi merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan selama 20 tahun ke depan, dan tentu saja akan menghadapi perubahan besar yang menuntut dilakukannya transformasi ekonomi. Beberapa perubahan tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim dan pergeseran geoekonomi dan geopolitik. Untuk menjadikan Sumatera Selatan sebagai pusat pertumbuhan regional, diperlukan pembangunan yang berorientasi

pada pertumbuhan ekonomi hijau yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan diperlukan arah kebijakan yang meliputi:

Tahap I: Meningkatkan ketahanan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tahap ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Selain itu, tahap ini juga menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi dan penguatan daya saing produk lokal untuk meningkatkan daya saing daerah. Pengembangan daya tarik daerah juga penting untuk meningkatkan perekonomian daerah dan menarik investor. Terakhir, identifikasi produk unggulan yang berkelanjutan penting untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal dan mendorong hilirisasi produk.

Meningkatkan ketahanan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui: (i) peningkatan infrastruktur dasar sanitasi dan infrastruktur terutama di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing ekonomi; (ii) peningkatan iklim investasi kondusif bidang perdagangan, investasi, teknologi, dan digitalisasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja pada setiap sektor perekonomian secara menyeluruh di Sumatera Selatan, serta mempertimbangkan *link and match* industri besar dengan IKM/UMKM serta kompetensi Sumber Daya Manusia yang tersedia; (iii) pengembangan daya tarik daerah, terutama dalam bidang pariwisata, budaya, dan investasi, akan meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja. Daya tarik daerah yang tinggi akan menarik wisatawan dan investor untuk berkunjung ke daerah tersebut; dan (iv) mengidentifikasi produk unggulan berbasis diversifikasi ekonomi yang berkelanjutan dalam menuju hilirisasi produk akan meningkatkan nilai tambah produk Indonesia dan daya saingnya di pasar global. Hilirisasi produk akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tahap II: Mengakselerasi pengembangan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis yang berimbang dan berkelanjutan

Mengakselerasi pengembangan kawasan strategis yang seimbang dan berkelanjutan merupakan tujuan utama dari pembangunan ekonomi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu

melakukan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis dengan konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi ini didasarkan pada pengelompokan kawasan/wilayah, kedekatan geografis, dan interaksi yang kuat antar wilayah meliputi kawasan industri, pertanian, perikanan dan pariwisata. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berkelanjutan. Selain pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis, diperlukan juga peningkatan dan penguatan daya saing daerah, terutama dalam bidang perdagangan, investasi, teknologi, dan digitalisasi. Peningkatan daya saing daerah akan meningkatkan daya tarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Pengembangan ekonomi wilayah yang berdaya saing merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan strategi yang tepat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi dan penguatan daya saing produk lokal menjadi strategi yang penting untuk diterapkan. Diversifikasi ekonomi dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru yang memiliki potensi, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri. Sementara itu, penguatan daya saing produk lokal dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas, produktivitas, daya tahan produk lokal dan nilai tambah produk, serta memperluas akses ke pasar.

Peningkatan daya tarik daerah juga diperlukan, terutama dalam bidang pariwisata, budaya, dan investasi. Peningkatan daya tarik daerah akan meningkatkan kunjungan wisatawan dan investasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, diperlukan juga pengembangan hilirisasi produk unggulan yang berkelanjutan. Pengembangan hilirisasi produk unggulan akan meningkatkan nilai tambah produk dan menciptakan lapangan kerja baru. Pengembangan hilirisasi produk unggulan juga akan mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan ekspor.

Pengembangan pusat pertumbuhan sangat diperlukan sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan wilayah. Pusat pertumbuhan yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Carat, dan Kawasan Industri Tanjung Enim diharapkan dapat menarik investasi, utamanya terkait dengan aspek perencanaan dan pembangunan. Pembangunan Wilayah Metropolitan Palembang yang mencakup Kota Palembang, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ilir, dan Kab. Banyuasin. Kota Palembang menjadi pusat pertumbuhan daerah sehingga diharapkan dapat memberikan *spread effect* bagi daerah belakangnya (*hinterland*) di Sumatera Selatan utamanya daerah yang berbatasan langsung, yaitu Palembang, Betung, Sungsang, Jejawi, dan Indralaya (Patung Sang Jaya).

Sumatera Selatan memiliki Kawasan Strategis Nasional yaitu: (1) KSN Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat; (2) KSN Kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang; (3) KSN Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan; dan (4) KSN Kawasan Perkotaan Palembang–Betung–Indralaya–Kayuagung. Adanya KSN mendukung pusat pertumbuhan di Provinsi Sumatera Selatan. Pengembangan pusat pertumbuhan dan pembentukan kawasan strategis diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di wilayah tertinggal dan mengantisipasi peningkatan urbanisasi ke kota besar. Pembentukan kawasan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu memperhatikan karakteristik potensi cepat tumbuh, sektor unggulan, memiliki sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi, serta mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal. Kawasan strategis sebagai fungsi dan daya dukung lingkungan ditetapkan sebagai upaya perlindungan keanekaragaman hayati, keseimbangan neraca air, iklim dan peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tahap III: Memperluas jaringan dan memperkuat sinergi antara inovasi dan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan

Arah kebijakan dalam memperluas jaringan dan memperkuat sinergi antara inovasi dan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kebijakan ini harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Iklusifitas penguatan inovasi daerah adalah kunci untuk meningkatkan daya saing daerah, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun perdagangan, investasi, teknologi, dan digitalisasi. Dengan inovasi, daerah dapat menciptakan produk dan layanan yang lebih berkualitas, efisien, dan kompetitif. Selain itu, arah kebijakan pemantapan daya tarik daerah juga penting untuk meningkatkan daya saing daerah. Daerah yang memiliki daya tarik yang tinggi akan lebih menarik bagi wisatawan, investor, dan pelaku bisnis. Daya tarik daerah dapat diwujudkan melalui keunggulan pariwisata, budaya, dan investasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga membuat perencanaan dalam pemantapan hilirisasi produk unggulan dapat meningkatkan nilai tambah produk dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantapan hilirisasi produk unggulan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai tambah produk unggulan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tahap IV: Mewujudkan perekonomian yang mapan secara menyeluruh dan berkelanjutan

Perwujudan perekonomian yang mapan secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan inklusifitas dalam pembangunan ekonomi daerah dan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak merusak lingkungan dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Implementasi kebijakan inklusifitas dalam pembangunan ekonomi daerah dan berkelanjutan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dan kerja sama antar-lembaga, serta meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memanfaatkan peluang pembangunan. Masyarakat perlu berperan aktif dalam proses pembangunan, serta memanfaatkan berbagai program dan layanan yang disediakan pemerintah. Sektor swasta perlu berkomitmen untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

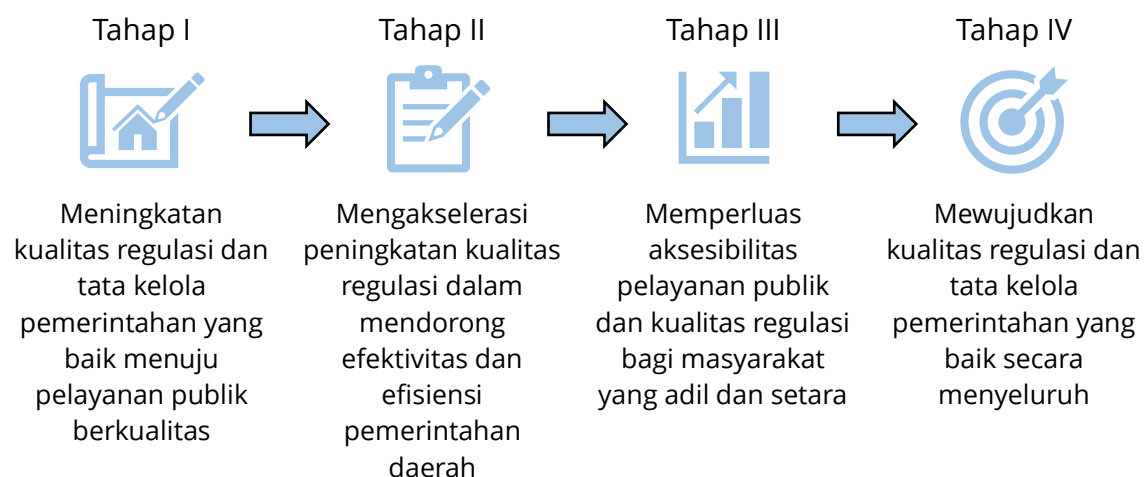
Kebijakan inklusifitas dalam pembangunan ekonomi daerah dan berkelanjutan dapat diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan, antara lain: (i) Penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan memberikan upah yang layak bagi pekerjaannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja, seperti sektor industri, pertanian, dan pariwisata; (ii) Pemberian jaring pengaman sosial melalui penyediaan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat yang rentan, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan lansia. Jaring pengaman sosial ini dapat berupa bantuan tunai, program pelatihan keterampilan, atau akses ke layanan kesehatan dan pendidikan; (iii) Peningkatan pelayanan publik dasar melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang; (iv) Pengembangan penerapan ekonomi hijau yang berkelanjutan melalui penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan melindungi lingkungan.

Arah kebijakan mewujudkan daerah dan masyarakat yang sejahtera, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam dan manusia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan

kualitas hidup. Inklusifitas pembangunan ekonomi daerah dan berkelanjutan diarahkan pada penguatan sistem pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan dan tahan terhadap berbagai guncangan dari faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal. Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan daerah dan masyarakat yang berdaya saing dalam bidang perdagangan, investasi, teknologi, dan digitalisasi; menciptakan iklim investasi yang kondusif, mengembangkan teknologi dan digitalisasi, serta meningkatkan daya saing produk daerah; mewujudkan daerah yang memiliki daya tarik daerah terutama dalam bidang pariwisata, budaya, dan investasi; mewujudkan daerah dan masyarakat yang berdaya saing terutama dalam hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah produk daerah melalui pengolahan dan pemasaran produk yang lebih baik.

▪ Misi Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Berkualitas

Penguatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berkarakter dan berkualitas merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Sumatera Selatan, diperlukan reformasi birokrasi, penguatan partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas publik yang meliputi:



Gambar 5. 4 Tahapan Misi Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Berkualitas

Tahap I: Meningkatkan kualitas regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju pelayanan publik berkualitas

Meningkatkan kualitas regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju pelayanan publik berkualitas menjadi hal yang sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi secara merata. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, bersih, responsif, efektif, efisien, dan akuntabel. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya adalah melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah,

peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi. Kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Aparatur pemerintah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni akan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan profesional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, serta peningkatan kesejahteraan.

Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan juga merupakan hal yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah perlu membuka diri terhadap masyarakat dan memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah juga perlu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu menerapkan berbagai kebijakan dan mekanisme, seperti keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat, dan audit kinerja.

Salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam tata kelola, Gubernur dapat membentuk lembaga non struktural untuk mengakomodir aspirasi semua pihak dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan terutama dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan energi, pembangunan infrastruktur, pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan energi serta isu-isu penting dalam upaya mempersiapkan transformasi ekonomi Sumatera Selatan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tahap II: Mengakselerasi peningkatan kualitas regulasi dalam mendorong efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah

Mengakselerasi peningkatan kualitas regulasi dalam mendorong efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah secara tepat dan akurat; mengoptimalkan penggunaan sumber daya daerah; dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan salah satu syarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Efektivitas pemerintahan diukur dari sejauh mana tujuan-tujuan pemerintahan dapat tercapai, sedangkan efisiensi pemerintahan diukur dari sejauh mana

penggunaan sumber daya pemerintahan dapat dioptimalkan. Penyederhanaan birokrasi, penyelarasan kebijakan dan program, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi merupakan tiga strategi utama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

Tahap III: Memperluas aksesibilitas pelayanan publik dan kualitas regulasi bagi masyarakat yang adil dan setara

Memperluas aksesibilitas pelayanan publik dan kualitas regulasi bagi masyarakat yang adil dan setara bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan tidak diskriminatif, sehingga semua warga negara dapat menikmati hak-haknya secara setara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama, atau gender. Peningkatan keadilan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pemerintahan penting untuk dilakukan karena hal tersebut akan berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Peningkatan keadilan dan kesetaraan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu: (i) penyediaan pelayanan publik yang merata dan berkualitas bagi semua warga; dan (ii) penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif sesuai dengan regulasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan publik yang merata dan berkualitas bagi semua warga, tanpa memandang latar belakang mereka. Pelayanan publik yang merata dan berkualitas akan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraannya.

Tahap IV: Mewujudkan kualitas regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik secara menyeluruh

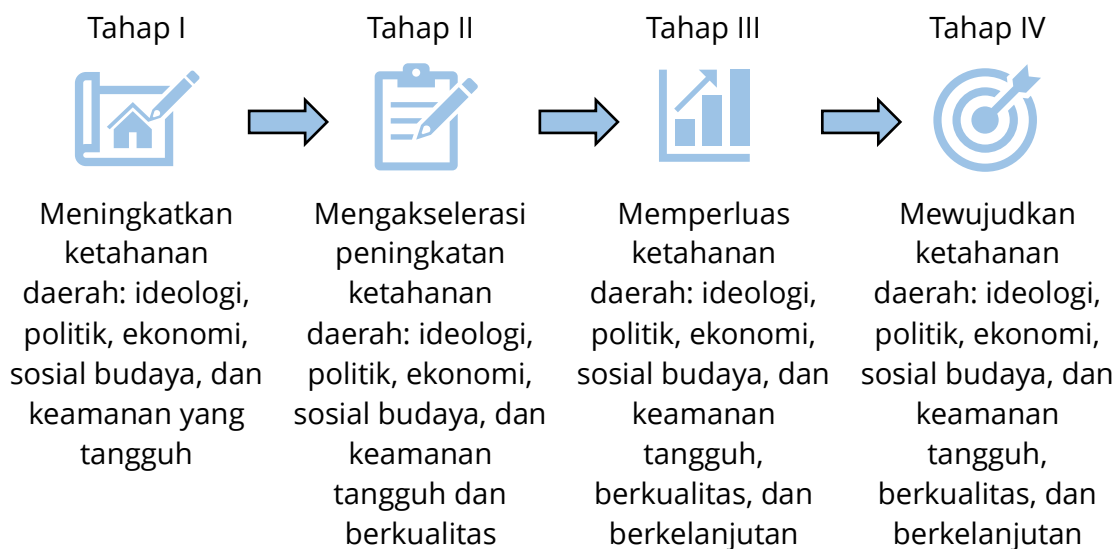
Sumatera Selatan akan mewujudkan kualitas regulasi dan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini sangat penting dan menjadi fokus dari setiap instansi pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang harus dijalankan secara adil, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Tata kelola pemerintahan yang baik ini dapat diwujudkan secara menyeluruh melalui penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat akan dapat memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip *good governance*. Sementara itu, peningkatan partisipasi masyarakat juga merupakan hal yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik. Partisipasi masyarakat akan dapat memberikan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat terwakili dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.

- **Misi Memantapkan Ketahanan Daerah Tangguh, Berkualitas, dan Berkelanjutan**

Misi untuk mewujudkan ketahanan daerah tangguh, berkualitas, dan berkelanjutan sangat penting untuk dicapai, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Ketahanan daerah yang tercermin dari mantapnya ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, ketahanan keamanan daerah termasuk ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Kebijakan dalam mewujudkan misi ini diarahkan pada: (i) peningkatan ketahanan ideologi yang tangguh untuk menjamin terciptanya iklim demokrasi yang adil; (ii) peningkatan ketahanan politik dan ekonomi tangguh, berkualitas, dan berkelanjutan; (iii) pemantapan ketahanan sosial dan budaya yang tangguh; dan (iv) peningkatan peran dan aksesibilitas masyarakat dalam mendukung ketahanan daerah berkelanjutan. Untuk meningkatkan ketahanan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan diperlukan arah kebijakan:



Gambar 5. 5 Tahapan Misi Memantapkan Ketahanan Daerah Tangguh, Berkualitas, dan Berkelanjutan

Tahap I: Meningkatkan ketahanan daerah: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan yang tangguh

Peningkatan ketahanan daerah tangguh, berkualitas, dan berkelanjutan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya ideologi; kestabilan

politik, kestabilan ekonomi makro, dan ketahanan sosial budaya serta keamanan yang tangguh. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan, seperti: (i) Penguatan Ideologi Pancasila sebagai pilar demokrasi; (ii) peningkatan kestabilan politik dan keamanan khususnya di wilayah yang rawan konflik dan wilayah tertinggal serta perbatasan; (iii) peningkatan kestabilan ekonomi makro daerah melalui peningkatan kemandirian keuangan daerah: intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah; dan pengendalian tingkat inflasi daerah serta peningkatan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi budidaya rendah karbon dan cerdas iklim seperti subsidi pupuk organik; penyediaan pangan yang sehat, beragam, aman dan harga terjangkau; dan pengembangan usaha kecil dan menengah di bidang pangan.

Tahap II: Mengakselerasi peningkatan ketahanan daerah: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan tangguh dan berkualitas

Akselerasi peningkatan ketahanan daerah utamanya menjaga kestabilan politik, keamanan daerah, dan percepatan pembangunan ekonomi untuk mendorong kestabilan ekonomi, akselerasi ketahanan sosial budaya. Program yang dapat dilakukan, yaitu: (i) pemantapan ideologi; (ii) penguatan kestabilan politik dan keamanan daerah melalui kerjasama antara daerah yang rawan konflik dan wilayah tertinggal serta perbatasan; (iii) Pemantapan stabilitas ekonomi makro utamanya ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dan peningkatan produktivitas pertanian melalui penciptaan nilai tambah, ketangguhan terhadap hama, penyakit tanaman dan perubahan iklim, pengembangan usaha kecil dan menengah di bidang pangan; peningkatan dan pengendalian tingkat inflasi daerah.

Tahap III: Memperluas ketahanan daerah: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan tangguh, berkualitas, dan berkelanjutan

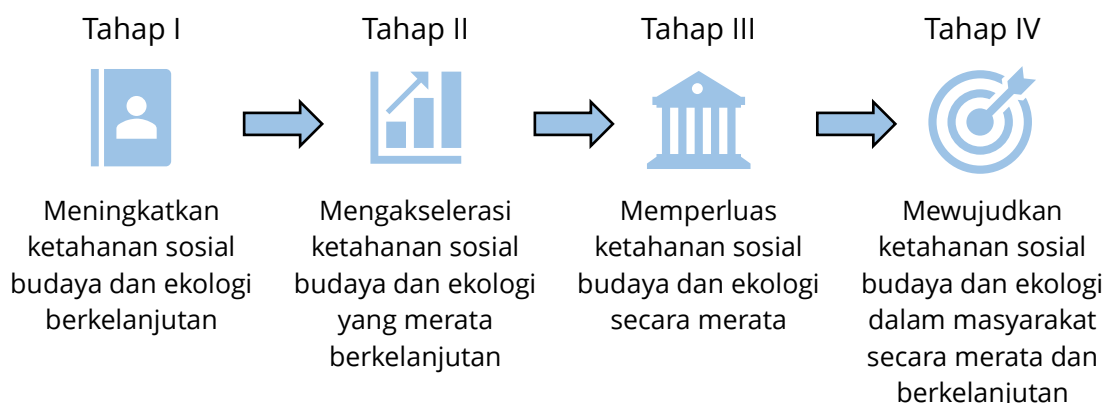
Ekspansi ketahanan daerah tangguh, berkualitas, dan berkelanjutan khususnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, politik dan keamanan daerah. Kondisi tersebut dapat dilakukan melalui: (i) pemantapan kualitas Ideologi Pancasila, (ii) pemantapan kestabilan politik dan keamanan daerah melalui kerjasama antara daerah rawan konflik dan wilayah tertinggal serta perbatasan, (iii) ekspansi ketahanan ekonomi: pemantapan kemandirian keuangan daerah seperti ekstensifikasi sumber pendapatan daerah dan pembiayaan daerah; peningkatan akses pangan, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai program, seperti program bantuan pangan sehat bersubsidi, program bantuan sosial, dan program pemberdayaan masyarakat.

Tahap IV: Mewujudkan ketahanan daerah: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan tangguh, berkualitas, dan berkelanjutan

Perwujudan ketahanan daerah berkualitas dan berkelanjutan merupakan salah satu langkah kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketahanan daerah tangguh, berkualitas, dan berkelanjutan menjadi pilar tercapainya Sumsel MAPAN. Untuk mewujudkan ketahanan daerah tangguh yang berkualitas dan berkelanjutan, diperlukan upaya pemantapan secara ideologi, politik dan keamanan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya serta lingkungan yang melibatkan seluruh komponen daerah.

▪ Misi Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan sosial budaya dan ekologi merupakan aspek penting dalam ketahanan nasional. Misi ini memastikan setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai kelompok sosial, dapat hidup berkualitas, berdaya, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif. Ketahanan sosial berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dan mengatasi berbagai tantangan sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan, konflik dan toleransi, termasuk kemampuan manusia menghadapi berbagai perubahan dan bencana. Ketahanan budaya berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai dan identitas budayanya. Ketahanan ekologi berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sumatera Selatan menjadi provinsi terdepan dalam penerapan ekonomi hijau yang didukung penerapan energi bersih di seluruh pembangunan dan mendukung pencapaian *net zero emission*. Pada tahap ini, perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, hutan, dan lahan gambut dilakukan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan iklim dan terus ditingkatkan. Dalam rangka mewujudkan penurunan emisi gas rumah kaca sesuai target nasional, Sumatera Selatan berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca khususnya yang berasal dari sektor berbasis lahan. Dengan demikian, dibutuhkan upaya melindungi sisa tutupan hutan, merestorasi lahan gambut, dan melestarikan keanekaragaman hayati. Arah kebijakan misi ini meliputi:



Gambar 5. 6 Tahapan Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Tahap I: Meningkatkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berkelanjutan

Akselerasi pembangunan infrastruktur dasar menyeluruh menuju masyarakat sejahtera di Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar bidang pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil dan tertinggal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar bidang pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mewujudkan ketahanan sosial. Infrastruktur dasar bidang pendidikan dan kesehatan yang memadai akan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil dan tertinggal, untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dari segi ketahanan ekologi, akselerasi pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas SDM diarahkan pada upaya perlindungan hutan, restorasi lahan gambut, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Tahap II: Mengakselerasi ketahanan sosial budaya dan ekologi yang merata dan berkelanjutan

Peningkatan ketahanan sosial budaya dan ekologi secara merata di semua wilayah, terutama di daerah terpencil dan tertinggal, merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah, masyarakat, dan swasta. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara cepat dan terukur di semua wilayah, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Hal ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan inklusi wilayah, yaitu dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah dalam proses pembangunan. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat merupakan dua hal yang saling berkaitan dan saling mendukung. Pembangunan akan membawa kepada kesejahteraan masyarakat dan akan menjadi fondasi yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan, sedangkan pemerataan ketahanan dari segi ekologi ditandai oleh meratanya perlindungan hutan, restorasi lahan gambut, dan

pelestarian keanekaragaman hayati serta meratanya kapasitas resiliensi masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Upaya percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara terukur berasal dari berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan sosial. Upaya yang dilakukan, antara lain: (i) pengembangan ekonomi lokal mendukung sektor-sektor ekonomi hijau (ekonomi hijau, ekonomi biru, bio-ekonomi, ekonomi sirkular) untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat; dan (ii) pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan potensi lokal secara berkelanjutan.

Tahap III: Memperluas ketahanan sosial budaya dan ekologi secara merata

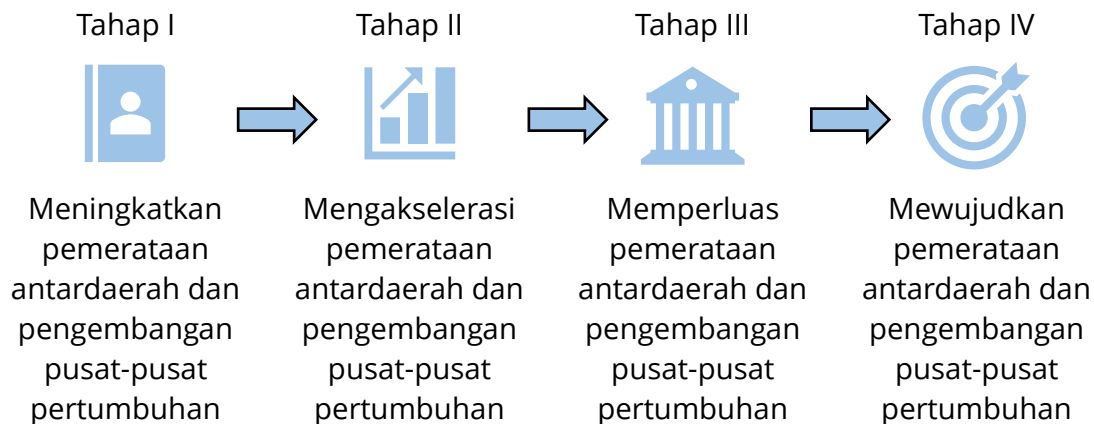
Memperluas ketahanan sosial budaya dan ekologi secara merata dengan langkah-langkah: (i) peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah, terutama di wilayah yang tertinggal dan terbelakang melalui berbagai program, seperti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan; (ii) peningkatan akses terhadap layanan publik di seluruh wilayah, terutama di wilayah yang tertinggal dan terbelakang melalui berbagai program, seperti pembangunan sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan; (iii) peningkatan kegiatan ekonomi di seluruh wilayah dengan pemberian insentif kepada pelaku usaha di wilayah tertinggal dan terbelakang, serta pengembangan sektor ekonomi produktif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan (iv) meratanya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Tahap IV: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam masyarakat secara merata dan berkelanjutan

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dalam masyarakat secara merata dan berkelanjutan merupakan tujuan akhir dari RPJPD Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan kerja sama yang erat dan berkelanjutan dari semua pihak. Beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu (i) menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang selaras dengan tersedianya lapangan kerja; (ii) peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan; (iii) Peningkatan kualitas lingkungan terutama pada ekosistem gambut; (iv) peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan; dan (v) peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim secara inklusif dan merata, baik untuk laki-laki maupun perempuan dari berbagai latar belakang.

- **Misi Mewujudkan Pemerataan Antardaerah dan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan**

Mewujudkan pemerataan antardaerah dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang dibutuhkan untuk mendukung pemerataan infrastruktur dasar, infrastruktur transportasi, dan infrastruktur digital yang meliputi:



Gambar 5. 7 Tahapan Misi Mewujudkan Pemerataan Antardaerah dan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan

Tahap I: Meningkatkan pemerataan antardaerah dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan

Meningkatkan pemerataan antardaerah dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan meliputi bidang pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil dan tertinggal merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan antardaerah. Infrastruktur dasar bidang pendidikan dan kesehatan yang memadai akan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil dan tertinggal, untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Tahap II: Mengakselerasi pemerataan antardaerah dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan

Mengakselerasi pemerataan antardaerah dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di semua wilayah, terutama di daerah terpencil dan tertinggal, merupakan tanggung jawab bersama dari pemerintah, masyarakat, dan swasta. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan secara cepat dan terukur di semua wilayah, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Hal ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan inklusi wilayah, yaitu dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah dalam proses pembangunan.

Upaya percepatan pembangunan secara terukur berasal dari berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain: (i) peningkatan infrastruktur dasar,

seperti jalan, jembatan, listrik, dan telekomunikasi untuk memudahkan akses masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal terhadap berbagai layanan publik; (ii) peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat.

Tahap III: Memperluas pemerataan antardaerah dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan

Memperluas pemerataan antardaerah dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat antara lain: (i) pengembangan infrastruktur yang memadai di seluruh wilayah, terutama di wilayah yang tertinggal dan terbelakang melalui berbagai program pembangunan infrastruktur dasar, seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik, dan air bersih; (ii) peningkatan akses terhadap layanan publik di seluruh wilayah, terutama di wilayah yang tertinggal dan terbelakang melalui berbagai program, seperti pembangunan sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan; dan (iii) peningkatan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah, terutama di wilayah yang tertinggal dan terbelakang melalui berbagai program, seperti pemberian insentif kepada pelaku usaha di wilayah tertinggal dan terbelakang, serta pengembangan sektor ekonomi produktif.

Tahap IV: Mewujudkan pemerataan antardaerah dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan

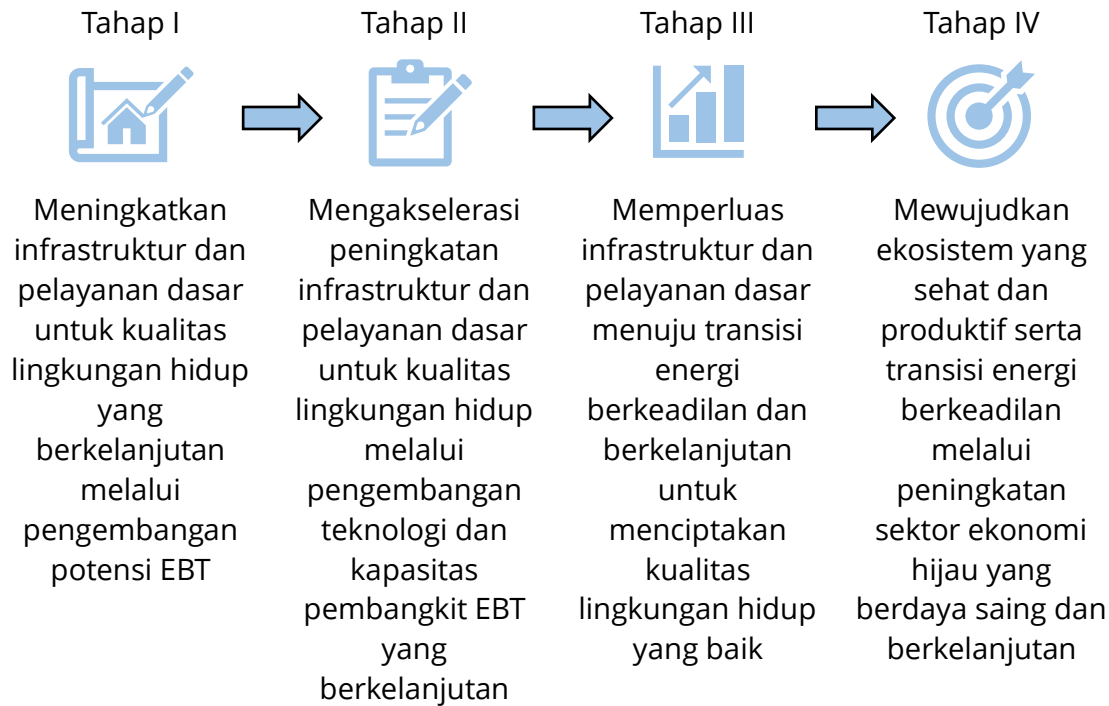
Perwujudan pemerataan pembangunan antardaerah di Sumatera Selatan akan terlihat dari mudahnya aksesibilitas dan konektivitas antardaerah. Hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh wilayah dan masyarakat. Untuk mewujudkannya diperlukan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta.

▪ Misi Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Meningkatkan infrastruktur dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan dapat dilakukan melalui pengembangan EBT dengan menyediakan infrastruktur yang lebih baik dan menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi investasi di bidang EBT. Selain itu, pengembangan EBT dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara, sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Misi ini mencakup upaya-upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan pola ruang dan struktur ruang. Perencanaan pembangunan dilakukan secara seimbang dengan

mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Agenda ini diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah serta menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas.

Kebijakan dalam mewujudkan misi ini diarahkan pada: (i) akselerasi penyediaan infrastruktur pendukung dan penyediaan insentif serta pengembangan teknologi mendukung peningkatan investasi di sektor EBT dan sektor-sektor yang berkelanjutan seperti ekonomi hijau, ekonomi sirkular, ekonomi biru, dan bioekonomi; (ii) peningkatan inovasi dan efisiensi pemanfaatan dan pengembangan teknologi EBT dan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan; (iii) peningkatan dan pemantapan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan; dan (iv) peningkatan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan EBT dan sektor ekonomi yang berkelanjutan menuju transisi energi dan pemantapan sektor unggulan yang berkelanjutan seperti pengembangan sektor *green economy*, *blue economy*, *bio economy*, dan *circular economy* di seluruh wilayah yang berpotensi.



Gambar 5. 8 Tahapan Misi Meningkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Tahap I: Meningkatkan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui pengembangan potensi EBT

Akselerasi peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengembangan potensi EBT yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilakukan dengan berbagai kebijakan dan program seperti kebijakan: (i) penyediaan infrastruktur dan insentif untuk mendorong investasi di sektor EBT dan sektor-sektor ekonomi hijau; (ii) penyediaan dan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di sektor EBT dan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan; (iii) pengembangan teknologi EBT berpotensi dalam mendukung transisi energi yang adil dan berkelanjutan; dan (iv) pengembangan teknologi dan inovasi daerah dalam mendukung pemantapan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan seperti pengembangan sektor *green economy*, *blue economy*, *bio economy*, dan *circular economy* di seluruh wilayah yang berpotensi.

Tahap II: Mengakselerasi peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk kualitas lingkungan hidup melalui pengembangan teknologi dan kapasitas pembangkit EBT yang berkelanjutan

Mengakselerasi peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk kualitas lingkungan hidup melalui pengembangan teknologi dan kapasitas pembangkit EBT yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan merupakan hal yang sangat penting dalam perwujudan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan tersebut akan mengarah pada beberapa hal, yaitu: (i) peningkatan infrastruktur pendukung dan insentif untuk mendorong investasi sektor EBT dan industri hilir; (ii) penguatan dan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di sektor EBT dan industri hilir komoditas unggulan; (iii) peningkatan teknologi dan inovasi pembangkit listrik EBT dalam mengakselerasi transisi energi yang berkeadilan dan terjangkau; dan (iv) peningkatan teknologi dan inovasi penguatan diversifikasi ekonomi dalam mendukung pemantapan hilirisasi produk unggulan yang berkelanjutan serta peningkatan sektor *green economy*, *blue economy*, *bio economy*, dan *circular economy* di wilayah yang berpotensi.

Tahap III: Memperluas infrastruktur dan pelayanan dasar menuju transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan kualitas lingkungan hidup yang baik

Memperluas infrastruktur dan pelayanan dasar menuju transisi energi berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan kualitas lingkungan hidup yang baik di Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu kebijakan yang strategis untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain: (i) peningkatan penataan ruang dan infrastruktur kawasan perkotaan dan penyediaan insentif dalam mendorong penguatan transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan; (ii) pemantapan dan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di sektor lingkungan, EBT dan sektor ekonomi

hijau; (iii) peningkatan teknologi dan inovasi di sektor lingkungan, EBT, dan ekonomi hijau dalam mengakselerasi pemanfaatan EBT yang berkeadilan dan terjangkau serta peningkatan kualitas sektor ekonomi hijau; dan (iv) penguatan sektor *green economy*, *blue economy*, *bio economy*, dan *circular economy* di wilayah berpotensi.

Tahap IV: Mewujudkan ekosistem yang sehat dan produktif serta transisi energi berkeadilan melalui peningkatan sektor ekonomi hijau yang berdaya saing dan berkelanjutan

Mewujudkan kualitas lingkungan berkualitas dan transisi energi berkeadilan melalui peningkatan sektor ekonomi hijau yang berdaya saing dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu langkah penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik akan mendorong percepatan transisi energi ini harus dilakukan secara berkeadilan, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Transisi energi ke energi terbarukan merupakan salah satu langkah penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya mewujudkan transisi energi berkeadilan antara lain: (i) pemerataan pembangunan infrastruktur EBT dan penyediaan insentif untuk mendorong sektor EBT dan sektor ekonomi hijau yang berdaya saing dan berkelanjutan; (ii) penyediaan akses yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat dalam pemanfaatan EBT dan produk sektor ekonomi hijau; (iii) peningkatan kesadaran masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya menjaga lingkungan dan turut berperan aktif dalam pemanfaatan produk sektor ekonomi hijau dan transisi energi yang berkeadilan; dan (iv) penguatan program pemberdayaan masyarakat untuk memastikan bahwa transisi energi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga masyarakat luas, program ini meliputi pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha khusus di sektor-sektor ekonomi yang ramah lingkungan.

▪ Misi Memperkuat Kemandirian dan Inovasi Pembiayaan Pembangunan

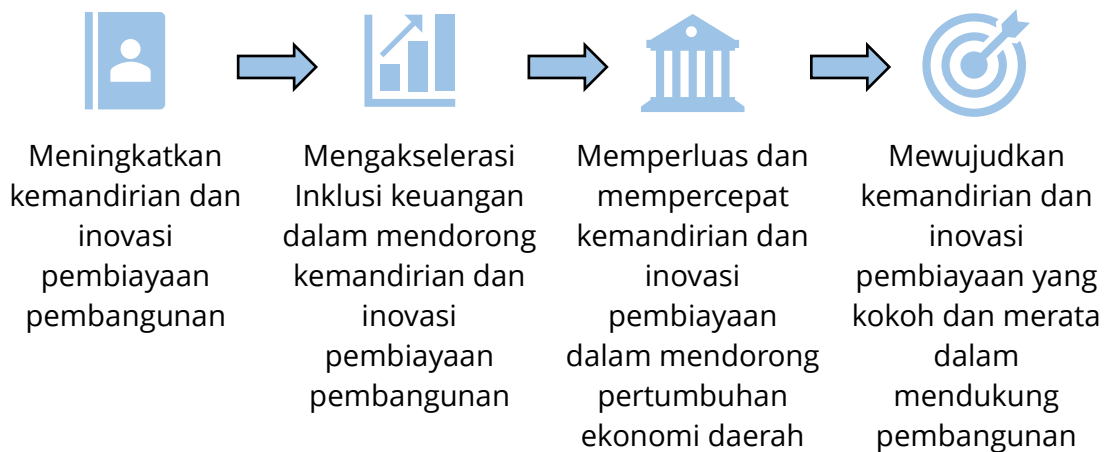
Misi ini bertujuan untuk mewujudkan penguatan inklusi keuangan secara merata sebagai upaya untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan produk dan layanan keuangan oleh pelaku usaha dan masyarakat secara merata. Agenda ini diarahkan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha (Badan Usaha Pemerintah, UMKM, dan koperasi) dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas usaha di sektor-sektor ekonomi produktif. Pada misi ini juga dapat ditingkatkan kapasitas fiskal daerah melalui sumber pembiayaan pembangunan yang inovatif.

Tahap I

Tahap II

Tahap III

Tahap IV



Gambar 5. 9 Tahapan Misi Memperkuat Kemandirian dan Inovasi Pembiayaan Pembangunan

Tahap I: Meningkatkan kemandirian dan inovasi pembiayaan pembangunan

Akselerasi peningkatan inklusi keuangan secara merata dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain: peningkatan akses layanan keuangan di seluruh wilayah dan wilayah terpencil (3T); penyediaan infrastruktur digital secara merata dan mendorong peningkatan literasi keuangan digital di seluruh wilayah; pengembangan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan kerjasama antar pemangku kepentingan dan lembaga keuangan. Pada tahap ini, perlu diperkuat ekosistem kelembagaan dan sumber daya dalam memanfaatkan sumber pembiayaan inovatif, seperti penguatan forum CSR dan kelembagaan lainnya.

Tahap II: Mengakselerasi Inklusi keuangan dalam mendorong kemandirian dan inovasi pembiayaan pembangunan

Penguatan Inklusi keuangan dalam mendorong pembangunan daerah mencakup pengembangan dan penyediaan produk dan layanan keuangan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan masyarakat; pengembangan dan penyediaan infrastruktur keuangan digital; dukungan kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan lembaga terkait, pemerintah, dan daerah; dan akselerasi peningkatan literasi keuangan digital di seluruh wilayah.

Tahap III: Memperluas dan mempercepat kemandirian dan inovasi pembiayaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Pemantapan inklusi keuangan secara merata dalam mendorong kesinambungan pembangunan daerah antara lain, yaitu: (i) meningkatkan

pemerataan pembangunan daerah yang menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kokoh secara menyeluruh; (ii) meningkatkan daya saing daerah melalui para pelaku usaha dan masyarakat; (iii) meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi bagi masyarakat secara menyeluruh. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memantapkan inklusi keuangan secara merata di daerah, yaitu: pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan; lembaga keuangan perlu mengembangkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah; mengoptimalkan sumber pendanaan inovatif untuk pembiayaan pembangunan dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan pemahamannya tentang pentingnya inklusi keuangan.

Tahap IV: Mewujudkan kemandirian dan inovasi pembiayaan yang kokoh dan merata dalam mendukung pembangunan

Inklusi keuangan yang kokoh dan merata merupakan salah satu kunci untuk mendukung kesinambungan pembangunan daerah. Penguatan inklusi keuangan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Upaya dalam mewujudkan inklusi keuangan yang kokoh dan merata dalam mendukung kesinambungan pembangunan daerah dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain: (i) pendekatan regulasi dalam mendorong pengembangan inklusi keuangan; (ii) pendekatan kebijakan dalam mendukung inklusi keuangan, seperti pemberian insentif kepada lembaga keuangan yang melayani masyarakat di daerah terpencil; (iii) pendekatan edukasi dapat dilakukan oleh pemerintah dan lembaga keuangan terkait edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya inklusi keuangan; dan (iv) mengoptimalkan sumber pendanaan inovatif untuk pembiayaan pembangunan.

5.2 Sasaran Pokok Pembangunan

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, dirumuskan sasaran pokok yang memuat tentang rencana pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah. Setiap sasaran pokok diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang bersifat progresif. Adapun sasaran pokok pembangunan Sumatera Selatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

IE1. Terwujudnya Peningkatan Kesehatan Untuk Semua, diukur dengan 4 Indikator Utama Pembangunan (IUP):

- (1). Meningkatnya Usia Harapan Hidup dari 74,09 tahun pada tahun 2025 menjadi 79,65 tahun pada tahun 2045.

- (2). Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak, mencakup:
 - a). Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) akan menurun dari 123 kasus pada tahun 2025 menjadi 14 kasus pada tahun 2045.
 - b). Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita akan menurun secara signifikan dari 18,0% pada tahun 2025 menjadi 5,3% pada tahun 2045.
- (3). Meningkatnya penanganan Tuberkulosis, meliputi:
 - a). Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) akan meningkat dari 71 kasus pada tahun 2025 menjadi 95 kasus pada tahun 2045.
 - b). Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) akan meningkat dari 93,77% pada tahun 2025 menjadi 98,00% pada tahun 2045.
- (4). Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional akan ditingkatkan dari 98,0% pada tahun 2025 menjadi 99,5% pada tahun 2045.

IE2. Terwujudnya Peningkatan Pendidikan Berkualitas, diukur dengan 3 Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang dirincikan ke dalam sub indikator terkait:

- (1). Meningkatnya hasil pembelajaran siswa, mencakup:
 - a). Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca akan meningkat dari rentang poin 5,88-11,76 pada tahun 2025 menjadi besaran poin 70,59.
 - b). Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi akan meningkat dari rentang poin 0,00 – 5,88 pada tahun 2025 menjadi rentang poin 58,82-64,71 pada tahun 2045.
 - c). Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca akan meningkat dari rentang poin 31,30-33,30 pada tahun 2025 menjadi rentang poin 66,66-68,66 pada tahun 2045.
 - d). Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi akan meningkat dari rentang poin 25,14-27,14 pada tahun 2025 menjadi rentang poin 59,46-61,46 pada tahun 2045.
 - e). Rata-rata Lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun akan mengalami peningkatan dari kisaran selama 9,19-9,20 tahun pada

tahun 2025 menjadi kisaran selama 11,66-11,72 tahun pada tahun 2045

- f). Angka harapan Lama sekolah akan meningkat dari rentang selama 12,80-12,81 tahun pada tahun 2025 menjadi rentang selama 14,17-14,22 tahun pada tahun 2045.
- (2). Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi akan mengalami peningkatan dari 8,88% pada tahun 2025 menjadi kisaran 8,88-10,14% pada tahun 2045.
- (3). Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi akan meningkat dari 74,46% pada tahun 2025 menjadi 85% pada tahun 2045.

IE3. Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif, diukur dengan 3 Indikator Utama Pembangunan (IUP):

- (1). Tingkat kemiskinan akan ditekan dari kisaran 9,37-10,37% pada tahun 2025 menjadi kisaran 0,21-0,71% pada tahun 2045.
- (2). Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi akan mengalami peningkatan dari kisaran 26,00-29,83% pada tahun 2025 menjadi 95,19% pada tahun 2045.
- (3). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal akan meningkat dari 23% pada tahun 2025 menjadi 55% pada tahun 2045.

IE4. Terwujudnya Pengembangan IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi, diukur dengan 7 Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang diuraikan ke dalam sub indikator, yaitu:

- (1). Rasio PDRB industri pengolahan akan mengalami peningkatan dari rentang persentase 17,86-17,95 pada tahun 2025 menjadi rentang persentase 23,66-24,82 pada tahun 2045.
- (2). Pengembangan pariwisata yang ditunjukkan dari:
 - a). Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum akan meningkat dari 1,97% pada tahun 2025 menjadi 3,35% pada tahun 2045.
 - b). Jumlah tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang) akan meningkat dari kisaran 12,90 ribu orang pada tahun 2025 menjadi 42,40 ribu orang pada tahun 2045.
- (3). Nilai Tambah Ekonomi Kreatif akan mengalami peningkatan dari Rp3.030 juta pada tahun 2025 menjadi Rp9.000 juta pada tahun 2045.
- (4). Peningkatan Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD ditandai dengan:

- a). Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi akan meningkat dari 10,62% pada tahun 2025 menjadi 12,61% pada tahun 2045.
 - b). Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi akan meningkat dari 2,34% pada tahun 2025 menjadi 4,29% pada tahun 2045.
 - c). Rasio kewirausahaan daerah akan meningkat dari 2,45% pada tahun 2025 menjadi 4,72% pada tahun 2045.
 - d). Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB akan meningkat dari 0,69% pada tahun 2025 menjadi 3,61% pada tahun 2045.
 - e). *Return on Asset* (ROA) BUMD akan meningkat dari 1,82% pada tahun 2025 menjadi 4,91% pada tahun 2045.
- (5). Penciptaan lapangan kerja yang baik ditandai dengan:
- a). Tingkat Pengangguran Terbuka dapat diturunkan dari kisaran 3,82-3,93% pada tahun 2025 menjadi kisaran 1,74-2,75% pada tahun 2045.
 - b). Proporsi penciptaan lapangan kerja formal akan mengalami peningkatan dari 40% pada tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2045.
- (6). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan akan meningkat dari 59,40% pada tahun 2025 menjadi 70,90% pada tahun 2045.
- (7). Peningkatan penguasaan IPTEK ditunjukkan dari:
- a). Indeks Inovasi Daerah yang akan mengalami peningkatan dari 79,47 pada tahun 2025 menjadi 85 pada tahun 2045.
 - b). Indeks Kapabilitas Inovasi akan meningkat dari 3,06 pada tahun 2025 menjadi 4,54 pada tahun 2045.

IE5. Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau, akan diukur dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:

- a). Indeks Ekonomi Hijau daerah yang akan meningkat dari 62,22 pada tahun 2025 menjadi 89,66 pada tahun 2045.
- b). Porsi EBT dalam bauran energi primer akan meningkat tajam dari 23,10% pada tahun 2025 menjadi 74,83% pada tahun 2045.

IE6. Terwujudnya Transformasi Digital, yang akan diukur dengan indikator: Meningkatnya Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dari 5,9 pada tahun 2025 menjadi 7,5 pada tahun 2045.

IE7. Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional, akan diukur dengan 3 Indikator Utama Pembangunan (IUP):

- (1). Koefisien Variasi Harga Antarwilayah tingkat provinsi akan menurun dari 7,13 pada tahun 2025 menjadi 4,72 pada tahun 2045.

- (2). Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Produk Domestik Regional Bruto akan mencapai 30,54% pada tahun 2025 dan 23,62% pada tahun 2045.
- (3). Ekspor barang dan jasa (% PDRB) akan mengalami peningkatan dari 21,26% pada tahun 2025 menjadi 27,56% pada tahun 2045.

IE8. Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi akan diukur dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan:

- a). Meningkatkan proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional dari 1,41% pada tahun 2025 menjadi 1,8% pada tahun 2045.
- b). Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan akan mengalami peningkatan dari 65,01% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2045.
- c). Persentase desa mandiri akan mengalami peningkatan dari 0,77% pada tahun 2025 menjadi sebesar 14,54% pada tahun 2045.

IE9. Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif akan diukur dengan 4 Indikator Utama Pembangunan (IUP):

- (1). Indeks Reformasi Hukum akan mengalami peningkatan dari 70 pada tahun 2025 menjadi 100 pada tahun 2045.
- (2). Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan meningkat dari 2,62 pada tahun 2025 menjadi 5,00 pada tahun 2045.
- (3). Indeks Pelayanan Publik akan meningkat dari 4,42 pada tahun 2025 menjadi 5,00 pada tahun 2045.
- (4). Indeks Integritas Nasional akan mengalami peningkatan dari 72,66 pada tahun 2025 menjadi 87,53 pada tahun 2045.

IE10. Terwujudnya Keamanan Daerah, dan Kualitas Demokrasi diukur dengan 3 Indikator Utama pembangunan (IUP) dan sub indikator:

- (1). Indeks Pembangunan Hukum
 - a). Persentase penegakan hukum peraturan daerah akan mengalami peningkatan dari 70% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2045.
 - b). Persentase capaian Pelaksanaan Aksi HAM akan meningkat dari 70% pada tahun 2025 menjadi 90% pada tahun 2045.
- (2). Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya akan meningkat dari 70,82% pada tahun 2025 menjadi 88,20% pada tahun 2045.

- (3). Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan akan mengalami peningkatan dari kisaran 81,79-85,04 pada tahun 2025 menjadi 90 pada tahun 2045.

E11. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro yang akan diukur dengan 4 Indikator Utama Pembangunan (IUP):

- (1). Rasio pajak daerah terhadap PDRB akan mengalami peningkatan dari 1,25% pada tahun 2025 menjadi 2,00% pada tahun 2045.
- (2). Tingkat Inflasi akan dapat dikendalikan pada kisaran 1,5-3,5% pada tahun 2025 dan kisaran 0,9-2,7% pada tahun 2045.
- (3). Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan, ditandai dengan:
 - a). Total Dana Pihak Ketiga/PDRB mengalami peningkatan dari 18,24% pada tahun 2025 menjadi 51,90% pada tahun 2045.
 - b). Aset Dana Pensiun/PDRB akan mengalami peningkatan dari 0,73% pada tahun 2025 menjadi 6,75% pada tahun 2045.
 - c). Nilai transaksi saham per kapita per provinsi akan mengalami peningkatan dari Rp12.796.305,07 pada tahun 2025 menjadi Rp113.978.098,81 pada tahun 2045.
 - d). Total kredit/PDRB akan mengalami peningkatan dari 16,9% pada tahun 2025 menjadi 50,2% pada tahun 2045.
- (4). Inklusi Keuangan akan mengalami peningkatan dari 94,46% pada tahun 2025 menjadi 99,04% pada tahun 2045.

IE12. Terwujudnya Ketangguhan Daerah, akan diukur dengan 2 Indikator Utama Pembangunan (IUP):

- (1). Penurunan ketimpangan wilayah dicapai melalui penurunan Indeks Entropy Theil dari 1,32 pada tahun 2025 menjadi 0,5 pada tahun 2045.
- (2). Peningkatan Indeks Daya Saing Daerah dari 3,2 pada tahun 2025 menjadi 5 pada tahun 2045.

IE13. Terwujudnya Toleransi dan Berkebudayaan Maju, akan diukur dengan 2 Indikator Utama Pembangunan (IUP):

- (1). Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) akan meningkat dari kisaran 58,71-58,78 pada tahun 2025 menjadi 67,93-68,60 pada tahun 2045.
- (2). Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) akan mengalami peningkatan dari kisaran 78,01-78,08 pada tahun 2025 menjadi pada kisaran 84,82-85,64 pada tahun 2045.

IE14. Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif diukur dengan 2 Indikator Utama Pembangunan (IUP):

- (1). Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga akan mengalami peningkatan dari kisaran 69,16-69,17 pada tahun 2025 menjadi kisaran 74,08-74,15 pada tahun 2045.
- (2). Indeks Ketimpangan Gender akan meningkat dari kisaran 0,472-0,471 pada tahun 2025 menjadi kisaran 0,234-0,217 pada tahun 2045.

IE15. Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas yang akan diukur dengan 2 Indikator Utama Pembangunan (IUP) beserta uraian sub indikator:

- (1). Indeks Pengelolaan Keragaman Hayati akan mengalami peningkatan dari 0,465 pada tahun 2025 menjadi 0,625 pada tahun 2045.
- (2). Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, yang ditandai dengan:
 - a). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah akan meningkat dari 68,19 pada tahun 2025 menjadi 73,26 pada tahun 2045.
 - b). Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman akan meningkat dari 4,54% pada tahun 2025 menjadi 60,00% pada tahun 2045.
 - c). Pengelolaan sampah (timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah) akan mengalami peningkatan dari 10% pada tahun 2025 menjadi 75% pada tahun 2045.
 - d). Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah akan mengalami peningkatan dari 29% RT pada tahun 2025 menjadi 70% RT pada tahun 2045.

IE16. Terwujudnya Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan yang diukur dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP) ketahanan energi, air, dan pangan yang diuraikan menjadi sub indikator:

- a). Meningkatnya ketahanan energi yang ditandai dengan:
 - 1) Konsumsi Listrik per kapita akan mengalami peningkatan dari 783 kWh pada tahun 2025 menjadi 3.400 kWh pada tahun 2045.
 - 2) Intensitas energi primer akan mengalami penurunan dari 197 SBM/Rp miliar pada tahun 2025 menjadi 183 SBM/Rp miliar pada tahun 2045.
- b). Meningkatnya Ketahanan Pangan yang ditandai dengan:
 - (1). Menurunnya prevalensi ketidakcukupan pangan dari 5,75% pada tahun 2025 menjadi 0,44% pada tahun 2045.
 - (2). Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan dari 74,03 pada tahun 2025 menjadi 91,02 pada tahun 2045.
- c). Meningkatnya Ketahanan Air yang ditandai dengan:
 - (1). Kapasitas air baku yang mengalami peningkatan dari 1,72 m³/detik pada tahun 2025 menjadi 11,44 m³/detik pada tahun 2045.

- (2). Akses Rumah Tangga perkotaan terhadap air minum perpipaan akan meningkat dari 42,25% pada tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2045.

IE17. Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim yang diukur dengan 2 Indikator Utama Pembangunan (IUP) beserta sub indikator yang relevan:

- (1). Indeks Risiko Bencana (IRB) akan mengalami penurunan dari sebesar 132,06 pada tahun 2025 menjadi sebesar kisaran 112,46-95,65 pada tahun 2045.
- (2). Persentase penurunan Emisi GRK secara kumulatif dan tahunan yaitu:
- Penurunan emisi GRK secara kumulatif dari 18,50% pada tahun 2025 menjadi 41,98% pada tahun 2045.
 - Penurunan emisi GRK secara tahunan sebesar 31,02% pada tahun 2025 menjadi sebesar 80,57% pada tahun 2045.

Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Sumatera Selatan tersebut akan dijabarkan ke dalam kebijakan dan program pembangunan yang lebih spesifik. Kebijakan dan program pembangunan tersebut akan disusun dengan memperhatikan kondisi dan tantangan pembangunan daerah, serta arahan pembangunan nasional. Kebijakan dan program pembangunan Sumatera Selatan harus dilaksanakan secara sinergis dan terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Selain itu, juga harus didukung oleh anggaran yang memadai dan sumber daya manusia yang berkualitas.

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Tabel 5. 2 Arah Kebijakan Transformasi

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
	Sosial	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
		Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
		Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Musi Rawas Utara).
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Musi Rawas Utara).
		Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
		Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
		Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), dan mendorong kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Paket C.
		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
		Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
		Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
		Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan serta peningkatan SDM perpustakaan
		Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Musi Rawas Utara).
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Musi Rawas Utara).

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).
		Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
		Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Musi Rawas Utara).
		Penguatan sekolah terbuka, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Musi Rawas Utara).
		Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Musi Rawas Utara).
		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas <i>intraregion & interregion</i> pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Musi Rawas Utara).
		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Musi Rawas Utara), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Musi Rawas Utara).
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> .
		Pengembangan/peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Musi Rawas Utara), yang akan mendorong peningkatan geliat

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Musi Rawas Utara) melalui bertambahnya <i>demand</i> .
		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
		Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
		Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Musi Rawas Utara).
		Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan (formal dan non formal), jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota.

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Musi Rawas Utara).
		Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
		Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
		Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.
	Ekonomi	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian melalui praktik pertanian yang baik dan cerdas iklim yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Selatan-Lampung.
		Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
		Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui <i>digital marketplace/platform</i> .
		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
		Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i> , bank, dan asuransi pertanian.
		Pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis keunggulan wilayah.
		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui <i>digital marketplace/platform</i> .
		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.
		Pengembangan <i>closed loop model</i> perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
		Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui praktik agroforestri, dan praktik pertanian berkelanjutan yang lain.
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
		Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
		Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada beberapa kawasan strategis industri Bengkulu-Muaraenim-Palembang-Jambi (klaster industri hilirisasi batu bara, industri hilirisasi <i>bioproduct</i> , dan pembangkitan energi listrik).
		Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, Kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi).
		Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan <i>grid</i> tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i> ; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
		Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, terutama pada metropolitan Palembang.
		Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).
		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan.
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.
		Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan.
		Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Palembang.
		Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Palembang.
		Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
		<i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i> , terutama pada kawasan perkotaan. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.
		Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
		Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
		Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone & maritime backbone</i> , yang menginterkoneksi antar kawasan strategis melalui <i>Palembang New Port</i> , termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra.
		Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.
		Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Sumatera Selatan untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: - Jambi-Sekayu-Pangkalan Balai-Palembang; - Prabumulih-Muaraenim-Lahat-Tebingtinggi-Lubuklinggau; - Lubuklinggau-Curup-Kepahiang-Bengkulu;

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		- Muaraenim-Baturaja-Martapura-Muaradua; - Lahat-Pagaralam; - Prabumulih-Talangubi; dan - Rupit-Lubuklinggau
		Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional Palembang.
		Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan <i>dry port</i> untuk KA logistik), terutama pada ruas Palembang-Jambi, Lubuklinggau-Bengkulu, dan Palembang-Muaraenim-Tarahan (peningkatan prasarana jalur rel KA yang dilintasi rangkaian KA babaranjang, antara lain berupa pembangunan lintas atas/lintas bawah pada perlintasan sebidang yang memiliki <i>traffic</i> lalu lintas kendaraan jalan raya yang cukup tinggi).
		Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama pada Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II.
		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Musi Rawas Utara.
		Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Musi Rawas Utara.
		Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Prabumulih-Bengkulu.

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
		Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon.
		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.
		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
		Peningkatan produktivitas BUMD dan BUMDes.
		Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik;

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		(iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
		Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital, yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
	Tata Kelola	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan, kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		pembangunan melalui lembaga non struktural untuk transformasi ekonomi Sumatera Selatan.
		Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
		Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Sumatera Selatan, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Sumatera Selatan yang profesional dan bebas korupsi.
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
		Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
		Penguatan integritas partai politik.
	Keamanan Daerah Tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas Ekonomi Makro)	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
		Penguatan pengendalian inflasi daerah.
		Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/ pos

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Musi Rawas Utara).
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
		Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
		Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.
		Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung, ekosistem gambut, dan keanekaragaman hayati.
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi serta kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
		Penguatan pengarusutamaan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di seluruh sektor.

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		Pelembagaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan.
		Penerapan teknologi <i>climate smart agriculture</i> untuk peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, meningkatkan kapasitas adaptasi perubahan iklim dan mitigasi emisi GRK sektor pertanian.
		Penguatan pemanfaatan berbagai potensi jasa ekosistem yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat.
		Meningkatkan integrasi pengelolaan tata ruang dengan penggunaan lahan berdasarkan kesesuaian fungsi, daya dukung daya tampung, pola ruang dan pemanfaatan lahan.
		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.
		Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau serta menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi.
		Penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah.
		Pengembangan transisi energi berkeadilan GEDSI.
		Pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem berbasis kearifan lokal.
		Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		Penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam mengatasi permasalahan kehutanan.
		Pengembangan jalur ekowisata yang terintegrasi.
		Pengembangan sistem kompensasi imbal jasa lingkungan hidup, terutama untuk penyediaan air bersih, pertanian berkelanjutan dan agroforestri.
		Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pascatambang melalui reklamasi lahan bekas tambang untuk memulihkan fungsi serta meminimalisir bahaya dan ancaman dari lahan kritis.
		Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui praktik agroforestri, dan praktik pertanian berkelanjutan yang lain.
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .
	Implementasi Transformasi	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologis/ekosistem.
		Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb).
		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
		Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, <i>trust</i> , dan dukungan

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.
		Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
		Percepatan pelaksanaan reforma agraria dan optimalisasi perhutanan sosial.
		Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas <i>researcher</i> , peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
		Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
		Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU, <i>blended finance</i> , dan insentif jasa lingkungan.
		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
		Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
		Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan

No	RPJPD 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
		Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

5.2.2.1 Upaya Transformasi Super Prioritas (*Game Changers*)

A. Transformasi Sosial

- 1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), dan mendorong kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Paket C.
- 2) Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*).
- 3) Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan dan kesehatan serta peningkatan SDM perpustakaan.
- 4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
- 5) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di seluruh kabupaten/kota, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.

B. Transformasi Ekonomi

- 6) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.
- 7) Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada beberapa kawasan strategis industri Bengkulu-Muaraenim-Palembang-Jambi (klaster industri hilirisasi batu bara, industri hilirisasi *bioproduct*, dan pembangkitan energi listrik).
- 8) Percepatan transisi energi berkeadilan melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik terutama *green/low-carbon electricity*.
- 9) Percepatan transformasi digital melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.

- 10) Integrasi Infrastruktur konektivitas (jalan tol, kereta api, pelabuhan dan bandar udara) dengan kawasan pertumbuhan ekonomi.

C. Transformasi Tata Kelola

- 11) Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Sumatera Selatan, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Sumatera Selatan yang profesional dan bebas korupsi.
- 12) Penguatan integritas partai politik.

D. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro

- 13) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
- 14) Penguatan Pengendalian Inflasi Daerah.

E. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- 15) Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
- 16) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.
- 17) Penguatan ketahanan energi melalui pengembangan transisi energi berkeadilan GEDSI.
- 18) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
- 19) Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui praktik agroforestri, dan praktik pertanian berkelanjutan yang lain.

5.2.3 Indikator Utama Pembangunan Daerah

Berdasarkan sasaran pokok dan arah pembangunan yang telah ditetapkan, telah ditentukan Indikator Utama Pembangunan untuk mengukur kinerja dari setiap sasaran pokok dan arah pembangunan tersebut. Adapun Indikator Utama Pembangunan dan targetnya dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 5.3 Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045
TRANSFORMASI SOSIAL	Terwujudnya Peningkatan Kesehatan Untuk Semua	IE.1. Kesehatan Untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (tahun)	74,4	80	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,09	79,65
			2. Kesehatan Ibu dan Anak			2. Kesehatan Ibu dan Anak:		
			a. Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122	16	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	123	14
			b. Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,80	5,0	b. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,0	5,3
			3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	76	3. Penanganan Tuberkulosis:		
						a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	71	95
						b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	93,77	98,00
			4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,0	99,5	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,0	99,5
	Terwujudnya Peningkatan		5. Hasil pembelajaran:			5. Hasil Pembelajaran:		

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045
	Pendidikan Berkualitas	IE.2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	a. Rata-rata nilai PISA			a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
			a-i Membaca	396	485	i) Literasi Membaca	5,88-11,76	70,59-70,59
			a- ii Matematika	404	490	ii) Numerasi	0,00-5,88	58,82-64,71
			a-iii Sains	416	487			
			b. Rata-rata nilai asesmen nasional			b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
			b-i Literasi Membaca	62,89	75,73	i) Literasi Membaca	31,30-33,30	66,66-68,66
			b-ii) Numerasi	54,36	68,72	ii) Numerasi	25,14-27,14	59,46-61,46
			c. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,33	12,0	c. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,19-9,20	11,66 - 11,72
			c. Harapan lama sekolah	13,32	14,81	d.Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,80 - 12,81	14,17 - 14,22
			6. Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	33,94	60,00	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8,88	8,88 - 10,14
			7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang	66,78	75,00	7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang	74,46	85,00

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045
			Keahlian Menengah Tinggi (%)			Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)		
	Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	IE.3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	8.Tingkat kemiskinan (%)	7,0-8,0	0,5-0,8	8. Tingkat Kemiskinan (%)	9,37-10,37	0,21-0,71
			9. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	43,19	99,5	9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	26,00-29,83	95,19
			10. Persentasi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	22,0	60,0	10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	23	55
TRANSFORMASI EKONOMI	Terwujudnya Pengembangan Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	IE.4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11. Rasio PDB industri pengolahan (%)			11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		
			a. Rasio PDB industri pengolahan (%)	20,8	28,0	a. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	17,86-17,95	23,66 - 24,82
			b. Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,2-3,4	3,3-4,2			
			12. Pengembangan Pariwisata:			12. Pengembangan Pariwisata:		
			a. Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6	8,0	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi makan dan Minum (%)	1,97	3,35
			b. Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar)	22,10	100	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)	12,90	42,40
			13 Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,92	11,00	13. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Juta Rupiah)	3.030	9.000

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045
			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN:			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:		
			a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,44	5,0	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non pertanian pada level provinsi (%)	10,62	12,61
						b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	2,34	4,29
			b. Rasio kewirausahaan (%)	3,14	8,0	c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,45	4,72
			c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1	5,0	d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,69	3,61
			d. Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6	e. Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,82	4,91
			15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
			a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50-5,00	4,00	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,82-3,93	1,74-2,75
			b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35	80	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	40	80
			16. Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)	56,30	70,0	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,40	70,90
			17. Tingkat penguasaan IPTEK			17. Tingkat Penguasaan IPTEK		

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045
			a. Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)	0,30	2,2-2,3	a. Indeks Inovasi Daerah	79,47	85
			b. Peringkat Index Inovasi Global (peringkat)	60	30 besar	b. Indeks Kapabilitas Inovasi	3,06	4,54
	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau	IE.5. Penerapan Ekonomi Hijau	18. Tingkat penerapan ekonomi hijau			18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
			a. Indeks ekonomi hijau (%)	70,8	90,65	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	62,22	89,66
			b. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	70	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23,10	74,83
	Terwujudnya Transformasi Digital	IE.6. Transformasi Digital	19. Indeks daya saing digital ditingkat global (peringkat)	43	20 besar	19. Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	5,9	7,5
	Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional	IE.7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Biaya logistic (% PDB)	13,5	8,0	20. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7,13	4,72
			21. Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)	30,1-30,2	27,2	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap Produk Domestik Regional Bruto (%)	30,54	23,62
			22. Ekspor barang dan jasa (% PDB)	21,0-21,6	40,0	22. Ekspor barang dan jasa (% PDRB)	21,26	27,56
	Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan	IE.8. Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat	23. Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045
	sebagai Pusat Pertumbuhan	Pertumbuhan Ekonomi	a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,34	48,92	a. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	1,41	1,8
			b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	67,00	100	b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	65,01	100,00
			c. Persentase Desa Mandiri (%)	4,00	16,25	c. Persentase Desa Mandiri (%)	0,77	14,54
TRANSFORMASI TATA KELOLA	Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	IE.9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24. Indeks materi hukum	0,51	0,71	24. Indeks Reformasi Hukum	70	100
			25. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	3,12	5,00	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,62	5,00
			26. Indeks pelayanan publik	3,68	5,00	26. Indeks Pelayanan Publik	4,42	5,00
			27. Anti Korupsi			27. Indeks Integritas Nasional	72,66	87,53
			a. Indeks integritas nasional	74,52	96,98			
			b. Indeks persepsi korupsi	38	60			
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA	Terwujudnya Keamanan Daerah, dan Kualitas Demokrasi	IE.10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28. Indeks pembangunan hukum	0,69	0,89	28. Indeks Pembangunan Hukum:	70	100
						a. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	90
						b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM		

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045
			29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	67,5	80,0	29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	70,82	88,20
			30. Indeks demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	30. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Selatan	Tinggi (81,79-85,04)	Tinggi (90)
	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro yang Baik	IE.11. Stabilitas Ekonomi Makro	31. Rasio pajak terhadap PDB (%)	10,70-11,20	18,0-20,0	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,25	2,00
			32. Tingkat inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1	32. Tingkat Inflasi (%)	1,5-3,5	0,9-2,7
			33. Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan			33. Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan		
			a. Aset perbankan/PDB (%)	66,9	200	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	18,24	51,90
			b. Aset dana pensiun/PDB (%)	8,0	60	b. Aset dana pensiun/PDRB (%)	0,73	6,75
			c. Aset asuransi/PDB (%)	9,1	20	-	-	-
			d. Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)	57,8	120	c. Nilai Transaksi Saham per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	12.796.305,07	113.978.098,81
			e. Total kredit/PDB (%)	37,8	80-90	d. Total Kredit/PDRB (%)	16,9	50,2
			34. Inklusi keuangan (%)	91	98	34. Inklusi keuangan (%)	94,46	99,04
	Terwujudnya Ketangguhan Daerah	IE.12. Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan	35. Asia Power Index (Diplomatic Influencer)	61,54	75,0-80,0	35. Indeks Entropy Theil	1,32	0,5
			36. Asia Power Index (Military Capability)	16	45,0	36. Indeks Daya Saing Daerah	3,2	5,0
	Terwujudnya Toleransi dan	IE.13. Beragama Maslahat dan	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39	68,15	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,71 - 58,78	67,93-68,60

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	Berkebudayaan Maju	Berkebudayaan Maju	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77	84,20	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,01 - 78,08	84,82 - 85,64
	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat inklusif	IE.14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,29	80,0	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,16 - 69,17	74,08 - 74,15
			40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,425	0,15	40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,472-0,471	0,234 - 0,217
	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas	IE.15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44	0,75	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,465	0,625
			42. Kualitas Lingkungan Hidup			42. Kualitas Lingkungan Hidup		
			a.i. Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,53	87,05	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	68,19	73,26
			a.ii. Indeks Kualitas Air (IKA)	72,02	77,50			
			a.iii. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	77,97	79,74			
			a.iv. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	81,02	88,77			
			b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	70,0	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	4,54	60,00
			c. Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah (%)	24 (16% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)	c. Pengelolaan Sampah		
						i). Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	10	75

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045
						ii). Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	29	70
	Terwujudnya Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	IE.16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43. Ketahanan energi, air, dan kemandirian menuju kedaulatan pangan			43. Ketahanan energi, air, dan pangan		
			i. Ketahanan Energi			a. Ketahanan Energi		
			- Indeks ketahanan energi	6,77	8,24	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	783	3.400
						- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp miliar)	197	183
			ii. Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan (%)	7,21	0,77	b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	5,75	0,44
						Indeks Ketahanan Pangan	74,03	91,02
			iii. Ketahanan air			c. Ketahanan Air		
			- Kapasitas tampungan air per kapita (m ³ /kapita)	65,18	200	- Kapasitas air baku (m ³ /detik)	1,72	11,44
			- Akses rumah tangga perkotaan terhadap asir siap minum perpipaan (%)	39,20	100	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	42,25	80
	Terwujudnya Resiliensi terhadap	IE.17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0,137	0,11	44. Indeks Risiko Bencana (IRB)	132,06	112,46 - 95,65

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan (IE)	IUP RPJPN			IUP RPJPD		
			Indikator	Target Nasional		Indikator	Target Daerah	
				2025	2045		2025	2045
	Bencana dan Perubahan iklim		45. Persentase penurunan emisi GRK (%)			45.Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
			a. Kumulatif	28,12	51,51	a. Kumulatif	18,50	41,98
			b. Tahunan	36,65	80,98	b. Tahunan	31,02	80,57

BAB VI. PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan daerah, regional, nasional dan perkembangan global serta melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui musyawarah rencana pembangunan. RPJPD merupakan dokumen perencanaan sebagai landasan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Sumatera Selatan selama 20 tahun ke depan bagi segenap pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan RPJPD dilakukan dengan prinsip, yaitu:

- a). Prinsip perencanaan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada perencanaan yang cerdas (*SMART Planning*), dan memiliki kekhususan (*Specific*), terukur (*Measurable*), Ketercapaian (*Achievable*), ketersediaan sumber daya (*Resources Availability*), dan waktu (*Time bound*).
- b). Prinsip pelaksanaan program menggunakan prinsip akuntabilitas yaitu:
 - (1). Taat dan sesuai aturan;
 - (2). Sesuai dengan norma profesionalisme); dan
 - (3). Berorientasi pada hasil yang berkualitas.
- c). Prinsip pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen pelaksanaan dengan cara pemantauan dan supervisi:
 - (1). *desk monitoring* dan evaluasi pelaksanaan implementasi program;
 - (2). *desk* akuntabilitas dan transparansi agar pelaksanaan program terukur, efektif dan efisien serta berkeadilan.
- d). Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program prioritas (*Money Follow Program*).

Implementasi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan dalam pembangunan daerah dilaksanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan secara berkesinambungan. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6.1.1 Kerangka Pengendalian

Untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan perlu diterapkan manajemen risiko yang berdasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan prinsip antara lain yaitu: terintegrasi, kolaboratif, transparan dan inklusif, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, memperhitungkan ketidakpastian (*uncertainty*), dan perbaikan terus-menerus.

Proses manajemen risiko dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1) komunikasi dan konsultasi, dilakukan kepada para pemangku kepentingan internal maupun eksternal; 2) identifikasi risiko, dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab, dan konsekuensi dari risiko yang dapat menghambat capaian RPJPD; 3) analisis risiko dengan menentukan tingkat konsekuensi dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko; 4) evaluasi risiko dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan, dan upaya untuk mengatasi risiko; 5) mitigasi risiko dilakukan dengan mencari alternatif mitigasi risiko yang terbaik, menyusun rencana mitigasi risiko, dan pelaksanaan rencana mitigasi risiko, dan 6) pemantauan dan *review* terhadap seluruh aspek proses manajemen risiko.

Kerangka manajemen risiko mencakup pembentukan struktur manajemen risiko dan pengembangan budaya sadar risiko. Struktur manajemen risiko terdiri dari Komite Manajemen Risiko, Unit Pemilik Risiko, Dan *Compliance Office for Risk Management*. Sementara itu, pengembangan budaya risiko dimanifestasikan dengan adanya pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan.

Sumatera Selatan telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko sehingga setiap pimpinan dan ASN pemerintah provinsi harus menerapkan manajemen risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran, utamanya sasaran dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan RPJPD, regulasi yang menjadi kewenangan provinsi perlu dilakukan perubahan, yaitu Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, dan Peraturan Daerah tentang RTRW.

RPJPD Provinsi Sumatera Selatan menjadi acuan di dalam penyusunan RPJPD kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi pedoman bagi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yang berdimensi 5 (lima) tahunan dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/kota dilakukan koordinasi antardaerah di Provinsi Sumatera Selatan meliputi arah kebijakan di daerah.

6.1.2 Mekanisme Perubahan

Pada pelaksanaannya RPJPD harus melibatkan berbagai pihak baik pemerintah daerah, instansi pemerintah, instansi vertikal, akademisi, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh komponen masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan monitoring yang harus dilakukan secara rutin, dan dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi gejolak eksternal dan internal, bencana target RPJPD dapat dimutakhirkan. Perubahan dapat dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun untuk mengetahui pencapaian target pembangunan dan melakukan penyesuaian sesuai dengan dinamika yang terjadi. Mekanisme evaluasi dan perubahan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan.

6.2 Pembiayaan

RPJPD Provinsi Sumatera Selatan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan dukungan sumber pembiayaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber pembiayaan pembangunan yang dapat digunakan yaitu bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sumatera Selatan, dan optimalisasi pembiayaan sektor keuangan non-publik. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan, dan peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik melalui (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang (antara lain dana pensiun, asuransi, dan instrumen pasar modal), (ii) inovasi produk pembiayaan syariah dan inovasi pembiayaan merespon perubahan iklim serta produk pembiayaan berbasis transaksi seperti bursa karbon, bursa plastik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Optimalisasi sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan daya tarik investasi daerah dapat dilakukan dengan memberikan insentif berupa kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Peningkatan daya tarik investasi di Provinsi Sumatera Selatan diupayakan untuk mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sehingga tercipta lapangan kerja di daerah.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan “Sumatera Selatan Maju, Terdepan, dan Berkelanjutan Tahun 2045” akan sangat tergantung pada komitmen dan peran aktif penyelenggaraan pemerintah daerah dan kolaborasi dengan *stakeholder*

pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Komitmen utuh, kuat dan demokratis, konsistensi kebijakan pemerintah, dan keberpihakan pembangunan kepada rakyat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan SUMSEL MAPAN 2045.

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI

